

Dr. H. A. Rusdiana, MM

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM



JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2013

Tujuan mata kuliah Kapita Selekt Pendidikan Islam ini agar mahasiswa memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam mengidentifikasi menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Islam kontemporer. mpetensi; mengiden-ifikasi menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Islam kontemporer Indikator untuk memahami; menjelaskan; ertama, persolan model pendidikan Islam, reformasi pendidikan, pendidikan Islam merupakan rangkaian proses pemberdayaan manusia. Kedua, hakikat dan makna pendidikan Islam, kelemahan dan tantangan pendidikan Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan konsep pendidikan Islam yang ideal. Ketiga, tantangan pendidikan masa kini dalam prefektif Islam di era glonalisasi. Keempat, problematika pendidikan Islam pada era globalisasi. Kelima, otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Keenam, tri pusat pendidikan; pilar utama pencapaian tujuan pendidikan. Ketujuh, profesionalime guru dan peningkatan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan. Kedelapan, reformasi pendidikan nasional. Kesembilan, strategi pendidikan nasional. Kesepuluh, pendidikan Islam dan kemajuan sains. Kesebelas, pendidikan Islam dan efistemologi ilmu. Keduabelas manajemen berbasis sekolah. Ketigabelas, paradigma manajemen pendidikan Islam (antara idelita dan relita).

Dr.H. A. Rusdiana, M.M
Dr. H. Abdul Kodir, MA

KAPITA SELEKTA
PENDIDIKAN ISLAM

Buku Daras

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2013

KATA PENGANTAR

Tujuan mata kuliah kapita selekta pendidikan Islam ini agar mahasiswa memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam mengidentifikasi menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Islam kontemporer. Cakupan bahan ajar ini cukup lengkap, yang disajikan ke dalam tigabelas bagian. Pertama, bagian pendahuluan yang berisi uraian tentang persolan model pendidikan Islam, reformasi pendidikan, pendidikan Islam merupakan rangkaian proses pemberdayaan manusia. Kedua, membahas mengenai makna pendidikan Islam, kelemahan dan tantangan pendidikan Islam, faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan, dan konsep pendidikan Islam yang ideal. Ketiga, membahas tantangan pendidikan masa kini dalam prefektif Islam di era globalisasi. Keempat, membahas problematika pendidikan Islam pada era globalisasi. Kelima, membahas otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Keenam, mengungkap tripusat pendidikan; pilar utama pencapaian tujuan pendidikan. Ketujuh, menguraikan profesionalime guru dan peningkatan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan. Kedelapan, menyoroti reformasi pendidikan nasional. Kesembilan, membahas strategi pendidikan nasional. Kesepuluh mengungkapkan pendidikan Islam dan kemajuan sains. Kesebelas, menyoroti pendidikan Islam dan efistemologi ilmu. Keduabelas membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Ketigabelas mengungkapkan tentang paradigma manajemen pendidikan Islam (antara idelita dan relita).

Mskipun konten bahan ajar kapita selekta ini tergolong lengkap, namun belum bisa dianggap sempurna dan tajam pembahasannya. Masih ada beberapa topik yang terlewatkan dan perlu diungkap lebih jauh karena cukup urgen dalam rangka menjadikan teks ini lebih berbobot, aktual dan akan memberikan sumbangan signifikan dalam *mainstream* pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Berbagai topik yang masih perlu berbagai teori pendidikan, pengertian pendidikan, tujuan dan metode pendidikan Islam serta berbagai hasil penelitian tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan pendidikan sekolah. kompetensi guru menurut perspektif pendidikan Islam, kompetensi guru menurut kajian teori pendidikan, kompetensi guru pendidikan agama Islam

serta kompetensi guru berdasarkan standar nasional pendidikan. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan pada Raudhatul Athfal, pendidikan dasar madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, pendidikan menengah madrasah Aliyah. pendidikan keagamaan madrasah Diniyyah, dan perguruan tinggi agama Islam.

Buku ini sangat berguna dan dapat membantu para mahasiswa yang sedang mendalami ilmu keguruan dan pendidikan khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam mendalami pengetahuannya tentang kapita selekta pendidikan Islam, karena dalam buku ini menyajikan dan membahas secara realistis mengkaji masalah pendidikan Islam merupakan rangkaian proses pemeberdayaan manusia.

Buku ini disajikan sangat sederhana dan mudah untuk difahami. Namun demikian penulis masih menyadari bahwa buku ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu penulis menghaharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Bahan ajar “Kapita Selekta Pendidikan Islam” patut kita sambut positif sebagai bagian dari ikhtiar untuk memperkaya perspektif dalam melihat eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran teks ini secara khusus akan menjadi bahan dialog reflektif bagi para akademisi serta praktisi pendidikan Islam dalam konteks lokal maupun global.

Demikian penulis sampaikan sebagai pengantar dari buku ini, semoga dapat bermanfaat.

Bandung, 2 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DESKIPSI MATA KULIAH.....	x

BAB 1

PENDAHULUAN

MENGIDENTIFIKASI DAN Mencari Solusi Terhadap Problem Pendidikan Islam Kontemporer

1

A. Persoalan Model Pendidikan Islam di Era Global

3

1. Dampak Globalisasi

4

2. Pespektif Budaya

5

B. Reformasi Pendidikan Nasional

5

1. Visi Pendidikan Nasional

6

2. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional

7

3. Penerapan MBS

9

C. Pendidikan Islam merupakan Rangkaian Proses Pemberdayaan Manusia

11

1. Fungsi Pendidikan Islam

11

2. Bentuk Pendidikan Islam

13

3. Perkembangan Pendidikan Islam

17

4. Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

19

BAB 2

MEMAHAMI MAKNA PENDIDIKAN ISLAM.....

23

A. Hakikat Pendidikan Islam.....

25

1. Pengertian Pendidikan Islam

25

2. Tujuan Pendidikan Islam.....

27

B. Kelemahan dan Tantangan Pendidikan Islam.....

28

1. Kelemahan dan Kendala Pendidikan Islam.

28

2. Beberapa Tantangan Dalam Pendidikan Islam.

29

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan.....

30

1. Tujuan.....

30

2. Guru.....

31

3. Anak Didik.....

31

4. Kegiatan pengajaran.....

31

5. Bahan dan alat evaluasi.....

31

6. Suasana Evaluasi.....

31

7. Teknik-Teknik Pendidikan.....

32

D. Konsep Pendidikan Islam Yang Ideal	33
1. Apa itu Pendidikan	34
2. Komponen Penunjang Pendidikan Islam	37
3. Peran Masyarakat Sebagai Pendukung Pendidikan Islam.....	40

BAB 3

TANTANGAN PENDIDIKAN MASA KINI DALAM PERPEKTIF ISLAM DI ERA GLOBALISASI	45
A. Memahami Makna Globalisasi	45
1. Pengertian Globalisasi.....	46
2. Posisi Pendidikan Islam	47
3. Fenomena Globalisasi Pendidikan Islam	48
B. Revitalisasi Peran Pendidikan.....	49
1. Pendidikan dan Tantangan Kekinian	53
2. Membangun Pendidikan Ideal.....	56
C. Problem dan Masalah Pendidikan Islam Era Global.....	58
1. Problematika.....	59
2. Masalah-Masalah Pendidikan Islam di Era Globalisasi ..	64
D. Respon Pendidikan Islam di Era Globalisasi	68
1. Konseptual.....	68
2. Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global	71

BAB 4

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA GLOBALISASI	81
A. Posisi Pendidikan Islam	83
1. Kondisi Umat Islam saat ini	83
2. Upaya Perbaikan Sistem Pendidikan	83
B. Problem Pendidikan Islam Era Global	84
1. Aspek Ekonomi	85
2. Aspek Sosial Budaya.....	85
3. Aspek Politik	86
4. Aspek Pendidikan.....	86
C. Respon Pendidikan Islam terhadap Globalisasi.....	90
1. Pendidikan Islam Memiliki Potensi Fleksibilitas dan Relevansi sesuai dengan Tuntutan Zaman	90
2. Pendidikan Islam selama ini selalu Konsisten dalam Aspek Humanistik,	90
D. Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global	92
1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan.....	93
2. Gagasan-gagasan Inovatif baru smpai Dukungan.....	93

BAB 5

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI

PENDIDIKAN.....	99
A. Memahami Otonomi Daerah	101
1. Prinsip-prinsip Desentralisasi Pendidikan	101
2. Implikasi bagi Desentralisasi Pendidikan:	108
B. Otonomi Pendidikan Pada Kerangka Otda	110
1. Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah	111
2. Peran Serta Aktif Masyarakat di Bidang Pendidikan	111
3. Guru yang Profesional dan Siswa yang Berkualitas	112
4. Privatisasi Sekolah Era Otonomi	114
C. Keberadaan Madrasah Pasca-OTDA	117
1. Pendidikan Islam	117
2. Alternatif Lain	119
D. Masa Depan Pendidikan Di Era Otonomi.....	120
1. Penyelenggaraan Pendidikan.....	121
2. Organisasi dan Personel	122
3. Manajemen Sekolah	123
E. Membangun Sekolah yang Efektif Di Era Otonomi Daerah.....	125
1. Memanfaatkan Peluang	125
2. Menghadapi Tantangan	126
3. Paradigma Baru Keberhasilan Pendidikan.....	127
4. Model Sekolah yang Efektif.....	127

BAB 6

TRI PUSAT PENDIDIKAN: PILAR UTAMA PENCAPAIAN

TUJUAN PENDIDIKAN.....	135
A. Konsep Dasar Tri Pusat Pendidikan	137
1. Pengertian Secara Proporsional.....	137
2. Ruang Lingkup	138
B. Tripusat sebagai Suatu Lembaga Pendidikan.....	139
1. Keluarga Sebagai Pusat Pendidikan Utama dari Pertama	139
2. Sekolah dan Fungsi Transformasi Pengetahuan	143
3. Masyarakat dan Bentuk Pelibatatanya dalam Pendidikan	145
C. Membangun Strategi Tiga Pilar Pendidikan.....	148
1. Lingkungan Pendidikan Keluarga.	148
2. Ruang Lingkup Pendidikan Sekolah.	150
3. Ruang Lingkup Pendidikan Masyarakat	151

BAB 7

PROFESIONALISME GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH.....	155
A. Hakikat Mutu Pendidikan.....	157
1. Pengertian Mutu	157
2. Ciri-ciri Mutu	157
3. Sifat-sifat Mutu.....	159
B. Hakikat Profesional.....	161
1. Pengertian Profesi.....	161
2. Ciri-ciri Profesi.....	162
3. Profesi merupakan Suatu Pernyataan atau Suatu Janji Terbuka.....	164
4. Profesi Keguruan.....	166
5. Ciri-Ciri Guru yang Memiliki Profesionalisme Tinggi .	168
6. Etika Kerja Guru	169
7. Kode Etik Guru	171
C. Etos Kerja dan Profesionalisme Guru	175
1. Makna Etos kerja.....	175
2. Unsur-unsur Etos Kerja.....	175
3. Pendekatan Proses Evolusi.....	177
D. Tantangan Profesi Guru.....	179
1. Perkembangan Teknologi Informasi.....	179
2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan.....	181

BAB 8

REFORMASI

PENDIDIKAN NASIONAL.....	189
A. Hakikat Reformasi Pendidikan	191
1. Pengertian Reformasi	191
2. Tindakan Reformasi Pendidikan	193
B. Langkah-langkah untuk Reformasi	204
1. Merumuskan Visi dan Misi	205
2. Isi dan Substansi Pendidikan Nasional	205
3. Manajemen dan Anggaran	206
C. Implikasi Reformasi Pendidikan.....	207
1. Reformasi pada Tingkat Pendidikan Persekolahan	207
2. Implikasi Bagi Perguruan Tinggi	218
3. Implikasi Terhadap Pendidikan Islam.....	222

BAB 9	
STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL	235
A. Hakikat Strategi Pendidikan Nasional.....	237
1. Definisi Strategi.....	237
2. Hakikat Pendidikan Nasional	241
B. Strategi Pendidikan Nasional.....	251
1. Kebijakan strategi pendidikan nasional	251
2. Pilar-Pilar Strategis.....	252
3. Enam Tahapan Strategi Pendidikan Nasional.....	252
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.	257
1. Mentalitas birokrat sektor pendidikan.....	257
2. Politisasi Birokrasi pendidikan.	257
3. Penghargaan terhadap profesi pendidikan	257
4. Mayoritas tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan.	257
5. Kepedulian Masyarakat Bisnis dan Industri yang Masih Rendah.	258
D. Implikasi bagi Pendidikan Islam	258

BAB 10	
PENDIDIKAN ISLAM DAN KEMAJUAN SAINS	261
A. Sekilas Tentang Pendidikan Islam.....	263
1. Pengertian Pendidikan Islam.....	263
2. Tujuan Pendidikan Islam.....	263
3. Pendidikan Islam dan Harapan Masyarakat.....	265
B. Perkembangan Sains	268
1. Islam dan Pengetahuan/Sains	268
2. Sumbangan Islam Terhadap Sains dan Peradaban Dunia....	270
3. Sarjana-Sarjana Muslim dan Karya Ilmiahnya	271
C. Pendidikan Islam dan Perkembangan Sains.....	276
1. Realitas Pendidikan Islam	277
2. Peran Islam Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi.....	279

BAB 11	
MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DAN	
EFISTEMOLOGI ILMU	293
A. Modernisasi Pendidikan	295
1. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah	295
2. Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perubahan Perkembangan Kebudayaan	299
3. Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Konteks Nasional	305
B. Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam.....	315
1. Realitas Pendidikan Islam	315
2. Mengurai Problematika Pendidikan Islam.....	318
3. Merekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam	323
BAB 12	
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.....	339
A. Hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	341
1. Latar Belakang	341
2. Konsep MBS	341
3. Landasan Yuridis.....	342
B. Definisi dan Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	343
1. Manajemen	343
2. Sekolah	343
3. Peran Manajemen Berbasis Sekolah	350
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Sekolah yang Baik merupakan Kunci keberhasilan MBS.....	352
1. Peningkatan Partisipasi	352
2. Peningkatan Transparansi	353
3. Peningkatan Akuntabilitas.....	354
D. Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah	356
1. Faktor Keberhasilan pendidikan	356
2. Manajemen berbasis sekolah (MBS)	357
3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	357
4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	358
5. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	358
6. Langkah-langkah Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	359
E. Implementasi Pengembangan Berbasis Madrasah	363
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran.....	364
2. Manajemen kesiswaan.....	366
3. Manajemen kepegawaian	367

4. Manajemen Sarana/Prasarana	368
5. Manajemen Keuangan (pembiayaan).....	369
6. Manajemen Layanan Khusus	374

BAB 13

PARADIGMA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM:

(ANTARA IDEALITA DAN REALITA)	379
--	------------

A. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan	381
---	------------

1. Mutu	381
2. Otonomi	381
3. Akuntabilitas	382
4. Akreditasi	382
5. Evaluasi	382

B. Manajemen Pendidikan Islam	383
--	------------

1. Pengertian Manajemen Pendidikan.....	383
2. Prinsip dan Aspek Manajemen Pendidikan Islami	385
3. Manajemen Model Pembelajaran Efektif dan Unggulan.....	386

C. Operasionalisasi Manajemen Pendidikan Islami pada Institusi.....	391
--	------------

1. Pendekatan Berdasarkan Struktur	391
2. Pendekatan Berdasarkan Proses	391
3. Pendekatan berdasarkan fungsi:	392
4. Pendekatan Berdasarkan Pembagian Kerja.....	392
5. Pendekatan Berdasarkan Gaya Kepemimpinan (Manajerial)	392

D. Analisis Manajemen	393
------------------------------------	------------

1. Perencanaan Pendidikan Islami.....	393
2. Pengorganisasian Pendidikan Islam.....	396
3. Tahap Pengendalian/Pengawasan	397
4. Kepemimpinan Pendidikan Islam	398
5. Manajemen berdasarkan ilmiah.	400
6. Manajemen berdasarkan tolong menolong (ta'awun). ..	400
7. Manajemen berdasarkan perdamaian.....	400

DAFTAR PUSTAKA	403
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	417
----------------------	------------

MATA KULIAH KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM

Tujuan mata kuliah Kapita Selektta Pendidikan Islam ini agar mahasiswa memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam mengidentifikasi menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Islam kontemporer. ompetensi; mengidentifikasi menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Islam kontemporer Indikator untuk memahami, menjelaskan; Pertama, persolan model pendidikan Islam, reformasi pendidikan, pendidikan Islam merupakan rangkaian proses pemberdayaan manusia. Kedua, hakikat dan makna pendidikan Islam, kelemahan dan tantangan pendidikan Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan konsep pendidikan Islam yang ideal. Ketiga, tantangan pendidikan masa kini dalam prefektif Islam di era glonalisasi. Keempat, problematika pendidikan Islam pada era globalisasi. Kelima, otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Keenam, tri pusat pendidikan; pilar utama pencapaian tujuan pendidikan. Ketujuh, profesionalime guru dan peningkatan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan. Kedelapan, reformasi pendidikan nasional. Kesembilan, strategi pendidikan nasional. Kesepuluh, pendidikan Islam dan kemajuan sains. Kesebelas, pendidikan Islam dan eistemologi ilmu. Keduabelas manajemen berbasis sekolah. Ketigabelas, paradigma manajemen pendidikan Islam (antara idelita dan relita).

Bagian 1

PENDAHULUAN

Mengidentifikasi, Mencermati dan Mencari Solusi Terhadap Problem Pendidikan Islam Kontemporer

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- Persoalan Model Pendidikan di Era Globalisasi
- Reformasi Pendidikan Nasional
- Pendidikan Islam merupakan Rangkaian Proses Pemberdayaan Manusia
- Perkembangan Pendidikan Islam
- Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam



endidikan mempunyai fungsi yang strategis dalam pembangunan bangsa, karena pendidikan diperlukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaksana pembangunan di segala bidang kehidupan. Tanpa pendidikan, kepribadian manusia sebagai subjek pembangunan belum dapat meningkatkan terwujudnya cita-cita pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sektor pendidikan perlu terus ditingkatkan.

Pembangunan di sektor pendidikan dimaksud meliputi perluasan kualitas, peningkatan mutu, dan penyesuaian sistem pendidikan. Di samping itu, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, mengakibatkan perlu diadakan penyesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Penyesuaian sistem pendidikan dimaksud ditandai dengan perubahan kurikulum dan sistem penyajiannya, perubahan sistem administrasi dan pembinaan serta perubahan sistem evaluasi.

Perluasan kuantitas dan penyesuaian sistem pendidikan itu, jika dikaitkan dengan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan, maka terdapat kesenjangan dimana keadaan kuantitas berupa sarana dan prasarana belajar yang cukup memadai, tenaga guru yang telah memenuhi kebutuhan, serta perubahan kurikulum yang sudah dilakukan, namun keadaan mutu pendidikan masih kurang memenuhi harapan masyarakat.

Kualitas pendidikan dapat ditunjukkan oleh kualitas lulusannya secara utuh dalam seluruh tataran, baik pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sehingga dapat melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dapat memasuki dunia usaha dan dunia kerja secara profesional. Namun patut disadari bahwa masalah peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat, karena melibatkan berbagai komponen pendidikan seperti madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, lingkungan, *visi* dan *misi*, kepemimpinan, sistem evaluasi yang dilakukan, hubungan dengan masyarakat, *stakeholder*, peserta didik, serta manajemen yang berlaku. Hal-hal tersebut merupakan *indikator substantif* utama dalam mencapai tujuan yaitu menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas.

A. Persoalan Model Pendidikan Islam di Era Global

Persoalan model pendidikan Islam di era global perlu diungkap karena globalisasi belakangan ini menjadi fakta yang kita hadapi dan harus disikapi secara hati-hati. Terpaan gelombang globalisasi ternyata membawa implikasi yang cukup serius bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi kian bergeser dari status dan fungsi awalnya yang cukup idealis, sebagai *human development*-, kini, mau tidak mau dipaksa tereduksi hanya sebagai komoditas dan harus terbingkai dalam logika pasar. Disatu sisi ia menjadi eksklusif dan tak terjangkau oleh kalangan bawah, sehingga darwinisme sosial pun sulit dielakkan berlaku. Sedang disisi lain visi dan misinya tidak keluar dari koridor ekonomi (menyiapkan peserta didik sebagai homo economicus semata). Peserta didik disibukkan oleh rutinitas studi-studi berdasarkan kurikulum yang juga terasing dari kehidupan sosial. Misalnya, ketika bicara sains dan teknologi, peserta didik digiring untuk memusatkan diri pada teknologi yang bias sektor urban. Misalnya, mesin-mesin industri berat dan bukan perihal teknologi tepat guna, yang murah, mudah dijalankan dan langsung memberi manfaat kepada masyarakat kecil.

Globalisasi budaya dan peradaban semakin tak terbendung oleh sekat-sekat negara- bangsa. Globalisasi, seperti ditulis Victor Segesvary, tidak menghasilkan *homogenitas* peradaban, tetapi justru melahirkan kesadaran *diversitas* manusia di muka bumi dan melahirkan penemuan begitu luasnya budaya-budaya lokal. *Pluralisme* peradaban dengan begitu merupakan akibat saling pengaruh antara yang global dan yang lokal, yang universal dan yang partikular. Di pihak lain, globalisasi menciptakan *diferensiasi* yang semakin rinci dan rumit sehingga klaim kebenaran yang partikular dan yang lokal itu menjadi semakin mungkin. Dengan demikian, globalisasi memiliki efek ganda: di satu sisi menciptakan kesadaran akan kemajemukan, tetapi di sisi lain menciptakan eksklusivisme partikular. Pada sisi yang terakhir inilah perbedaan mudah berubah menjadi pertentangan, dan pertentangan melahirkan terorisme.

Jeremy Rifkin, seorang pengamat kultural dan globalisasi kenamaan, dalam *The Age of Access: How the Shift from ownership to access is transforming modern life* (2000) mencemaskan adanya penghisapan ranah personal ke dalam ranah pasar, atau diistilahkan: *The commodification of human relationship*. Sehaluan dengan kritik Marcuse atas fenomena Totalitarianisme baru yang berjubahkan

konsumerisme, namun dalam analisa yang jauh lebih sosiologis dan kaya dengan contoh-contoh ekspresi kebudayaan, Rifkin juga meratapi hilangnya *multi-dimensionalitas* manusia dan martabat khas kemanusiaan kita dengan berkata “jika setiap aspek hidup kita menjadi aktivitas yang bercirikan bayar-membayar, hidup manusia sendiri akhirnya menjadi produk komersial yang paling ultim, dan ranah komersial menjadi hakim akhir dari eksistensi personal dan kolektif kita.

1. Dampak Globalisasi

Globalisasi diakui telah membawa dampak cukup serius dalam tatanan kehidupan umat beragama. Tak sedikit pemeluk agama yang gagal dalam menjaga tradisi, nilai-nilai, ritual dan simbol-simbol keagamaan akibat derasnya penetrasi arus globalisasi. Namun, globalisasi di pihak lain telah memberi pelajaran berharga bagi sebagian pemeluk agama. Banyak pemeluk agama yang kini memiliki daya resistensi dalam menolak efek negatif globalisasi. Bahkan yang menggembirakan, globalisasi telah memberi inspirasi sekaligus memotivasi umat beragama untuk memunculkan upaya-upaya kreatif dalam melestarikan jatidiri, identitas diri, bentuk budaya dan landasan-landasan religius.

Pendek kata, globalisasi telah membawa pengaruh terhadap cara-cara umat beragama dalam mengekspresikan kualitas keberagamaannya dan pola-pola hubungan dan komunikasi antar pemeluk beragama yang sangat beragam. Dalam konteks ini, pola-pola komunikasi dan hubungan di antara pemeluk agama dituntut semakin terbuka, toleran, terbuka, penuh kejujuran, cair dan semakin intens.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

2. Prespektif Budaya

Dalam perspektif budaya, pendidikan di era global menjadi wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan umat Islam. Pendidikan Islam dapat menjadi instrument untuk memupuk kepribadian muslim, memperkuat identitas muslim, dan memantapkan jati diri muslim. Bahkan peran pendidikan menjadi

lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai umat dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan kerukunan sosial.

B. Reformasi Pendidikan Nasional

Persoalan reformasi pendidikan nasional tampaknya juga luput menjadi pembahasan dalam bahan ajar ini. Pada hal ini, era reformasi diakui menjadi titik balik bagi kita untuk menata kehidupan kebangsaan, termasuk pendidikan yang lebih demokratis. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

1. Visi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai beberapa misi. (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. (b). membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. (c). meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. (d). meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. (e). memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam UUSPN 2003 meliputi beberapa hal: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (c) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (d) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; (e) penyediaan sarana belajar yang mendidik; (f) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; (g) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan

merata; (h) pelaksanaan wajib belajar; (i) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (j) pemberdayaan peran masyarakat; (k) pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan (l) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaharuan dan penataan dunia pendidikan nasional melalui jalur normatif maupun implementatif perlu menjadi agenda wajib dalam pekerjaan pembangunan kita. Hal ini didasari beberapa alasan.

Pertama, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Untuk itu, ia sering dikatakan *homo educandum* yang berarti sebagai makhluk yang dapat dididik, mendidik dan perlu dididik.

Kedua, pendidikan merupakan institusi yang memegang posisi strategis dalam ikut menentukan masa depan bangsa kita. Melalui pendidikan, human investment dapat dilakukan untuk memajukan bangsa. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa, maka ia tidak lagi diperlakukan secara tradisional-konservatif tetapi secara progresif.

Penanganan pendidikan secara progresif ini lebih menitik-beratkan pada demokrasi dalam pendidikan dan dirasakan lebih dapat mengembangkan anak secara optimal sesuai dengan potensinya. Menurut McRay (1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada dasarnya dipengaruhi oleh empat faktor: (1) keluwesan untuk melakukan *diversifikasi* produk sesuai dengan tuntutan pasar; (2) kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui *reverse engineering* (contoh: *computer clone*); (3) besarnya tabungan masyarakat; (4) mutu pendidikan yang baik; dan (5) etos kerja. Diantara faktor-faktor tersebut, pendidikan (faktor 4) adalah merupakan simpul atau katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi (*brought into being*).

Persoalan bagaimana perjumpaan antara pendidikan Islam dengan kemajuan sains juga tidak memperoleh prioritas pembahasan dalam bahan ajar ini. Pada hal, permasalahan seputar krisis pendidikan Islam ketika dihadapkan dengan kemajuan *sains* menjadi sebuah agenda pekerjaan yang menuntut upaya pemecahan secara

mendesak. Bahkan menurut sinyalemen al-Faruqi, krisis dalam aspek pendidikan inilah yang paling buruk dialami oleh dunia Islam. Memperhatikan permasalahan yang sangat kompleks ini, Syed Muhammad al-Naquib al-Attas memberikan analisis bahwa “yang menjadi penyebab kemunduran dan degenerasi kaum muslimin justru bersumber dari kelalaian mereka dalam merumuskan dan mengembangkan rencana pendidikan yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip Islam secara terkoordinasikan dan terpadu...”. Untuk itulah al-Faruqi menyatakan dengan tegas bahwa: agenda memecahkan problematika pendidikan Islam menjadi tugas rumah yang terberat bagi Umat islam pada abad ke 15 H. ini.”

Sejalan dengan hal ini, Khursid Ahmad menyatakan bahwa di antara persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam masa kini, persoalan pendidikan adalah tantangan yang paling berat, masa depan Islam akan sangat tergantung pada bagaimana dunia itu menghadapi tantangan ini.”Berbagai pendapat dari para cendekiawan muslim ini telah memberi gambaran bahwa ada suatu problematika yang cukup serius dalam sistem pendidikan Islam selama ini, baik pada tataran konseptual maupun pada tataran aplikasinya. Untuk mengatasinya membutuhkan sebuah langkah reformulasi total sejak dari ide dan konseptualisasi sampai kepada aplikasi konsep pendidikan Islam.

Meminjam istilah Winarno Surakhmad, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih inteligent terhadap masalah kependidikan masa depan.” Jadi salah satu upaya stretegis untuk mengatasi berbagai krisis di dunia Islam saat ini dan masa yang akan datang adalah dengan memperkuat pendidikannya.

Sebenarnya umat Islam telah lama sadar bahwa perlu langkah reformulasi sistem kependidikan dan idenya tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan telah dilaksanakannya beberapa kali konferensi pendidikan Islam sedunia seperti yang pertama dilaksanakan diJeddah, Saudi Arabia, tanggal 31 Maret sampai dengan 8 April 1977, namun sangat disayangkan rekomendasi dari hasil konferensi itu belum terlaksana sepenuhnya, terutama dalam pengintegrasian nilai-nilai dan ideologi Islam ke dalam berbagai teori ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, filsafat, sosiologi serta pendidikan bagi wanita.

Memperhatikan itu semua kiranya para cendekiawan muslim perlu mengembangkan strategi pendekatan ganda dengan tujuan mengintegrasikan pendekatan situasional jangka pendek dengan

pendekatan konseptual jangka panjang dengan melibatkan berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu, sambil senantiasa menelaah berbagai konsep yang telah ada yang dihasilkan oleh para cendekiawan muslim terkemuka di bidang pendidikan Islam, mengingat merekalah yang mengadakan perenungan dan pengelaborasiannya secara filosofis termasuk pula mengkritik dan mengevaluasi sistem pendidikan dan pelaksanaannya, serta sekaligus pula melakukan terobosan-terobosan baru yang urgen dan mendasar.

3. Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah

Hal ini lain yang belum disinggung dalam kajian ini adalah masalah akseptasi konsep manajemen berbasis di sekolah (MBS) dalam lingkungan madrasah. Konsep MBS ini diadaptasikan dalam lingkungan madrasah menjadi manajemen berbasis madrasah (MBM).

Menurut Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah Departemen Agama RI (2003:13), Manajemen Berbasis Madrasah atau Madrasah Based Management (MBM) merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas kepada madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Otonomi diberikan agar madrasah leluasa mengelolah sumber daya, sumber dana sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi madrasah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan.

Dengan penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Madrasah memiliki “*full authority and responsibility*” dalam menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Madrasah merupakan ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari tradisi pendidikan agama dalam

masyarakat, Madrasah memiliki arti penting sehingga keberadaannya terus diperjuangkan. Madrasah adalah “Sekolah umum yang bercirikan Islam” menurut Departemen Agama, pengertian ini menunjukkan bahwa dari segi materi kurikulum, madrasah mengajarkan pengetahuan umum yang sama dengan sekolah-sekolah umum sederajat. Hanya saja yang membedakan madrasah dengan lembaga pendidikan umum adalah banyaknya pengetahuan agama yang diberikan, yang merupakan ciri khas Islam dan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama.

Manajemen Berbasis Madrasah yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja kerja madrasah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Mengingat peserta didik datang dari berbagai latar belakang kesukuan dan tingkat sosial, salah satu perhatian madrasah harus ditujukan pada asas pemerataan, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik..

Disisi lain madrasah bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Karakteristik dan MBM bisa diketahui antara lain dari bagaimana madrasah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan.

Pada akhirnya bahan ini seyogyanya memberikan tawaran tentang bagaimana merekonstruksi atau membaharui pendidikan Islam agar bisa eksis di era modern. Upaya pembaharuan pendidikan Islam ini perlu dilakukan mengingat keberadaannya sangat strategis bagi umat Islam.

C. Pendidikan Islam merupakan Rangkaian Proses Pemberdayaan Manusia

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif (kedewasaan), baik secara akal, mental maupun moral. Pendewasaan ini diperlukan dalam rangka mengemban tugas sebagai seorang hamba (abd) dihadapan *Khaliq*-nya dan sebagai “pemelihara” (khalifah) pada semesta (Tafsir, 1994).

1. Fungsi Pendidikan Islam

Dalam konteks ini, fungsi praktis pendidikan Islam adalah membekali peserta didik (generasi penerus) dengan kemampuan dan keahlian (skill) agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat (lingkungan). Tujuan akhir pendidikan dalam Islam, sebagai proses pembentukan diri peserta didik (manusia) agar sesuai dengan fitrah keberadaannya (al-Attas, 1984). Hal ini meniscayai akan adanya kebebasan gerak bagi setiap elemen dalam dunia pendidikan terutama peserta didik untuk mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Pada masa kejayaan Islam, pendidikan telah mampu menjalankan perannya sebagai wadah pemberdayaan peserta didik, namun seiring dengan kemunduran dunia Islam, dunia pendidikan Islam pun turut mengalami kemunduran. Bahkan dalam paradigma pun terjadi pergeseran dari paradigma *aktif-progresif* menjadi *pasif-defensif*. Akibatnya, pendidikan Islam mengalami proses 'isolasi diri' dan termarginalkan dari lingkungan di mana ia berada.

Dari pandangan di atas, dapat dikatakan peran pendidikan Islam mestinya bukan hanya “dipahami dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan), melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini mencakup masyarakat, bangsa, negara dan bahkan manusia pada umumnya” (Fasli Jalal, 2001:16-17).

Berangkat dari sini, pendidikan Islam terintegrasi antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat (learning society). Cara berpikir ini juga sejalan dengan pendapat Brubacher dalam bukunya, *Modern Philosophies of Education* (1978), yang mengakui adanya hubungan pendidikan dengan masyarakat baik dalam dimensi sosial, ekonomi, politik dan negara. Mengingat pendidikan berlangsung di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka kegiatan untuk memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan.

Sedangkan, secara mikro pendidikan senantiasa memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik (Fasli Jalal, 2001: 16), dalam kerangka interaksi proses belajar. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan dan menempatkan dunia pendidikan Islam pada peran ideal sebagaimana pernah dijalankan pada masa keemasan

Islam dengan karakteristiknya yang aktif-progresif. Pertama, Menempatkan kembali seluruh aktifitas pendidikan (talab alilm) di bawah *frame work* agama. Artinya, seluruh aktifitas intelektual senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama, di mana tujuan akhir dari seluruh aktifitas tersebut adalah upaya menegakkan agama dan mencari ridloAllah.

Kedua, Adanya perimbangan (balancing) antara disiplin ilmu agama dan pengembangan *intelektualitas* dalam kurikulum pendidikan. Salah satu faktor utama dari *marginalisasi* dalam dunia pendidikan Islam adalah kecenderungan untuk lebih menitik beratkan pada kajian agama dan memberikan porsi yang berimbang pada pengembangan ilmu non-agama, bahkan menolak kajian-kajian non-agama. Oleh karena itu, penyeimbangan antara materi agama dan non-agama dalam dunia pendidikan Islam adalah sebuah keniscayaan jika ingin dunia pendidikan Islam kembali survive di tengah masyarakat.

Ketiga, Perlu diberikan kebebasan kepada civitas akademika untuk melakukan pengembangan keilmuan secara maksimal. Karena, selama masa kemunduran Islam, tercipta banyak sekat dan wilayah terlarang bagi perdebatan dan perbedaan pendapat yang mengakibatkan sempitnya wilayah pengembangan intelektual. Dengan menghilangkan, minimal membuka kembali, sekat dan wilayah-wilayah yang selama ini terlarang bagi perdebatan, maka wilayah pengembangan intelektual akan semakin luas yang, tentunya, akan membuka peluang lebih lebar bagi pengembangan keilmuan di dunia pendidikan Islam pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya.

Keempat, Mulai mencoba melaksanakan strategi pendidikan yang membumi. Artinya strategi yang dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana proses pendidikan tersebut dilaksanakan. Selain itu, materi-materi yang diberikan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, setidaknya selalu ada materi yang *applicable* dan memiliki relasi dengan kenyataan faktual yang ada. Dengan strategi ini diharapkan pendidikan Islam akan mampu menghasilkan sumber daya yang benar-benar mampu menghadapi tantangan jaman dan peka terhadap lingkungan.

2. Bentuk Pendidikan Islam

Di Indonesia kita kenal, berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Umum bercirikan

Islam, Perguruan Tinggi Islam dan jenis-jenis pendidikan Islam luar sekolah, seperti Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), Pesantrenisasi dan sebagainya. Kesemuanya itu, sesungguhnya merupakan aset dan salah satu dari konfigurasi sistem pendidikan nasional Indonesia.

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sebagai khasanah pendidikan dan diharapkan dapat membangun dan memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal, tetapi pada kenyataan pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Memang terasa janggal dan mungkin juga lucu, karena dalam suatu komunitas masyarakat muslim yang besar pendidikan Islam (Madrasah) kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Mungkin ada benarnya, pepatah yang mengatakan bahwa "ayam mati kelaparan di lumbung padi", artinya, pada kenyataannya pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas dan seimbang dengan umatnya yang besar di bumi Indonesia ini. Akhir-akhir ini terlihat pendidikan Islam mulai mengalami kemajuan, hal ini terbukti dengan semakin bertambah jumlah (kuantitatif) dan kokohnya keberadaan lembaga pendidikan Islam, artinya masuknya pendidikan agama/madrasah ke dalam mainstream pendidikan nasional, misalnya pada pendidikan tingkat madrasah sekarang ini, sejak ibtidaiyah sampai aliyah sudah mengikuti kurikulum nasional.

Dengan demikian aliyah tidak lagi khusus mengaji atau mendalami masalah-masalah keagamaan sebagaimana dulunya. Namun sudah ada madrasah yang membuka jurusan IPA, sosial, keterampilan dan lain-lain. (Azyumardi Azra, <http://islamlib.com/WAWANCARA/azra3.html>, 6/27/2003), serta munculnya beberapa jenis serta model pendidikan yang ditawarkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Namun pada kenyataannya tantangan yang dihadapi pendidikan Islam tetap saja kompleks dan berat, karena dunia pendidikan Islam juga dituntut untuk memberikankontribusi bagi kemoderenan dan tendensi globalisasi, sehingga mau tidak mau pendidikan Islam dituntut menyusun langkah-langkah perubahan yang mendasar, menuntut terjadinya diversifikasi dan diferensiasi keilmuan dan atau mencari pendidikan alternatif yang inovatif.

Kondisi ini menuntut kerja serius dari para pengelola lembaga-lembaga pendidikan dalam mengembangkan mutu pendidikannya.

Meminjam pernyataan Mukti Ali, kelemahan-kelemahan pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat, ketajaman interpretasi (insight), kelembagaan (organisasi), manajemen, serta penguasaan ilmu dan teknologi.

Berkaitan dengan hal ini, M.Arifin, (1991:3), juga menyatakan bahwa pendidikan Islam harus didesak untuk melakukan inovasi yang tidak hanya berkaitan dengan perangkat kurikulum dan manajemen, tetapi juga menyangkut dengan strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik itu, menuntut perombakan model-model pendidikan sampai dengan institusi-institusinya, sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti pedagogis, sosiologis dan kultural dalam menunjukkan perannya.

Syafii Maarif (1996: 5), menggambarkan situasi pendidikan Islam di Indonesia sampai awal abad ini tidak banyak berbeda dengan perhitungan kasar yang dikemukakan di atas. Sistem madrasah dan pesantren yang berkembang di nusantara ini dengan segala kelebihanannya, juga tidak disiapkan untuk membangun peradaban. Mencermati kondisi tersebut di atas, penataan sistem dan model-model pendidikan Islam di Indonesia adalah sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Sistem pengembangan pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang paling mendesak dan sentral yang akan menjadi model dasar untuk usaha pengembangan model-model pendidikan Islam selanjutnya, dengan tidak meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah dan madrasah, masjid, pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah lainnya tetap dipertahankan keberadaannya.

Yahya Muhaimin (2000: 1), juga “menawarkan sebuah *mindmap* tentang basis-basis pendidikan, yaitu pendidikan berbasis keluarga (family-based education), pendidikan berbasis komunitas (community-based education), pendidikan berbasis sekolah (school-based education), dan pendidikan berbasis tempat kerja (workplacebased education).

Dari pandangan Yahya Muhaimin tersebut, apabila dicermati model-model pendidikan Islam sekarang ini sekurang-kurangnya berbasis pada empat jenis lembaga pendidikan Islam yang dapat mengambil peran dalam memberdayakan umat, yaitu pendidikan Islam berbasis pondok pesantren, pendidikan Islam berbasis pada Mesjid, pendidikan Islam berbasis pada sekolah atau madrasah, dan

pendidikan Islam berbasis pada pendidikan umum yang bernafaskan Islam Lembaga pendidikan yang berbasis pada pondok pesantren, sebagai model pendidikan Islam yang dapat mengembangkan atau memperluas sistem pendidikan nonformalnya pada pelayanan pendidikan yang meliputi berbagai jenis bidang misalnya, seperti pertanian, peternakan, kesehatan, kesenian, kepramukaan, iptek, dan pelbagai keterampilan, kemahiran dan sebagainya Pondok pesantren, seharusnya memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara wajar dan sistematis, sehingga apa yang disajikan kepada masyarakat akan tetap terasa bermuara pada pandangan dan sikap Islami, dan terasa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Begitu juga mengenai aktivitas mesjid harus dijadikan basis pembinaan umat. Materi-materi kajian pendidikan Islam yang disampaikan lewat khotbah jum'ah dan ceramah-ceramah harus dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi realitas umat yang dihadapi dan mengantisipasi kondisi perubahan masa depan. Pondok pesantren dan masjid perlu menggalang kerjasama dengan para ulama dan para cendekiawan muslim yang di luar atau yang tergabung dalam perguruan tinggi yang ada di sekitarnya Adapun peran jenis pendidikan yang berbais pada madrasah dan pendidikan umum yang bernafaskan Islam, adalah dalam upaya menemukan pembaruan dalam sistem pendidikan formal yang meliputi metode pengajaran baik agama maupun umum yang efektif. inovasi dibidang kurikulum, alat-alat pelajaran, lingkungan yang mendidik, guru yang kreatif dan penuh dedikasi dan sebagainya sangat diperlukan (Suroyo, 1991: 77-78).

Karel Steenbrink (1994), menyatakan bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia cukup pariatif. Steenbrink, mengkategorikan pendidikan Islam dalam tiga jenis, yaitu: (1) pendidikan Islam yang berbasis pada pondok pesantren, (2) madrasah, dan (3) sekolah. Ketiga jenis pendidikan ini diharapkan menjadi "modal" dalam upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan sebagai suatu paradigma didaktik metodologis. Sebab, pengembangan keilmuan yang integral (interdisipliner) akan mampu menjawab kesan dikotimis dalam lembaga pendidikan Islam selama ini berkembang.

Pada sisi lain, muncul pula jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim dengan model pesantrenisasi dan TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an) . Pendidikan pesantrenisasi sebagai jenis

pendidikan Islam yang muncul sebagai kekuatan pendidikan Islam, walaupun dilaksanakan secara insidental pada setiap bulan Ramadhan, tetapi terencana dan terprogram oleh sekolah-sekolah. Artinya, pada liburan bulan Ramadhan peserta didik dikonsentrasikan atau “di kemkan” pada suatu tempat untuk mendapatkan ceramah-ceramah agama Islam dan paraktek-praktek ibadah selama satu minggu atau lebih. Tetapi sayangnya pendidikan model ini belum ditindak lanjuti dan dievaluasi efektivitas dan efisiensi prosesnya baik dari kurikulum dan materi, metode, pengajar, waktu pelaksanaan dan organisasi.

Kemudian, terdapat pula “Taman Pendidikan al-Qur’an” (TPA), sebagai kekuatan pendidikan Islam yang muncul dengan metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan *output* yang mampu membaca al-Qur’an dalam waktu yang relatif singkat. Dapat kita saksikan produk TPA dengan bangga di wisuda oleh seorang Menteri bahkan tidak tanggung-tanggung oleh Presiden (zaman Presiden Soeharto). Tetapi sampai saat ini belum terpikirkan tindak lanjut dari usaha pendidikan ini, karena selesai wisuda, selesailah usaha pendidikan tersebut. Tetapi, harus diakui bahwa jenis pendidikan Qur’an ini, merupakan hasil inovasi dari model pengajaran al-Qur’an model lama. “Model pendidikan TPA yang ada sekarang merupakan hasil inovasi pendidikan dan perbaikan model pengajaran al-Qur’an tempo dulu itu. Maka dalam model TPA, seorang peserta didik tidak perlu berlama-lama belajar membaca al-Qur’an. Dalam waktu singkat ia telah dapat menguasainya, maka apabila dilihat dari segi didaktik metodik, TPA lebih efektif dan efisien dari pada model pengajaran al-Qur’an model lama (Hajar Dewantoro, 1997:90).

3. Perkembangan Pendidikan Islam

Perkembangan yang mencolok pada tahun 90-an adalah munculnya sekolah-sekolah *elite* Muslim yang dikenal sebagai “sekolah Islam”. Sekolah-sekolah itu mulai menyatakan dirinya secara formal dan diakui oleh banyak kaum Muslim sebagai “sekolah unggulan” atau “sekolah Islam unggulan”. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut sekolah-sekolah tersebut adalah “SMU Model” atau “Sekolah Menengah Umum (Islam) Model”. Dapat saja disebut, sekolah Islam al-Azhar yang berlokasi di kompleks Masjid Agung al-Azhar di Kebayoran Baru Jakarta, dengan beberapa cabang seperti Cirebon, Surabaya, Sukabumi, Serang, Semarang dan sebagainya.

Sekolah al-Azhar-2 di Pondok Labu, Jakarta, SMU Insan Cendekia 3 di Serpong dan SMU Paradinah di Parung.

Saat ini lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendisain model-model pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Muncul pertanyaan model-model pendidikan Islam yang bagaimana? Yang diharapkan dapat menghadapi dan menjawab tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural menuju masyarakat Indonesia baru.

Untuk menjawab pertanyaan ini, meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang digunakan Hasim Amir (A.Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam: 37), yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang *idealistik*, yakni pendidikan yang *integralistik*, *humanistik*, *pragmatik* dan berakar pada budaya kuat.

a. Pendidikan *Integralistik*

Pendidikan *integralistik*, merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Pendidikan yang berorientasi pada Rabbaniyah (Ketuhanan), insaniyah (kemanusiaan) dan alamiyah (alam pada umumnya), sebagai suatu yang *integralistik* bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*, serta pendidikan yang mengangap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan *integralistik* diharapkan dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang memiliki integritas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan *disintegrasi* sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan (Teosentris), artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut. Konsep kemanusiaan, artinya dengan konsep ini dapat dikembangkannya antropologi dan sosiologi pendidikan Islam, dan konsep alam dapat dikembangkannya konsep pendidikan kosmologi dan ketiga konsep

ini harus dikembangkan seimbang dan *integratif*.

b. Pendidikan yang *Humanistik*

Pendidikan yang humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia (humanisasi), yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses *humanisasi*, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya.

Pendidikan *humanistik*, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk (*khairu ummah*). Maka, manusia “yang manusiawi”, yang dihasilkan oleh pendidikan yang *humanistik* diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, merasa dan berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat *individualistik, egoistik, egosentrik* dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

c. Pendidikan *Pragmatik*

Pendidikan pragmatik adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spritual ilahiyah. Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan *pragmatik* diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

d. Pendidikan yang Berakar pada Budaya,

Pendidikan yang berakar pada budaya, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu.

Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya,

diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain (A. Malik Fadjar,1999:37-39). Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan, perubahan, *reformasi* dan menolak begitu saja arus *transformasi* budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat.

D. Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

Usaha pembaruan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh dan terkesan tambal sulam, sehingga "sebagian besar sistem pendidikan Islam, belum dikelolah secara profesional" (Azyumardi Azra, 1999: 59). Hal inipun didukung dengan "upaya pembaruan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat oleh berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai dengan tenaga ahli yang belum siap melakukan perubahan. Untuk itu, pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat rapuh terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas" (Muslih Usa, 1991: 11) .

Dengan kenyataan ini, semestinya "sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasi diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan" (Azyumardi Azra, 1999:57), apabila tidak, maka pendidikan Islam di Indonesia akan ketinggalan dalam persaingan global.

Mencermati permasalahan kondisi pendidikan yang dikemukakan, maka ada dua alasan pokok yang perlu dilakukan pembaruan pada pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: (1) konsepsi dan praktek pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan Islam yang sangat sempit yang hanya atau terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, (2) lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal sekarang ini, seperti madrasah dan pesantren, kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masyarakat yang selalau mengalami perubahan dan politik bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan.

Untuk menghadapi tuntutan dan perubahan masyarakat menuju masyarakat milenium diperlukan usaha pembaruan pendidikan Islam

secara terencana, sistimatis dan mendasar. Pembaharuan ini bertumpu pada hal.

1. Perubahan pada Konsepsi, Praktek, dan Isi Program

Perubahan pada konsepsi, praktek, dan isi program pendidikan Islam dilakukan upaya pembaruan sebagai berikut: (a) perlu pemikiran untuk menyusun kembali "konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada fitrah atau potensinya (Anwar Jasin, 1985:7-8) dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada pada manusia sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, (b) pendidikan Islam harus didisain menuju pada integritas antara ilmu-ilmu *naqliyah* dan ilmu-ilmu *'aqliyah*, untuk tidak menciptakan jurang pemisah antara ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama dan ilmu bukan ilmu agama atau ilmu umum. Karena, dalam pandangan Islam, semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah SWT., (c) "pendidikan didisain menuju tercapainya sikap dan perilaku "toleransi", lapang dada dalam berbagaihal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam,tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (d) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (e) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur" (Suroyo, 1991: 45-48) (f) pendidikan Islam didisain untuk menyiapkan generasi Islam yang berkualitas untuk mampu menjawab tantangan dan perubahan masyarakat dalam semua sektor kehidupan dan siap memasuki milenium ketiga, (g) pendidikan Islam perlu didisain secara terencana, sistimatik, dan mendasar agar lentur terhadap perubahan masyarakat dan peradaban.

2. Perubahan pada Kelembagaan Pendidikan

Perubahan pada kelembagaan pendidikan Islam yaitu (a) perlu menyusun visi dan misi pendidikan Islam menuju milenium ketiga, (b) perlu penataan dan memodernisasika manajemen pendidikan Islam, (c) lembaga pendidikan dikelola secara profesional dengan didasarkan pada prinsip kreatif, otonom, demokratis, transparan, berkualitas, relevan, danefisiensi, (d) sistem rekruting yang transparan dan berkualitas, (e) pengelolah lembaga pendidikan Islam perlu lapang dada, berani, dan terbuka untuk dapat menerima murid-murid atau mahasiswa-mahasiswi non-Islam. Mereka dapat

mempelajari dan mengetahui Islam melalui institusi-institusi pendidikan Islam, bukan dari institusi-institusi non-Islam."Al-Azhar, menurut Fazlur Rahman suatu lembaga tradisional yang terbesar dewasa ini"(Fazlur Rahman, 1997:281), juga menerima mahasiswa-mahasiswa non-muslim belajar di Al-Azhar. Terobosan menerima mahasiswa non-Muslim, sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi Islam dengan menerima para pemeluk agama lain untuk belajar.

Penutup

Globalisasi budaya dan peradaban semakin tak terbendung oleh sekat-sekat negara- bangsa. Globalisasi, seperti ditulis Victor Segesvary, tidak menghasilkan *homogenitas* peradaban, tetapi justru melahirkan kesadaran *diversitas* manusia di muka bumi dan melahirkan penemuan begitu luasnya budaya-budaya lokal. *Pluralisme* peradaban dengan begitu merupakan akibat saling pengaruh antara yang global dan yang lokal, yang universal dan yang partikular.

Di pihak lain, globalisasi menciptakan *diferensiasi* yang semakin rinci dan rumit sehingga klaim kebenaran yang partikular dan yang lokal itu menjadi semakin mungkin.

Dengan demikian, globalisasi memiliki efek ganda: di satu sisi menciptakan kesadaran akan kemajemukan, tetapi di sisi lain menciptakan eksklusivisme partikular. Pada sisi yang terakhir inilah perbedaan mudah berubah menjadi pertentangan, dan pertentangan melahirkan terorisme.

Rangkuman

1. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.
3. Untuk menjawab pertanyaan ini, meminjam prinsip hakekat

pendidikan Islam yang digunakan yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang *idealistik*, yakni pendidikan yang *integralistik*, *humanistik*, *pragmatik* dan berakar pada budaya kuat.

4. Mencermati permasalahan kondisi pendidikan yang dikemukakan, maka ada dua alasan pokok yang perlu dilakukan pembaruan pada pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: (1) konsepsi dan praktek pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan Islam yang sangat sempit yang hanya atau terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, (2) lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal sekarang ini, seperti madrasah dan pesantren, kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masyarakat yang selalau mengalami perubahan dan politik bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan.

Pertanyaan Tinjauan dan Diskusi

1. Bagaimana Persoalan Model Pendidikan di Era Globalisasi di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Reformasi Pendidikan Nasional Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?.
3. Bagaiman bentuk, fungsi dan perkembangan pendidikan Islam merupakan Rangkaian Proses Pemberdayaan Manusia?
4. Perkembangan Pendidikan Islam
5. Bagaimana usaha pembaharuan pendidikan Islam untuk menghadapi tuntutan dan perubahan masyarakat menuju masyarakat milenium?

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M, 1991, *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azra, Azyumardi.,1999, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta: Logo Macana Ilmu,
- , *Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran*, <http://islamlib.com/WAWANCARA/azra3.html>,6/27/2003
- Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ (1997) *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Yogyakarta: Aditiya Media,
- Dewantoro, Hajar., 1997, “*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*”, dalam : *Muslih Usa dan Aden Wijdan*

- SZ (Penyunting) , Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Fadjar, A. Malik., 1999, *Reformasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia.
- Karel A., 1994, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. Kedua, Jakarta: LP3ES,
- Maarif, A.Syafii., 1996, “*Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah*”, makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.
- Muhaimin, Yahya (Menteri Pendidikan Nasional) , 2000, “*Reformasi Pendidikan Nasional Menuju Indonesia*”, Majalah Dwiwutan BPK Penabur Jakarta, Midyawarta, No. 69/Thn.XII, From: <http://www.bpk. Penabur. or.id/KPS. Jkt/widya/69/69.pdt>.
- Rahman, Fazlur., 1985, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terj.Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka.
- Steenbrink, Karel A., (1994), *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. Kedua, Jakarta: LP3ES,
- Sudiro, M. Irsyad., *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal, 30 Agustus – 1 September 1995.
- Suroyo, 1991, *Perbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsep Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volem 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta.
- , 1992, “*Pendidikan Islam di Indonesia Merancang Masa Depan*”, Yogyakarta : UNISIA, No.12 Th. XIII, 1992, UII,.
- Syafii Maarif, Ahmad., 1997, “*Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa*, dalam: Muslih Usa (Penyunting) , *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta.

BAB 2

MEMAHAMI MAKNA PENDIDIKAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu untuk:

- Hakikat Pendidikan Islam
- Kelemahan dan Tantangan Pendidikan Islam
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan.
- Konsep Pendidikan Islam Yang Ideal



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat membawa dampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Globalisasi telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Pendidikan dihadapkan pada persoalan besar. kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan menjadikan pergeseran fungsi sekolah sebagai suatu instansi pendidikan. beban sekolah semakin berat dan kompleks. sekolah tidak saja dituntut untuk dapat membekali berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat cepat berkembang, akan tetapi juga dituntut untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, membentuk moral dan keperabadian, bahkan dituntut agar anak didik dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang di butuhkan untuk memenuhi dunia pekerjaan (Wina Sanjaya, 2007: 4). tuntutan-tuntutan baru yang dibebankan masyarakat terhadap sekolah tersebut, mengakibatkan pula pergeseran makna dan proses pembelajaran.

Keluhan yang sering di lontarkan masyarakat dan pihak orang tua murid selama ini, pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, belum mampu mengantarkan peserta didik untuk dapat memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar.

Demikian pula kemampuan dalam praktek ibadah tidak seperti yang diharapkan. Selain kelemahan dalam penguasaan materi (aspek kognitif) juga dalam hal pembentukan perilaku (aspek afektif) dampak nilai-nilai luhur agama dari proses pendidikan agama di sekolah-sekolah oleh sebagian masyarakat dinilai kurang nampak dalam pribadi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Tingginya frekwensi perkelahian sesama pelajar di kota-kota besar, kurangnya rasa hormat sang anak atau murid kepada guru, bahkan ada yang memukul guru kalau ia tidak naik kelas, akrabnya sebagian anak muda dengan obat-obat perangsang dan terlarang seperti narkoba, ecstassy adanya pergaulan bebas dan “ngumpet sekamar” pelajar putra dan putri atau “kumpul kebo” dikalangan (segelintir) mahasiswa atau generasi muda, sering diangkat oleh sebagian anggauta masyarakat dan orang tua sebagai indikasi ketidak berhasilan pendidikan agama disekolah dan perguruan tinggi. Di mana letak kesalahannya? Pada isi kurikulum yang kurang tepat, system atau metodologi, alokasi waktu atau ketidak mampuan pihak guru agama?.

A. Hakikat Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan dalam perspektif filosofis adalah usaha membantu memanusiakan manusia (Ahmad Tafsir, 2006: 33). Artinya manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya ketika mereka diberikan pendidikan. Atau dengan kata lain, ada manusia yang tidak menjadi manusia disebabkan tidak mendapatkan pendidikan. Ilmu pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari proses pendidikan, karena itulah pendidikan dikatakan sebagai peradaban manusia sebagai upaya untuk melestarikan hidupnya. Theodore Mayer Greene (Ahmad Tafsir, 2004: 6) pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna. Dari definisi ini dapat dikatakan pendidikan merupakan proses yang diarahkan untuk perubahan perilaku seseorang.

Secara umum pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional). (Fahrur Razy Dalimunte, 1999:11). Pendidikan merupakan aktivitas yang diorientasikan kepada pengembangan individu manusia secara optimal.

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka yang di pengaruhi dengan nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai-nilai Islam (Syafarudin Siahaan, 1999: 12).

Pendidikan Islam juga dapat diartikan suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.

Menurut Hasan Langulungan pengertian ilmu pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran

memindahkan pengetahuan, dan nilai-nilai islam yang dijelaskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. (Hasan Langulungan, 1980:94)

Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah terwujudnya manusia sempurna. Atau manusia bertaqwa kepada Allah SWT. Juga tujuan dari pendidikan Islam itu ialah menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual dan intelektual, rasional diri. (Fahrur Razy Dalimunte,1999:12)

Dalam menjelaskan arti pendidikan Islam akan banyak kita jumpai beberapa pandangan mengenai pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri. Burlian Somad. (1981), mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Alloh dan isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan itu, yaitu ajaran Alloh. Secara terperinci beliau mengemukakan, pendidikan itu disebut Pendidikan Islam apabila memiliki dua ciri khas yaitu:

1. Tujuannya membentuk individu menjadi bercorak tinggi menurut ukuran Al-Qur'an.
2. Isi pendidikannya adalah ajaran Alloh yang tercantum dengan lengkap didalam Al-qur'an yang pelaksanaannya didalam praktek hidup sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan menurut Marimba Ahmad (1980). bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam yaitu suatu kepribadian muslim yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu arti pendidikan Islam menurut hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 s/d 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor, adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan Islam ialah usaha dalam pengubahan sikap dan tingkah laku individu dengan menanamkan ajaran-ajaran agama Islam dalam proses pertumbuhannya menuju terbentuknya kepribadian yang berakhlak mulia, Dimana akhlak yang mulia adalah merupakan hasil pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu individu yang memiliki akhlak mulia menjadi sangat penting keberadaannya sebagai cerminan dari terlaksananya pendidikan Islam.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah suatu sasaran yang akan dicapai seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu suatu sasaran yang akan dicapai seseorang atau kelompok orang yang melakukan pendidikan Islam. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan pendidikan Islam mempunyai makna yang sangat penting, keberhasilan dari suatu sasaran yang diinginkan, arah atau pedoman yang harus ditempuh, tahapan, sasaran, serta sifat dan mutu kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu kegiatan tanpa disertai dengan tujuan, menyebabkan sasarannya akan kabur, akibatnya program dan kegiatan tersebut akan acak-acakan.

Adapun pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap dan percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan manusia muslim yang dimaksud adalah pribadi-pribadi muslim yang mempunyai keseimbangan yang dapat mengintegrasikan kesejahteraan kehidupan di dunia maupun kebahagiaan kehidupan di akhirat, dapat menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik dengan jiwa sosial yang tinggi, mengembangkan etos ta'awun dalam kebaikan dan taqwa.

Upaya ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang mampu berperan aktif menjadi agen pembaharuan dan pengembangan kehidupan nasional dan internasional. dalam GBHN 1999-2004 dinyatakan bahwa "pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya *proaktif* dan *reaktif* oleh seluruh komponen bangsa agar generasi

muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya (TAP MPR RI No.IV/MPR/1999, GBHN 1999-2004: Hal 79).

Realisasi tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang Sinstem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, yaitu : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga Negara yang demokratis serta tanggungjawab (DPR RI, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003: Hal 6-7).

B. Kelemahan dan Tantangan Pendidikan Islam

1. Kelemahan dan Kendala Pendidikan Islam.

Menurut Sardjito Marwan (1996:66-74) dalam berbagai kesempatan diskusi, seminar, lokakarya, penataran dan lain-lain, telah sering dikemukakan kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Dari kalangan guru, keluhan yang sering dikemukakan adalah alokasi waktu yang kurang memadai dan isi kurikulum yang terlalu syarat. Di samping itu, sarana dan lingkungan sekolah sering tidak menunjang pelaksanaan pendidikan agama.

Juga dari pihak orang tua kurang memperlihatkan kerjasama. Mereka hanya menuntut anaknya menjadi orang yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia, taat melaksanakan agama, sementara mereka tidak mau memberi dukungan dan contoh. Bagaimana seorang anak menjadi manusia atau generasi berbudi pekerti luhur dan taat melaksanakan perintah agama seperti shalat, puasa, dan lain-lain kalau orang tuanya dirumah tidak pernah melakukan shalat dan puasa. Dalam kasus seperti ini, kiranya kurang adil kalau guru agama dituding sebagai kambing hitam.

Ini tidak berarti tidak ada kelemahan dipihak guru. Banyak kekurangan pihak guru agama. Diantara kekurangan mereka adalah keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan. Dan kalau muncul isu-isu yang mempertentahkan nilai-nilai dasar agama dengan penemuan-penemuan baru dari kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, guru-guru tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai. Sebagian guru agama nampaknya tidak cukup mempunyai pengetahuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Kelemahan lain, pada umumnya guru-guru agama kurang mampu atau tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat untuk mata pelajaran pendidikan agama. Guru-guru agama disekolah dasar dari tamatan PGAN selain urang mendalami materi yang diajarkan, juga sering kali mengajar tanpa memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak.

2. Beberapa Tantangan dalam Pendidikan Islam.

Kiranya perlu kita sadari pula bahwa merebaknya kenakalan remaja, perkehian antar pelajar terutama di kota-kota besar, munculnya “premanisme” dan berbagai bentuk kejahatan lainnya merupakan tantangan bagi para pendidik, tokoh masyarakat, guru agama, dan kita semua.

Tetapi kita juga ingin menegaskan bahwa dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan tersebut guru-guru agama tidak dapat dipersalahkan begitu saja atau dijadikan “kambing hitam”. Guru Agama tidak dapat dipersalahkan secara pukul rata lantaran ada kejahatan, tidak berakhlak, brutal, alkoholis, berkelahi dan bersikap kurang ajar! Banyak factor lain yang lebih dominan dalam pembentukan perilaku dan watak mereka. Karenanya kita menolak kalau ada pihak yang menilai bahwa semakin “merebaknya” kejahatan dan kenakalan remaja itu merupakan indicator kuat terhadap kegagalan pendidikan agama disekolah-sekolah. Tetapi meski demikian kita juga tidak boleh bersikap apatis sambil berkata: “apa yang terjadi, terjadilah!”

Tokoh-tokoh Islam, Ulama’ dan guru-guru agama kiranya tetap menaruh rasa prihatin dan perlu proaktif untuk ikut menanggulangi kejahatan dan kenakalan remaja dan premanisme tersebut. Perlu kita sadari juga, bahwa para preman, remaja dan pelajar yang suka berkelahi, anak-anak yang suka mabuk-mabukan, mereka yang melakukan kejahatan di kota-kota besar, sebagian besar berasal dari keluarga muslim, baik dari kalangan yang berada maupun dari kalangan yang tidak punya. Tetapi sekali lagi, hal tersebut bukan indicator kegagalan atau merosotnya kualitas penghayatan dan pengamalan keagamaan umat islam Indonesia.

Penghayatan dan pengamalan keagamaan umat islam dalam masa dua atau tiga dekade terakhir ini jauh lebih maju, semarak dan mantap dibandingkan dengan masa sebelumnya atau dimasa orde lama. Betapapun masih ada kekurangan dan hambatan, program pendidikan agama telah memberikan hasil dan dampak positif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan generasi muda dan umat islam Indonesia.

Kesadaran masyarakat ntuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan sedini mungkin kepada anak-anak didik kita makin tumbuh dan merata. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya kegiatan “pendidikan agama” melaluai media masa, munculnya pengajian-pengajian, majlis ta’lim, madrasah diniyah, pesantren kilat, taman pendidikan Al Qur’an, dan lain-lain.

Gerakan masyarakat dalam kegiatan pendidikan agama tersebut perlu didorong lebih luas dan meningkat lagi, dan segala kekurangan dan hambatan yang ada kita tanggulangi dan kita carikan jalan keluar.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan.

Djamarah & Zain Aswan (1996:123) berpendapat, jika ada guru yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berhasil dalam mengajar, adalah ungkapan seorang guru yang sudah putus asa dan jauh dari kepribadian seorang guru. Mustahil setiap guru tidak ingin berhasil dalam mengajar. Apalagi jika guru itu hadir kedalam dunia pendidikan berdasarkan tuntunan hati nurani. Panggilan jiwanya pasti merintah atas kegagalan mendidik dan membina anak didiknya.

Betapa tingginya nilai suatu keberhasilan, sampai-sampai seorang guru berusaha sekuat tenaga dan fikiran mempersiapkan program pengajarannya dengan baik dan sistematis. Namun terkadang keberhasilannya yang dicita-citakan, tetapi kegagalan yang ditemui; disebabkan oleh beberapa faktor sebagai penghambatnya. Sebaliknya, jika keberhasilan itu ingin menjadi kenyataan, maka berbagai faktor itu juga sebagai pendukungnya, Berbagai faktor yang dimaksud adalah :

1. Tujuan.

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses

belajar mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran.

2. Guru.

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia menjadi anak didik menjadi orang yang cerdas. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kompetensi seorang guru dibidang pendidikan dan pengajaran.

3. Anak Didik.

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Orang tuanyalah yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan dikemudian hari. Kepercayaan orang tua anak diterima oleh guru dengan kesadaran dan penuh keikhlasan. Maka jadilah guru sebagai pembeban tanggung jawab yang diserahkan itu.

4. Kegiatan pengajaran.

Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Guru yang mengajar. Anak didik yang belajar. Maka guru adalah orang yang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar anak didik. Anak didik adalah orang yang digiring kedalam lingkungan belajar yang telah diciptakan oleh guru. Gaya mengajar guru berusaha mempengaruhi gaya belajar anak didik. Tetapi disini gaya mengajar guru lebih dominan mempengaruhi gaya belajar anak didik.

5. Bahan dan Alat Evaluasi.

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat didalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Bila tiba masa ulangan, semua bahan yang telah diprogramkan dan harus selesai dalam jangka waktu tertentu dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan item-item soal evaluasi.

6. Suasana Evaluasi.

Selain faktor tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, serta

bahan dan alat evaluasi, faktor evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar.

7. Teknik-Teknik Pendidikan.

Sementara menurut Muhammad Quthub (1988:325), memberi komentar, tetapi lebih dari itu, Islam belum pernah pula kehabisan persediaan dalam hal teknik-teknik pendidikan dan masih banyak lagi persediaan anak-anak panah didalam kantongnya. Ia melakukan pendidikan melalui teladan, melalui teguran, melalui hukuman, melalui cerita-cerita, melalui pembiasaan, dan melalui pengalaman-pengalaman kongkrit.

a. Pendidikan melalui Teladan.

Ini adalah salah satu teknik pendidikan yang efektif dan sukses. Mengarang buku mengenai pendidikan adalah mudah begitu juga menyusun suatu metodologi pendidikan, kendatipun hal itu membutuhkan ketelitian, keberanian dan pendekatan yang menyeluruh. Namun hal itu masih tetap hanya akan merupakan tulisan diatas kertas, tergantung diatas awang-awang, selama tidak terjamah menjadi kenyataan yang hidup didunia nyata, bila tidak bisa menjamah manusia yang menterjemahkannya, dengan tingkah laku, tindak-tanduk, ungkapan-ungkapan rasa, dan ungkapan-ungkapan pikiran: menjadi dasar-dasar dan arti suatu metodologi. Hanya bila demikianlah suatu metodologi akan berubah menjadi suatu gerakan, akan menjadi suatu sejarah. Diperlukanlah teladan. Oleh karena itulah Allah mengutus Muhammad s.a.w. untuk menjadi tauladan buat manusia.

b. Pendidikan melalui Nasehat.

Didalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap, dan oleh karena itu kata-kata harus diulang-ulang. Nasehat yang berpengaruh, membuka jalannya kedalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Dalam pendidikan nasehat saja tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan teladan dan perantara yang memungkinkan teladan itu diikuti dan diteladani.

c. Pendidikan melalui Hukuman.

Bila teladan tidak mampu, dan begitu juga nasehat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan ditempat yang benar. Kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-

sebut. Tetapi generasi muda yang ingin dibina tanpa hukuman itu; di Amerika, adalah generasi muda yang sudah kedodoran, meleleh, dan sudah tidak bisa dibina lagi eksistensinya. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diperlukan. Ada orang-orang yang teladan dan nasehat saja sudah cukup, tidak perlu lagi hukuman dalam hidupnya. Tetapi manusia itu tidak sama seluruhnya. Diantara mereka ada yang perlu dikerasi sekali-kali.

d. Pendidikan melalui Cerita.

Cerita mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Bagaimanapun persoalannya, cerita itu pada kenyataannya sudah merajut kaki manusia dan akan tetap mempengaruhi kehidupan mereka. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita itu, dan menyadari pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. Oleh karena itu Islam mengeksploitasi cerita itu untuk dijadikan salah satu teknik pendidikan.

e. Pendidikan melalui Kebiasaan.

Kebiasaan, sebagaimana sudah kita singgung, menduduki kedudukan yang sangat istimewa di dalam kehidupan manusia. Islam mempergunakan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik pendidikan. Lalu ia mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan.

f. Menyalurkan Kekuatan.

Diantara banyak teknik Islam dalam membina manusia dan juga dalam memperbaikinya adalah mengaktifkan kekuatan-kekuatan yang tersimpan didalam jiwa dan tubuh dari diri dan tidak memendamnya kecuali bila potensi-potensi itu memang terpuruk untuk lepas.

g. Mengisi Kekosongan.

Bila Islam menyalurkan kekuatan tubuh dan jiwa ketika sudah menumpuk, dan tidak menyimpannya, karena penuh resiko. Maka Islam sekaligus juga tidak senang pada kekosongan. Kekosongan merusak jiwa, seperti halnya kekuatan terpendam juga rusak, tanpa adanya suatu keadaan istimewa. Kerusakan utama yang timbul oleh kekosongan adalah habisnya kekuatan potensial itu untuk mengisi tersebut. Seterusnya orang itu akan terbiasa pada sikap buruk yang dilakukannya untuk mengisi kekosongan itu.

D. Konsep Pendidikan Islam yang Ideal

Islam sejak awal kemunculannya telah memperlihatkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Ayat pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah *Iqra'* yang mengandung pesan tentang perintah memberdayakan potensi akal yang dimiliki manusia, dan itu merupakan inti pendidikan dalam Islam. Namun, perlu diakui bahwa pendidikan Islam ketika itu belum mempunyai bentuk yang formal dan sistematis, karena peranan pendidikan pada awal perkembangan Islam masih sebatas upaya-upaya penyebaran dakwah Islam berupa penanaman ketauhidan dan praktek-praktek ritual keagamaan. Keadaan di atas berlangsung sejak Nabi Muhammad masih hidup hingga sampai pada suatu zaman dimana pemikiran umat Islam mulai bersentuhan dengan peradaban dan kebudayaan dari luar Islam (Arab). (Abudin Nata 2004:99)

Masuknya filsafat Yunani merupakan faktor yang sangat dominan bagi perkembangan pemikiran dalam Islam, termasuk dalam bidang pendidikan.

Pendidikan zaman dulu seharusnya menjadi cerminan untuk pendidikan masa yang akan datang. Yang baik dari zaman dulu dan sisi buruknya ditinggalkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi menghadapi globalisasi dan perkembangan zaman yang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Filsafat pendidikan dan pemikiran pendidikan Islam, dalam hal ini harus turut memberi respon bagi semua perubahan dan perkembangan itu. Karena filsafat dan pemikiran Islam itu selalu merupakan akibat dari dua hal, yaitu ideologi Islam seperti digambarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta suasana baru yang muncul dalam dunia Islam (pendidikan) itu sendiri, sehingga perlu dibentuk konsep pendidikan Islam yang ideal yang dapat menyesuaikan terhadap perkembangan zaman dengan tanpa melupakan nilai-nilai keagamaan Islam dalam dunia pendidikan.

1. Apa itu Pendidikan

Sebelum membahas tentang pendidikan Islam, terlebih dahulu membahas apa itu pendidikan? Menurut M.J Langeveld. "Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan". Ahmad D. Marimba, (1974: 2); merumuskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh spondidit terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik

menuju terbentuknya keperibadian yang utama.

Demikian dua pengertian pendidikan dari sekian banyak pengertian yang diketahui. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, “pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akang datang”. Sedangkan, “pendidikan dalam pengertian yang luas adalah meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah. (Zuhairini, dkk, 1995:2).

Pendidikan Islam ideal adalah membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional dan intelegensia secara optimal. Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran.

Aktifitas pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan spirit Islam, yaitu suatu upaya dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai Islami. Selanjutnya spirit tersebut digunakan sebagai pedoman hidup. Spirit Islam ini berakar dalam teks-teks suci Al-Qur’an yang disampaikan Allah kepada Muhammad SAW. Sebagai Kitab Suci agama Islam, Al-Qur’an memperkenalkan dirinya sebagai ‘pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus’ (QS. 17: 19), petunjuk-petunjuknya bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu ditemukan petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kedua bentuk tersebut. Rosul sebagai penerima Al-Qur’an bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut, menyucikan dan mengajarkannya kepada manusia (QS 67: 3). Menyucikan dapat diidentikan dengan mendidik (menjadikan seseorang bersih/suci), sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi jiwa anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam fisik dan metafisik.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembacaan, penyucian dan pengajaran tersebut adalah pengabdian kepada Allah SWT sejalan

dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam Surat Al-Dzariat 56 '*aku tidak menciptakan manusia dan Jin kecuali untuk menjadikan tujuan akhir atau hasil segala aktifitasnya sebagai pengabdian kepada-Ku*'. Aktifitas yang dimaksudkan disini tersimpul dalam kandungan ayat 30 Surat Al-Baqarah '*sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*' dan Surat Hud 61 '*dan Dia (Allah) menciptakan kamu (manusia) dari bumi (tanah) dan menugaskan kamu memakmurkan*'. Maksud dari ayat ini, manusia yang dipercaya oleh Allah sebagai khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah).

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Dari uraian tersebut juga dapat dirumuskan konsep pendidikan Islam sebagai berikut: Pertama; Pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam merupakan manifestasi dari tugas kekhalifahan ummat manusia di muka bumi. Manifestasi ini akan bermakna fungsional jika seluruh fenomena kehidupan yang muncul dapat diberi batasan-batasan nilai moralitasnya, sehingga tugas kekhalifahan itu tidak justru berada di luar lingkaran nilai-nilai itu. Dan konsekuensinya, mengisyaratkan kepada manusia agar dalam proses pendidikannya selalu cenderung pada ajaran-ajaran pokok dari sang Pendidik yang paling utama dan pertama, yaitu Allah sebagai *rabb al-'alamiin* dan sekaligus sebagai *rab an-naas*.

Kedua, Pendidikan Islam memahami alam dan manusia sebagai totalitas ciptaan Allah, sebagai satu kesatuan, di mana manusia yang diberi *otoritas relatif* untuk mendayagunakan alam, tidak bisa terlepas dari sifat *ar-rahman* dan *ar-rahim* Allah yang termasuk sifat ke-*rubbubiyahan*-Nya. Oleh karena itu pendidikan sebagai bagian pokok dari aktifitas pembinaan hidup manusia harus mampu mengembangkan rasa kepatuhan dan rasa syukur yang mendalam kepada *Khaliq*-nya. Sehingga beban tanggungjawab manusia tidak ditujukan kepada selain Allah. Inilah sebenarnya makna *tauhid* yang mendasari segala aspek pendidikan Islam. Ketiga, Atas dasar ketauhidan tersebut, pendidikan Islam haruslah mendasarkan orientasinya pada penyucian jiwa, sehingga setiap diri manusia

mampu meningkatkan dirinya dari tingkatan iman ke tingkatan ikhsan yang mendasari seluruh kerja kemanusiaannya (amal sholeh).

Dari orientasi pendidikan Islam ini, maka asas pendidikan Islam tidak lain adalah berupaya mengefektifkan aplikasi-aplikasi nilai-nilai agama yang dapat menimbulkan transformasi nilai dan pengetahuan secara utuh kepada manusia, masyarakat, dan dunia pada umumnya, (Syamsul Arifin, dkk. 1996: 166-167).

Al-Syaibany menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut: (a) dalam segala prinsip, kepercayaan dan kandungannya sesuai dengan ruh (spirit) Islam; (b) berkaitan dengan realitas masyarakat dan kebudayaan serta sistem sosial, ekonomi, dan politiknya; (c) bersifat terbuka terhadap segala pengalaman yang baik (hikmah); (d) pembinaannya berdasarkan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan aspek-aspek yang melingkungi; (e) bersifat universal dengan standar keilmuan; (f) selektif, dipilih yang penting dan sesuai dengan ruh agama islam; (g) bebas dari pertentangan dan persanggahan antara prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasarnya; dan (h) proses percobaan yang sungguh-sungguh terhadap pemikiran pendidikan yang sehat, mendalam dan jelas.

Selain itu, menurut Malik Fajar (199), pendidikan Islam harus memenuhi 4 tuntutan sebagai berikut; (a) kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah operasional di dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, (b) memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya, (c) meningkatkan dan memperbaiki Manajemen, dan (d) meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM).

2. Komponen Penunjang Pendidikan Islam

Penyelesaian problem pendidikan sangat berkaitan dengan masalah bidang lainnya, seperti ekonomi, hukum, sosial dan politik. Tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan hanya dari satu sudut bidang pendidikan semata, karena hasil pendidikan siswa disekolah sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan keluarganya, maka solusinya harus bersifat revolusioner yaitu merubah secara total paradigma berpikir dan bersikap dari pola pikir dan pola sikap dari kapitalis menjadi pola berpikir islam.

Di masyarakat kita saat ini berkembang persepsi kapitalis, semisal sekolah bertujuan dapat kerja, sekolah biar jadi orang kaya,

sekolah sekedar mengisi waktu luang atau dari pada menganggur. Pelajaran ekonomi misalnya, mengajarkan: demi keuntungan sebesar-besarnya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.

Kerusakan yang lama ada pada pola pendidikan di negara Barat sepatutnya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kerusakan tersebut timbul dikarenakan tidak adanya muatan ruhiyah dalam penelitian dan pengembangan sains dan teknologinya. Sehingga dampak yang bisa dirasakan, pola pendidikan tersebut menghasilkan output berpikir dan bersikap berdasarkan pada prinsip materialisme dengan menanggalkan prinsip syari'at Islam. (Tim Penulis IRP, 2005: 53). Dari sinilah problem sosial kemasyarakatan muncul dan kerusakan tatanan kehidupan.

Membangun kepribadian islami yang terdiri dari pola pikir dan pola jiwa bagi umat yaitu dengan cara menanamkan *tsaqofah* Islam berupa aqidah, pemikiran, dan perilaku islami ke dalam akal dan jiwa anak didik. Mempersiapkan generasi Islam untuk menjadi orang 'alim dan faqih di setiap aspek kehidupan, baik ilmu *diniyah* (Ijtihad, Fiqh, Peradilan, dll) maupun ilmu terapan dari sains dan teknologi (kimia, fisika, kedokteran, dll). Sehingga output yang didapatkan mampu menjawab setiap perubahan dan tantangan zaman dengan berbekal ilmu yang berimbang baik *diniyah* maupun *madiyah*-nya. (M. Arifin, 1999: 27)

Kemudian tujuan dari pola pendidikan Islam bisa terlaksana jika ditopang dengan pilar yang akan menjaga keberlangsungan dari pendidikan Islam tersebut. Pilar penopang pendidikan Islam yang dibutuhkan untuk bekerja sinergis terdiri dari:

a. Keluarga

Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan gerbang utama dan pertama yang membukakan pengetahuan atas segala sesuatu yang dipahami oleh anak-anak. Keluarga-lah yang memiliki andil besar dalam menanamkan prinsip-prinsip keimanan yang kokoh sebagai dasar bagi si anak untuk menjalani aktivitas hidupnya. Berikutnya, mengantarkan dan mendampingi anak meraih dan mengamalkan ilmu setinggi-tingginya dalam koridor taqwa. Jadi keluarga harus menyadari memiliki beban tanggung jawab yang pertama untuk membentuk pola akal dan jiwa yang Islami bagi anak. Singkatnya, keluarga sebagai cermin keteladanan bagi generasi baru. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan

atas fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Bukhari)

b. Masyarakat

Pendidikan generasi merupakan aktivitas yang berkelanjutan tanpa akhir dan sepanjang hayat manusia. Oleh karena itu, pola pendidikan Islam tidak berhenti dan terbatas pada pendidikan formal (sekolah), namun justru pendidikan generasi Islami yang bersifat non formal di tengah masyarakat harus beratmosfer Islam pula. Kajian tsaqofah islam serta ilmu pengetahuan dan sarana penunjangnya menuntut peran aktif dari masyarakat pula. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan masyarakat sebagai pilar penopang pendidikan generasi islami yaitu sebagai contoh penyelenggaraan pendidikan oleh negara dan laboratorium permasalahan kehidupan yang kompleks.

c. Madrasah/Sekolah/Lembaga Pendidikan

Tempat untuk mengkaji keilmuan lebih intensif dan sistematis terletak pada Madrasah. Semasa Rasulullah SAW, masjid-masjid yang didirikan kaum muslimin menjadi lembaga pendidikan formal bagi semua manusia. Didalamnya tidak semata-mata membahas ilmu diniyah, namun juga ilmu terapan. Rasulullah menjadikan masjid untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tapi penyusunan strategi perang pun juga seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat didalam masjid. Sedangkan dimasa modern saat ini pendidikan bisa dialihkan yang semula masjid ke tempat dengan fasilitas yang menunjang dalam proses pembelajaran lebih efektif baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini sah-sah saja dan tidak bisa dianggap sebagai upaya memisahkan anak didik dari masjid.

d. Negara

Negara sebagai pilar penopang bisa mewujudkan pola pendidikan Islami akan lebih optimal, efektif dan sempurna jika didukung dengan semua kebijakan yang dikeluarkan terhadap aspek kehidupan ini berlandaskan syari'at Islam. Peran yang bisa diambil oleh Negara dalam mewujudkan pola pendidikan Islami diantaranya; (1) Seleksi dan kontrol ketat terhadap para tenaga pendidik. Penetapan kualifikasi berupa ketinggian syakhsiyah islamiyah dan kapabilitas mengajar. Jika sudah didapatkan tenaga pendidikan yang sesuai kualifikasi, negara harus menjamin kesejahteraan hidup para tenaga pendidik agar mereka bisa focus dalam penelitian dan pengembangan ilmu bagi anak didik dan tidak disibukkan aktivitas mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, (2)

menyajikan konten pendidikan dengan prinsip *al-Fikru li al-'Amal* (*Link and Match*/ilmu yang bisa diamalkan). Artinya jangan sampai isi materi pendidikan tidak membumi (tidak bisa diterapkan) sehingga tidak berpengaruh dan tidak memotivasi anak didik untuk mendalaminya, (2) tidak membatasi proses pendidikan dengan batasan usia dan lamanya belajar. Karena hakekat pendidikan adalah hak setiap manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Allah mengamanahkan penguasa negara untuk benar-benar memenuhi kebutuhan umat tanpa syarat termasuk pendidikan.

3. Peran Masyarakat Sebagai Pendukung Pendidikan Islam

Pendidikan Islam penuh dengan nilai insaniah dan ilahiyah. Agama Islam adalah sumber akhlak, kedudukan akhlak sangatlah penting sebagai pelengkap dalam menjalankan fungsi kemanusiaan di bumi. Pendidikan merupakan proses pembinaan akhlak pada jiwa. Meletakkan nilai-nilai moral pada anak didik harus diutamakan. Nilai-nilai ketuhanan harus dikedepankan, pendidikan Islam haruslah memperhatikan pendidikan akhlak atau nilai dalam setiap pelajaran dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi dan mengutamakan *fadhilah* dan sendi moral yang sempurna. (Jamal Barzinji , 1996:37)

Dalam pendidikan Islam, keseimbangan hidup meliputi beberapa prinsip, yakni Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmanai dan rohani, antara kepentingan individu dan sosial, serta keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan amal.

Hal diatas merupakan konsep pendidikan Islam yang ideal. Namun, realitas problem pendidikan yang ada adalah problem sistemik pendidikan artinya; permasalahan menyangkut keseluruhan komponen pendidikan, mulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan sistem pendidikan nasional, manajerial pemerintah, kompetensi guru/dosen, sarana-prasarana, kurikulum, dukungan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penanganannya juga harus melibatkan berbagai pihak, dan sudah seharusnya permasalahan ini merupakan tanggung jawab bersama.

Dibalik otonomi dan kebebasan yang dimiliki, kepada guru diberikan target yang harus dicapai sebagai standar keberhasilan. Sudah barang tentu target tersebut adalah keberhasilan untuk semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi yang dimiliki, mencapai prestasi pada tingkat tertentu. Target bisa

dikembangkan pada berbagai skop sekolah. Dengan adanya target sebagai standar, masyarakat bisa ikut mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan.

Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dan orangtua peserta didik untuk mengevaluasi proses pendidikan, memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat sekitar dan khususnya orangtua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan. Misalnya, sekolah bisa mengundang orangtua dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan operasionalisasi kegiatan sekolah. Orangtua dan masyarakat sekitar yang mampu bisa diajak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pada level makro, secara nasional bisa dilaksanakan realokasi anggaran pembangunan pendidikan. Anggaran pendidikan pemerintah yang terbatas hanya diarahkan pada sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik dengan latar belakang yang kurang mampu. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang peserta didiknya terdiri dari orangtua berlatar belakang sosial ekonomi relatif kaya, diharapkan bisa *self-supporting* dalam pembiayaan sekolah.

Bahkan tidak hanya masyarakat sekitar, karena target dan standar yang harus memiliki skop regional dan daerah, maka pemerintah daerah akan secara langsung terlibat dalam menyukseskan pendidikan di wilayah masing-masing. Diharapkan pemerintah setempat bisa mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian target pendidikan tersebut. Misalnya, pemerintah kelurahan menetapkan “jam belajar” bagi anak usia tertentu. Pada jam-jam tersebut anak-anak tidak boleh bermain. Dengan kata lain pelayanan kemasyarakatan perlu dikaitkan dengan proses pendidikan.

Penutup

Kepada setiap sekolah dan guru diberikan kebebasan apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang penting adalah pencapaian target yang telah ditentukan, dengan kata lain proses pendidikan bersifat product oriented, berlawanan process oriented, yang dilakukan sekarang ini. Untuk mencapai target yang telah ditentukan kepada guru perlu diberikan insentif dan sekaligus sanksi. Insentif diberikan kepada guru yang berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Sebaliknya, sanksi diberikan kepada guru yang melakukan tindak kecurangan, misalnya mengubah, menambah atau memalsu nilai hasil pembelajaran peserta didik.

Konsep filosofis pendidikan Islam adalah bersumber dari *hablum min Allah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia) dan *hablum min al-alam* (hubungan dengan manusia dengan alam sekitar) yang selanjutnya berkembang ke berbagai teori yang ada seperti sekarang ini. Inpirasi dasar yaitu berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis.

Lembaga pendidikan Islam harus ditata kembali sehingga program pendidikannya berorientasi pada pencapaian dan penguasaan kompetensi tertentu, oleh karena itu lembaga pendidikan Islam harus mempunyai sifat; (a) Multiprogram dan multistrata dan berorientasi pada tujuan perpektif dan kebutuhan deskriptif, (b) setiap program disusun dengan menggunakan prinsip pemaduan kompetitif kognitif, afektif, dan "akhlak" (c) Diversifikasi program ditata sesuai dengan kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat yang berorientasi pada penampilan perilaku anak didik yang mempunyai rasa tanggung jawab.

RANGKUMAN

1. Pendidikan Islam ialah usaha dalam pengubahan sikap dan tingkah laku individu dengan menanamkan ajaran-ajaran agama Islam dalam proses pertumbuhannya menuju terbentuknya kepribadian yang berakhlak mulia, Dimana akhlak yang mulia adalah merupakan hasil pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu individu yang memiliki akhlak mulia menjadi sangat penting keberadaannya sebagai cerminan dari terlaksananya pendidikan Islam.
2. Kelemahan lain, pada umumnya guru-guru agama kurang mampu atau tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat untuk mata pelajaran pendidikan agama. Guru-guru agama disekolah dasar dari tamatan PGAN selain urang mendalami materi yang diajarkan, juga sering kali mengajar tanpa memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak.
3. Kesadaran masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan sedini mungkin kepada anak-anak didik kita makin tumbuh dan merata. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya kegiatan "pendidikan agama" melalulai media masa,

munculnya pengajian-pengajian, majlis ta'lim, madrasa diniyah, pesantren kilat, taman pendidikan Al Qur'an, dan lain-lain. Gerakan masyarakat dalam kegiatan pendidikan agama tersebut perlu didorong lebih luas dan meningkat lagi, dan segala kekurangan dan hambatan yang ada kita tanggulangi dan kita carikan jalan keluar.

4. Faktor-faktor yang dapat menunjang terhadap keberhasilan pendidikan dengan melakukan pendidikan melalui teladan, melalui teguran, melalui hukuman, melalui cerita-cerita, melalui pembiasaan, dan melalui pengalaman-pengalaman kongkrit.
5. Konsep filosofis pendidikan Islam adalah bersumber dari *hablum min Allah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia) dan *hablum min al-alam* (hubungan dengan manusia dengan alam sekitar) yang selanjutnya berkembang ke berbagai teori yang ada seperti sekarang ini. Inpirasi dasar yaitu berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis. Lembaga pendidikan Islam harus ditata kembali sehingga program pendidikannya berorientasi pada pencapaian dan penguasaan kompetensi tertentu, oleh karena itu lembaga pendidikan Islam harus mempunyai sifat; (a) Multiprogram dan multistrata dan berorientasi pada tujuan perpektif dan kebutuhan deskriptif, (b) setiap program disusun dengan menggunakan prinsip pemaduan kompetitif kognitif, afektif, dan "akhlak" (c) Diversifikasi program ditata sesuai dengan kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat yang berorientasi pada penampilan perilaku anak didik yang mempunyai rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, (1991). M. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Syamsul. Dkk (1996). *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Si Press.
- Barzinji, Jamal.(1996). *Sejarah Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Burlian, Somad, 1981. *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- Djamara, S, Bahri, Drs.& Zain, Aswan, Drs,1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. *Pendidikan dan Peserta didik dalam interaksi Edukatif suatu Pendekatan Teoritis Pendidikan*, Bandung: Rineka Cipta.
- Marimba, Ahmad, D, 1980. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al. Ma'arif.
- Nata, Abudin.(2004). *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Quthb, Muhammad, (1988). *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Prakti Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (cet. Ke-2)*., Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sardjito, Marwan, 1996. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV Amisisco.
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Pendidikan Islami*, Bandung: Rosdakarya
- . 2005. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2008. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis, (2005) *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Zuhairini, dkk, (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

BAB 3

TANTANGAN PENDIDIKAN MASA KINI DALAM PERPEKTIF ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu untuk:

- **Memahami Globalisasi**
- **Memakami Revitalisasi Peran Pendidikan**
- **Memakami Masalah-Masalah Pendidikan Islam di Era Globalisasi**



alam era globalisasi, seluruh aspek kehidupan bangsa terguncang dahsyat hingga daya *adaptif* kita sebagai suatu bangsa dalam suatu sistem sangat terpengaruh oleh perubahan, perubahan yang sangat cepat. Dalam dunia pendidikan, proses akulturasi dan perubahan perilaku bangsa mau tidak mau kita terdorong menjadi masyarakat yang memasuki *complex adaptive system*.

Era reformasi dalam konteks nasional terasa getarannya seperti perubahan radikal, terasa pula ada penjungkirbalikan nilai-nilai yang telah kita miliki, menjadi porak poranda, dan hampir tercabut sampai ke akar-akarnya. Hal ini kita rasakan sejak tahun 1998, dan kita bertanya apakah ini demokrasi atau reformasi, kita bergumam bahwa ini bukan demokrasi, dan bukan reformasi.

Kita merasakan krisis multidimensional melanda kita, di bidang politik, ekonomi, hukum, nilai kesatuan dan keakraban bangsa menjadi longgar, nilai-nilai agama, budaya dan ideologi terasa kurang diperhatikan, terasa pula pembangunan material dan spiritual bangsa tersendat, *discontinue, unlinier dan unpredictable*.

Dalam keadaan seperti sekarang ini sering tampak perilaku masyarakat menjadi lebih korup bagi yang punya kesempatan, bagi rakyat awam dan rapuh tampak beringas dan mendemostrasikan sikap antisosial, antikemapanan, dan kontraproduktif serta goyah dalam keseimbangan rasio dan emosinya.

Bagi kita bangsa yang masih sadar, sabar dan tawakal perlu melaksanakan diagnosis terhadap sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma dan moral yang kurang terkendali ini. Perlu dipola terapi yang tepat melalui senyum karakter bangsa dan pendekatan keakraban nasional, mengikuti ungkapan seorang negarawan Amerika Serikat (Edward Kennedy) “ *We are one nation in a sorrow*”. Mari dalam rasa keprihatinan nasional sekarang ini kita bersatu padu agar derita dari segala bencana yang menimpa bangsa Indonesia baik fisik maupun mental terutama dalam kesulitan himpitan ekonomi.

A. Memahami Makna Globalisasi

1. Pengertian Globalisasi

Menurut bahasa, global ialah seluruhnya, menyeluruh. Sedangkan globalisasi ialah pengglobalan secara keseluruhan aspek kehidupan, perwujudan secara menyeluruh disegala aspek kehidupan. Kemudian pengertian secara luas globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju (Amerika, Eropa dan Jepang) melakukan ekspansi besar-besaran. Kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer dan ekonomi.

Bila dipelajari lebih jauh, globalisasi membawa pengaruh terhadap Negara-negara berkembang yang baru terlepas dari belenggu penjajahan, baik positif maupun negatif. Pengaruh positif dari globalisasi yaitu membantu/ mendorong negara-negara baru berkembang untuk maju secara teknis, serta menjadi lebih sejahtera secara material. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya teknokrasi yang sangat berkuasa, didukung oleh alat-alat teknik modern dan persenjataan yang canggih. Mengapa alat-alat dan teknik yang modern serta persenjataan menjadi pengaruh negatif. Karena seringkali bagi Negara yang berkuasa, mereka menyalahgunakan teknologi tersebut, seperti halnya ilmu pengetahuan, mesin-mesin, pesawat hyper modern yang digunakan/dijadikan mekanisme operasionalistik yang menghancurkan.

Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia.

2. Posisi Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai salah satu media strategis dalam penciptaan sumber daya manusia berkualitas perlu kontekstual dan terefleksi perlunya format baru dalam rangka menyingkapi kondisi masyarakat yang harus direspon serius baik secara konseptual, strategis dan praktis.

Sejalan dengan itu, masalah pendidikan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan, karena pada kenyataannya merupakan faktor

penentu bagi perkembangan umat Islam. Kenyataan lain yang tidak dapat disangkal adalah bahwa komunitas muslim pada zaman modern ini masih mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan; dengan demikian, salah satu target yang harus diusahakan semaksimal mungkin adalah revitalisasi pelaksanaan pendidikan bagi umat Islam melalui cara-cara yang sesuai dengan dan motif ajaran Islam, sehingga tidak salah arah dengan pelaksanaan pendidikan ala Barat. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan Islam. (Isma'il Raji al-Faruqi and A.H Abu, 1989:17). Meminjam istilah al-Faruqi (1989:23): sangatlah penting "meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan orientasi keislaman anak didik dan tenaga pengajarnya..

Hal tersebut karena pendidikan Islam bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menempuh kesempurnaan insani dalam menghadapi masyarakat yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Swt. Adapun yang bertujuan jangka pendek diarahkan untuk lebih menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika melihat kondisi atau perubahan masyarakat kekinian. Seperti penyiapan tenaga-tenaga profesional, penciptaan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menjawab tantangan zaman yang membutuhkan sebuah jawaban solutif.

3. Fenomena Globalisasi Pendidikan Islam

Fenomena globalisasi memang tidak bisa dihindari lagi, karena kolonialisme berwajah baru tersebut tengah bersetubuh dengan berbagai sendi kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, budaya, tatanan sosial bahkan dalam aspek pendidikan. Dinamika masyarakat dari masyarakat industri menjadi masyarakat yang didominasi oleh informasi dan teknologi serta ilmu pengetahuan ini telah berlangsung dan proses transformasinya selalu meningkat, yang belum pernah ditemui dalam sejarah lintasan manusia di era sebelumnya. Dinamika tersebut menciptakan pergeseran paradigma dan perubahan tingkah laku manusia yang mencerminkan telah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*) dan nilai-nilai agama.

Dalam konteks ini globalisasi dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang saling terkait dan terjadi dalam struktur-struktur sistem kerja yang dibangun di atas mode-mode produksi kapitalis globalisasi. Ditandai dengan perkembangan arus informasi

yang begitu cepat dan tiada batas, kejadian yang terjadi dibelahan bumi mana pun dan kapanpun waktunya, dalam waktu yang bersamaan orang di seiuruh penjuru dunia mudah mengakses dan mengetahui segalanya. Di samping itu pesatnya teknologi menciptakan persaingan-persaingan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan negara yang satu dengan negara lainnya.

Fenomena tersebut perlu mendapatkan respon yang serius, karena di tengah masyarakat telah terjadi sebuah transaksi budaya, pemiliharaan, modal, dan lain-lain. Dari berbagai lintasan penjur; sehingga percaturan global tersebut menciptakan kondisi tatanan sosial masyarakat yang individualistik dan konsumeris, budaya hedonis, politik yang oportunis, ekonomi kapitalis dan yang lebih parah telah menjangkit pada persoalan pendidikan sehingga pendidikan lebih bersifat materialistik. Nilai-nilai pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan Islam semakin lama justru semakin larut ke dalam gegap gempita perubahan tersebut. Persoalan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana respon pendidikan Islam dalam menghadapi formasi sosial globalisasi yang kapitalistik tersebut, mencari format pendidikan Islam dalam perspektif formasi sosial globalisasi. Untuk menjawab pertanyaan utama dan sangat berat di atas perlu dipaparkan secara kritis fenomena pendidikan Islam dalam era globalisasi. Meskipun refleksi tentang situasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para pemerhati, praktisi, pengamat pendidikan selama ini merujuk pada persoalan klasik, di sini penulis mencoba untuk membuka tabir dan mengungkap kondisi nyata yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh pendidikan Islam, karena pendidikan Islam tidak seperti apa yang selama ini di labelkan, akan tetapi pendidikan Islam sesungguhnya lebih inklusif, selalu berhubungan dengan perubahan zaman, dan pada dasarnya pendidikan Islam lebih fleksibel (sesuai dengan tuntutan zaman).

Era globalisasi memprasyaratkan sebuah kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dari mumpuni untuk bermain dalam percaturan global tersebut. Untuk menuju ke sana usaha-usaha konseptual dan taktis tersebut perlu dikerjakan oleh para pemikir muslim, meskipun ini merupakan pekerjaan berat. Hal ini akan meliputi strategi perencanaan pendidikan, beserta lembaganya, sampai pada pelatihan-pelatihan jangka pendek untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang siap menghadapi era globalisasi, di semua jajaran dan tingkatan masyarakat (Qodri Azizi, 2003: 121)

B. Revitalisasi Peran Pendidikan

Pendidikan dalam pandangan klasik dikatakan sebagai institusi atau pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama; menyiapkan generasi anak manusia agar kelak dapat memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa datang. Kedua; mentransfer (memindahkan) pengetahuan, sikap dan kecakapan tertentu sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga; mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (*survive*) masyarakat dan peradaban. Pada butir kedua dan ketiga di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya *transfer of knowledges, attitudes and skills* tetapi juga sekaligus sebagai *transfer of value*.

Dalam perkembangan berikutnya, perluasan atau *ekstensifikasi* pengertian pendidikan sejalan dengan tuntutan masyarakat, maka lahir misalnya dua fungsi *suplementasi* yaitu melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, dan sekaligus sebagai agen pembaharuan. Di sini terlihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan perubahan. Dengan kata lain, fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya semakin menonjol, tetapi di sisi lain kurang (tidak) mampu mengatasi masa depan secara akurat dan memadai. Kritik terhadap pendidikan pada umumnya bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pendidikan yang mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Vembriarto (Syafi Ma'arif, 1991), berpendapat bahwa pendidikan setidaknya harus menjalankan empat macam fungsi, yaitu: Pertama, transmisi kultural; berupa pengetahuan, sikap, nilai dan norma. Kedua; memilih dan mengajarkan peranan sosial; (a) mengembangkan fasilitas untuk mengajarkan berbagai macam spekulasi, (b) mengusahakan agar jumlah manusia yang terlatih dan memiliki spesialisasi, sesuai dengan kebutuhan, dan (c) mengembangkan mekanisme untuk menyesuaikan talenta dan bakat anak didik dengan spesialisasi. Ketiga, menjamin integrasi social. Keempat, mengadakan inovasi-inovasi sosial.

Christoper J.Lucas (1979) mengemukakan, pendidikan seharusnya menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat

memberi informasi yang paling berharga mengenai pasangan hidup masa depan di dunia, serta membantu peserta didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghargai perubahan.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Harold G. Shane, (1995) menurutnya: (1) pendidikan adalah cara memperkenalkan peserta didik pada keputusan soal yang timbul, (2) pendidikan adalah cara menanggulangi masalah sosial tertentu, (3) pendidikan adalah cara menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru, dan (4) pendidikan adalah cara membimbing perkembangan untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan di masa mendatang.

Perubahan menuju masyarakat *madani* membutuhkan kemampuan personal yang berkualitas unggul serta profesional di bidangnya. Itulah sebabnya pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia ber-*akhlaqul karimah*, berpengatahuan luas serta memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Konsep ini memang tidak mudah dicapainya, tetapi perlu diupayakan, untuk itu diperlukan kemampuan melakukan perubahan dengan mendesain ulang konsep filosofis yang jelas dan baku, visi dan misinya, tujuan dan fungsi lembaga, kurikulum, materi dan proses pendidikannya agar memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menuju perubahan, pendidikan diupayakan sebisa mungkin tidak semata-mata bersifat konsumtif, dalam pengertian pemuasan secara langsung atas kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara saja, melainkan: (a) pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas iman yang aplikatif, (b) pendidikan sebagai proses pembebasan dan proses pencerdasan, (c) Pendidikan sebagai proses menjunjung hak-hak anak, (d) pendidikan sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, (e) pendidikan dapat menjadikan manusia demokratis dan membangun watak persatuan, dan (e) pendidikan dapat menghasilkan manusia cinta perdamaian dan peduli terhadap lingkungan.

Atas dasar tersebut pendidikan perlu diorientasikan pada pendidikan berwawasan kemanusiaan, dan pendidikan yang mendorong pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pertama, pendidikan berwawasan kemanusiaan; pendidikan mempunyai peran strategis bagi kehidupan manusia baik dalam konteks sosiologis maupun psikologis. Dengan konsep fitrah, Islam memandang pendidikan sebagai berikut: (a) pendidikan harus

diorientasikan pada upaya optimalisasi potensi dasar manusia secara keseluruhan. Artinya pendidikan tidak semata-mata diorientasikan pada upaya penumbuhan dan pengembangan manusia secara psikologi yang lebih menekankan pada upaya pengayaan secara material, seperti penekanan yang berlebihan pada aspek keterampilan, (2) implikasi tentang pandangan kemanusiaan tersebut mengharuskan tujuan pendidikan masa depan yang diarahkan pada pencapaian pertumbuhan kepribadian manusia secara seimbang. Pencapaian kepribadian yang seimbang sangat diperlukan agar prasarat manusia di masa depan dapat tercapai, dan (3) terletak pada muatan materi dan metodologi pendidikan; karena manusia diakui mempunyai banyak potensi dasar yang terangkum dalam fitrah, maka muatan materi pendidikan harus dapat melingkupi seluruh potensi itu.

Kedua; Pendidikan yang mendorong pada peningkatan sumber daya manusia (SDM): pendidikan dalam kerangka dimensi manusia seutuhnya (*insan kamil*) setidaknya harus menghasilkan dua kepastian yang strategis, yaitu melestarikan dan mengembangkan secara terus menerus nilai-nilai kehidupan sesuai dengan kodratnya, dan senantiasa menjaga keharmonisan untuk meraih kehidupan yang abadi dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan khalik-Nya.

Salah satu fungsi pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dalam rangka mewujudkan budaya kemanusiaan. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, tepatnya potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dimana diri mereka pada dasarnya siap menerima kondisi apapun yang ada di sekelilingnya dan mampu menghadapi tantangan seberat apapun.

Oleh karena itu, pendidikan tidak lain adalah untuk membentuk manusia *kamil* yang harus diarahkan pada dua dimensi, yaitu dimensi dialektikal horisontal dan dimensi ketundukan vertikal. Dimensi pertama pendidikan pada hakekatnya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan kongkrit; yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Pada dimensi ini manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia kongkritnya melalui sains dan teknologi.

Dimensi kedua adalah pendidikan sains dan teknologi; yaitu selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara serta

melestarikan sumber daya alami, juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan abadi dengan Yang Maha Pencipta.

1. Pendidikan dan Tantangan Kekinian

Sebagaimana yang kita saksikan, bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah perubahan terus menerus pada setiap lini kehidupan yang selanjutnya banyak menimbulkan pergeseran kultur maupun struktur di tengah masyarakat.

Usaha pembangunan yang terus menerus dipacu oleh pemerintah telah memberi nilai tersendiri bagi kemajuan bangsa setidaknya dalam bersaing dengan masyarakat global terutama di bidang budaya maupun pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi harus diakui adanya celah yang kurang kondusif bagi pengembangan sosial secara menyeluruh.

Diakui atau tidak, bahwa proses modernisasi dalam berbagai dimensi akan menimbulkan eksese sampingan bagi masyarakat terutama lahirnya kecenderungan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat *konsumtif*, *materialistik* dan *individualistik*. Hal tersebut terjadi dikarenakan masing-masing individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan riil sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di bawah ini merupakan eksese sampingan yang dialami oleh masyarakat yang sedang membangun: Pertama, berkembangnya *mass culture* karena pengaruh kemajuan mass media, sehingga kultur tidak lagi bersifat lokal melainkan bersifat nasional atau bahkan global. Hal ini akan berakibat meningkatnya heterogenitas nilai-nilai dalam masyarakat. Maka selain nilai-nilai agama yang diperlukan, masyarakat merasa perlu melengkapi dirinya dengan nilai-nilai lain yang datang dari sekitarnya, baik karena kesepakatan politik, ekonomi maupun budaya.

Kedua, menurunnya sikap-sikap fatalistik dan meningkatnya sifat-sifat yang lebih mengakui kebebasan bertindak menuju perubahan masa depan, dengan semakin dapat ditaklukkannya alam, masyarakat merasa lebih leluasa bahkan merasa lebih berkuasa.

Ketiga, masyarakat industri pada dasarnya dibangun atas proses yang rasional. Meskipun yang irrasional itu nampaknya tidak bisa hilang sama sekali dari kehidupan umat manusia, akan tetapi sebagian terbesar kehidupan semakin diatur oleh aturan-aturan yang rasional, ini berarti pula faham-faham keagamaan atau kepercayaan yang tidak dapat diterima rasio akan ditinggalkan.

Keempat, masyarakat industri juga akan ditandai oleh semakin meningkatnya sikap hidup materialistik. Setiap kemajuan harus dapat diukur dengan ukuran-ukuran ekonomi dan kebendaan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Jika setiap masyarakat menyenangi kenikmatan dunia itu bukan persoalan, karena sudah menjadi kenyataan sejarah sejak zaman dulu, akan tetapi jika semua orang sepakat bahwa ukuran keberhasilan hidup itu ialah kemajuan materi saja, justru hal yang demikian menentang terhadap eksistensi agama, sebab agama mengajarkan bahwa keberhasilan itu harus diukur dari dua aspek, yakni keberhasilan dibidang materi dan keberhasilan dibidang ibadah/keimanan. Kelima, masyarakat industri juga ditandai oleh maraknya urbanisasi yang pesat, hal ini dapat menimbulkan konsekwensi tersendiri terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang telama berlaku di masyarakat.

Jalaluddin Rahmat (1997) memberi ilustrasi bahwa pendidikan telah melahirkan para ahli di bidangnya, mereka bisa melahirkan teknologi nuklir yang dapat memberi sumber energi, ketika sumber energi lain mulai menyusut. Dunia kedokteran telah menggunakan teknologi nuklir, bukan saja untuk mendiagnosis penyakit melainkan juga untuk membunuh sel-sel kanker. *Pion cance therapy* misalnya, menggunakan tembakan partikel *pion* untuk membunuh tumor ganas. Tetapi, seperti yang kita ketahui, lebih dari 50.000 senjata nuklir yang ada di dunia sekarang ini memiliki daya penghancur jutaan kali bom yang jatuh di Hiroshima. Biologi dan kimia telah melahirkan teknologi yang mempertahankan struktur kehidupan modern, seperti purifikasi air, pembuangan sampah, imunisasi, peningkatan produksi pertanian, kesehatan, pengobatan, pengolahan dan penyimpanan makanan. Sekarang bioteknologi sudah sanggup dengan teknik pembelahan "gen" atau *recombinant DNA* menjadikan bakteri-bakteri semacam pabrik kimia yang menghasilkan insulin dan interferon. Insulin diperlukan oleh mereka yang menderita diabetes, dan interferon diperlukan oleh mereka yang mengidap penyakit kanker. Tetapi, kemajuan biokimia juga telah dipakai untuk mengembangkan senjata pemusnah massal bukan untuk memusnahkan hama penyakit akan tetapi juga untuk manusia .

Teknologi ruang angkasa telah melahirkan satelit yang dapat digunakan untuk navigasi, ramalan cuaca, monitor sumber daya

alam, menunjukkan masalah polusi, kegagalan panen, atau penyakit hewan. Pada saat yang sama lebih dari seribu delapan ratus satelit yang sekarang berada di ruang angkasa telah dipakai untuk tujuan-tujuan militer, di samping untuk menghancurkan sesama satelit sehingga ruang angkasa penuh dengan sampah-sampah radioaktif

Teknologi pengobatan lingkungan dapat dipakai untuk menyelamatkan suatu daerah dari bahaya banjir, mencegah desertifikasi (meluasnya gurun pasir), atau menyediakan air bagi daerah yang kekeringan. Namun, teknologi ini juga telah dapat digunakan untuk peperangan geofisik: menimbulkan kebakaran hutan, penyimpangan air sungai, gempa bumi, gelombang laut, atau ledakan vulkanis.

Revolusi teknologi juga telah menimbulkan saluran-saluran komunikasi yang baru. Radio dapat dikaitkan dengan pesawat telepon sehingga sinyal dapat dikirim ke kantor, rumah, mobil, atau ke *beeper portabel*, semacam telepon saku. Telepon dapat digunakan untuk telekonferensi, atau dikombinasikan dengan rekaman dan komputer guna menyebarkan informasi. Namun, secara diam-diam melebarnya perluasan dan intensitas jaringan-jaringan informasi juga bisa mendorong perilaku-perilaku negatif.

Akibat lain dari revolusi teknologi dan informasi tersebut adalah terjadinya revolusi sosial. Revolusi teknologi pada umumnya akan menempatkan negara-negara *superpower* pada kedudukan yang menguntungkan secara politis, ekonomis, dan kultural. Banyak negara-negara terbelakang akan memandang negara-negara Barat sebagai rujukan nilai, maka akan terjadi tidak saja ketergantungan politis dan ekonomis, tetapi juga kultural. Di sini nilai-nilai agama khususnya Islam akan banyak berbenturan dengan nilai-nilai Barat.

Karena adanya ekses sampingan yang kurang menguntungkan dari teknologi tersebut, kini timbul kesadaran betapa pentingnya memperhatikan etika dalam pengembangan teknologi. Di beberapa negara maju telah didirikan lembaga-lembaga “pengawal moral” untuk sains. Yang paling terkenal diantaranya ialah *The Institut of Society, Ethics and Life Sciences* di Hastings, New York. Berkaitan dengan berbagai problem sosial tersebut, maka perlu untuk direnungkan hal-hal berikut, bahwa pendidikan bukanlah sekadar

proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tapi sekaligus sebagai proses alih nilai-nilai kemanusiaan (*transfer of human values*), dengan tujuan menjadikan manusia yang bertakwa kepada kepada Allah. Inilah tujuan utama pendidikan.

2. Membangun Pendidikan Ideal

Dalam konteks “makro pendidikan”, pendidikan tidak hanya semata-mata diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan manusia yang secara filosofis lebih menekankan pada pencapaian secara material. Pendidikan bukan hanya diarahkan pada upaya pengayaan aspek mental spiritual dalam rangka mengejar tujuan normative, melainkan juga diarahkan untuk tercapainya manusia yang sempurna secara etik maupun moral serta mempunyai kepekaan susila. Jika tidak demikian, pendidikan akan terjebak pada pola yang bercorak dualisme dikotomik. Sementara dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan rekayasa *insaniyah* yang berjalan secara sistematis yang dikembangkan dalam rangka keutuhan manusia, sesuai dengan potensi fitrahnya. Maka muatan pendidikan yang hanya mementingkan salah satu aspek dari keduanya tidak akan mengantarkan manusia pada corak personalitas yang utuh.

Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pendidikan hendaknya serba meliputi. Sebagaimana yang terungkap dalam QS. Luqman (31: 1-34). Intinya, pendidikan hendaknya memberi penyadaran potensi fitrah keagamaan, menumbuhkan, mengelola dan membentuk wawasan (fitrah), akhlak serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal shaleh dalam rangka beribadah kepada Allah.

Dalam merumuskan hakekat pendidikan, A Malik Fadjar (1999) menawarkan “pendidikan idealistik”, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya kuat. Adapun pendidikan yang idealistik ini bisa dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pendidikan integralistik; yakni mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Tuhan, manusia dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu-sosial. Pendidikan yang integralsitik diharapkan bisa menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, yang bisa menyatu dengan dirinya sendiri (agar tidak memiliki kepribadian

belah), menyatu dengan masyarakatnya (agar bisa menghilangkan disintegrasi sosial), dan bisa menyatu dengan alam (agar tidak berbuat kerusakan).

Kedua, Pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai manusia; yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas antara hewan dan malaikat, ia menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang dan lain sebagainya. Pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembalikan hati manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk, *khaira ummah*. Manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan bisa berfikir, merasa dan berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan dan lain sebagainya.

Ketiga, Pendidikan yang pragmatik; adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, baik bersifat jasmani, seperti pangan, sandang, papan, sex, kendaran dan sebagainya; juga bersifat rohani, seperti berfikir, merasa, aktualisasi diri, kasih sayang dan keadilan maupun kebutuhan sukawi seperti dorongan untuk berhubungan dengan *Adikodrati*. Pendidikan yang pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

Keempat, Pendidikan yang berakar kuat, yakni pendidikan yang tidak meninggalkan aka-rakar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tertentu. Pendidikan yang berakar budaya kuat diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri dan membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri yang merupakan warisan monumental dari nenek moyangnya. Tetapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar.

Jika dirumuskan, maka proses pembentukan manusia seutuhnya (*insan kamil*), akan diwujudkan melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sains, teknologi dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan (*fitrah*) untuk membebaskan manusia dari belenggu kehidupan serta mendapatkan pemahaman hakiki tentang fenomena atau misteri di balik kehidupan nyata, guna memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Itulah pendidikan yang bermakna secara horisontal sekaligus vertikal yang akan menghasilkan manusia berkualitas iman kepada Allah, komitmen dengan ilmu pengetahuan serta senantiasa beramal shaleh.

Keseluruhan aspek yang tercakup dalam konfigurasi kesatuan iman, ilmu dan amal shaleh merupakan takaran bagi pembentukan kerangka ideal manusia yang bertaqwa kepada Allah, cerdas, kreatif. Yakni manusia yang berdaya cipta, bercita rasa, berjiwa karsa. Di dalam dirinya terdapat kesimbang dalam tiga aspek yaitu kognitif, efektif dan motorik yang diperlukan untuk memainkan peran pada zamannya. Itulah *blue print* manusia masa depan yang memiliki kualitas dzikir, fikir dan amal shaleh sekaligus.

C. Problem dan Masalah Pendidikan Islam Era Global

Saat ini masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya telah berada pada masa krisis, dimana mereka telah dihadapkan dengan suatu tatanan masyarakat baru dengan formasi kapitalis yang sering disebut dengan "globalisasi". Dalam sambutannya, Holger Borner (1999) (Direktur Freidrik Ebert Stiftung, Jerman), pada konferensi internasional tentangantisipasi kaum sosial demokrat terhadap masalah globalisasi pada tahun 1998, dijelaskan bahwa fenomena globalisasi telah memperlebar jurang ketidakadilan masyarakat.

Tindakan-tindakan politik harus difokuskan bagi penguatan dasar-dasar kohesi sosial. Bentuk-bentuk kerja sama dan solidaritas telah dicerai-beraikan; dan sekarang mengharuskan adanya upaya penegakan kembali bentuk-bentuk tersebut dengan lebih diperkuat. Dan kita harus memikirkan kembali hubungan pasar dan negara dalam level nasional dan internasional. Ketidakadilan pembangunan di berbagai bagian dunia mengharuskan adanya penghubung masalah-masalah politik dan ekonomi dengan kata lain masalah-masalah sosial global akan mengancam kita. (Anas Ma'ruf dan Anas, SA, 200:4).

Melihat kondisi seperti itu globalisasi selama ini telah disambut hangat oleh masyarakat dunia dan khususnya masyarakat Indonesia. Asumsi yang dibangun adalah: dengan adanya percaturan global akan memudahkan perkembangan perekonomian dan sebagai cara strategis untuk mensejahterakan rakyat. Dengan teknologi informasi dan transportasi yang canggih dihadapkan akan mempermudah proses menuju kesejahteraan dan keadilan bersama.

Implikasi mendasar sudah dirasakan bersama, ironisnya hanya sedikit orang yang benar-benar mengembangkan analisis bagaimana implikasi globalisasi terhadap kaum pinggiran. Sebaliknya justru di Indonesia terdapat reaksi yang gegap gempita menyambut globalisasi, baik dari pemerintah, pengusaha maupun media masa, seakan globalisasi adalah satu-satunya jalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang (Mansour Faqih, 1997:5). Dengan berbagai agenda acara penyiapan kualitas SDM untuk mengarungi perubahan ini.

1. Problematika

Dalam perspektif pendidikan, era globalisasi memiliki keterkaitan dengan pendidikan, karena globalisasi merupakan proses, dinamika, atau perkembangan masyarakat yang sebelumnya memang belum terjadi, yang menciptakan pola-pola baru dalam struktur sosial masyarakat. Baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan.

Pertama; Aspek Ekonomi' pada aspek ekonomi, pemusatan perekonomian pada pasar modal yang mengakibatkan negara-negara yang perekonomiannya sedang berkembang justru semakin terpuruk dan selalu tergantung pada negara-negara pemodal, karena percaturan global dan pasar yang menentukan. Sementara yang berperan dalam *free market* tersebut adalah kapitalis. Dalam aspek ekonomi terdapat jurang pemisah yang sangat jauh antara orang/negara yang memiliki modal banyak dan yang memiliki modal sedikit. Pemain utama dalam percaturan ini adalah kaum kapitalis yang beranggapan bahwa persaingan di pasar secara bebas akan mempercepat kemajuan perekonomian dan aspek kehidupan manusia yang lainnya tanpa memperhatikan proses penindasan yang telah berlangsung.

Kedua; Aspek Sosial Budaya, pada aspek sosial budaya, terlihat jelas bahwa pergeseran pola hidup masyarakat dewasa ini memiliki perubahan yang sangat signifikan. Nalar *individualisme* dan

persaingan antar individu semakin ditonjolkan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi masyarakat kekeringan akan nuansa kekeluargaan dan kebersamaan karena kontrol masyarakat semakin berkurang. Sedangkan dalam aspek budaya "*hedonisme*" dan "konsumerisme" menjadi *trend* masyarakat kekinian, karena dilancarkan oleh media masa dan canggihnya teknologi informasi, masyarakat cepat berubah. Hal ini dapat dikatakan bahwa inilah kehebatan globalisasi yang selama ini menindas, yang dalam bagian awal telah penulis singgung.

Ketiga; Aspek Politik, pada aspek politik *oportunistik*, politik yang akhirnya memikirkan kebutuhan sesaat dengan menghalalkan segala cara. Fenomena itu cenderung menjadi wajah baru perpolitikan global maupun nasional. Kepentingan politik global yang dengan segala cara telah melakukan proses marginalisasi terhadap budaya politik lokal. Karena pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan ekonomi politik global adalah pihak yang menguasai pasar (pemodal) sehingga mereka dengan sesukanya untuk menimbun kekayaan dan modal dengan cara menindas meskipun atas dalih kompetisi sehat di pasar.

Keempat; Aspek Pendidikan, aspek pendidikan adalah bagian dari investasi jangka panjang (*longterm investasion*) untuk penyiapan generasi bangsa yang tangguh sesuai dengan jati diri bangsa dan komitmen dengan amanat para *founding father* ternyata mengalami persoalan yang tidak kalah rumitnya. Pendidikan nasional atau lebih khusus dalam pendidikan Islam lebih berkaitan dengan pendidikan yang bersifat *materialistik & sekularistik*. Pendidikan yang *materialistik* adalah buah dari kehidupan *sekularistik* yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh. Yakni, seorang '*abidush shalih*'. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, paradigma pendidikan yang keliru. Dalam sistem kehidupan sekuler, asas penyelenggaraan pendidikan juga sekuler. Pendidikan yang ditetapkan juga adalah buah dari pihak sekularistik tadi, yakni membentuk manusia-manusia berpaham materialistik dan serba individual. *Kedua*, kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksanaan pendidikan, yakni (a) kelemahan lembaga pendidikan formal yang tercermin dari kacaunya kurikulum serta tidak fungsinya guru dan lingkungan sekolah/kampus sebagai medium pendidikan sebagaimana mestinya, (b) kehidupan keluarga yang tidak mendukung, dan (c) Keadaan masyarakat yang tidak kondusif. (Muhammad Ismail Yusanto, 2001: 11).

Secara umum keutamaan pendidikan Islam terletak pada dua hal, pertama pendidikan itu penting karena dilandasi nilai-nilai Islam akan menuntun umat Islam menuju ketakwaan secara total kepada Allah. Dengan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia. Tanpa melalui pendidikan yang tepat, situasi yang dikehendaki tidak akan pernah terwujud. Kedua, pendidikan Islam itu penting karena secara akademis pendidikan merupakan aktivitas intelektual sebagai sarana terwujudnya formulasi Islamisasi pengetahuan. Tanpa keterlibatan dan kontribusi lembaga pendidikan tinggi Islam lengkap dengan intelektual muslim didalamnya, islamisasi mungkin hanya omong kosong belaka.

Sebagai respon terhadap situasi dramatis tersebut, pernyataan Abdul Hamid A. Abu Sulayman (1993: 126), seorang aktivis proyek Islamisasi ilmu pengetahuan, tepat untuk dikemukakan, dalam pengertian bahwa pertama-tama sarjana-sarjana muslim harus mengarahkan energi reformatifnya terhadap ilmu ekonomi dan politik. Bentuk-bentuk yang seharusnya diperhatikan meliputi seminar, konferensi, pengembangan kurikulum, pusat studi, dan penelitian serta pembentukan jurusan-jurusan khusus.

Tantangan memiliki strategi untuk mendapatkan kembali pendidikan Islam dari *sekularisme* merupakan tanggung jawab cendekiawan Muslim baik secara individual maupun kolektif. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa "pendidikan Islam berada pada tataran keterpurukan meskipun kemajuan di bidang pendidikan sangat pesat." (Abdul Hamid Abu Sulayman, 1993:5-6)

Dalam konteks ini Rosnani Hashim (1997) memberikan gambaran, paling sedikit ada tiga aspek problematis pendidikan modern yang benar-benar substansial dan mendesak segera di 'Islam' kan. Pertama, aspek filosofis yakni visi atau pandangan dunia yang jelas-jelas sangat mempengaruhi hakikat dan tujuan pendidikan. Karena dipengaruhi visi *positivistis* dan *materialistis*, pendidikan dewasa ini cenderung membawa mentalitas palsu ke dalam umat Islam. Pada saat bersamaan, kekurangan visi melanda pengelola pendidikan. Keadaan ini mengarah kepada persoalan *dispirited ethic* yang tak terpecahkan dalam persaudaraan Islam. Akibatnya, tidaklah mengejutkan jika "generasi muda terdidik tidak berperilaku sesuai dengan norma masyarakat (Islam) yang diharapkan maupun dengan aspek kemanusiaan yang lazim dalam pengelolaan pendidikan. (Manzoor-ul-Haque, 1993: 35).

Kedua, bagi umat masyarakat menyangkut masalah keutamaan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, disatu pihak kita tidak dapat mengabaikan perlunya menyelamatkan pendidikan Islam dari ilmu pengetahuan Barat, modern dengan segala kekurangan integralitas dan spiritualitas di dalamnya, yang dalam pengertian total hanya merupakan sebuah produk pertimbangan akal kemanusiaan sekuler. Di lain pihak, penting juga kita mengevaluasi ulang ilmu pengetahuan tradisional dan agama, yang menolak sama sekali isu-isu ilmiah maupun kontemporer. Sejauh ini, kecenderungan-kecenderungan tersebut melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan di negara-negara Islam, pada gilirannya telah menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang *hipokrit* (munafik) di manapun.

Pendidikan Islam harus membekali dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang benar-benar Islami, relevan dengan sumber mutlaknya, yakni Allah. Dengan demikian, isi ilmu pengetahuan harus *genuine* dan nyata; sumber asalnya adalah Allah Yang Maha Tahu segala sesuatu.

Ketiga, isu metodologi. Tidak kalah penting. Pendidikan Islam di negara-negara Islam biasanya tidak memiliki kreativitas dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Masalah ini juga menyangkut kurangnya penyediaan buku teks yang berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan dalam pemahaman Islam. Meniru metodologi Barat, hampir semua kasus proses belajar mengajar sangat minim aspek etikanya. Ini disadari juga bahwa bentuk tradisional pembelajaran agama mewariskan penekanan berlebihan terhadap tradisi hafalan dibanding pemahaman. Dengan adanya dua kelemahan tersebut, di satu pihak pendidikan umum pada era modern telah gagal dalam menanamkan dimensi etis ke dalam sanubari peserta didik muslim, dan di lain pihak gagal mempromosikan cara berpikir progresif ke dalam proses penalaran mereka.

Cara lain mengidentifikasi problem pendidikan adalah dengan cara memilah-milah corak pendidikan Islam ke dalam dua sistem, yaitu studi agama dan studi Islam dan institusi pendidikan umat. Sistem pertama terutama di tingkat akademik, seperti yang terlihat di negara-negara Islam, mengkhususkan diri pada studi Islam untuk melahirkan sarjana di bidang studi Islam baik sebagai intelektual maupun sebagai *mufti* (orang yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa). Di negara seperti Indonesia, masalah studi Islam menjadi salah satu isu

paling penting yang mengundang pembicaraan hangat antar cendekia Muslimnya. Beberapa diantaranya berpendapat bahwa lembaga pendidikan Islam seperti IAIN/ UIN seharusnya melestarikan misi tradisional dengan penambahan inovasi seperlunya yang terbatas pada ruang lingkup instrumental. Beberapa cendekia lainnya mengusulkan perubahan model ilmu pengetahuannya sebagai respon terhadap tradisi Barat di bidang ini. Namun demikian, sebagian besar berpendapat bahwa IAIN/ UIN sebaiknya merubah ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan agar relevan dengan kebutuhan, bukan menginduk pada, tantangan modem yang sedang berlangsung. Dengan adanya perdebatan yang tak pernah berakhir itu, maka secara luas IAIN/ UIN dianggap berada di persimpangan jalan”

Sementara itu, pendidikan umat diartikan sebagai sebuah sistem dalam arti umum, yakni semua mata pelajaran diberikan secara mendasar sejak berada di sekolah dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Keberadaan *privatisasi* lembaga pendidikan sebagai wujud keterlibatan swasta dalam mengelola sektor pendidikan justru semakin menyengsarakan masyarakat. Efek secara langsung adalah pembengkakan biaya pendidikan, yang disebabkan karena subsidi dari pemerintah berkurang dan mengingat biaya operasional pendidikan semakin bertambah. Sehingga muncullah fenomena kapitalisme pendidikan, yang menjadikan pendidikan sebagai bisnis, mudah untuk mengeruk keuntungan dengan menaikkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik. Kondisi seperti ini justru akan menciptakan jurang pemisah yang sangat jauh antara orang kaya dan orang miskin atau orang-orang pinggiran. Akhirnya, berbagai macam problem yang melanda masyarakat Indonesia secara umum merupakan tantangan sendiri bagi pendidikan Islam.

Dalam era globalisasi ini pendidikan Islam dalam kondisi dilematis. Akan tetapi pendidikan Islam merupakan serangkaian proses yang memiliki konsep secara jelas tetap akan memberikan kontribusi positif dalam membantu memecahkan problem masyarakat. Dengan tetap berpegang teguh pada sumber pokok pendidikan Islam dan komitmen masyarakat muslim untuk tetap mempertahankan jati dirinya, untuk itu, langkah pendidikan Islam untuk reformulasi paradigma dan strategi menjadi sangat penting.

2. Masalah-Masalah Pendidikan Islam di Era Globalisasi

Dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual pendidikan.

a. Masalah Kualitas Pendidikan

Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu Negara, dari keunggulan komparatif (*Comperative advantage*) kepada keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas artinya dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat tinggi, karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat *cosmopolitantisme* dimana anak-anak bangsa boleh jadi akan memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri secara kompetitif *under-quality* (berkualitas rendah).

Indikator-indikator rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, salah satu indikator mutu pendidikan, yaitu Nilai Ebtanas Murni (NEM) masih jauh dibawah standar yang diinginkan. Indikator mutu pendidikan lainnya, juga terlihat dalam *Human Developmen Index* (HDI) yang dibublikasikan oleh *United Nation Developmen Programme* (UNDP), yang menempatkan Indonesia berada pada urutan ke 107 dari 177 negara-negara di dunia (*Human Developmen Report, 2008*). Peringkat Indonesia tersebut, ternyata masih dibawah Vietnam yang menempati urutan ke 105, (UNDP, 2008: 94).

b. Permasalahan Profesionalisme Guru

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan taknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan *variable* penting bagi keberhasilan pendidikan.

Menurut Suyanto (2008), “guru memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya”. Tetapi segera ditambahkan: “guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi, sehingga bisa “di ditiru”

Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sampingan, atau pekerjaan sebagai moon-lighter (usaha objek). Namun kenyataan dilapangan menunjukkan adanya guru terlebih terlebih guru honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui system seleksi profesi. Singkatnya di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat banyak, guru yang tidak profesioanal. Inilah salah satu permasalahan internal yang harus menjadi “pekerjaan rumah” bagi pendidikan nasional masa kini.

c. Masalah Kebudayaan (alkulturasi)

Kebudayaan yaitu suatu hasil budi daya manusia baik bersifat material maupun mental spiritual dari bangsa itu sendiri ataupun dari bangsa lain. Suatu perkembangan kebudayaan dalam abad moderen saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya proses alkulturasi yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Dari sinilah terdapat tantangan bagi pendidikan-pendidikan islam yaitu dengan adanya alkulturasi tersebut maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral dan akhlak anak. Oleh karena itu hal ini merupakan tantangan bagi pendidikan islam untuk memfilter budaya-budaya yang negatif yang diakibatkan oleh pengaruh budaya-budaya barat. (Arifin, 1994:42)

d. Permasalahan Strategi Pembelajaran

Menurut Suyanto (2008) era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada

guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan.

Dewasa ini terdapat tuntutan pergeseran paradigma pembelajaran dari model tradisional ke arah model baru, namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru:

Pertama, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa dampak positif dari kemajuan teknologi sampai kini, adalah bersifat fasilitatif (memudahkan). Teknologi menawarkan berbagai kesantiaian dan ketenangan yang semangkin beragam. Dampak negatif dari teknologi modern telah mulai menampakkan diri di depan mata kita, yang pada prinsipnya melemahkan daya mental-spiritual/jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilannya. Pengaruh negatif dari teknologi elektronik dan informatika dapat melemahkan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya seperti kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan (emosi) diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi-elektronis dan informatika seperti Komputer, foto copy dan sebagainya (Arifin,1991,hal: 9)

Alat-alat diatas dalam dunia pendidikan memang memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Misalnya pada pelajaran bahasa asing anak didik tidak lagi harus mencari terjemah kata-kata asing dari kamus, tapi sudah bisa lewat komputer penerjemah atau hanya mengcopy lewat internet. Nah dari sinilah nampak jelas bahwa pengaruh teknologi dan informasi memiliki dampak positif dan negatif; (a) tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam di antaranya, krisis moral. Melalui tayangan acara-acara di media elektronik dan media massa lainnya, yang menyuguhkan pergaulan bebas, sex bebas, konsumsi alkohol dan narkotika, perselingkuhan, pornografi, kekerasan, liar dan lain-lain. Hal ini akan berimbas pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, penjangbretan, pencopetan, penodongan, pembunuhan oleh pelajar, malas belajar dan tidak punya integritas dan krisis akhlaq lainnya, (b) dampak

negatif dari era globalisasi adalah krisis kepribadian. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di suatu negara yang menyuguhkan kemudahan, kenikmatan dan kemewahan akan menggoda kepribadian seseorang. Nilai kejujuran, kesederhanaan, kesopanan, kepedulian sosial akan terkikis . Untuk ini sangat mutlak diperlukan bekal pendidikan agama, agar kelak dewasa akan tidak menjadi manusia yang berkepribadian rendah, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme , melakukan kejahatan intelektual, merusak alam untuk kepentingan pribadi, menyerang kelompok yang tidak sepaham, percaya perdukunan, menjadi budak setan dan lain-lain. Faktor pendorong adanya tantangan di atas dikarenakan longgarnya pegangan terhadap agama dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh kepala rumah tangga yaitu dengan keteladanan dan pembiasaan, derasnya arus informasi budaya negatif global diantaranya, hedonisme, sekulerisme, pornografi dan lain-lain, Selain adanya hambatan akibat dampak negatif era global juga terdapat tantangan pendidikan agama Islam untuk membekali generasi muda mempunyai kesiapan dalam persaingan.

Kesiapan itu Deliar Noer (2002) memberikan ilustrasi ciri-ciri manusia yang hidup di jaman global adalah masyarakat informasi yang merupakan kelanjutan dari manusia modern dengan sifatnya yang rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif juga mampu bersaing serta menguasai berbagai metode dalam memecahkan masalah. Dengan demikian pendidikan agama Islam dituntut untuk mampu membekali peserta didik moral, kepribadian, kualitas dan kedewasaan hidup guna menjalani kehidupan bangsa yang multi cultural, yang sedang dilanda krisis ekonomi agar dapat hidup damai dalam komunitas dunia di era globalisasi.

Kedua; Cara pandang masyarakat terhadap pendidikan Islam. Kita sangat menyayangkan hingga kini lembaga-lembaga pendidikan Islam masih sulit dijadikan model lembaga pendidikan yang paripurna dan berlaku umum di Indonesia. Hal ini disebabkan lemahnya kinerja yang ditunjukkan serta rendahnya motivasi untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam ini sebagai "kawah candradimuka" para intelektual yang agamis dan para ulama yang intelektual. Kurangnya kesungguhan penyelenggara pendidikan Islam dalam mengelola lembaga pendidikan Islam seperti madrasah

dan sekolah berbasis keislaman disinyalir karena kesadaran umat Islam atas kewajiban menuntut ilmu masih rendah. Gejala rendahnya budaya membaca, belajar dan bekerja keras menunjukkan bahwa pemahaman umat Islam tentang nilai-nilai Islam belum merata dan menjadi hambatan untuk maju berprestasi. Pengelola merupakan pencerminan dari kondisi umat islam yang tidak terlepas dari hambatan kultural internal tersebut.

Pengelola belum mampu bangkit menjadi "agent of change", para pembaharu perilaku dan budaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bentuk ketauhidan social seperti menegakkan disiplin sekolah secara ajeg dan konsisten, menyebarkan budaya membaca dan bekerja keras serta nilai-nilai social keislaman lainnya. Kondisi internal umat Islam yang masih lemah untuk menanam-suburkan nilai-nilai Islam itu oleh para penyelenggara dan pengelola pendidikan Islam, pada akhirnya berpengaruh juga pada persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Fenomena kondisi cultural umat Islam yang menyelenggarakan pendidikan Islam merupakan aspek internal yang saling kait mengkait dengan persepsi umat Islam di luar lembaga tersebut. Sehingga kedua-duanya (kultural internal dan eksternal) menjadi hambatan bagi kemajuan dan pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan Islam. Persepsi masyarakat sudah terlanjur terpengaruh dengan paradigm bahwa pendidikan Islam hanya berkutat pada masalah agama dan kurang menaruh perhatian pada pengembangan aspek-aspek lainnya seperti kecerdasan intelektual dan sosial.

D. Respon Pendidikan Islam di Era Globalisasi

1. Konseptual

Jawaban persoalan ini adalah pendidikan Islam secara konseptual dan secara realitas selalu aktif dan mendapatkan posisi yang strategic dalam percaturan masyarakat global beserta segala persoalan yang melingkupinya. Sebab perkembangan pendidikan Islam sesungguhnya memiliki potensi fleksibilitas dan relevansi sesuai dengan tuntutan zaman. Memang perlu diakui globalisasi yang telah membawa kemakmuran ekonomi dan kemajuan iptek, telah membawa dampak krisis spiritual dan kepribadian, sehingga lebih memunculkan kesenjangan dan kekerasan sosial, ketidakadilan, dan demokrasi (Husni Rahim,2001:129).

Dari sini tampak bahwa pendidikan Islam memiliki ruang dalam aspek spiritualitas, karena kondisi masyarakat global yang memiliki kecenderungan melalaikan aspek spiritualkeagamaan, mereka lebih bersifat sekuler, sehingga secara manusiawi akan terasing dalam dunianya sendiri. Berdasarkan pandangan di atas, pendidikan Islam secara tegas memiliki tujuan tidak hanya mengurus persoalan *pro-fan* atau keduniawian akan tetapi, pendidikan Islam juga memperhatikan nuansa agamis (*religiusitas*) yang sejak dini ditanamkan pada peserta didik.

Di samping itu, gelombang globalisasi telah mengantarkan kehidupan kosmopolitan di antara berbagai bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, dan pluralitas. Ini berarti bahwa pendidikan mestilah harus berpijak pada pilar *learning to life together*. Untuk mendukung yang terakhir ini nilai-nilai kemanusiaan. universal, budaya, moral, dan agarna perlu diberdayakan, agar pendidikan menjadi *humanistik* (Abd. Assegaf, 2004:9). Pendidikan Islam selama ini selalu konsisten dalam aspek humanistik, bahkan pendidikan Islam meletakkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi pilar utama dalam menentukan paradigma dan strategisnya. Karena adanya sebuah persaingan yang ketat antara berbagai komponen dalam percaturan pasar bebas (*free market*), maka dibutuhkan persaingan yang sehat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Selanjutnya Assegaf, (2004) menjelaskan bahwa dalam era globalisasi ini pendidikan Islam tidak perlu membuka atau menutup diri terhadap turbulansi arus global, mengingat keduanya mengundang konsekuensi tersendiri, melainkan menjalankan prinsip *al-muhafadhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al jaded al-ashlah*. Sains dan teknologi modern merupakan perkara baru (*aljadid*) yang netral *values*, bilamana diambil oleh pendidikan yang Islami, menjadi *value bond*, akan menghasilkan sains dan teknologi yang semula netral akan berisi dengan nilai-nilai agama. Akibatnya produk teknologi yang dihasilkan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, negara tertentu, atau efek negatif berupa kerusakan yang timbul darinya.

Pendidikan Islam harus senantiasa responsif dengan perkembangan teknologi yang dilancarkan oleh globalisasi. Seperti media masa baik cetak maupun elektronik, telah mempengaruhi secara

mendasar pola pikir dan konstruksi karakter masyarakat terutama anak.

Untuk menghadapi tantangan tersebut menurut Qodri Azizi (2003:21), seharusnya masyarakat muslim memiliki landasan. Yaitu ajaran agama, Islam. Dalam waktu bersamaan, untuk menghadapi tantangan, perlu juga memiliki landasan motivasi, inspirasi dan akidah. Umat Islam perlu memperkuat dan mempertegas landasan hidup agar mampu menjawab tantangan. Dalam konteks pendidikan Islam untuk merespon berbagai tantangan yang sekaligus peluang tersebut, pendidikan Islam memerlukan sebuah paradigma yang jelas, baik secara konseptual atau pun pelaksanaan praktis di lapangan. Untuk merealisasikan idealitas tersebut dibutuhkan kerja sama dan sinergitas antara seluruh komponen pendidikan Islam, sehingga dalam menghadapi arus globalisasi pendidikan Islam akan tetap memberikan respon positif dan tetap selalu mempertahankan karakter yang dinilainya dalam rangka membantu memberikan kontribusi penyelesaian problem yang dihadapi masyarakat global.

Di samping itu agar pendidikan Islam tidak terjebak pada sikap menutup atau eksklusif yang berakibat ketinggalan zaman, atau membuka diri dengan risiko kehilangan jati diri atau kepribadian, maka pendidikan Islam harus kembali ke dasar, *back to basic*, yakni al-Quran dan al-Hadis, sebagai identitas "lokal" dengan tetap mengambil perkara yang baru (*al jadid*) yang lebih baik dalam sains dan teknologi, sehingga pendidikan Islam berwawasan terbuka, inklusif dan global (*act locally think globally*). (Abd. Assegaf, 2004:7).

Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan Islam telah mengundang para cendekia untuk memberikan kontribusi pemikirannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa diantaranya, seperti Hossein Nasr, Fazlur Rahman, dan Naguib al-Attas, telah menulis karya tulis khusus tentang pendidikan. Contoh menarik tentang seorang cendekia yang telah mencoba membahas soal pendidikan secara tidak langsung adalah sosok Ismail Raji Al-Faruqi yang sekalipun komentar-komentarnya dan artikel singkatnya tentang pendidikan telah tersebar luas. Al-Faruqi adalah figur yang sangat berpengaruh di kawasan Amerika Utara (pernah menjabat sebagai ketua Department of Islamic Studies, Temple University) dan kawasan Pakistan. Pemikiran dan pemahamannya tentang pendidikan Islam dapat dilihat dalam buku dan tulisan-tulisan ilmiahnya.

Karena tingginya komitmen mereka terhadap Islam, maka terlihat jelas aktivitas pendidikannya merepresentasikan ide-idenya tentang masalah tersebut. Sebagaimana diuraikan diatas, problematika pendidikan Islam terletak antara lain pada kurangnya visi yang secara mendasar bersifat filosofis. Dalam hal ini konsep al-Faruqi tentang *tauhid*, ke Esaan Tuhan, benar-benar luar biasa karena telah meletakkan dasar kepada prinsip-prinsip bidang ilmu lainnya seperti sejarah, Ilmu pengetahuan, metafisika, etika, susunan masyarakat, kehidupan keluarga, politik, ekonomi, tata aturan dunia dan estetika. Meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan implikasi tauhid bagi pendidikan, dari pemahamannya tentang tauhid secara logis kita dapat menyimpulkan beberapa prinsip yang harus ada dalam visi pendidikan Islam bagi umat di era modern.

2. Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global

Pencarian format pendidikan Islam yang ideal sesuai dengan konteks sekarang, tentunya tidak terlepas dari kondisi empirik pendidikan di Indonesia, karena perjalanan pendidikan Islam di Indonesia memiliki keterkaitan yang mendasar terhadap pendidikan di Indonesia. Tonggak-tonggak perjalanan panjang upaya pencerdasan kehidupan bangsa itu merupakan modal dasar bangsa untuk menghadapi tantangan internal dan tantangan global yang cenderung semakin kompleks, terutama masa transisi memasuki era millenium ketiga.

Tantangan yang dihadapi saat ini dan masa datang sesungguhnya bersumber dari dua akar permasalahan. *Pertama*, sejak 32 tahun terakhir ini kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia diatur secara terpusat. Penyeragaman pengelolaan pendidikan dilakukan sehingga anak didik tercabut dari akar budayanya, lingkungan fisik dan sosialnya. Akibat penyeragaman ini, pendidikan menjadi tidak fungsional dan jauh dari situasi nyata yang dihadapi anak didik. Penekanan berlebihan akhirnya diarahkan pada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi-dimensi lain. Akibatnya lahirlah manusia Indonesia dengan kepribadian pecah.

Kedua, dalam era orde baru, di berbagai periode kabinet pembangunan, sejak periode Soemantri Bodjonegoro, Syarief Thayeb, Daud Yoesoef, Nugroho Notosusanto, Fuad Hasan, Wardjiman Djodjonegoro, sampai Wiranto Arismunandar, yang memiliki masa kementerian tersingkat hingga saat ini, sampai menteri pendidikan era

reformasi, masing-masing telah memberikan warna perkembangan pendidikan Islam dengan gagasan yang inovatif dan strategis. Masing-masing menteri pendidikan dan kebudayaan (sekarang menteri pendidikan nasional) telah memberi perkembangan pendidikan di Indonesia dengan gagasan inovatif, namun gagasan inovatif tersebut terkesan sporadik dan temporer. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan hanya sebatas masa jabatan menteri yang bersangkutan (TIM Nasional PRPSDM, 2001: xiv-xv).

Berdasarkan fakta di atas, sebagai bagian dari reformasi total, pendidikan juga harus melakukan sebuah reformasi, untuk terciptanya masyarakat madani dan sistem pendidikan yang benar-benar menampung segala kebutuhan masyarakat dalam konteks zamannya sekarang baik secara teoritis maupun praktis. Atas problem dan tantangan pendidikan nasional di atas, pendidikan Islam secara tidak langsung telah dipengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan Islam justru tidak memiliki orientasi yang jelas karena disebabkan oleh kebijakan-kebijakan menteri pendidikan yang tidak kontinyu. Di samping itu juga problem klasik dalam dunia pendidikan Islam sebagaimana penulis jelaskan pada subbab awal, seperti problem pengelompokan ilmu agama dan umum, sehingga pemberian pelajaran ilmu agama di sekolah pun sangat minim.

Untuk lepas dari keterpurukan ini, maka sangat mendesak untuk membekali umat dengan visi-visi yang secara komprehensif berdasarkan sumber utama ajaran Islam, sebagaimana difirmankan dalam al-Quran bahwa "Allah adalah teman bagi Orang-orang beriman, dan Dia membimbing mereka keluar dari kegelapan," pendidikan adalah proses yang mengarahkan untuk umat manusia, sebagai peserta didik, keluar jauh dari buruknya kebodohan menuju cahaya penceraha (MA. Kaji 1992: 7). Secara prinsip, hal itu berarti Islam menempatkan Tuhan sebagai sumber pendidikan yang utama dan mutlak. Pendidikan Islam, tidak seperti perspektif sekuler, seharusnya bukan semata-mata sebuah proses belajar-mengajar tanpa dikaitkan dengan Allah, tetapi juga sebuah proses terpadu yang disertai kesadaran akan kehadiran Tuhan, karena Islam menggolongkan pendidikan sebagai tugas suci maupun penyerahan diri terhadap Allah (ibadah). Untuk itulah, pendidikan Islam harus menanamkan benih keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam ke dalam mentalitas dasar peserta didik. Keteguhan hati tersebut memotivasi umat untuk mengaktualisasikan imannya kepada

Allah dalam situasi dan kondisi apapun, bukan perkembangan yang didominasi Barat. Jadi, benarlah bahwa keadaan tersebut, *bi'ah* (lingkungan), adalah faktor keberhasilan pendidikan, namun demikian tetaplah keteguhan hati yang didasarkan pada kecintaan pada Islam lebih penting, yang membawa semangat belajar kedalam hati setiap umat. Misalnya, dalam kehidupan sahabat-sahabat besar, sekalipun situasi pada saat itu dikuasai kaum jahiliyah, mereka tetap mengembangkan diri dengan penuh kecintaan kepada Islam dan menjadi Muslim sejati. Dalam hal ini, visi pendidikan Islam tentu tidak diarahkan oleh *pragmatisme*, namun oleh keteguhan hati dan cinta terhadap Allah" (Afandi Muchtar, 2005:236).

Hal penting lainnya adalah bahwa pendidikan Islam, pada prinsipnya, dimaksudkan bagi tercapainya pengembangan diri dari hakikat umat manusia. Ini tidaklah berarti bahwa Islam mengabaikan aspek-aspek materi dan fisik kehidupan, karena yang terkandung sangat ditentukan oleh din pribadinya. Penulis yakin, target pendidikan lainnya dapat dicari secara tepat setelah *nafs* benar-benar telah dikembangkan. Untuk mengembangkan *nafs*, pendidikan harus membekali peserta didiknya dengan pelajaran-pelajaran agama, etika, hukum, sejarah, dan peradaban Islam. Tanpa menafikan materi pelajaran teknis, pengajaran seperti di atas diharapkan mampu menanamkan benih iwan (percaya pada Tuhan) dalam hati atau diri peserta didik. Masalah ini sangat penting sehingga pendidikan bukan semata-mata tugas para guru dan pihak sekolah. Para orang tua maupun umat secara keseluruhan tidak bisa lari dari tanggung jawab untuk melatih mereka dalam semua aspek ajaran Islam sampai mendapatkan kematangan diri.

Sebagai upaya reformulasi pendidikan Islam dalam perspektif global tersebut, pendidikan Islam tetap harus berpijak dari sumber utama pendidikan Islam itu sendiri, yakni al-Quran dan hadits. Di samping itu, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia pijakan utama selain yang pertama tadi adalah amanat para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara historis dapat disebut sebagai *Indonesia Declaration Independence* menunjukkan dengan tegas pengukuhan keyakinan bangsa Indonesia (kemerdekaan adalah hak semua bangsa), visi kesejarahan (negara adalah hasil perjuangan bangsa), landasan fundamental kenegaraan (Pancasila), dan alasan ideologis berdirinya negara Indonesia yang merdeka.

Alasan negara didirikan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan itu adalah untuk: mempertahankan bangsa dan tanah air; meningkatkan kesejahteraan rakyat; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta dalam penciptaan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Konsep pencerdasan bangsa harus dilaksanakan secara terus menerus dan dijadikan landasan utama dalam segala upaya untuk mencerdaskan rakyat, dengan konteks masyarakat dan zamannya. Maka terciptanya sebuah masyarakat yang cerdas dan berkeadilan memang suatu proses yang panjang dan berkesinambungan, sehingga tonggak-tonggak awal harus senantiasa kita lanjutkan sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita yang telah digariskan.

A. Penutup

Dampak globalisasi telah meranggas ke seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya pada aspek berikut ini:

pertama, pada aspek ekonomi, pemusatan perekonomian pada pasar modal yang mengakibatkan negara-negara berkembang justru semakin terpuruk dan selalu tergantung pada negara-negara pemodal, karena percaturan global dan pasar yang menentukan.

Kedua, pada aspek sosial budaya, terlihat jelas bahwa pergeseran pola hidup masyarakat dewasa ini memiliki perubahan yang sangat signifikan. Nalar individualisme dan persaingan antar individu semakin ditonjolkan.

Ketiga, pada aspek politik *oportunistik*, politik yang hanya memikirkan kebutuhan sesaat dengan menghalalkan segala cara. Fenomena itu cenderung menjadi wajah barn perpolitikan global maupun nasional.

Keempat, aspek pendidikan adalah bagian dari investasi jangka panjang (*long term investasion*) untuk penyiapan generasi bangsa yang tangguh sesuai dengan jati din bangsa & komitmen dengan amanat para *founding father* ternyata mengalami persoalan yang tidak kalah rumitnya. Pendidikan nasional atau lebih khusus dalam pendidikan Islam lebih berkait dengan pendidikan yang bersifat *materialistik* dan *sekularistik*. Pendidikan yang *materialistik* adalah bush dari kehidupan *sekularistik* yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh.***

RANGKUMAN

Globalisasi dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang saling terkait dan terjadi dalam struktur-struktur sistem kerja yang dibangun di atas mode-mode produksi kapitalis globalisasi. Ditandai dengan perkembangan arus informasi yang begitu cepat dan tiada batas, kejadian yang terjadi di belahan bumi mana pun dan kapan pun waktunya, dalam waktu yang bersamaan orang di seluruh penjuru dunia mudah mengakses dan mengetahui segalanya. Di samping itu pesatnya teknologi menciptakan persaingan-persaingan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan negara yang satu dengan negara lainnya.

Fenomena tersebut perlu mendapatkan respon yang serius, karena di tengah masyarakat telah terjadi sebuah transaksi budaya, pemiliharaan, modal, dan lain-lain. Dari berbagai lintasan penjuru; sehingga percaturan global tersebut menciptakan kondisi tatanan sosial masyarakat yang individualistik dan konsumeris, budaya hedonis, politik yang oportunis, ekonomi kapitalis dan yang lebih parah telah menjangkit pada persoalan pendidikan sehingga pendidikan lebih bersifat materialistik. Nilai-nilai pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan Islam semakin lama justru semakin larut ke dalam gegap gempita perubahan tersebut. Persoalan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana respon pendidikan Islam dalam menghadapi formasi sosial globalisasi yang kapitalistik tersebut, mencari format pendidikan Islam dalam perspektif formasi sosial globalisasi. Untuk menjawab pertanyaan utama dan sangat berat di atas perlu dipaparkan secara kritis fenomena pendidikan Islam dalam era globalisasi. Meskipun refleksi tentang situasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para pemerhati, praktisi, pengamat pendidikan selama ini tnerujuk pada persoalan klasik, di sini penulis mencoba untuk membuka tabir dan mengungkap kondisi nyata yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh pendidikan Islam, karena pendidikan Islam tidak seperti apa yang selama ini di labelkan (*eksIdusit*), akan tetapi pendidikan Islam sesungguhnya lebih inklusif, selalu berhubungan dengan perubahan zaman, dan pada dasarnya pendidikan Islam lebih fleksibel (sesuai dengan tuntutan zaman). Dengan demikian era globalisasi memprasyaratkan sebuah kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan murni untuk bermain dalam percaturan global tersebut. Untuk menuju ke sana usaha-usaha konseptual dan taktis tersebut perlu dikerjakan oleh para pemikir muslim, meskipun ini merupakan pekerjaan berat. Hal ini akan meliputi strategi

perencanaan pendidikan, beserta lembaganya, sampai pada pelatihan-pelatihan jangka pendek untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang siap menghadapi era globalisasi, di semua jajaran dan tingkatan masyarakat.

Pendidikan dalam pandangan klasik dikatakan sebagai institusi atau pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. *Pertama*; menyiapkan generasi anak manusia agar kelak dapat memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa datang. *Kedua*; mentransfer (memindahkan) pengetahuan, sikap dan kecakapan tertentu sesuai dengan peranan yang diharapkan. *Ketiga*; mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (*survive*) masyarakat dan peradaban. Pada butir kedua dan ketiga di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya *transfer of knowledges, attitudes and skills* tetapi juga sekaligus sebagai *transfer of value*.

Dalam perkembangan berikutnya, perluasan atau *ekstensifikasi* pengertian pendidikan sejalan dengan tuntutan masyarakat, maka lahir misalnya dua fungsi *suplementasi* yaitu melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, dan sekaligus sebagai agen pembaharuan. Di sini terlihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan perubahan. Dengan kata lain, fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya semakin menonjol, tetapi di sisi lain kurang (tidak) mampu mengatasi masa depan secara akurat dan memadai. Kritik terhadap pendidikan pada umumnya bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pendidikan yang mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam era globalisasi ini pendidikan Islam dalam kondisi dilematis. Akan tetapi pendidikan Islam merupakan serangkaian proses yang memiliki konsep secara jelas tetap akan memberikan kontribusi positif dalam membantu memecahkan problem masyarakat. Dengan tetap berpegang teguh pada sumber pokok pendidikan Islam dan komitmen masyarakat muslim untuk tetap mempertahankan jati dirinya, untuk itu, langkah pendidikan Islam untuk reformulasi paradigma dan strategi menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafidz, Muhammad Nur, 1997, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*. Bandung: Al-Bayan,
- Al-Attas, Syed M. Naquib, 2003, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Faruqi, Ismaili Raji, (1988). "Islamization of Knowledge: Problems, Principles, and Prospective," in *Islam: Source and Purpose of Knowledge*, Herndon: IIIT,.
- Al-Qur'an dan Tarjamahnya, 2005, Depag, Jakarta.
- An-Nahlawi. Abdurrahman, 1995, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, H.M. (1991) *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (1994) *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Assegaf, Abd. Rahman (2004), *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azizi, Qodri, (2003) *Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmaningtyas, 2005, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Daud Ali, Muhammad, 1999, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud Ibrahim, Marwah, 1994, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi (Wacana Peradaban dengan Visi Islami)*, Mizan, Bandung.
- Dhalimunthe Fahrur Razy. (1999). *Kapita Selekta Pendidikan*. Medan: IAIN Pres, ,
- F. O'neil, William, (2001), *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta.: Pustaka Pelajar,
- Fadjar, Malik, (1955) *Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995, (tidak diterbitkan).
- _____, (1999,) *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia.
- Faqih, Mansour (1997). *Islam, Globalisasi dan Nasib Kaum Marginal*, Jurnal Ulurnul Quran, No. 6/VII/1997.
- Freire, Paulo, (1999) *Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebsan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

- Hasan Langulungan, (1999). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husni.
- Ismail, (ed), (2000), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Latif, Yudi, 2005, *Inteligensia Muslim dan Kuasa (Geneologi Intelgensia Muslim Indonesia Abad ke 20)*, Bandung: Mizan,
- Ma'arif, Syafii, A., dkk, (1991), *Pendidikan Islam di Indonesia (Antara Cita dan Fakta)*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Madjid, Nurcholish, (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina,
- Ma'ruf, Anas dan Anas (2000). *Shaping Globalization; Jawaban Kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*. Yogyakarta: Jendela.
- Muchtar, Afandi, (2005) "*Pendidikan Islam: Makna, Problem dan Solusi*", dalam *Hannoni Kehidupan Beragama*, Jakarta: Oasis publisher.
- Muhammad, Omar, (1979) *Falsafah Pendidikan Islam*", Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukti, Abdul, 2000, (editor), *Pendidikan, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Nata, Abuddin, 2000, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Rahim, Husni (2001) *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,
- Rahmat, Jalaluddin, 1997, *Catatan Kang Jalal (Visi Media, Politik dan Pendidikan*. Bandung: Mizan,
- Shihab, Quraisy, 1996, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Mizan, Bandung.
- Soebahar, Abd. Halim, 2002, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia,
- Sulayman, Abdul Hamid Abu (1993), *Crisis in Muslim Mind*, Terj. Yusuf Talal DeLorenzo, Herndon, Virginia: IIIT.
- Syafaruddin, (1999). *Kapita Selektta Pendidikan*. Medan: IAIN Pres,
- Tafsir, Ahmad, 1994, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yusanto, Muhammad Ismail (2001). *Menggagas Kembali Konsep System Pendidikan Islam*, (makalah), disampaikan dalam Stadium Geeral Magister Studi Islam UT' Yogyakarta, tanggal 8 September 2001.

BAB 3.....	45
TANTANGAN PENDIDIKAN MASA KINI DALAM PERPEKTIF ISLAM DI ERA GLOBALISASI	45
Tujuan Pembelajaran:	45
Setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu untuk:	45
▪ Memahami Globalisasi	45
▪ Memakami Revitalisasi Peran Pendidikan	45
▪ Memakami Masalah-Masalah Pendidikan Islam di Era Globalisasi	45
A. Memahami Makna Globalisasi	47
1. Pengertian Globalisasi	47
2. Posisi Pendidikan Islam	47
3. Fenomena Globalisasi Pendidikan Islam	48
B. Revitalisasi Peran Pendidikan.....	50
1. Pendidikan dan Tantangan Kekinian.....	53
2. Membangun Pendidikan Ideal.....	56
C. Problem dan Masalah Pendidikan Islam Era Global.....	58
1. Problematika.....	59
2. Masalah-Masalah Pendidikan Islam di Era Globalisasi... 	64
D. Respon Pendidikan Islam di Era Globalisasi	68
1. Konseptual.....	68
2. Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global.....	71
A. Penutup	74
RANGKUMAN.....	75

BAB 4

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA GLOBALISASI

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu untuk:

- **Posisi Pendidikan Islam**
- **Problem Pendidikan Islam Era Global**
- **Respon Pendidikan Islam terhadap Globalisasi**
- **Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global**



fenomena globalisasi memang tidak bisa dihindari lagi, karena kolonialisme berwajah baru tersebut tengah bersetubuh dengan berbagai sendi kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, budaya, tatanan sosial bahkan dalam aspek pendidikan. Dinamika masyarakat dari masyarakat industri menjadi masyarakat yang didominasi oleh informasi dan teknologi serta ilmu pengetahuan ini telah berlangsung dan proses transformasinya selalu meningkat, yang belum pernah ditemui dalam sejarah lintasan manusia di era sebelumnya. Dinamika tersebut menciptakan pergeseran paradigma dan perubahan tingkah laku manusia yang mencerminkan telah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*) dan nilai-nilai agama.

Dalam konteks ini globalisasi dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang saling terkait dan terjadi dalam struktur-struktur sistem kerja yang dibangun di atas mode-mode produksi kapitalis globalisasi. Ditandai dengan perkembangan arus informasi yang begitu cepat dan tiada batas, kejadian yang terjadi di belahan bumi mana pun dan kapan pun waktunya, dalam waktu yang bersamaan orang di seluruh penjuru dunia mudah mengakses dan mengetahui segalanya. Di samping itu pesatnya teknologi menciptakan persaingan-persaingan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan negara yang satu dengan negara lainnya.

Fenomena tersebut perlu mendapatkan respon yang serius, karena di tengah masyarakat telah terjadi sebuah transaksi budaya, pemiliharaan, modal, dan lain-lain. Dari berbagai lintasan penjuru; sehingga percaturan global tersebut menciptakan kondisi tatanan sosial masyarakat yang individualistik dan konsumeris, budaya hedonis, politik yang oportunis, ekonomi kapitalis dan yang lebih parah telah menjangkit pada persoalan pendidikan sehingga pendidikan lebih bersifat materialistik. Nilai-nilai pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan Islam semakin lama justru semakin larut ke dalam gegap gempita perubahan tersebut. Persoalan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana respon pendidikan Islam dalam menghadapi formasi sosial globalisasi yang kapitalistik tersebut, mencari format pendidikan Islam dalam perspektif formasi sosial globalisasi. Untuk menjawab pertanyaan utama dan sangat berat di atas perlu dipaparkan secara kritis fenomena pendidikan Islam dalam era globalisasi. Meskipun refleksi tentang situasi pendidikan Islam yang

dilakukan oleh para pemerhati, praktisi, pengamat pendidikan selama ini tnerujuk pada persoalan klasik, di sini penulis mencoba untuk membuka tabir dan mengungkap kondisi nyata yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh pendidikan Islam, karena pendidikan Islam tidak seperti apa yang selama ini di labelkan (*eksIdusit*), akan tetapi pendidikan Islam sesungguhnya lebih inklusif, selalu berhubungan dengan perubahan zaman, dan pada dasarnya pendidikan Islam lebih fleksibel (sesuai dengan tuntutan zaman).

Era globalisasi memprasyaratkan sebuah kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan murni untuk bermain dalam percaturan global tersebut. Untuk menuju ke sana usaha-usaha konseptual dan taktis tersebut perlu dikerjakan oleh para pemikir muslim, meskipun ini merupakan pekerjaan berat. Hal ini akan meliputi strategi perencanaan pendidikan, beserta lembaganya, sampai pada pelatihan-pelatihan jangka pendek untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang siap menghadapi era globalisasi, di semua jajaran dan tingkatan masyarakat.¹(Qodri Azizi, 2003:121)

A. Posisi Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai salah satu media strategis dalam penciptaan sumber daya manusia berkualitas perlu kontekstual dan terefleksi perlunya format baru dalam rangka menyingkapi kondisi masyarakat yang harus direspon serius baik secara konseptual, strategis dan praktis.

Sejalan dengan itu, masalah pendidikan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan, karena pada kenyataannya merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat Islam.

1. Kondisi Umat Islam saat ini

Kenyataan lain yang tidak dapat disangkal adalah bahwa komunitas muslim pada zaman modern ini masih mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan; dengan demikian, salah satu target yang harus diusahakan semaksimal mungkin adalah revitalisasi pelaksanaan pendidikan bagi umat Islam melalui cara-cara yang sesuai dengan dan motif ajaran Islam, sehingga tidak salah arah dengan pelaksanaan pendidikan ala Barat.

2. Upaya Perbaikan Sistem Pendidikan

Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam

selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan Islam. (Isma'il Raji al-Faruqi and AH Abu, 1989:17). Meminjam istilah al-Faruqi (1989:23), sangatlah penting meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan orientasi keislaman anak didik dan tenaga pengajarnya. Hal tersebut karena pendidikan Islam bertujuan untuk: Menyiapkan peserta didik untuk menempuh kesempurnaan insani dalam menghadapi masyarakat yang bermuara pada penclekatan diri kepada Allah Swt.

Adapun yang bertujuan jangka pendek diarahkan untuk lebih menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika melihat kondisi atau perubahan masyarakat kekinian. Seperti penyiapan tenaga-tenaga profesional, penciptaan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menjawab tantangan zaman yang membutuhkan sebuah jawaban solutif.

B. Problem Pendidikan Islam Era Global

Saat ini masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya telah berada pada masa krisis, dimana mereka telah dihadapkan dengan suatu tatanan masyarakat baru dengan formasi kapitalis yang sering disebut dengan "globalisasi". Dalam sambutannya, Holger Borner (Direktur Freidrik Ebert Stiftung, Jerman), pada konferensi internasional tentang antisipasi kaum sosial demokrat terhadap masalah globalisasi pada tahun 1998, dijelaskan bahwa fenomena globalisasi telah memperlebar jurang ketidakadilan masyarakat. Tindakan-tindakan politik harus difokuskan bagi penguatan dasar-dasar kohesi sosial. Bentuk-bentuk kerja sama dan solidaritas telah diceraiberaikan; dan sekarang mengharuskan adanya upaya penegakan kembali bentuk-bentuk tersebut dengan lebih diperkuat. Dan kita harus memikirkan kembali hubungan pasar antar negara dalam level nasional dan internasional. Ketidakadilan pembangunan di berbagai bagian dunia mengharuskan adanya penghubung masalah-masalah politik dan ekonomi dengan kata lain masalah-masalah sosial global akan mengancam kita. (Anas Ma'ruf dan Anas, SA, 200:4).

Melihat kondisi seperti itu globalisasi selama ini telah disambut hangat oleh masyarakat dunia dan khususnya masyarakat Indonesia. Asumsi yang dibangun adalah: dengan adanya percaturan global akan memudahkan perkembangan perekonomian dan sebagai cara strategis

untuk mensejahterakan rakyat. Dengan teknologi informasi dan transportasi yang canggih dihadapkan akan mempermudah proses menuju kesejahteraan dan keadilan bersama.

Implikasi mendasar sudah dirasakan bersama, ironisnya hanya sedikit orang yang benar-benar mengembangkan analisis bagaimana implikasi globalisasi terhadap kaum pinggiran. Sebaliknya justru di Indonesia terdapat reaksi yang gegap gempita menyambut globalisasi, baik dari pemerintah, pengusaha maupun media masa, seakan globalisasi adalah satu-satunya jalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang (Mansour Faqih, 1997:5). Dengan berbagai agenda acara penyiapan kualitas SDM untuk mengarungi perubahan ini.

Dalam perspektif pendidikan, era globalisasi memiliki keterkaitan dengan pendidikan, karena globalisasi merupakan proses, dinamika, atau perkembangan masyarakat yang sebelumnya memang belum terjadi, yang menciptakan pola-pola baru dalam struktur sosial masyarakat. Baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan.

3. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, pemusatan perekonomian pada pasar modal yang mengakibatkan negara-negara yang perekonomiannya sedang berkembang justru semakin terpuruk dan selalu tergantung pada negara-negara pemodal, karena percaturan global dan pasar yang menentukan. Sementara yang berperan dalam *free market* tersebut adalah kapitalis. Dalam aspek ekonomi terdapat jurang pemisah yang sangat jauh antara orang/negara yang memiliki modal banyak dan yang memiliki modal sedikit. Pemain utama dalam percaturan ini adalah kaum kapitalis yang beranggapan bahwa persaingan di pasar secara bebas akan mempercepat kemajuan perekonomian dan aspek kehidupan manusia yang lainnya tanpa memperhatikan proses penindasan yang telah berlangsung.

4. Aspek Sosial Budaya

Pada aspek sosial budaya, terlihat jelas bahwa pergeseran pola hidup masyarakat dewasa ini memiliki perubahan yang sangat signifikan. Nalar *individualisme* dan persaingan antar individu semakin ditonjolkan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi masyarakat kekinian akan nuansa kekeluargaan dan kebersamaan karena kontrol

masyarakat semakin berkurang. Sedangkan dalam aspek budaya "*hedonisme*" dan "konsumerisme" menjadi *trend* masyarakat kekinian, karena dilancarkan oleh media masa dan canggihnya teknologi informasi, masyarakat cepat berubah. Hal ini dapat dikatakan bahwa inilah kehebatan globalisasi yang selama ini menindas, yang dalam bagian awal telah penulis singgung.

5. Aspek Politik

Pada aspek politik oportunistik, politik yang hariya memikirkan kebutuhan sesaat dengan menghalalkan segala cara. Fenomena itu cenderung menjadi wajah barn perpolitikan global maupun nasional. Kepentingan politik global yang dengan segala cara telah melakukan proses marginalisasi terhadap budaya politik lokal. Karena pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan ekonomi politik global adalah pihak yang menguasai pasar (pemodal) sehingga mereka dengan sesukanya untuk menimbun kekayaan dan modal dengan cara menindas meskipun atas dalih kompetisi sehat di pasar.

6. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan adalah bagian dari investasi jangka panjang (*longterm investasion*) untuk penyiapan generasi bangsa yang tangguh sesuai dengan jati diri bangsa dan komitmen dengan amanat para *founding father* ternyata mengalami persoalan yang tidak kalah rumitnya. Pendidikan nasional atau lebih khusus dalam pendidikan Islam lebih berkaitan dengan pendidikan yang bersifat *materialistik & sekularistik*. Pendidikan yang materialistik adalah buah dari kehidupan sekularistik yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh. Yakni, seorang '*abidush shalih* yang *mus.a*. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, paradigma pendidikan yang keliru. Dalam sistem kehidupan sekuler, asas penyelenggaraan pendidikan juga sekuler. Pendidikan yang ditetapkan juga adalah buah dari pihak sekularistik tadi, yakni membentuk manusia-manusia berpaham materialistik dan serba individual. *Kedua*, kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksanaan pendidikan, yakni 1) Kelemahan lembaga pendidikan formal yang tercermin dari kacaunya kurikulum serta tidak fungsinya guru dan lingkungan sekolah/kampus sebagai medium pendidikan sebagaimana mestinya; 2) Kehidupan keluarga yang tidak mendukung; dan 3) Keadaan masyarakat yang tidak kondusif.⁶ (Muhammad Ismail Yusanto,

2001:11).

Secara umum keutamaan pendidikan Islam terletak pada dua hal, pertama pendidikan itu penting karena dilandasi nilai-nilai Islam akan menuntut umat Islam menuju ketakwaan secara total kepada Allah. Dengan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia. Tanpa melalui pendidikan yang tepat, situasi yang dikehendaki tidak akan pernah terwujud. Kedua, pendidikan Islam itu penting karena secara akademis pendidikan merupakan aktivitas intelektual sebagai sarana terwujudnya formulasi Islamisasi pengetahuan. Tanpa keterlibatan dan kontribusi lembaga pendidikan tinggi Islam lengkap dengan intelektual muslim didalamnya, islamisasi mungkin hanya omong kosong belaka.

Sebagai respon terhadap situasi dramatis tersebut, pernyataan Abdul Hamid A. Abu Sulayman, seorang aktivis proyek Islamisasi ilmu pengetahuan, tepat untuk dikemukakan, dalam pengertian bahwa pertama-tama sarjana-sarjana muslim harus mengarahkan energi reformatifnya terhadap ilmu ekonomi dan politik. Bentuk-bentuk yang seharusnya diperhatikan meliputi seminar, konferensi, pengembangan kurikulum, pusat studi, dan penelitian serta pembentukan jurusan-jurusan khusus.⁷(Abdul Hamid AbuSulayman, 1993:126)

Tantangan memiliki strategi untuk mendapatkan kembali pendidikan Islam dari *sekularisme* merupakan tanggung jawab cendekiawan Muslim baik secara individual maupun kolektif. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa "pendidikan Islam berada pada tataran keterpurukan meskipun kemajuan di bidang pendidikan sangat pesat."⁸(Abdul Hamid AbuSulayman, 1993:5-6)

Dalam konteks ini Rosnani Hashim (1997) ⁹ memberikan gambaran, paling sedikit ada tiga aspek problematis pendidikan modern yang benar-benar substansial dan mendesak segera di 'Islam' kan. *Pertama*, aspek filosofis yakni visi atau pandangan dunia yang jelas-jelas sangat mempengaruhi halakat dan tujuan pendidikan. Karena dipengaruhi visi *positivistis* dan *materiālistis*, pendidikan dewasa ini cenderung membawa mentalitas palsu ke dalam umat Islam. Pada saat bersamaan, kekurangan visi melanda pengelola pendidikan. Keadaan ini mengarah kepada persoalan *dispirited ethic* yang tak terpecahkan dalazxi. persaudaraan Islam. Akibatnya, tidaklah mengejutkan jika "generasi muda terdidik tidak berperilaku sesuai dengan norma masyarakat (Islam) yang diharapkan

maupun dengan aspek kemanusiaan yang lazim dalam pengelolaan pendidikan.¹⁰ (Manzoor-ul-Haque, 1993:35)

Kedua, bagi umat masyarakat menyangkut masalah keutamaan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, disatu pihak kita tidak dapat mengabaikan perlunya menyelamatkan pendidikan Islam dari ilmu pengetahuan Barat, modern dengan segala kekurangan integralitas dan spiritualitas di dalamnya, yang dalam pengertian total hanya merupakan sebuah produk pertimbangan akal kemanusiaan sekuler. Di lain pihak, penting juga kita mengevaluasi ulang ilmu pengetahuan tradisional dan agama, yang menolak sama sekali isu-isu ilmiah maupun kontemporer. Sejauh ini, kecenderungan-kecenderungan tersebut melahirkan *dualisme* dalam sistem pendidikan di negara-negara Islam, pada gilirannya telah menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang *hipokrit* (munafik) di manapun.

Pendidikan Islam harus membekali dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang benar-benar Islami, relevan dengan sumber mutlak-nya, yakni Allah. Dengan demikian, isi ilmu pengetahuan harus *genuine* dan nyata; sumber asalnya adalah Allah Yang Maha Tahu segala sesuatu.

Ketiga, isu metodologi. Tidak kalah penting. Pendidikan Islam di negara-negara Islam biasanya tidak memiliki kreativitas dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Masalah ini juga menyangkut kurangnya penyediaan buku teks yang berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan dalam pemahaman Islam. Meniru metodologi Barat, hampir semua kasus proses belajar mengajar sangat minim aspek etikanya. Ini disadari juga bahwa bentuk tradisional pembelajaran agama mewariskan penekanan berlebihan terhadap tradisi hafalan dibanding pemahaman. Dengan adanya dua kelemahan tersebut, di satu pihak pendidikan umum pada era modern telah gagal dalam menanamkan dimensi etis ke dalam sanubari peserta didik muslim, dan di lain pihak gagal mempromosikan cara berpikir progresif ke dalam proses penalaran mereka.

Cara lain mengidentifikasi problem pendidikan adalah dengan cara memilah-milah corak pendidikan Islam ke dalam dua sistem, yaitu studi agama dan studi Islam dan institusi pendidikan umat. Sistem pertama terutama di tingkat akademik, seperti yang terlihat di negara-negara Islam, mengkhususkan diri pada studi Islam untuk melahirkan sarjana di bidang studi Islam baik sebagai intelektual maupun sebagai *mufthi* (orang yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa). Di

negara seperti Indonesia, masalah studi Islam menjadi salah satu isu paling penting yang mengundang pembicaraan hangat antar cendekia Muslimnya. Beberapa diantaranya berpendapat bahwa lembaga pendidikan Islam seperti IAIN seharusnya melestarikan misi tradisional dengan penambahan inovasi seperlunya yang terbatas pada ruang lingkup instrumental. Beberapa cendekia lainnya mengusulkan perubahan mode ilmu pengetahuannya sebagai respon terhadap tradisi Barat di bidang ini. Namun demikian, sebagian besar berpendapat bahwa IAIN sebaiknya merubah ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan agar relevan dengan, bukan menginduk pada, tantangan modern yang sedang berlangsung. Dengan adanya perdebatan yang tak pernah berakhir itu, maka secara luas IAIN dianggap berada di persimpangan jalan”

Sementara itu, pendidikan umat diartikan sebagai sebuah sistem dalam arti umum, yakni semua mata pelajaran diberikan secara mendasar sejak berada di sekolah dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Keberadaan *privatisasi* lembaga pendidikan sebagai wujud keterlibatan swasta dalam mengelola sektor pendidikan justru semakin menyengsarakan masyarakat. Efek secara langsung adalah pembengkakan biaya pendidikan, yang disebabkan karena subsidi dari pemerintah berkurang dan mengingat biaya operasional pendidikan semakin bertambah. Sehingga muncullah fenomena *Icapitalis.me* pendidikan, yang menjadikan pendidikan sebagai bisnis, mudah untuk mengeruk keuntungan dengan menaikkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik. Kondisi seperti ini justru akan menciptakan jurang pemisah yang sangat jauh antara orang kaya dan orang miskin atau orang-orang pinggiran. Akhirnya, berbagai macam problem yang melanda masyarakat Indonesia secara umum merupakan tantangan sendiri bagi pendidikan Islam.

Dalam era globalisasi ini pendidikan Islam dalam kondisi dilematis. Akan tetapi pendidikan Islam merupakan serangkaian proses yang memiliki konsep secara jelas tetap akan memberikan kontribusi positif dalam membantu memecahkan problem masyarakat. Dengan tetap berpegang teguh pada sumber pokok pendidikan Islam dan komitmen masyarakat muslim untuk tetap mempertahankan jati dirinya, untuk itu, langkah pendidikan Islam untuk reformulasi paradigma dan strategi menjadi sangat penting.

C. Respon Pendidikan Islam terhadap Globalisasi

Jawaban persoalan ini adalah pendidikan Islam secara konseptual dan secara realitas selalu aktif dan mendapatkan posisi yang strategis dalam percaturan masyarakat global beserta segala persoalan yang melingkupinya. Dikarenakan pendidikan Islam paling tidak memiliki potensi fleksibilitas dan relevansi sesuai dengan tuntutan zaman dan pendidikan Islam selama ini selalu konsisten dalam aspek humanistik.

1. Pendidikan Islam Memiliki Potensi Fleksibilitas dan Relevansi sesuai dengan Tuntutan Zaman

Sebab perkembangan pendidikan Islam sesungguhnya memiliki potensi fleksibilitas dan relevansi sesuai dengan tuntutan zaman. Memang perlu diakui globalisasi yang telah membawa kemakmuran ekonomi dan kemajuan iptek, telah membawa dampak krisis spiritual dan kepribadian, sehingga lebih memunculkan kesenjangan dan kekerasan sosial, ketidakadilan, dan demokrasi (Husni Rahim, 2001:129).

Dari sini tampak bahwa pendidikan Islam memiliki ruang dalam aspek spiritualitas, karena kondisi masyarakat global yang memiliki kecenderungan melalaikan aspek spiritual keagamaan, mereka lebih bersifat sekuler, sehingga secara manusiawi akan terasing dalam dunianya sendiri. Berdasarkan pandangan di atas, pendidikan Islam secara tegas memiliki tujuan tidak hanya mengurus persoalan *profan* atau keduniawian akan tetapi, pendidikan Islam juga memperhatikan nuansa agamis (*religiusitas*) yang sejak dini ditanamkan pada peserta didik.

2. Pendidikan Islam selama ini selalu Konsisten dalam Aspek Humanistik,

Di samping itu, gelombang globalisasi telah mengantarkan kehidupan kosmopolitan di antara berbagai bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, dan pluralitas. Ini berarti bahwa pendidikan mestilah harus berpijak pada pilar *learning to life together*. Untuk mendukung yang terakhir ini nilai-nilai kemanusiaan. universal, budaya, moral, dan agarna perlu diberdayakan, agar pendidikan menjadi *humanistik*. (Abd. Assegaf, 2004:9). Pendidikan Islam selama ini selalu konsisten dalam aspek humanistik, bahkan pendidikan Islam meletakkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi pilar utama dalam

menentukan paradigma dan strategisnya. Karena adanya sebuah persaingan yang ketat antara berbagai komponen dalam pencaturan pasar bebas (*free market*), maka dibutuhkan persaingan yang sehat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Selanjutnya Assegaf, (2004) menjelaskan bahwa dalam era globalisasi ini pendidikan Islam tidak perlu membuka atau menutup diri terhadap turbulensi arus global, mengingat keduanya mengundang konsekuensi tersendiri, melainkan menjalankan prinsip *al-muhafadhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jaded al-ashlah*. Sains dan teknologi modern merupakan perkara baru (*aljadid*) yang netral *values*, bilamana diambil oleh pendidikan yang Islami, menjadi *value bond*, akan menghasilkan sains dan teknologi yang semula netral akan berisi dengan nilai-nilai agama. Akibatnya produk teknologi yang dihasilkan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, negara tertentu, atau efek negatif berupa kerusakan yang timbul darinya.

Pendidikan Islam harus senantiasa responsif dengan perkembangan teknologi yang dilancarkan oleh globalisasi. Seperti media masa baik cetak maupun elektronik, telah mempengaruhi secara mendasar pola pikir dan konstruksi karakter masyarakat terutama anak-anak.

Untuk menghadapi tantangan tersebut menurut Qodri Azizi (2003:21), seharusnya masyarakat muslim memiliki landasan. Yaitu ajaran agama, Islam. Dalam waktu bersamaan, untuk menghadapi tantangan, perlu juga memiliki landasan motivasi, inspirasi dan akidah. Umat Islam perlu memperkuat dan mempertegas landasan hidup agar mampu menjawab tantangan. Dalam konteks pendidikan Islam untuk merespon berbagai tantangan yang sekaligus peluang tersebut, pendidikan Islam memerlukan sebuah paradigma yang jelas, baik secara konseptual atau pun pelaksanaan praktis di lapangan. Untuk merealisasikan idealitas tersebut dibutuhkan kerja sama dan sinergitas antara seluruh komponen pendidikan Islam, sehingga dalam menghadapi arus globalisasi pendidikan Islam akan tetap memberikan respon positif dan tetap selalu mempertahankan karakter yang dimilikinya dalam rangka membantu memberikan kontribusi penyelesaian problem yang dihadapi masyarakat global.

Di samping itu agar pendidikan Islam tidak terjebak pada sikap menutup atau eksklusif yang berakibat ketinggalan zaman, atau membuka diri dengan risiko kehilangan jati din atau kepribadian,

maka pendidikan Islam harus kembali ke dasar, *back to basic*, yakni al-Quran dan al-Hadis, sebagai identitas "lokal" dengan tetap mengambil perkara yang baru (*al jadid*) yang lebih baik dalam sains dan teknologi, sehingga pendidikan Islam berwawasan terbuka, inklusif dan global (*act locally think globally*). (Abd. Assegaf, 2004:7).

Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan Islam telah mengundang para cendekia untuk memberikan kontribusi pemikirannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa diantaranya, seperti Hossein Nasr, Fazlur Rahman, dan Naguib al-Attas, telah menulis karya tulis khusus tentang pendidikan. Contoh menarik tentang seorang cendekia yang telah mencoba membahas soal pendidikan secara tidak langsung adalah sosok Ismail Raji Al-Faruqi yang sekalipun komentarkomentarnya dan artikel singkatnya tentang pendidikan telah tersebar luas. Al-Faruqi adalah figur yang sangat berpengaruh di kawasan Amerika Utara (pernah menjabat sebagai ketua Department of Islamic Studies, Temple University) dan kawasan Pakistan. Pemikiran dan pemahamannya tentang pendidikan Islam dapat dilihat dalam buku dan tulisan-tulisan lainnya.

Karena tingginya komitmen mereka terhadap Islam, maka terlihat jelas aktivitas pendidikannya merepresentasikan ide-idenya tentang masalah tersebut. Sebagaimana diuraikan di atas, problematika pendidikan Islam terletak antara lain pada kurangnya visi yang secara mendasar bersifat filosofis. Dalam hal ini konsep al-Faruqi tentang *tauhid*, ke-Esaan Tuhan, benar-benar luar biasa karena telah meletakkan dasar kepada prinsip-prinsip bidang ilmu lainnya seperti sejarah, Ilmu pengetahuan, metafisika, etika, susunan masyarakat, kehidupan keluarga, politik, ekonomi, tata aturan dunia dan estetika. Meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan implikasi tauhid bagi pendidikan, dari pemahamannya tentang tauhid secara logis kita dapat menyimpulkan beberapa prinsip yang harus ada dalam visi pendidikan Islam bagi umat di era modern.

D. Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global

Pencarian format pendidikan Islam yang ideal sesuai dengan konteks sekarang, tentunya tidak terlepas dari kondisi empirik pendidikan di Indonesia, karena perjalanan pendidikan Islam di Indonesia memiliki keterkaitan yang mendasar terhadap pendidikan di Indonesia. Tonggak-tonggak perjalanan panjang upaya pencerdasan kehidupan

bangsa itu merupakan modal dasar bangsa untuk menghadapi tantangan internal dan tantangan global yang cenderung semakin kompleks, terutama masa transisi memasuki era millenium ketiga.

Tantangan yang dihadapi saat ini dan masa datang sesungguhnya bersumber dari dua akar permasalahan:

1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Sejak 32 tahun terakhir ini kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia diatur secara terpusat. Penyeragaman pengelolaan pendidikan dilakukan sehingga anak didik tercabut dari akar budayanya, lingkungan fisik dan sosialnya. Akibat penyeragaman ini, pendidikan menjadi tidak fungsional dan jauh dari situasi nyata yang dihadapi anak didik. Penekanan berlebihan akhirnya diarahkan pada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi-dimensi lain. Akibatnya lahirlah manusia Indonesia dengan kepribadian pecah.

2. Gagasan-gagasan Inovatif baru sampai Dukungan

Dalam era orde baru, di berbagai periode kabinet pembangunan, sejak periode Soemantri Bodjonegoro, Syarief Thayeb, Daud Yoesoef, Nugroho Notosusanto, Fuad Hasan, Wardjiman Djodjonegoro, sampai Wiranto Arismunandar, yang memiliki masa kementerian tersingkat hingga saat ini, sampai menteri pendidikan era reformasi, masing-masing telah memberikan warna perkembangan pendidikan Islam dengan gagasan yang inovatif dan strategis. Masing-masing menteri pendidikan dan kebudayaan (sekarang menteri pendidikan nasional) telah memberi perkembangan pendidikan di Indonesia dengan gagasan inovatif, namun gagasan inovatif tersebut terkesan sporadik dan temporer. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan hanya sebatas masa jabatan menteri yang bersangkutan. (TIM Nasional PRPSDM, 2001: xiv-xv).

Berdasarkan fakta di atas, sebagai bagian dari reformasi total, pendidikan juga harus melakukan sebuah reformasi, untuk terciptanya masyarakat madani dan sistem pendidikan yang benar-benar menampung segala kebutuhan masyarakat dalam konteks zamannya sekarang baik secara teoritis maupun praktis. Atas problem dan tantangan pendidikan nasional di atas, pendidikan Islam secara tidak langsung telah dipengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan Islam justru tidak memiliki orientasi yang jelas karena

disebabkan oleh kebijakan-kebijakan menteri pendidikan yang tidak kontinyu. Di samping itu juga problem klasik dalam dunia pendidikan Islam sebagaimana penulis jelaskan pada subbab awal, seperti problem pengelompokkan ilmu agama dan umum, sehingga pemberian pelajaran ilmu agama di sekolah pun sangat minim.

Untuk lepas dari keterpurukan ini, maka sangat mendesak untuk membekali umat dengan visi-visi yang secara komprehensif berdasarkan sumber utama ajaran Islam, sebagaimana difirmankan dalam al-Quran bahwa "Allah adalah teman bagi Orang-orang beriman, dan Dia membimbing mereka keluar dari kegelapan," pendidikan adalah proses yang mengarahkan untuk umat manusia, sebagai peserta didik, keluar jauh dari buruknya kebodohan menuju cahaya penceraha. (MA. Kaji 1992: 7). Secara prinsip, hal itu berarti Islam menempatkan Tuhan sebagai sumber pendidikan yang utama dan mutlak. Pendidikan Islam, tidak seperti perspektif sekuler, seharusnya bukan semata-mata sebuah proses belajar-mengajar tanpa dikaitkan dengan Allah, tetapi juga sebuah proses terpadu yang disertai kesadaran akan kehadiran Tuhan, karena Islam menggolongkan pendidikan sebagai tugas suci maupun penyerahan diri terhadap Allah (*ibadah*). Untuk itulah, pendidikan Islam harus menanamkan benih keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam ke dalam mentalitas dasar peserta didik. Keteguhan hati tersebut memotivasi umat untuk mengaktualisasikan imannya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, bukan perkembangan yang didominasi Barat. Jadi, benarlah bahwa keadaan tersebut, *bi'ah* (lingkungan), adalah faktor keberhasilan pendidikan, namun demikian tetaplah keteguhan hati yang didasarkan pada kecintaan pada Islam lebih penting, yang membawa semangat belajar ke dalam had setiap umat. Misalnya, dalam kehidupan sahabat-sahabat besar, sekalipun situasi pada saat itu dikuasai kaum jahiliyah, mereka tetap mengembangkan diri dengan penuh kecintaan kepada Islam dan menjadi Muslim sejati. Dalam hal ini, visi pendidikan Islam tentu tidak diarahkan oleh *pragmatisme*, namun oleh keteguhan had dan cinta terhadap Allah".(Afandi Muchtar, 2005:236).

Hal penting lainnya adalah bahwa pendidikan Islam, pada prinsipnya, dimaksudkan bagi tercapainya pengembangan dini (na.6)-hadikat umat manusia. Ini tidaklah berarti bahwa Islam

mengabaikan aspek-aspek materi dan fisik kehidupan, karena yang terkandung sangat ditentukan oleh din pribadinya. Penulis yakin, target pendidikan lainnya dapat dicari secara tepat setelah *nafs* benar-benar telah dikembangkan. Untuk mengembangkan *nafs*, pendidikan hams membekali peserta didiknya dengan pelajaran agama, etika, hukum, sejarah, dan peradaban Islam. Tanpa menafikan materi pelajaran teknis, pengajaran seperti di atas diharapkan mampu menamakan benih iwan (percaya pada Tuhan) dalam Kati atau din peserta didik. Masalah ini sangat penting sehingga pendidikan bukan semata-mata tugas para guru dan pihak sekolah. Para orang tua maupun umat secara keseluruhan tidak bisa lari dari tanggung jawab untuk melatih mereka dalam semua aspek ajaran Islam sampai mendapatkan kematangan diri.

Sebagai upaya reformulasi pendidikan Islam dalam perspektif global tersebut, pendidikan Islam tetap hams berpijak dari sumber utama pendidikan Islam itu sendiri, yakni al-Quran dan baths. Di samping itu, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia pijakan utama selain yang pertama tadi adalah amanat para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara historis dapat disebut sebagai *Indonesia Declaration Independence* menunjukkan dengan tegas pengukuhan keyakinan bangsa Indonesia (kemerdekaan adalah hak semua bangsa), visi kesejarahan (negara adalah hasil perjuangan bangsa), landasan fundamental kenegaraan (Pancasila), dan alasan ideologis berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Alasan negara didirikan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan itu adalah untuk: mempertahankan bangsa dan tanah air; meningkatkan kesejahteraan rakyat; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta dalam penciptaan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Konsep pencerdasan bangsa harus dilaksanakan secara terusmenerus dan dijadikan landasan utama dalam segala upaya untuk mencerdaskan rakyat, dengan konteks masyarakat dan zamannya. Maka terciptanya sebuah masyarakat yang cerdas dan berkeadilan memang suatu proses yang panjang dan berkesinambungan, sehingga tonggak-tonggak awal hams senantiasa kita lanjutkan sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita yang telah digariskan.

Penutup

Dampak globalisasi telah meranggas ke seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya pada aspek berikut ini:

pertama, pada aspek ekonomi, pemusatan perekonomian pada pasar modal yang mengakibatkan negara-negara berkembang justru semakin terpuruk dan selalu tergantung pada negara-negara pemodal, karena percaturan global dan pasar yang menentukan.

Kedua, pada aspek sosial budaya, terlihat jelas bahwa pergeseran pola hidup masyarakat dewasa ini memiliki perubahan yang sangat signifikan. Nalar individualisme dan persaingan antar individu semakin ditonjolkan.

Ketiga, pada aspek politik *oportunistik*, politik yang hanya memikirkan kebutuhan sesaat dengan menghalalkan segala cara. Fenomena itu cenderung menjadi wajah barn perpolitikan global maupun nasional.

Keempat, aspek pendidikan adalah bagian dari investasi jangka panjang (*long term investasion*) untuk penyiapan generasi bangsa yang tangguh sesuai dengan jati din bangsa & komitmen dengan amanat para *founding father* ternyata mengalami persoalan yang tidak kalah rumitnya. Pendidikan nasional atau lebih khusus dalam pendidikan Islam lebih berkait dengan pendidikan yang bersifat *materialistik* dan *sekularistik*. Pendidikan yang *materialistik* adalah bush dari kehidupan *sekularistik* yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh.

RANGKUMAN

Dalam era globalisasi ini pendidikan Islam dalam kondisi dilematis. Akan tetapi pendidikan Islam merupakan serangkaian proses yang memiliki konsep secara jelas tetap akan memberikan kontribusi positif dalam membantu memecahkan problem masyarakat. Dengan tetap berpegang teguh pada sumber pokok pendidikan Islam dan komitmen masyarakat muslim untuk tetap mempertahankan jati dirinya, untuk itu, langkah pendidikan Islam untuk reformulasi paradigma dan strategi menjadi sangat penting.

Sebagai upaya reformulasi pendidikan Islam dalam perspektif global tersebut, pendidikan Islam tetap hams berpijak dari sumber utama pendidikan slam itu sendini, yakni al-Quran dan baths. Di samping itu, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia pijakan utama selain

yang pertama tadi adalah amanat para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara historis dapat disebut sebagai *Indonesia Declaration Independence* menunjukkan dengan tegas pengukuhan keyakinan bangsa Indonesia (kemerdekaan adalah hak semua bangsa), visi kesejarahan (negara adalah hasil perjuangan bangsa), landasan fundamental kenegaraan (Pancasila), dan alasan ideologis berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Alasan negara didirikan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan itu adalah untuk: mempertahankan bangsa dan tanah air; meningkatkan kesejahteraan rakyat; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta dalam penciptaan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Konsep pencerdasan bangsa harus dilaksanakan secara tuntas-menerus dan dijadikan landasan utama dalam segala upaya untuk mencerdaskan rakyat, dengan konteks masyarakat dan zamannya. Maka terciptanya sebuah masyarakat yang cerdas dan berkeadilan memang suatu proses yang panjang dan berkesinambungan, sehingga tonggak-tonggak awal harus senantiasa kita lanjutkan sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita yang telah digariskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Abu Sulayman, (1993). *Crisis in Muslim Mind*, tr. by Yusuf Talal DeLorenzo, Herndon, Virginia: III T.
- , (1995). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*, Third edition, Herndon: Virginia: IIIT.
- Abd. Rahman Assegaf, (2004). *Pendidikan tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Afandi Muchtar, (2005) *Pendidikan Islam: makna, problem dan solusi, dalam harmoni kehidupan beragama*, Jakrta: Oasis publisher.
- Al-Faruqi, Ismaili Raji, (1988) "Islamization of Knowledge: Problems, Principles, and Prospective," in *Islam: Source and Purpose of Knowledge*, Herndon: IIIT.
- Assegaf, Abd. Rahman, (2004) *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azizi, Qodri, (2003) *Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqih, Mansour, (1997) *Islam, Globalisasi dan Nasib Kaum Marginal*, Jurnal Ulurnul Quran, No. 6/VII/1997.
- Kazi, (1992). "The Pursuit of Scientific Knowledge in Islam," *Islamic Thought and Scientific Creativity*, "Conceptual Framework of Islamic Educational System," *Islamic Thought and Scientific Creativity*.
- Ma'ruf, Anas dan Anas, (2000). *Shaping Globalization; Jawaban Kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*, Teri. Yogyakarta: Jendela, 2000.
- Manzoor-ul-Haque, (1993) "The Quranic Model of Education," *Muslim Education Quarterly*.
- Muhammad, Omar,(1997) *Falsafah Pendidikan Islam*", Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahim, Husni, (2001) *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Yusanto, Muhammad Ismail, (2001) *Menggagas Kembali Konsep System Pendidikan Islam*, (makalah), disampaikan dalam Stadium Geeral Magister Studi Islam UT' Yogyakarta, tanggal 8 September 2001.

BAB 4.....	81
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA	
GLOBALISASI	81
Tujuan Pembelajaran:	81
Setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu untuk:	81
▪ Posisi Pendidikan Islam	81
▪ Problem Pendidikan Islam Era Global	81
▪ Respon Pendidikan Islam terhadap Globalisasi.....	81
▪ Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global	81
A. Posisi Pendidikan Islam	83
1. Kondisi Umat Islam saat ini	83
2. Upaya Perbaikan Sistem Pendidikan.....	83
B. Problem Pendidikan Islam Era Global	84
3. Aspek Ekonomi	85
4. Aspek Sosial Budaya.....	85
5. Aspek Politik.....	86
6. Aspek Pendidikan	86
C. Respon Pendidikan Islam terhadap Globalisasi.....	90
1. Pendidikan Islam Memiliki Potensi Fleksibilitas dan	
Relevansi sesuai dengan Tuntutan Zaman	90
2. Pendidikan Islam selama ini selalu Konsisten dalam Aspek	
Humanistik.....	90
D. Format Pendidikan Islam dalam Perspektif Global	92
1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan.....	93
2. Gagasan-gagasan Inovatif baru sampai Dukungan	93
Penutup	96
RANGKUMAN.....	96

BAB 5

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami:

- Makna Otonomi Daerah dan Pendidikan
- Otonomi Pendidikan Pada Kerangka Otda
- Keberadaan Madrasah Pasca-Otda
- Masa Depan Pendidikan Di Era Otonomi
- Membangun Sekolah yang Efektif Di Era Otonomi Daerah



Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2001 mengacu pada dua UU, yaitu: UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk sektor pelayanan dasar yang akan mengalami perubahan secara mendasar dengan akan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya. Sebelum PP tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah secara resmi diberlakukan pemerintah, maka antisipasi implikasi otonomi daerah terhadap sektor pendidikan hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada UU nomor 22 dan 25 tahun 1999.

Bada Bab ini bertujuan untuk mengkaji implikasi implementasi UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah terhadap Desentralisasi Pendidikan dengan membahas: *pertama*, prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan serta bagaimana proses desentralisasi dapat mempengaruhi faktor-faktor yang akan menentukan efektifitas sekolah, dan *kedua*, implikasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap desentralisasi pendidikan di Indonesia. Pembahasan pendidikan dalam tulisan ini dibatasi pada tingkat pendidikan: SD, SLTP dan SLTA, dan tidak termasuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.

A. Memahami Otonomi Daerah

1. Prinsip-prinsip Desentralisasi Pendidikan

Pembahasan mengenai konsep desentralisasi pendidikan berikut ini mengacu pada Burki, et. al. (1999), khususnya chapter 4: “Empowering Municipalities or Schools? The Decentralization of Education”.

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*school resources*; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat).

Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajarmengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak Negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

a. Tipologi komponen-komponen sektor pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk didesentralisasikan

Tipologi komponen-komponen sektor pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk didesentralisasikan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tipologi Kewenangan-kewenangan Pendidikan yang Dapat Didesentralisasikan

Pendidikan	Kewenangan dalam
Organisasi dan poses belajar mengajar	Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang murid. Waktu belajar di sekolah. Penentuan buku yang digunakan. Kurikulum.
Manajemen guru	Memilih dan memberhentikan kepala sekolah. Memilih dan memberhentikan
Struktur dan perencanaan	Membuka atau menutup suatu sekolah. Menentukan program yang ditawarkan sekolah. Definisi dari
Sumber daya	Program pengembangan sekolah. Alokasi anggaran untuk guru dan tenaga administratif (<i>personnel</i>). Alokasi anggaran non-personnel

Sumber: *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) Methodology seperti dikutip dalam Burki, et. al. (1999), halaman 57.

Dari pengalaman negara-negara maju (OECD) dan beberapa negara Amerika Latin yang telah melakukan desentralisasi pendidikan dapat ditarik suatu benang merah yang memberikan kesimpulan sebagai berikut. Di negara-negara yang tergabung dalam OECD, kewenangan-kewenangan dalam hal: penentuan buku pelajaran, metode pembelajaran, tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah cenderung berlaku di tingkat sekolah dan tidak tergantung pada tingkat desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengamatan di negara-negara Amerika Latin menyimpulkan bahwa kewenangan dalam menentukan kurikulum inti tetap berada pada pemerintah pusat, demikian pula dengan kewenangan dalam melaksanakan ujian-ujian yang diberlakukan secara nasional. Kesimpulan ini berlaku secara umum di negara-negara Amerika Latin, dan tidak tergantung pada tingkat desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari masing-masing negara.

Desentralisasi pendidikan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin tersebut merupakan bagian dari desentralisasi politik dan fiskal penyelenggaraan pemerintahan, dari sistem pendidikan yang sentralistik ke sistem yang memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah dan sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat. Desentralisasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, meskipun studi empiris tentang hal ini di negara-negara Amerika Latin belum dapat dilakukan karena keterbatasan data.

Salah satu cara dalam mempersiapkan desentralisasi pendidikan adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar-mengajar, khususnya dari sekolah-sekolah unggulan. Mohrman and Wohlstetter, 1994; Creemers, 1994 and Darling-Hammond, 1997 seperti dikutip Burki, *et.al.*, 1999 menyimpulkan bahwa sekolah unggulan memiliki karakteristik-karakteristik: kepemimpinan yang kuat, staf pengajar dengan kualifikasi dan komitmen tinggi, fokus pada proses pembelajaran, dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai (lihat Tabel 2).

Proses desentralisasi sektor pendidikan yang meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke pemerintah daerah

dalam alokasi anggaran dan perencanaan pendidikan di daerah, serta pemberian kewenangan yang lebih besar pada sekolah dalam manajemen guru, pendanaan, pemilihan kepala sekolah manajemen proses belajar-mengajar diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Karakteristik sekolah yang efektif

Tabel 2. Karakteristik sekolah yang efektif

Karakteristik sekolah yang efektif	Variabel desentralisasi yang akan memperkuat karakteristik sekolah yang efektif
Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah dipilih oleh masyarakat dengan menggunakan kriteria yang transparan; - Program pengembangan sekolah disusun pada tingkat lokal; - Penggalian dana untuk melaksanakan program-program sekolah
Guru dengan kualifikasi dan komitmen tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah diberi kewenangan untuk mengubah kurikulum dan proses pembelajaran; - Kepala sekolah diberi wewenang untuk mengevaluasi guru; - Sekolah diberi kewenangan dan prasarana/dana untuk menentukan sendiri program pelatihan bagi guru-gurunya.
Fokus pada proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah menekankan pada aspek peningkatan proses pembelajaran; - Keterbukaan informasi mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan sekolah.
Bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala sekolah diangkat berdasarkan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan tergantung pada prestasi dalam memenuhi target peningkatan proses pembelajaran sekolah.

Sumber: Burki, et. al. (1999), halaman 61.

c. Dari Sentralisasi Menuju ke Desentralisasi Pendidikan

Sistem pendidikan yang berlaku sampai saat ini bersifat sangat sentralistis, yang dimulai dari pemberlakuan satu kurikulum secara nasional, sampai dengan peranan pusat yang sangat dominan dalam pengelolaan guru (sekolah negeri). Misalnya, Pusat sangat dominan dan menentukan dalam setiap keputusan tentang proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembinaan dan mutasi guru. Demikian pula dari aspek keuangan. Gaji guru sekolah negeri ditetapkan dan dibayarkan pemerintah, meskipun gaji guru SD pengelolaannya dilaksanakan oleh Propinsi, sedangkan gaji guru SLTP dan SLTA langsung oleh Pusat melalui KPKN.

Dari segi dana di luar gaji yang dialokasikan pemerintah ke masing-masing sekolah, diberikan dengan cara alokasi dana dari pusat ke daerah (kabupaten/kota) berdasarkan jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut. Mekanisme alokasi dana dilakukan dengan perhitungan sejumlah dana yang sama untuk setiap sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, tanpa memperhitungkan jumlah murid, lokasi ataupun tingkat kemakmuran ekonomi daerah tersebut. Cara seperti ini jelas mengandung banyak kelemahan, karena tidak memperhatikan sisi pemerataan (*equity*) dalam pengalokasian dana ke masing-masing sekolah.

Sejalan dengan proses desentralisasi yang segera akan diimplementasikan pemerintah melalui UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota serta perimbangan keuangan pusat daerah sebagai berikut:

1) Kewenangan Pemerintah Pusat:

Melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah dalam bidang-bidang Pertahanan/Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, Fiskal/Moneter, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya dan/atau Kebijakan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³

Bidang lainnya yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- (i) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro;
- (ii) Kebijakan dana perimbangan keuangan;
- (iii)

Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; (iv) Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (v) Kebijakan pendayagunaan teknologi tinggi dan strategis, serta pemanfaatan kedirgantaraan, kelautan, pertambangan dan kehutanan/lingkungan hidup; (vi) Kebijakan konservasi; (vii) Kebijakan standarisasi nasional.

2) Kewenangan Pemerintah Propinsi:

Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawab Propinsi, misalnya adalah kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan disamping kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.⁴

Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya mencakup:

(i) Perencanaan pembangunan regional secara makro; (ii) Pelatihan kejuruan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (iii) Pelabuhan regional; (iv) Lingkungan hidup; (v) Promosi dagang dan budaya/pariwisata; (vi) Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; (vii) Perencanaan tata ruang Propinsi.

a. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota:

Mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Secara eksplisit dinyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, lingkungan hidup, dan pertanian.

3) Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah:

Di sisi fiskal, Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah menurut UU nomor 25 tahun 1999 (UU-PKPD) mengatur pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan mempertimbangkan aspek pemerataan antar daerah, potensi, kondisi, kebutuhan obyektif daerah serta tatacara pengelolaan dan pengawasan pelaksanaannya.

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU-PKPD meliputi: (i). Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii). Dana Perimbangan; (iii). Pinjaman Daerah; (iv). Lain-lain pendapatan yang sah. Daerah melaksanakan semua kewenangannya yang berkaitan dengan desentralisasi dengan dibiayai dari anggaran daerah.

Penerimaan daerah yang berupa PAD masih mengacu pada UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: bagian daerah atas hasil Sumber Daya Alam, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk block grant, dengan kriteria alokasi berdasarkan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan obyektif daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum diserahkan sepenuhnya pada daerah.⁵

(a) Dana Alokasi Umum (DAU):

- Berfungsi sebagai dana untuk pemerataan antar daerah.
- Besarnya DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri APBN dengan pembagian 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.
- DAU untuk suatu Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan.

Porsi Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) merupakan proporsi bobot Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan terhadap jumlah semua Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan: kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

(b) Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dana Alokasi Khusus merupakan transfer dari pusat ke daerah yang bersifat spesifik, yang peruntukannya ditetapkan pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK):

- Dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
- Kebutuhan khusus adalah: kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus DAU, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional

2. Implikasi bagi Desentralisasi Pendidikan:

Implikasi otonomi daerah bagi desentralisasi pendidikan sangat

tergantung pada pembagian kewenangan di bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jika mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999, maka kewenangan di sektor pendidikan yang terkait dengan (i) perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro; (ii) kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (iii) kebijakan standarisasi nasional akan ditangani pusat, lainnya akan ditangani daerah, khususnya daerah kabupaten/kota.

Masih belum jelas benar interpretasi pelaksanaan desentralisasi di bidang pendidikan dengan mengacu UU nomor 22 tahun 1999. Bagaimana dengan status kepegawaian guru, apakah tetap sebagai PNS nasional atau menjadi PNS daerah? Status guru sebagai PNS pusat atau daerah akan sangat berpengaruh pada alokasi anggaran, pembiayaan melalui APBN atau APBD. Implikasi lain dari status guru adalah fleksibilitas daerah dan sekolah dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mutasi, pemberhentian guru, serta evaluasi atas kinerja guru.

Dari aspek kurikulum, perlu kejelasan tentang kebijakan perumusan kurikulum, apakah hanya kurikulum inti yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan muatan lokal dalam persentase yang cukup signifikan diserahkan pada masing-masing daerah atau bahkan langsung pada masing-masing sekolah. Saat ini kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat (Kurikulum 1994), dan daerah hanya dapat mengisi bagian kurikulum yang berupa muatan lokal dalam persentase yang sangat kecil. Misalnya: di Jawa Barat, muatan lokal kurikulum ditetapkan mata pelajaran bahasa Sunda dan Karawitan.

Mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang perumusan alokasi DAU dan DAK ke daerah, apakah dana yang ditransfer pusat sebagai DAU sudah mencakup alokasi anggaran rutin dan pembangunan untuk sektor pendidikan? Ataukah dana yang termasuk dalam transfer DAU hanya diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran *non-personnel* dari sektor pendidikan, karena Guru masih akan berstatus sebagai PNS Pusat? Hal-hal seperti ini akan sangat tergantung pada keputusan untuk tetap

mempertahankan status guru sebagai PNS Pusat atau mendesentralisasikan pengelolaan guru kepada daerah sepenuhnya.

Demikian pula dengan alokasi DAK ke daerah, sektor prioritas apa saja yang masih diberikan DAK ke daerah, kriteria pengalokasiannya dan apakah sektor pendidikan termasuk sektor yang akan diberikan DAK, misalnya untuk daerah-daerah dengan pencapaian standar tingkat pendidikan dibawah rata-rata nasional.

Jika dana pendidikan untuk rutin (gaji guru) dan non-rutin ditransfer sepenuhnya ke daerah melalui mekanisme DAU, maka berapa besar yang akan dialokasikan ke sektor pendidikan akan tergantung pada prioritas masing-masing daerah. Prioritas alokasi dana daerah selanjutnya tergantung pada pemerintah daerah dan DPRD setempat. Mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu sektor pelayanan dasar, masih perlu adanya suatu ketentuan standar minimal pendidikan yang harus dicapai daerah, sehingga daerah memiliki acuan yang harus dicapai dalam perencanaan sektor pendidikan.

Pertanyaan terpenting tentang arah desentralisasi pendidikan adalah sampai seberapa jauh sekolah-sekolah akan diberi kewenangan yang lebih besar menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pusat ke daerah, tetapi juga meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah, sehingga mereka dapat merencanakan proses belajar-mengajar dan pengembangan sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

B. Otonomi Pendidikan Pada Kerangka Otda

Otonomi daerah secara resmi telah diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, pada hakekatnya otonomi daerah merupakan "keleluasaan" pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala-urusan, kecuali urusan tertentu yang masih menjadi urusan pemerintah pusat.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dapat diurus oleh pemerintah daerah. Pada bidang ini pada kenyataannya tidak serta-merta segala sesuatunya diurus oleh pemerintah daerah.

Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh segala sesuatunya dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan.

Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kenyataan yang ada, maka dalam rangka menyongsong otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan serangkaian inovasi. Inovasi yang dimaksud, diantaranya berupa: pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peran aktif masyarakat di bidang pendidikan, dan guru yang profesional dan siswa yang berkualitas.

Untuk mengimplementasikan konsep pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, setiap pihak haruslah memberikan sumbangan pikiran yang konstruktif. Hal ini amat penting, mengingat hingga saat ini konsep otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah masih mencari bentuk (model) yang relevan. Paling tidak terdapat tiga elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu: sekolah, masyarakat, dan guru sebagai tulang punggung penentu keberhasilan pendidikan.

Permasalahannya adalah, bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah; bagaimanakah peran masyarakat di bidang pendidikan; dan bagaimanakah sosok guru yang dibutuhkan di dunia pendidikan?

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan otonomi pendidikan sudah seharusnya dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Paradigma baru otonomi pendidikan yang harus diemban dan diwujudkan oleh sekolah adalah melalui: (1) Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah, (2) Peran Serta Aktif Masyarakat di Bidang Pendidikan, dan (3) Guru yang Profesional dan Siswa yang Berkualitas.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan otonomi pendidikan sudah seharusnya dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Secara prinsip, paradigma baru yang ingin dibangun dan serangkaian pembahasan ini adalah:

1. Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah

Pada kerangka otonomi pendidikan, sekolah merupakan pilar utama dan terdepan untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara komprehensif. Telah disadari bersama bahwa upaya mewujudkan sekolah yang mandiri dan kreatif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemberian kepercayaan yang penuh bagi sekolah itu agar dapat mengaktualisasikan potensinya. Untuk itu, sekolah beserta seluruh perangkatnya segera bangkit menuju kemandirian dan senantiasa kreatif dalam melakukan setiap aktivitas (Anonim, 2000).

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pada pengelolaan sekolah diharapkan memiliki kemampuan yang memadai untuk berinisiatif dan sekaligus mendorong inisiatif perangkat sekolah lainnya sehingga berkembang sesuai dengan potensinya. Peran sekolah bukan hanya menghasilkan siswa yang mampu meraih NEM tinggi saja, tetapi lebih ditekankan pada siswa yang terpelajar. Nantinya siswa bukan hanya pandai dalam memperoleh ilmunya, tetapi juga terpelajar dalam mempraktekkan ilmu yang dimilikinya. Misi dan visi sekolah ke depan bukan hanya diketahui oleh perangkat sekolah, tetapi perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait. Secara nyata aktualisasinya terdapat pada rancangan program kerja sekolah yang memungkinkan perangkatnya dapat menjalankan peran optimal sesuai dengan kemampuannya.

2. Peran Serta Aktif Masyarakat di Bidang Pendidikan

Sekolah diharapkan secara bertahap memiliki kemampuan untuk membiayai sebagian besar kebutuhannya. Sekolah didorong agar mampu melakukan suatu terobosan baru guna memperoleh dana mandiri. Perlu diingat bahwa otonomi membawa konsekuensi pada semakin berkurangnya campur tangan pemerintah terhadap peran sekolah, termasuk dalam hal ketersediaan keuangan pemberian subsidi) sekolah.

Bagi sekolah-sekolah swasta, kebijakan itu tidak terlalu membawa pengaruh pada kinerja sekolah. Mengingat selama ini sekolah secara mandiri telah mendanai sebagian besar aktivitasnya. Hal itu berbeda dengan sekolah negeri yang selama ini lebih banyak tergantung pada bantuan dana pendidikan dari subsidi pemerintah. Untuk itu, peran orang tua/masyarakat melalui BP3 atau lainnya sangat menentukan kelangsungan suatu sekolah. Dukungan masyarakat (*community support*) terhadap kelangsungan sekolah

perlu lebih ditingkatkan (Anonim, 2000). Sekolah perlu mencoba dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait sehingga program *link and match* dapat terwujud.

Melalui pola tersebut, sekolah dimungkinkan memiliki rancangan kegiatan belajar yang variatif dan inovatif, sehingga masyarakat lebih tertarik dan sekaligus meningkatkan kepeduliannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat setempat (sekitar) sebagai *stake holders* perlu diyakinkan bahwa peningkatan kualitas sekolah adalah suatu keharusan. Untuk mewujudkannya adalah tanggung jawab bersama, yakni sekolah dan seluruh komponen masyarakat.

3. Guru yang Profesional dan Siswa yang Berkualitas

Sekolah dapat menawarkan program yang menarik apabila didukung oleh tenaga guru yang profesional. Sebagian besar keberhasilan sekolah-sekolah ditentukan oleh kinerja guru yang profesional dan optimal. Tuntutan ini tentu wajar adanya, mengingat profesi keguruan melekat suatu kewajiban dan hak yang harus dijalankan secara profesional dan optimal.

Seseorang yang memilih profesi sebagai guru hendaknya menyadari bahwa pilihan itu bukanlah pilihan yang mudah dan menjanjikan (dari segi pendapatan finansial), namun melekat suatu taanggung jawab profesionalisme yang amat berat. Guru dituntut menjadi sosok ideal tanpa cacat (Usman, 1990). Guru adalah panutan bagi siswa dan masyarakat sekitar (Nasution, 1999). Guru harus kreatif, inovatif, dan mandiri. Guru memiliki tanggung jawab bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan melatih siswa menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan mandiri.

Telah disinyalir bahwa seseorang yang memilih profesi ini cenderung sebagai pilihan terakhir. Sebagai pilihan terakhir kadangkala berdampak pada lemahnya kinerja. Kenyataan ini disadari betul oleh pihak terkait (Depdiknas). Akan tetapi, Depdiknas serasa menemui jalan buntu untuk mencarinya solusinya. Kinerja guru masih belum optimal karena penghasilan (gaji) relatif rendah. Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk membuat penghasilan (gaji) guru menjadi lebih memadai. Di lain pihak, kualitas pendidikan amat menentukan perjalanan bangsa Indonesia.

Jika kita senantiasa terbelenggu dengan kenyataan itu tanpa diimbangi dengan kinerja yang optimal, sampai kapan pun kualitas

sekolah tidak akan menghasilkan sesuatu (lulusan) yang optimal. Untuk itu, mau tidak mau kita dituntut untuk bangkit dari keterpurukan itu dan senantiasa mencari solusi tepat dan manusiawi.

Pada dasarnya guru yang profesional terlihat dari kemampuan guru menyediakan seluruh perangkat pembelajaran yang dinamis (Ali, 1983). Jika hal ini telah dipenuhi, persyaratan berikutnya adalah berfikir dan bertindak secara kreatif, inovatif, dan mandiri (Jurnal Ilmu Pendidikan XII, 1998/1999). Semua itu tercermin pada kegiatan belajar-mengajar sehari-hari. Pada kegiatan belajar konvensional terdapat kecenderungan siswa dituntut menghafal dan mengerjakan soal-soal secara tepat (tanpa salah). Siswa kurang diberikan kesempatan untuk berpikir, menemukan fakta, menerjemahkan konsep, dan mengungkapkan argumentasi. Dampaknya, siswa hampir seperti "robot". Siswa senantiasa puas dengan perolehan NEM tinggi tanpa memahami dengan benar apa arti NEM itu bagi dirinya. Pada bagian lain, pembelajaran yang nonkonvensional merupakan kebalikan dari konvensional. Siswa dibimbing untuk berpikir agar mencari sendiri fakta pembelajaran; memahami konsep; dan mencoba merencanakan aktualisasi konsep pada perilaku di sekolah.

Seperti telah dipaparkan di atas, visi dan misi utama pendidikan di sekolah adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, siswa hendaknya dipandang sebagai manusia yang berpikir dan memiliki potensi untuk maju serta berkembang. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam mewujudkan harapan itu adalah melalui beberapa cara berikut ini:

- a. Guru perlu berkreasi dengan menyusun muatan lokal pada setiap mata pelajaran yang dibinanya. Melalui muatan lokal itu siswa akan lebih memahami lingkungannya sehingga mereka tidak merasa asing dengan lingkungannya.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana aktualisasi bakat dan minat siswa perlu dikembangkan sehingga siswa dapat melatih diri untuk menemukan jati dirinya.
- c. Guru lebih kreatif dalam memilih materi pembelajaran; menyeleksi sumber belajar; dan mengkomunikasikannya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Guru juga perlu mencoba dan bahkan mengembangkan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) sehingga kinerja guru menjadi lebih

menarik dan menyenangkan (Muhajir, 1996; Kasbolah, 1999; dan Munsir, 1999).

- d. Budaya baca-tulis perlu senantiasa dijadikan sebagai kebutuhan dasar (utama) sehari-hari.
- e. Sebagai target ke depan, guru perlu Kelompok Kerja Guru/Musyawahar Guru
- f. Mata Pelajaran (KKG/MGMP) perlu dikembangkan dengan suatu bentuk aktivitas yang bervariasi. KKG/MGMP bukan hanya sebagai sarana menyusun SP/RP dan soal-soal cawu, tetapi perlu diarahkan untuk pengembangan kinerja profesional.
- g. Evaluasi belajar bukan hanya terbatas pada kemampuan akademik semata, tetapi perlu diupayakan secara komprehensif dan senantiasa berkesinambungan.

Apabila beberapa pokok pikiran di atas dapat dilakukan, niscaya upaya memanusiaikan manusia pada diri siswa bukanlah suatu hal yang utopia. Segalanya perlu dicoba dan dikembangkan. Seluruh perangkat sekolah harus membuktikan diri sebagai pribadi-pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Pada akhirnya akan tumbuh suatu kinerja yang optimal. Masing-masing pihak tidak ada yang lebih dominan dari pihak lain.

Setiap pihak selalu membutuhkan bantuan pihak lain. Hal inilah yang perlu disadari bersama dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Privatisasi Sekolah Era Otonomi

Kalau ada seorang manusia yang menjadi pengembara akibat pengaruh kebangsawanan dan kekayaannya terkikis habis, kemudian kembali ke negerinya dan sukses membangun institusi pendidikan selevel akademi, Plato adalah orangnya. Tatkala Plato berusia tiga puluhan tahun, negara Athena menjatuhkan hukuman mati kepada Socrates, guru yang sangat disegani. Tidak menerima realitas itu, Plato mengembara ke Mesir, Sisilia, dan daerah lainnya, untuk kemudian kembali ke Athena dan mendirikan Akademi Pengetahuan. Di akademi inilah antara lain melahirkan jenius yang kemudian menjadi filosof kenamaan, Aristoteles.

Kisah ringkas di atas sekadar menggambarkan bahwa sejak peradaban sebelum Masehi, masyarakat partikelir telah ambil peran penting dalam membangun pendidikan. Pengalaman di atas dapat menjadi referensi pembangunan pendidikan ke depan dengan

pendekatan privatisasi atau swastanisasi atas sekolah-sekolah kita. Gagasan privatisasi atau swastanisasi sekolah muncul dari adanya keraguan terhadap kemampuan pemerintah menyediakan anggaran pendidikan yang mencukupi.

Ketika istilah ini digagas oleh Peter F Drucker, *The Economist* mengulasnya sebagai tesis yang omong kosong dan tidak mungkin. Apa yang digagas oleh Peter F Drucker baru disadari banyak orang sekitar delapan tahun kemudian, tatkala PM Margaret Thatcher segera memulai swastanisasi di Inggris Raya. Kebijakan ini juga dilakukan oleh Jaques Chirac pada 1986, ketika menjadi Perdana Menteri Prancis.

Sebagai seorang nonpakar ekonomi, tidak ada maksud saya untuk mentransfer pengalaman di atas ke bidang pendidikan. Namun demikian, ketika kemampuan pemerintah menyediakan dana pembangunan pendidikan makin tidak memadai, peran masyarakat dalam memikul anggaran pendidikan dipastikan akan terdongkrak ke atas. Pada jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, sebutan yang populer untuk itu saat ini adalah pendidikan berbasis masyarakat atau *community-based education*.

Konsep ini tidaklah identik dengan tereduksinya peran pemerintah dalam bidang pendidikan, apalagi hilang sama sekali. Di negara kita, produk perundang-undangan yang relevan telah menggariskan bahwa ada dua kelompok penyelenggara pendidikan formal, yaitu pemerintah dan masyarakat. Istilah privatisasi atau swastanisasi pendidikan harus diberi makna bahwa peran masyarakat makin besar, khususnya di bidang pendanaan, perencanaan program, pengawasan, evaluasi, kendali mutu, akuntabilitas, dan sebagainya.

Khusus untuk tanggung jawab pembiayaan, saya tidak berani menentukan rasio antara beban pemerintah dan masyarakat. Rasio relatif dapat dibedah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut; pertama, standar pelayanan minimum (SPM) atau standar mutu proses dan hasil pendidikan minimum (SMPHPM) seperti apa yang ingin dicapai? Kedua, berapa besar dana minimum yang diperlukan untuk mencapai target menurut SPM atau SMPHPM itu? Ketiga, berapa besar kemampuan pemerintah menyediakan dana yang diperlukan untuk mencapai target menurut SPM atau SMPHPM itu? Keempat, dari selisih antara besar dana minimum yang diperlukan untuk mencapai target dan kemampuan pemerintah menyediakan dana, berapa besar beban pendanaan yang harus ditanggung oleh

masyarakat?

Keinginan untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya di bidang pembiayaan, tidak terlalu mudah. Seperti dikemukakan oleh Prof Winarno Surakhmad (Kompas, 17 April 2002): "Dulu pemerintah hanya meminta partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, tetapi tidak pernah mengatakan pada masyarakat bahwa ini pendidikanmu. Tidak heran kalau kemudian masyarakat juga menjadi tidak peduli dengan bidang pendidikan." Padahal, masih menurut Winarno, "Untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, tidak bisa tidak pengelolaan pendidikan harus dikembalikan pada masyarakat."

Pengembalian pengelolaan pendidikan kepada masyarakat menuntut persyaratan eksistensial, yaitu lahirnya masyarakat madani Indonesia, termasuk masyarakat madani sebuah kota.

Mengutip pendapat Alexis de Tocqueville, Muhammad AS Hikam merumuskan empat ciri utama masyarakat madani, yaitu kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian yang tinggi terhadap negara, dan keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Kembali ke masalah pembiayaan pendidikan, termasuk yang menjadi beban masyarakat, banyak pakar bahkan berani merumuskan tesis *cost quality relationship*, di mana besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan merupakan fungsi peningkatan mutu proses dan produk pendidikan dan pembelajaran. Penghapusan SPP/DPP sekolah dasar pada tahun 1978 dan SLP tahun 1994, karenanya, tidak seharusnya dipersepsi bahwa biaya pendidikan untuk dua jenjang ini serbagratis. Kebijakan itu, menurut hemat saya, harus dipersepsi sebagai pegalihan fungsi pengelolaan biaya pendidikan dari masyarakat oleh pemerintah ke fungsi pengelolaan pembiayaan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat atau orang tua murid melalui pengurus BP3 bekerja sama dengan sekolah. Tanpa sumbangsih finansial dari masyarakat akan sangat sulit bagi sekolah mempertahankan keberadaannya seperti sekarang, apalagi memperbaiki kinerjanya.

C. Keberadaan Madrasah Pasca-Otda

Sejak tahun 2002, wacana otonomi mendominasi isu-isu strategis seputar pendidikan, terutama untuk jenjang SD hingga SLTA. Semangat tersebut berangkat dari semangat desentralisasi yang

kemudian membuahakan harapan akan terwujudnya otonomi pendidikan, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Masih menyangkut persoalan penerapan otonomi pendidikan yaitu keberadaan madrasah yang secara struktural berada di bawah Depag. Jika sekolah umum di lingkungan Depdiknas sudah diotonomikan kepada pemerintah daerah, bagaimana dengan madrasah? Apakah ia juga akan diotonomikan. Seandainya ya, lalu bagaimana dengan skema lembaga-lembaga pendidikan Islam ini.

Dengan demikian kemungkinan menjadikan pendidikan di bawah satu atap akankah terwujud? Dan apa implikasinya bagi pendidikan Islam secara keseluruhan.

Prinsip otonomi pendidikan itu kembali ditegaskan GBHN 1999-2004 tentang pendidikan yang mencakup enam hal: (1) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) peningkatan kemampuan akademik, profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan, (3) pembahasan sistem pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai pusat nilai sikap, kemampuan dan partisipasi masyarakat, (4) pembahasan dan pemantapan pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi dan manajemen, (5) peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, dan (6) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

1. Pendidikan Islam

Peranan pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan hingga sekarang dapat dikatakan sungguh sangat minimal. Data yang ada pada Depag (2000) menunjukkan MI swasta mencapai 95,2 persen, MIN hanya 4,8 persen. Keadaan ini terbalik dengan SDN yang berjumlah 93,1 persen, berbanding SD swasta yang hanya 6,9 persen. Pada tingkat MTs, terdapat 75,5 persen MTs swasta berbanding 24,3 persen MTsN. Sedangkan SLTPN berjumlah 44,9 persen berbanding 55,9 persen SLTP swasta. Pada tingkat selanjutnya, terdapat 70 persen MA swasta berbanding 30 persen MAN. Sedangkan SMUN berjumlah 30,5 persen dibanding SMU swasta sebanyak 69,4 persen.

Kontras dengan inisiatif dan kontribusi kaum muslimin dalam

menyelenggarakan *community-based education* adalah kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif dalam penganggaran dan pendanaan pemerintah terhadap subsidi per kapita terhadap anak-anak bangsa yang belajar pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Indeks biaya per kapita pendidikan per siswa di madrasah jauh lebih kecil dibandingkan di sekolah umum. Pada tahun anggaran 1999/2002 biaya pendidikan per siswa MIN adalah Rp 19.000 sedangkan per siswa SDN adalah Rp 100.000 (1:5,2), MTsN per siswa Rp 33.000 sedangkan per siswa SLTPN adalah Rp 46.000 (1:1,4). Kepincangan pendanaan subsidi ini lebih mencolok lagi jika mencakup madrasah/sekolah swasta yang selama ini memang cenderung diabaikan pemerintah.

Sementara para penyelenggara pendidikan swasta Islam sebagian besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan. Maka kepincangan anggaran bantuan atau subsidi di pemerintah tidak bisa lain mengakibatkan mutu pendidikan menjadi sangat rendah. Kebanyakan madrasah swasta tidak hanya kesulitan dalam prasarana dan sarana, tetapi juga tidak mampu memberikan imbalan yang memadai bagi tenaga pendidikan.

Akibatnya, hanya mampu memiliki jumlah guru dan tenaga kependidikan secara sangat terbatas, itu pun dengan imbalan sekadarnya. Dari sinilah munculnya kecenderungan bagi banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang salah kamar (*mismatch*), kualitas keilmuan yang tidak memadai. Hanya sekitar 20 persen dari total guru madrasah yang "layak" (berkualitas), 20 persen mismatch, dan 60 persen belum atau tidak layak.

Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu, bisa dipahami kalau gagasan dan rencana otonomi dan penempatan pendidikan diletakkan dalam satu atap, dinas (pemerintah kabupaten/kota) bisa menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Kedua gagasan dan rencana itu hanya mengandung komplikasi kelembagaan dan struktur, tetapi pada gilirannya juga dapat mempengaruhi masa depan dan eksistensi pendidikan Islam. Karena sebagaimana diakui staf ahli Mendiknas Ace Suryadi PhD bahwa para guru di beberapa daerah ingin arus balik, diurus kembali oleh pemerintah pusat (Depdiknas) lantaran pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mengarahkannya menjadi lebih profesional.

2. Alternatif Lain

Mengantisipasi rencana perubahan-perubahan yang kelihatannya sulit dielakkan itu, di lingkungan Depag telah berkembang beberapa pemikiran yang dapat dipilih bagi pendidikan agama dan keagamaan.

Pemikiran pertama, eksistensi suprastuktur Ditjen Bagais Depag tetap dipertahankan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan dilimpahkan kepada pemda kabupaten/kota. Dasar pertimbangan pemikiran pertama ini adalah bahwa Depag tetap memegang kewenangan dalam mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sesuai dengan aspirasi masyarakat muslimin. Selain ini, pembinaan pendidikan agama dan keagamaan secara operasional akan sama dengan pembinaan pendidikan di sekolah umum, yang akan ditangani pemda sesuai dengan UU No 22 tahun 1999. Dalam pemikiran pertama ini, Ditjen Bagais memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional, pembinaan, standarisasi mutu (kompetensi dasar), monitoring dan evaluasi. Sedangkan daerah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana, prasarana, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Pemikiran pertama ini jelas memiliki kekuatan yang berkaitan dengan pemeliharaan wewenang dan bahkan eksistensi Depag itu sendiri sejak dari tingkat pusat sampai daerah. Dari sudut daerah, pemda memiliki ruang otonomi untuk mendistribusikan sumber dana dan daya secara efektif dan efisien ke seluruh jenis dan jenjang pendidikan di wilayah setempat. Selain itu, pemda dapat menghilangkan diskriminasi terhadap madrasah dan, sebaliknya memperlakukannya sama dengan sekolah umum.

Pemikiran kedua, institusi Ditjen Bagais Depag diintegrasikan ke dalam Depdiknas, dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan diserahkan kepada pemda sesuai UU No 22/1999. Dasar pertimbangan pemikiran kedua ini baha dengan satu atap di bawah Depdiknas (pemda kabupaten/kota), maka penyelenggaraan (termasuk pendanaan) dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan akan sama dan sejajar dengan sekolah. Kekuatan pemikiran kedua ini adalah dengan satu atap, maka pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, tidak ada lagi dikotomi kelembagaan dan substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum. Juga, diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan agaknya dapat diminimalisasi,

jika tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Kelemahan pemikiran kedua ini tidak adanya atau kurang adanya jaminan tentang kelangsungan eksistensi pendidikan agama dan keagamaan Islam. Disamping munculnya kecenderungan umum sebagaimana dikemukakan Prof Dr Sadu Wasistiono, Ketua Komisi Otonomi Daerah pada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bahwa pemerintah kabupaten/kota mengintervensi pengangkatan kepala sekolah. Kenyataan demikian sungguh bertolak belakang dengan MBS.

Padahal konsep MBS pada awalnya dibuat untuk menyelaraskan otonomi daerah dengan otonomi bidang pendidikan. Dalam hal ini, para guru dan perwakilan masyarakat di setiap sekolah secara otomatis berhak memilih dan mengangkat serta memberhentikan kepala sekolah berdasarkan kerjanya. Konsep MBS memang ideal, tetapi praktiknya terkacaukan oleh paradigma sempit para birokrasi soal otonomi daerah. Karena itu pelaksanaan otonomi madrasah di lingkungan Depag tidak perlu tergesa-gesa. Beberapa perangkat sekolah yang sudah diotonomikan saja ingin arus balik, jangan-jangan setelah madrasah diotonomikan ternyata salah masuk kamar.

D. Masa Depan Pendidikan Di Era Otonomi

Situasi yang berkembang hingga saat ini menunjukkan adanya keraguan akan kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Ini berarti ada keraguan akan masa depan sektor pendidikan, karena sektor pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah.

Akan sangat ironis, kalau otonomi daerah pada akhirnya justru menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan, dan pada gilirannya kualitas SDM Indonesia. Mudah disepakati bahwa otonomi di sektor pendidikan diharapkan akan memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sebaliknya.

Ada beberapa aspek yang menjadi titik krusial yang mempengaruhi masa depan sektor pendidikan di era otonomi daerah. Beberapa hal yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan, organisasi dan personel, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, serta standar pelayanan minimum (SPM).

1. Penyelenggaraan Pendidikan

Setelah keluar PP 25/2000, menjadi jelas bahwa hampir seluruh kewenangan berkaitan dengan pendidikan SD, SLTP dan SLTA akan berada di tangan pemda. Hanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini merupakan perubahan yang radikal, karena sebelumnya hanya penyelenggaraan pendidikan SD yang dikelola oleh pemda.

Dari sini mulai muncul bayangan persoalan mengenai kesanggupan dan kemampuan pemda untuk mengelola seluruh jenjang pendidikan di luar pendidikan tinggi. Kalau hal ini ditanyakan kepada pemda, jawabannya pasti satu: Sanggup! Persoalannya, apakah kesanggupan ini cukup realistis dalam arti diimbangi dengan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Mestinya dalam kasus ini, *test case* bisa dilakukan dengan melontarkan pertanyaan: Apakah selama ini penyelenggaraan pendidikan SD (yang sejak lama menjadi tanggung jawab pemda) memang lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan lanjutan (yang menjadi tanggung jawab pusat)? Kalau jawabannya "ya", cukup alasan bagi kita untuk bersikap optimistik bahwa pemda akan mampu mengelola seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SLTA dengan baik. Tapi kalau tidak, penyerahan kewenangan kepada pemda tidak lebih dari sebuah perjudian besar yang berisiko tinggi terhadap penurunan kualitas SDM di masa depan.

Menyimak apa yang bisa diamati, terlihat bahwa pendidikan SD relatif mengandung lebih banyak masalah dibandingkan dengan SLTP dan SLTA. Ilustrasi yang paling sederhana, persoalan potongan terhadap gaji guru sangat dirasakan oleh para guru SD yang *nota bene* berada di bawah kendali pemda. Se mentara itu, persoalan kualitas pendidikan tak memperlihatkan perbedaan yang signifikan (dalam arti lebih baik) dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Nilai lebihnya barangkali terletak pada sifat pendidikan SD yang lebih mudah dikontrol, karena *span of control* nya yang lebih sempit.

Akan sangat baik, kalau pemda bersikap realistis dalam menilai kesanggupan dan kemampuannya mengelola pendidikan di era otonomi. Sebagai contoh, ada baiknya semua pihak membuka kemungkinan untuk menyerahkan pengelolaan pendidikan SLTA kepada provinsi sebagai transisi sebelum semuanya ditangani daerah.

Dalam pengelolaan pendidikan, semua pihak sebaiknya mengedepankan kalkulasi risiko terhadap kualitas SDM dan membuang jauh orientasi uang dan kekuasaan.

2. Organisasi dan Personel

Penyelenggaraan pendidikan sangat terkait dengan penataan organisasi dan personel yang menanganinya. Di era otonomi daerah, praktis hanya ada satu instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan (umum), yakni Dinas Pendidikan (atau apa pun namanya) di bawah pemda.

Dinas pendidikan akan menjadi sebuah instansi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar. Tanpa adanya upaya *up-grading*, sulit membayangkan Dinas Pendidikan akan mampu menangani semua urusan pendidikan dari jenjang TK/SD hingga SLTA.

Urusan personel tak berhenti pada pegawai di lingkungan diknas. Yang sangat krusial justru masalah guru. Di era otonomi, rekrutmen dan pengembangan kualitas guru akan menjadi wewenang pemda. Akan tetapi, ada keraguan bahwa pemda akan mampu menangani masalah rekrutmen guru ini dengan baik. "Benang ruwet" seputar perpindahan guru antardaerah menunjukkan, bahwa keraguan tersebut bukannya tak beralasan.

Pada prinsipnya, penanganan masalah guru ini terkait erat dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Kalau memang seluruh jenjang pendidikan diserahkan kepada daerah, tak ada alasan untuk tidak juga menyerahkan kewenangan itu kepada daerah. Sebaliknya, jika ide penyerahan kewenangan penyelenggaraan dilakukan secara berjenjang, di mana diusulkan SLTA ditangani oleh provinsi, hanya masalah guru SD dan SLTP yang akan menjadi tanggung jawab daerah, sementara masalah guru SLTA ditangani oleh provinsi.

Para penentu kebijakan otonomi daerah selalu menyatakan, uang mengikuti kewenangan. Artinya, setiap transfer kewenangan dari pusat ke daerah akan diikuti dengan transfer dana. Dalam konteks demikian, perdebatan mengenai kecilnya anggaran sektor pendidikan dalam RAPBN sangatlah mengherankan. Dengan begitu banyaknya kewenangan pusat yang diserahkan kepada daerah, mestinya anggaran pendidikan dalam APBN (yang mencerminkan kebutuhan dana Depdiknas) akan jauh berkurang, bukan tetap atau

justru meningkat.

Secara teknis, sebagian besar anggaran untuk Depdiknas mestinya sudah harus dimasukkan ke dalam DAU yang akan dibagikan kepada setiap kabupaten/kota. Perdebatan seputar budget pendidikan dalam APBN, di mana anggaran pendidikan (Depdiknas) dianggap terlalu rendah, menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berdebat tidak memahami (pura-pura?) konteks otonomi daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan.

Di era otonomi daerah, komponen terbesar pembiayaan pendidikan akan berasal dari APBD. Bahwa dana dalam APBD itu bisa juga berasal dari pusat, misalnya DAU, itu persoalan lain. Pendek kata, APBD akan menjadi amplop besar yang di dalamnya juga berisi anggaran untuk pendidikan di daerah tertentu.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah komitmen pemda terhadap sektor pendidikan. Jika suatu daerah memiliki pemda yang memberi perhatian besar pada masalah pendidikan, sektor pendidikan di daerah tersebut pasti tak akan kekurangan dana.

Sebaliknya, jika pemda tak menganggap sektor pendidikan sebagai prioritas bisa dipastikan sektor pendidikan akan telantar. Padahal, dana itu sebenarnya masih jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu, setiap pemda juga dituntut kemampuannya untuk melibatkan sektor swasta (*private sector*) dalam membiayai pendidikan di daerahnya.

Kuncinya terletak pada akuntabilitas, yakni kemampuan pemda untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diperolehnya dari masyarakat. Tanpa akuntabilitas, jangan pernah berharap masyarakat mau menyumbangkan dana dengan jumlah yang signifikan untuk pendidikan.

3. Manajemen Sekolah

Sebelum lahir kebijakan otonomi daerah, pemerintah (Depdiknas) sebenarnya sedang bersiap untuk mengimplementasikan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau *school based management*. Kebijakan ini pada intinya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.

Dalam konsep MBS, sekolah memiliki kewenangan untuk melibatkan masyarakat (bukan hanya orang tua) dalam berbagai

aspek penyelenggaraan kegiatan sekolah. Meskipun diakui banyak kendala untuk mengimplementasikannya, MBS dianggap sebagai salah satu kunci kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Sekarang, setelah memasuki era otonomi daerah, keterbatasan kewenangan pusat juga terwujud pada ketiadaan kewenangan bagi Depdiknas untuk "memaksa" penda menerapkan konsep tersebut. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa semua daerah akan menerapkan konsep MBS dalam pengelolaan pendidikan. Kalau pun daerah ingin menerapkan konsep ini, belum tentu aparat yang berwenang memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukannya.

Apa pun sistem manajemen sekolah yang nantinya dipakai oleh penda, dan juga variasinya, yang terpenting adalah membangun sistem manajemen di sekolah yang lebih *accountable*. Dengan manajemen yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, sekolah diyakini akan mampu melibatkan masyarakat secara intens dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Satu hal lain yang akan sangat menentukan kualitas pendidikan di era otonomi daerah adalah standar pelayanan minimum (SPM) yang disusun oleh pusat (Depdiknas). Sayang sekali, yang akhirnya dikeluarkan oleh Depdiknas adalah "Pedoman Penyusunan SPM", bukan SPM itu sendiri. Pada gilirannya, yang akan menyusun SPM adalah provinsi.

Pada intinya, SPM merupakan standar yang harus dicapai oleh setiap daerah untuk dianggap mampu menyelenggarakan (dalam hal ini) pendidikan. SPM ini tidak boleh terlalu rendah, tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Jika terlalu rendah, semua akan bisa mencapainya, tetapi tidak memberi jaminan bagi kualitas SDM. Kalau terlalu tinggi, semua daerah tak akan sanggup memenuhinya.

Melihat perkembangan hingga saat ini, SPM cenderung terlalu tinggi, hingga lebih layak disebut sebagai standar ideal ketimbang standar minimal. Akibatnya muncul ungkapan sinis, "Kalau SPM seperti itu, pusat saja tidak mampu memenuhi SPM, bagaimana daerah mesti memenuhinya?"

Untuk keperluan pengujian, diperlukan sebuah evaluasi yang sifatnya nasional. Evaluasi tersebut mirip dengan Ebtanas, tetapi tidak digunakan untuk menentukan kelulusan siswa, serta dilaksanakan untuk semua kelas di semua jenjang pendidikan.

Evaluasi yang dimaksud hanya merupakan alat monitoring. Tanpa itu, pemerintah tak akan punya alat untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi SPM, dan tak akan mampu memonitor kualitas pendidikan di era otonomi daerah. Oleh karenanya, mestinya Ebtanas tidak perlu dihapus, tetapi cukup diubah format dan orientasinya.

E. Membangun Sekolah yang Efektif Di Era Otonomi Daerah

Sejalan dengan otonomi daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001, pendidikan dasar dan menengah juga diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Pemerintah daerah memang belum memiliki pengalaman mengelola sekolah secara komprehensif. Ada daerah yang mencerminkan sikap pesimisme dan juga ada yang mencerminkan sikap yang amat optimistik dalam menyambut otonomi dalam bidang pendidikan. Bagi daerah yang pesimistik, hal ini terjadi sebagai akibat Dana Alokasi Umum kecil dibandingkan dengan kebutuhan daerah untuk menggaji guru pegawai negeri lain yang sudah didaerahkan. Karena pesimisnya bahkan ada Bupati yang dengan lugas “bercita-cita” untuk meng-embalikan sebagian guru ke pemerintah pusat. Hal ini terjadi kebanyakan di daerah dalam Jawa. Sebaliknya, Pemerintah Daerah yang optimistik saat ini telah mampu membuat rancangan anggaran untuk meningkatkan pendidikan di daerahnya masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah yang amat signifikan jumlahnya. Keadaan ini dapat terjadi karena daerah yang bersangkutan memiliki cukup sumber alam berupa komoditas primer yang dapat dijual untuk kepentingan itu. Apapun sikap daerah, *the show must go on*. Artinya, pendidikan memang harus segera ditangani dengan berbagai kendala yang mungkin ada di daerah masing-masing secara otonom.

1. Menfaatkan Peluang

Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan dasar dan menengah

tinggal tergantung pada maunya daerah. Jika kita meminjam terminologi *school based management*, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan.

Sebaliknya, manakala pemerintah daerah memandang pendidikan tidak penting, sehingga visi dan misi pendidikan di daerah itu tidak dirumuskan secara jelas dan dengan demikian tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan yang solid, mudah ditebak bahwa pendidikan di daerah itu akan tidak baik. Jika hal ini terjadi, praksis pendidikan akan berjalan secara tidak profesional. Sekolah-sekolah akan dikelola secara tidak efektif. Akhirnya berbicara visi dan misi di sekolah-sekolah berubah menjadi sesuatu yang dipandang terlalu mewah. Kondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya secara profesional.

2. Menghadapi Tantangan

Membangun budaya sekolah agar suatu sekolah menjadi sekolah efektif merupakan tantangan bagi daerah dalam menangani otonomi pendidikan. Semasa sentralisasi pendidikan, sekolah-sekolah dikelola tanpa memperhatikan efektivitas suatu sekolah. Bahkan ada tolok ukur yang amat trivial, dan sebenarnya *misleading* bagi proses pendidikan di sekolah, yaitu pencapaian prestasi sekolah yang selalu dikaitkan dengan NEM. Akibatnya segala daya yang dimiliki sekolah dikerahkan sedemikian rupa agar di sekolah-sekolah di bawah daerah kekuasaan kantor wilayah dapat mencapai NEM yang tinggi. Proyek-proyek perbaikan kualitas sekolah juga memiliki parameter peningkatan NEM. Masyarakat juga sangat menikmati kebijakan itu, sehingga jika seorang anak memiliki NEM yang tinggi orangtua anak yang bersangkutan sangat bangga tanpa mempedulikan kerusakan aspek afektif pada diri anak. Pendek kata NEM telah dituhankan di

republik ini dalam kurun waktu yang cukup lama.

3. Paradigma Baru Keberhasilan Pendidikan

Dalam era otonomi pendidikan, keadaan ini harus diubah. Sekarang ini telah lahir paradigma baru mengenai keberhasilan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa IQ – perolehan aspek kognitif (yang dicerminkan dengan perolehan NEM) tidak lagi merupakan parameter yang signifikan bagi keberhasilan seseorang. Sebaliknya, ada faktor lain yang lebih signifikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu: aspek afektif – *emotional intelligence (EQ)*. Dengan demikian, kemampuan menahan diri, mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, memiliki ketahanan menghadapi kegagalan, bersikap sabar, memiliki kesadaran diri, bermotivasi tinggi, bersikap kreatif, memiliki empati, bersikap toleransi, dan sebagainya merupakan karakteristik yang jauh lebih penting untuk dimiliki siswa dari pada sekedar pencapaian NEM itu sendiri.

Jika demikian halnya, dalam paradigma baru itu secara implisit kita perlu mengelola sekolah secara efektif di era otonomi pendidikan ini. Rumusan sekolah yang efektif dapat kita ikuti dari konsepnya Mortimore (1991), yaitu: “*one in which students progress further than might be expected from a consideration of intake*” Jadi nampak dari rumusan ini bahwa tugas penting sekolah bukannya pencapaian NEM, akan tetapi menjaga agar semua siswa dapat berkembang sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah yang bersangkutan. Pada sekolah yang efektif, semua siswa dijamin dapat berkembang. Sebaliknya, pada sekolah yang tidak efektif hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar (*fast learners*) yang dapat berkembang.

4. Model Sekolah yang Efektif

Dalam sekolah yang efektif terdapat proses belajar yang efektif, yang ciri-cirinya menurut Mortimore adalah sebagai berikut: (1) aktif, bukannya pasif; (2) tidak kasab mata; (3) rumit, bukannya sederhana; (4) dipengaruhi oleh adanya perbedaan individual di antara para peserta didik; (5) dipengaruhi oleh berbagai konteks. Selanjutnya, ada beberapa ciri penting bagi sekolah yang efektif (Sackney, 1986), yaitu: (1) Adanya visi dan misi yang dipahami bersama oleh

komunitas sekolah, yang dari sini dapat dirinci lagi menjadi: (a) adanya sistem nilai dan keyakinan yang saling dimengerti oleh komunitas sekolah; (b) adanya tujuan sekolah yang jelas; (c) adanya kepemimpinan instruksional. (2) Iklim belajar yang kondusif di sekolah, yang meliputi: (a) adanya keterlibatan dan tanggung jawab siswa; (b) lingkungan fisik yang mendukung; (c) perilaku siswa yang positif; (d) adanya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap sekolah. (3) Ada penekanan pada proses belajar, yang terdiri dari: (a) memusatkan diri pada kurikulum dan instruksional; (b) ada pengembangan dan kolegialitas para guru; (c) adanya harapan yang tinggi dari komunitas sekolah; dan (d) adanya pemantauan yang berulang-ulang terhadap kemajuan belajar siswa.

Era otonomi pendidikan baru saja kita masuki. Inilah saat yang menentukan bagi para ahli, praktisi, dan juga pengamat pendidikan untuk secara bersama memberdayakan pendidikan nasional, meskipun secara politis pendidikan nasional kita saat ini kurang, dan bahkan juga layak untuk dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan dan kebosanan menyaksikan gejolak politik di republik ini, marilah kita juga memanfaatkan sisa energi yang ada pada diri kita untuk merenungkan, dan juga memikirkan bagaimana nasib para generasi penerus bangsa ini melalui sentuhan pendidikan di sekolah-sekolah yang mampu menawarkan *transfer of learning*, *transfer of training*, dan *transfer of principles* secara efektif. Jika demikian halnya, konsekuensinya kita memang perlu membangun budaya sekolah yang efektif. Semoga begitu.

PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah yang menurut rencana akan diimplementasikan pada tahun 2001 merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereformasi penyelenggaraan pendidikan dari aspek birokrasi, pendanaan, dan manajemen pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.

Otonomi pendidikan pada kerangka otonomi daerah membawa konsekunsi yang cukup dilematis di kalangan persekolahan. Pada satu sisi sekolah harus mandiri dalam mewujudkan kualitasnya, pada sisi lain sekolah masih banyak memiliki kekurangan (pendukung). Namun demikian, pada era otonomi pendidikan, sekolah harus mampu berkompetisi dengan sekolah lain dalam hal peningkatan kualitas lulusannya. Oleh karena itu, setiap pemda juga dituntut kemampuannya untuk melibatkan sektor swasta (*private sector*) dalam membiayai pendidikan di daerahnya. Kuncinya terletak pada akuntabilitas, yakni kemampuan pemda untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diperolehnya dari masyarakat. Tanpa akuntabilitas, jangan pernah berharap masyarakat mau menyumbangkan dana dengan jumlah yang signifikan untuk pendidikan.

Oleh karena itu di sela-sela kesibukan dan kebosanan menyaksikan gejolak politik di republik ini, marilah kita juga memanfaatkan sisa energi yang ada pada diri kita untuk merenungkan, dan juga memikirkan bagaimana nasib para generasi penerus bangsa ini melalui sentuhan pendidikan di sekolah-sekolah yang mampu menawarkan *transfer of learning*, *transfer of training*, dan *transfer of principles* secara efektif. Jika demikian halnya, konsekuensinya kita memang perlu membangun budaya sekolah yang efektif. Semoga begitu.

RANGKUMAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah yang menurut rencana akan diimplementasikan pada tahun 2001 merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereformasi penyelenggaraan pendidikan dari aspek birokrasi, pendanaan, dan manajemen pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.

Otonomi pendidikan pada kerangka otonomi daerah membawa konsekunsi yang cukup dilematis di kalangan persekolahan. Pada

satu sisi sekolah harus mandiri dalam mewujudkan kualitasnya, pada sisi lain sekolah masih banyak memiliki kekurangan (pendukung). Namun demikian, pada era otonomi pendidikan, sekolah harus mampu berkompetisi dengan sekolah lain dalam hal peningkatan kualitas lulusannya. "Paradigma baru" otonomi pendidikan yang harus diimban dan diwujudkan oleh sekolah adalah melalui: (1) Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah, (2) Peran Serta Aktif Masyarakat di Bidang Pendidikan, dan (3) Guru yang Profesional dan Siswa yang Berkualitas. Ketiga hal itu hanya akan terwujud jika seluruh perangkat sekolah mampu menyadari dan melaksanakan tanggung jawab mereka secara optimal dalam bentuk sinergikerja yang saling menunjang satu sama lainnya. Tanpa semua itu, otonomi pendidikan benar-benar hanya sebuah utopia.

Konsep MBS pada awalnya dibuat untuk menyelaraskan otonomi daerah dengan otonomi bidang pendidikan. Dalam hal ini, para guru dan perwakilan masyarakat di setiap sekolah secara otomatis berhak memilih dan mengangkat serta memberhentikan kepala sekolah berdasarkan kerjanya. Konsep MBS memang ideal, tetapi praktiknya terkacaukan oleh paradigma sempit para birokrasi soal otonomi daerah. Karena itu pelaksanaan otonomi madrasah di lingkungan Depag tidak perlu tergesa-gesa. Beberapa perangkat sekolah yang sudah diotonomikan saja ingin arus balik, jangan-jangan setelah madrasah diotonomikan ternyata salah masuk kamar.

Secara teknis, sebagian besar anggaran untuk Depdiknas mestinya sudah harus dimasukkan ke dalam DAU yang akan dibagikan kepada setiap kabupaten/kota. Perdebatan seputar bujet pendidikan dalam APBN, di mana anggaran pendidikan (Depdiknas) dianggap terlalu rendah, menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berdebat tidak memahami (pura-pura?) konteks otonomi daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan. Di era otonomi daerah, komponen terbesar pembiayaan pendidikan akan berasal dari APBD. Bahwa dana dalam APBD itu bisa juga berasal dari pusat, misalnya DAU, itu persoalan lain. Pendek kata, APBD akan menjadi amplop besar yang di dalamnya juga berisi anggaran untuk pendidikan di daerah tertentu. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah komitmen pemda terhadap sektor pendidikan. Jika suatu daerah memiliki pemda yang memberi perhatian besar pada masalah pendidikan, sektor pendidikan di daerah tersebut pasti tak akan kekurangan dana. Sebaliknya, jika pemda tak menganggap

sektor pendidikan sebagai prioritas bisa dipastikan sektor pendidikan akan telantar. Padahal, dana itu sebenarnya masih jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu, setiap pemda juga dituntut kemampuannya untuk melibatkan sektor swasta (*private sector*) dalam membiayai pendidikan di daerahnya. Kuncinya terletak pada akuntabilitas, yakni kemampuan pemda untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diperolehnya dari masyarakat. Tanpa akuntabilitas, jangan pernah berharap masyarakat mau menyumbangkan dana dengan jumlah yang signifikan untuk pendidikan.

Dalam sekolah yang efektif terdapat proses belajar yang efektif, yang ciri-cirinya menurut Mortimore adalah sebagai berikut: (1) aktif, bukannya pasif; (2) tidak kasab mata; (3) rumit, bukannya sederhana; (4) dipengaruhi oleh adanya perbedaan individual di antara para peserta didik; (5) dipengaruhi oleh berbagai konteks. Selanjutnya, ada beberapa ciri penting bagi sekolah yang efektif (Sackney, 1986), yaitu: (1) Adanya visi dan misi yang dipahami bersama oleh komunitas sekolah, yang dari sini dapat dirinci lagi menjadi: (a) adanya sistem nilai dan keyakinan yang saling dimengerti oleh komunitas sekolah; (b) adanya tujuan sekolah yang jelas; (c) adanya kepemimpinan instruksional. (2) Iklim belajar yang kondusif di sekolah, yang meliputi: (a) adanya keterlibatan dan tanggung jawab siswa; (b) lingkungan fisik yang mendukung; (c) perilaku siswa yang positif; (d) adanya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap sekolah. (3) Ada penekanan pada proses belajar, yang terdiri dari: (a) memusatkan diri pada kurikulum dan instruksional; (b) ada pengembangan dan kolegialitas para guru; (c) adanya harapan yang tinggi dari komunitas sekolah; dan (d) adanya pemantauan yang berulang-ulang terhadap kemajuan belajar siswa. Era otonomi pendidikan baru saja kita masuki. Inilah saat yang menentukan bagi para ahli, praktisi, dan juga pengamat pendidikan untuk secara bersama memberdayakan pendidikan nasional, meskipun secara politis pendidikan nasional kita saat ini kurang, dan bahkan juga layak untuk dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan dan kebosanan menyaksikan gejolak politik di republik ini, marilah kita juga memanfaatkan sisa energi yang ada pada diri kita untuk merenungkan, dan juga memikirkan bagaimana nasib para generasi penerus bangsa ini melalui sentuhan pendidikan di sekolah-sekolah

yang mampu menawarkan *transfer of learning*, *transfer of training*, dan *transfer of principles* secara efektif. Jika demikian halnya, konsekuensinya kita memang perlu membangun budaya sekolah yang efektif. Semoga begitu.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida S. Alisjahbana, (1999) "Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia" diselenggarakan Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung 20 Juli 1999.
- _____, (1999) "Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Platform untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia" diselenggarakan oleh ISEI Cabang Bandung dan LPEM FE-UI, Bandung 25 Maret.
- _____, 1998, "Desentralisasi Kebijakan Fiskal dan Tuntutan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah". Orasi Ilmiah pada Dies ke 41 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung 24 Oktober.
- Bray, Mark, (1996) *Decentralization of Education: Community Financing*, The World Bank: Directions in Development, Washington, D.C.
- Burki, Shahid J., Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, (1999) *Beyond the Center: Decentralizing the State*, The World Bank, Washington, D.C.
- Patrinos, Harry A. and David L. Ariasingam, (1997) *Decentralization of Education: Demand-Side Financing*, The World Bank: Directions in Development, Washington, D.C.
- Republik Indonesia, (1999) UU nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, Mei.
- _____, (1999) UU nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Mei.
- Shah, Anwar, 1998, "Balance, Accountability, and Responsiveness: Lessons about Decentralization", dalam Picciotto, Robert and Eduardo Wiesner (eds.), *Evaluation*

- and Development: The Institutional Dimension*, New Brunswick, USA and London, UK: Transaction Publishers.
- Ali, M., (1983). *Guru dalam proses belajar mengajar*. Bandung: Asyraf.
- _____, (2000). *Manajemen pendidikan berbasis sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2000). *Dukungan masyarakat terhadap sekoiah*. Jakarta: Depdiknas.
- Kasbolah, K. (1999). *Penelitian tindakan kelas*. Jakarta: Dirjen Dikti P2GSD.
- Muhaiir, N. (1996). *Pedoman pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK)*. Yogyakarta: BP3GSD, UP3SD, UKMP-SD Dirjen Dikti Depdikbud.
- Munsir, D.N. (1999). *Penelitian tindakan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III.
- Nasution. (1999). *Guru yang profesional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Usman, M.U. (1990). *Menjadi guru profesional*. Bandung: Remadja Rosda Karya.

BAB 5.....	99
OTONOMI DAERAH	99
DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN.....	99
Tujuan Pembelajaran:	99
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami:	99
▪ Makna Otonomi Daerah dan Pendidikan ...Error! Bookmark not defined.	
▪ Otonomi Pendidikan Pada Kerangka Otda Error! Bookmark not defined.	
▪ Keberadaan Madrasah Pasca-OtdaError! Bookmark not defined.	
▪ Masa Depan Pendidikan Di Era Otonomi..Error! Bookmark not defined.	
▪ Membangun Sekolah yang Efektif Di Era Otonomi Daerah	Error! Bookmark not defined.
A. Memahami Otonomi Daerah	101
1. Prinsip-prinsip Desentralisasi Pendidikan	101
2. Implikasi bagi Desentralisasi Pendidikan:	107
B. Otonomi Pendidikan Pada Kerangka Otda	109
1. Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah	111
2. Peran Serta Aktif Masyarakat di Bidang Pendidikan.	111
3. Guru yang Profesional dan Siswa yang Berkualitas ..	112
4. Privatisasi Sekolah Era Otonomi	114
C. Keberadaan Madrasah Pasca-Otda	116
1. Pendidikan Islam.....	117
2. Alternatif Lain.....	119
D. Masa Depan Pendidikan Di Era Otonomi	120
1. Penyelenggaraan Pendidikan	121
2. Organisasi dan Personel	122
3. Manajemen Sekolah	123
E. Membangun Sekolah yang Efektif Di Era Otonomi Daerah.....	125
1. Menfaatkan Peluang	125
2. Menghadapi Tatantangan	126
3. Paradigma Baru Keberhasilan Pendidikan.....	127
4. Model Sekolah yang Efektif	127
PENUTUP	128
RANGKUMAN	129

DAFTAR PUSTAKA 132

BAB 6

TRI PUSAT PENDIDIKAN: PILAR UTAMA PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami:

- Manusia dan Lingkungan Pendidikan
- Konsep Dasar Tri Pusat Pendidikan
- Tripusat sebagai Suatu Lembaga Pendidikan
- Membangun Strategi Tiga Pilar Pendidikan



Untuk mengetahui sebuah persoalan atau masalah tidak hanya cukup melihat kata-katanya, karena dibalik kata-kata itu selalu ada saja makna tersembunyi, yakni makna yang paling dalam merupakan isi masalah secara keseluruhan. Sehingga dalam menetapkan atau menulis suatu isu seharusnya didukung dengan penelitian terhadap kebenaran dibalik kenyataan. Harus dicari *net work*-nya secara khusus yang kadang-kadang tidak jelas. Semakin dilakukan penetrasi kedalam *net work* secara baik, maka akan semakin dapat menangkap akar persoalan dalam kompleksitas yang dinamis, tidak terkecuali masalah tri pusat pendidikan. Sehingga menurut *Paulo Freire*, (2000:6) berbicara pada soal pendidikan itu tidak lepas dari persoalan manusia dan lingkungan.

Manusia sebagai makhluk individu lahir ke dunia dengan suatu *hereditas* tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindahan dari cairan-cairan "germinal" dari pihak orang tuanya. Disamping itu individu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungannya, baik secara fisik, psikologi, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan dimaksud (Wasty Soemanlo, 998:82).

Beberapa literatur yang membahas tentang faktor-faktor pendidikan menunjukkan adanya kaitan erat dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain, sebagaimana Hasbunah (199:8) bahwa faktor-faktor dimaksud yaitu faktor pendidikan, anak didik, media pendidikan dan lingkungan.

Pada bagian ini memfokuskan pembahasannya tentang lingkungan pendidikan, sebab lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, meski demikian lingkungan pendidikan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik baik psikologis, fisiologi, dan fisiknya.

A. Konsep Dasar Tri Pusat Pendidikan

1. Pengertian Secara Proporsional

Di kalangan masyarakat pendidikan sering mengartikan lingkungan pendidikan secara sempit, seolah-olah hanyalah alam sekitar di luar diri manusia. Lingkungan sebenarnya mencakup segala materil dan stimulus dalam diri dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisik maupun psikologis dan sosial kultural. (Wasty Soemanlo, 1998:84). Secara fisik, lingkungan meliputi segala kondisi dan materil jasmaniah dalam tubuh seperti pemberian gizi, vitamin, air, untuk mengembangkan sistim syaraf serta kesehatan jasmani. Sedangkan secara psikologis, lingkungan mencakup stimulasi yang diterima oleh individu sejak dalam konsesi, kelahiran stimulasi itu misalnya berupa sifat-sifat, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minar kebutuhan, kemauan dan kapasiras intelektual. Dan secara sosio kultural, lingkungan mencakup stimulasi interaksi dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Pola hidup keluarga, masyarakat, latihan belajar, bimbingan dan penyuluhan. (Wasty Soemanlo, 1998:85).

Menurut Sartain, (Ngaling Purwanto, 1994:5) lingkungan meliputi kondisi dan alam ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku seseorang, baik pertumbuhan dan perkembangannya atau *life processes*. Sedangkan penulis lebih cenderung memberi pengertian sesuatu yang ada disekitar kehidupan dan dapat mempengaruhi kelangsungan serta perkembangan hidup manusia.

Beberapa pengertian di atas dapat ditarik hipotesis bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah berlangsungnya suatu pendidikan yang mengandung nilai-nilai Islam (sesuai dengan ajaran Islam) dari segi jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang mulia.

Pada dasarnya lingkungan pendidikan mencakup; (1) tempat (lingkungan fisik), keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan dam, (2) kebudayaan (lingkungan budaya) dengan warisan budaya tertentu bahasa, agama, seni, ekonomi, dan pandangan hidup, dan (3) kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, kelompok bermain dan sebagainya.

Abd. Rahman Getteng (1997: 49), memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya pendidikan Islam dapat dipandang dari tiga aspek yaitu: "sebagai pembentukan individu, pembentukan keluarga dan sebagai pembentukan masyarakat. Pada pokoknya

pendidikan Islam meliputi pendidikan jasmani, pendidikan akal dan pendidikan rohani. Aspek jasmani merupakan salah satu dasar pokok untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, dengan akal dan jiwa yang sehat terdapat pada jasmani pula. Hubungan antar jasmani dan rohani manusia saling memberikan pengaruh timbal balik, yaitu hal-hal yang berpengaruh pada jiwa akan berpengaruh juga jasmani, demikian sebaliknya. Mengenai pendidikan akal. Al-Gazali berpendapat bahwa akal adalah sumber ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan, dengan akal dapat dipengaruhi untuk menemukan dan menciptakan alat-alat yang berguna baginya untuk menghadapi problem-problem kehidupan manusia. Dengan demikian aspek pendidikan akal merupakan suatu keharusan sebagaimana memuliakan akal pikiran manusia dan hasil talakkurrtya. Adapun tentang pendidikan rohani, agar supaya diberikan kepada anak-anak sejak dini, terutama penanaman aqidah tauhid atau pemahaman tentang keesaan Allah, karena akan hadir secara sempurna dalam jiwa anak terhadap kepercayaannya kepada Allah sebagai pondamen dalam kehidupannya, jangan sampai terpengaruh oleh pengakuan tentang adanya kekuatan yang inenguasainya. Sehingga timbul perasaan takut berbuat keculi yang baik-baik saja. Jadi penanaman aqidah adalah masalah pendidikan rohani (jiwa) bukan akal pikiran, sedangkan jiwa itu telah ada dan melekat pada anak sejak lahir. Oleh karena itu, sejak awal pertumbuhannya harus ditanamkan rasa keimanan dengan sebaik-baiknya sebagai realisasi dan aspek pendidikan rohani.

2. Ruang Lingkup

Dengan ketiga macam pendidikan inilah yang dapat mengantarkan terbentuknya kepribadian muslim yang menjadi ruang lingkup pendidikan Islam (Zainuddin, 1991:126-127).

Menurut Abdurrahman Shaleh, (Nur Uhbiyati, 1977:236), menjelaskan ada tiga macam pengaruh lingkungan pendidikan terhadap keberagaman anak, yaitu:

- a. Lingkungan acuh tak acuh terhadap agama, yaitu adakalanya keberatan terhadap pendidikan agama, dan adakalanya pula agar sedikit tabu tentang persoalan itu.
- b. Lingkungan yang berpegang pada tradisi agama tetapi tanpa keinsyafan hati, biasanya lingkungan demikian menghasilkan anak-anak beragama yang tradisional tanpa kritik atau

beragama secara kebetulan.

- c. Lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam kehidupan agama.

Sebagai makhluk hidup, anak mempunyai kebutuhan, keinginan dan perasaan. Ia ingin mendapat perhatian, kasih sayang dari orang tuanya dan orang di sekitarnya, yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan pendidikan. Maka proses pendidikan bermula dari perhatian akhlak mulia dengan memberi *uswa al-hasanah*, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan daya nalar serta keterampilan yang dapat mendukung masa depan anak. (Muhaimin dan Abd. Mujib: 1993:68). Anak merupakan jaminan atau modal bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masa depan bangsa. Oleh karena itu, Sejak dini kepentingan anak perlu mendapat perhatian, terutama dalam pendidikan moral. Pendidikan moral yang dimaksud adalah pendidikan mengenal dasardasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa hingga ia menjadi seorang mukallaf. (Abdullah Nasih Ulwan,1981:75).

B. Tripusat sebagai Suatu Lembaga Pendidikan

Berkaitan dengan pendidikan anak, maka lembaga yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak dikenal istilah tripusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. Istilah Tripusat pendidikan ini adalah istilah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimaksudkan adalah pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan masyarakat. Ketiga lembaga pendidikan tersebut tidak dapat berjalan tanpa ada keterkaitan satu sama lain, sebab merupakan satu rangkaian dari tahap-tahap pendidikan yang harus berjalan seiring. (Ag. Soejono, 1997:97)

1. Keluarga Sebagai Pusat Pendidikan Utama dari Pertama

a. Pengertian

Secara etimologi, Ki Hajar Dewantara memberi pengertian tentang keluarga, yaitu rangkaian perkataan "kawula" dan "warga". Kawula berarti 'abdi' atau 'chamba', sedangkan warga berarti 'anggota'. Sebagai abdi dalam keluarga seseorang wajib menyerahkan segala kepentingannya kepada keluarganya. Sebaliknya, sebagai warga atau anggota ia berhak sepenuhnya ikut mengurus

segala kepentingan di dalam keluarganya. (Abu Ahmadi dan Nuruhbiyati, 1991:176)

Sedangkan secara oprasional, keluarga merupakan suatu struktur yang bersifat khusus, antara satu sama lain mempunyai ikatan apakah melalui nasab atau perkawinan. Intl keluarga adalah ayah ibu dan anak. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan negara. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan bathin yang dinikmati oleh suatu bangsa adalah cerminan dari keadaan keluarga yang hidup pada masyarakat tersebut. Begitupun sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan suatu bangsa juga merupakan cerminan keluarga yang ada di dalamnya. (Muhammad Amin Aliy, 1997:255). Maka lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama, dan mempunyai pengaruh terhadap peserta didik dalam menyongsong hari esok yang lebih cerah.

b. Peranan Keluarga dalam Pendidikan

Kita telah merasakan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utamadalam masyarakat karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang diterima seorang anak ketika lahir ke dunia adalah dari lingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik dan anak adalah peserta didik. Orang tua mempunyai tugas dan tnggung jawab dalam keluarga terhadap pendidikan anak lebih bersikap menentukan ; watak budi pekerti, latihan ketrampilan, pendidikan kesosialan.

Pendidika Segala hal yang dilakukan oleh orang tua merupakan proses pendidikan bagi anak karena pada masa-masa ini anak selalu meniru apa yang diperbuat oleh orang tua. Orang tua dapat membentuk anaknya sesuai keinginannya, jika orang tua ingin anaknya menjadi baik, maka orang tua harus mencontohkan hal-hal yang baik dalam kesehariannya baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, jika orang tua ingin anaknya menjadi orang yang tidak baik, maka contohkan hal-hal yang tidak baik pula dalam keseharian orang tua. Akan tetapi, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak baik, tetapi pada kenyataannya, kebanyakan orang tua tanpa sadar telah menjadikan

anaknya menjadi anak yang tidak baik dengan perbuatan orang tua yang tidak baik pula. Pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah modal penting dalam pendidikan anak ke jenjang selanjutnya.

Pembinaan dan Tanggung Jawab Pendidikan pada Orang Tua. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita. Dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974. yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera maka lahirlah anak dan kita wajib mendidiknya. Memelihara dan mendidik anak terus berlanjut sampai ia dikawinkan dan dapat berdiri sendiri. Bahkan memuat pasal 45 ayat 2 UU perkawinan ini, kewajiban dan tanggung jawab orang tua akan kembali apabila antara keduanya putus karena suatu hal maka anak ini kembali menjadi tanggung jawab orang tua, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran Surat At Tahrim: 6

غُلَاطٌ بِكُم مَلَائِكَةٌ وَالْحَجَارَةُ وَفُؤُهَا النَّاسُ نَارًا وَأَهْلِيكُمْ نَفْسِكُمْ قُوا أَمْنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُؤْمَرُونَ مَا يَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ لَا يَعْصُونَ شَيْدَادٌ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

c. Tanggung jawab Pendidikan

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Memelihara, membesarkan agar hidup berkelanjutan
- 2) Melindungi, mengayumi secara jasmani dan rohani
- 3) Mendidik berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan yang berguna bagi hidupnya
- 4) Membahagiakan anak dunia akhirat dengan membarikan pendidikan agama sesuai ketentuan Allah. Sebagai tujuan hidup muslim tanggung jawab juga di katagorikan sebagaitanggung jawab kepada Allah.

Agama islam selalu mengingatkan pemeluknya agar generasi pemeluknya agar generasi berikutnya lebih baik dari generasi berikutnya. Konsep pendidikan ini telah di anut bangsa indonesia sehingga dimasukkan kedalam GBHN (garis-garis besar haluan negara). Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan

membina anak secara terus menerus perlu di kembangkan kepada setiap orangtua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern secara perkembangan zaman, pendidikan yang di berikan dapat di gunakan untuk menghadapi lingkungan yang lambat. Upaya yang dapat ditempuh untuk dapat meningkatkan kualitas dari orang tua antara lain dengan cara belajar seumur hidup, sebagai mana yang diajarkan oleh Nabi muhammad SAW, yaitu : Belajar seumur hidup dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimat tanpa kecuali.

Bermacam-macam kepribadian anak yang di lakukan oleh orang tua terhadap anaknya, bila kepribadian yang diwarnai dengan pelajaran agama yang berkesinambungan, ini akan dapat membawa anak menjadi anak yang dewasanya manusia tang berkepribadian muslim, ia akan dapat bergaul dan menyesuaikan diri dengan teteangga ataupun masyarakat pada umumnya.

Pembentukan sikap sosial ini kadang kala agak terlupakan oleh sebagian orang tua. Padahal dalam ajaran islam “Hablum Minannas” ini sangat utama karena manusia makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupan. Para ahli didik dewasa ini mengakui besarnya peran seorang ibu dalam mendidik anaknya, walaupun ibu atau wanita di golong kan pada kaum yang lemah. Meskipun demikian secara kerohanian wanita adalah maluk Allah yang kuat dalam pendirian dan perinsip hidup dalam keluarga.

Dalam dirinya, terdapat perasaan halus, kasih sayang melebihi halusnya perasaan dan kasih sayang laki-laki, mungkin juga dengan sifat kewanitaannya, ia diberi Allah rahim yaitu suatu tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang serta kua, sehingga calon bayi yang tidur selama masa kandungan merasa aman didalamnya. Oleh Al-quran tempat ini disebut: makan hamin, yaitu tempat yang kuat dan kokoh. Dengan belaian tangan, ciumannya serta kata-katanya yang lemah lembut anaknya dekat dengannya, anak merasa lebih dekat dan lebih sayang padanya dibanding kedekatannya dengan kedekatannya dengan ayahnya. Oleh Sigmund Freud kedekatan anak (anak laki-laki) ini kepada ibunya ini menjadi teori Oedipus Kompleks. Yaitu pertentangan antara anak dan ayah. Oleh karena itu dalam konsep pendidikan Islam

kebahagiaan rumah tangga, lebih banyak berada di pihak ibu, karena ia dapat menciptakan suasana rumah yang harmonis melalui kasih sayang dan sapaannya yang menyejukan hati anaknya. Kita dapat mengetahui betapa besarnya peran ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya yang dapat membuahakan kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan, kepatuhan, dan penanaman nilai luhur serta norma-norma agama. Sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Alqur'an QS. [31] : 14, bahwa setiap anak wajib di berbakti, patuh dan berterimakasih kepada orang tuanya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَالْهَيْبَةُ كَافَّةٌ ۚ لَكُمْ فِيهِمْ مَكْرَهُمْ وَعَفْوُهُمْ ۗ فِى
عَافِيَةٍ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَإِلَى الْمَعِينِ ﴿١٤﴾

Artinya : "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun [1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu" (Qs. Lukman: 14) .

Beberapa sifat dan sikap yang mungkin muncul itu antara lain dikemukakan oleh Dr. Sis Heyster dalam bukunya Ilmu jiwa anak dan masa muda. Dan juga oleh Crijn dan Reksosiswojo dalam pengantar di dalam prakatek pengajaran dan pendidikan sebagai berikut, keras hati keras kepala, manja, perasaan takut, dusta, agresif (menyerang anak lain), cepat merajuk berkata gagap, ingin menang sendiri, menyembunyikan milik teman sendiri, dan gangguan anak yang disebut infant terrible.

2. Sekolah dan Fungsi Transformasi Pengetahuan

a. Pengertian Sekolah

Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. M. Sudomo mengutip pendapat *Eferett Reimer* menjelaskan bahwa sekolah merupakan lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru-guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat. (M. Sudono, 1987:25)

Hadari Nawawi, (1985:25), juga berpendapat bahwa sekolah merupakan organisasi kerja atau sebagai wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa sekolah adalah tempat anak didik mendapatkan paedagogik dan didaktik, tujuannya untuk mempersiapkan anak didik menurut bakat dan kecakapan masing-masing agar mampu berdiri sendiri dalam masyarakat. (Masan Shadily, tt.:300).

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang melakukan kegiatan pendidikan berdasarkan kurikulum tertentu yang melibatkan sejumlah orang (siswa dan guru) yang harus bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

b. Peran Sekolah atau Madrasah

Sebagai akibat dari perkembangan ilmu teknologi dan terbatasnya orang tua akan mengenai kedua hal tersebut, orang tua tidak mampu lagi mendidik anaknya. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut diperlukan orang lain yang lebih ahli. Prof. Dr. Sikun Pribadi menyatakan. “Karena orang tua tidak mampu memberikan pendidikan selanjutnya dalam berbagai kecakapan dan ilmu. Kita dapat menggambarkan masyarakat tanpa sekolah. Di dalam sekolah bekerja orang-orang khusus didik untuk keperluan mengajar.

Didalam dunia pendidikan istilah sekolah sudah sangat lazim. Sekolah merupakan salah satu pusat pendidikan yang diharapkan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sekolah dalam bahasa Inggris disebut “School” atau didalam dunia pendidikan Islam disebut Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis. Demikian menurut pendapat Dr. Hadari Nawawi dalam bukunya Administrasi Pendidikan. Formalitas pendidikan

madrasah mulai terangkat ketika adanya usaha pemerintah Indonesia menghapus warisan kebijakan Belanda yang membedakan antara sistem pendidikan Madrasah dengan sistem Pendidikan Sekolah biasa.

Di dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah di difenisikan sebagai “Satuan Pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar”. Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas kepercayaan dan tuntutan zaman. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggungjawab atas tiga faktor:

- 1) Tanggung Jawab Normal; Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan sesuai fungsi tugas dan tujuan pendidikan, harus melakukan pembinaan menurut ketentuan yang berlaku.
- 2) Tanggung Jawab Keilmuan; Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab mentransfer pengetahuan kepada anak didik.
- 3) Tanggung jawab fungsional; Sekolah atau madrasah selain harus melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, sekolah juga harus bertanggung jawab melalui pendidik (guru) untuk melaksanakan program yang terstruktur di dalam kurikulum.

3. Masyarakat dan Bentuk Pelibatattnya dalam Pendidikan

a. Pengertian

Masyarakat secara umum yang biasa juga disebut *society* yang merupakan kelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat atau lingkungan, yang bekerja sama dalam suatu ikatan aturan tertentu dibawah pimpinan yang disepakati dan berkeinginan untuk mencapai tujuan. Munir Mursiy Sarhan (1978), menjelaskan masyarakat bila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan, dan saling berinteraksi dengan sesamanya untuk mencapai tujuan. Lebih jauh Munir Mursiy Sarhan membagi lingkungan kepada dua bagian. Pertama, al-Muztama', al-Muhally yaitu komunitas manusia atau kelompok manusia dalam skala kecil, seperti komunitas penduduk desa, suku terasing, penduduk kota dan sterusnya. Kedua al-Mujtama' al-Kabir yaitu kelompok manusia dalam skala besar, seperti. kelompok

manusia yang hidup dalam suatu geografis tertentu. (Munir Mursiy Sarhan, 1978:230)

Secara kualitatif dan kuantitatif anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, suku bangsa, kebudayaan, agama. Setiap anggota masyarakat secara tidak langsung telah mengadakan kerjasama dan saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Mutahhari (M. Hashein, 1976:31), menjelaskan bahwa; Dalam suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang saling terkait oleh sistem, adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum khas dan hidup bersamanya. Hal masyarakat merupakan suatu tujuan umum dan semesta yang dapat dicapai oleh manusia. Secara kualitatif dan kuantitatif anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, potensi, keahlian, suku bangsa, kebudayaan, agama yang disebut dengan lapisan masyarakat sehingga disebut masyarakat majemuk. Setiap anggota masyarakat secara tidak langsung telah mengadakan kerja sama dan saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Demikianlah dinamika masyarakat berjalan secara terus menerus.

Dilihat dalam lingkungan pendidikan non formal, yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya untuk mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial yang lahir dan bathin dibawah. lindungan Allah swt.

b. Peranan Masyarakat dalam Pendidikan

Masyarakat apabila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi. Bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan baanyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Ia adalah laboratorium besar tempat para anggotanya mengamalkan semua keterampilan yang dimilikinya.

Di lihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang pluralistik (Majemuk) itu dan

mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan mental spiritual dan fisik atau kesejahteraan lahir dan batin.

Kalau lembaga pendidikan pendidikannya adalah guru. Maka kalau di masyarakat yang menjadi pendidikannya adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi lanjutan yang diletakan dasar-dasar oleh keluarga dan juga sekolah sebelum mereka masuk kedalam masyarakat.

Masing-masing anggotanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama melalui institusi atau lembaga yang dipimpinnya.

- 1) Mengawasi Jalannya Nilai Sosio-Budaya; Masyarakat Indonesia sejak dahulu sangat menjunjung tinggi nilai sosio budaya yang ada dalam masyarakat masing-masing bahkan sesuai dengan sikap masyarakatnya ada yang berkehendak melestarikan dan mengembangkannya.
- 2) Menyalurkan Aspirasi Masyarakat; Keinginan masyarakat untuk hidup bahagia dan sejahteraserta aman sejak pemerintatahan orde baru makin besar, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan menggalakan transmigrasi, sistem keamanan lingkungan (sikamling), posyandu dan lain-lain.
- 3) Pembinaan Kerjasama antara Orang Tua, sekolah dan Masyarakat; Proses pendidikan yang dilakukan oleh ketiga lingkungan tersebut dapat di kemukakan sebagai berikut, secara mental spiritual dasar-dasar pendidikan diletakan oleh rumah tangga, dan secara akademik konseptual dikembangkan oleh sekolah sehingga perkembangan pendidikan anak makin terarah. Betapa eratnya kerjasama yang terpadu dari ketiga macam lingkungan pendidikan untuk membawa anak kepada tujuan bersama, yaitu membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik untuk bangsa, negara, dan agama.

c. Unsur-unsur pokok yang ada dalam suatu masyarakat

Unsur-unsur pokok yang ada dalam suatu masyarakat adalah:

- 1) Adanya unsur kelompok manusia yang tinggal di daerah tertentu.
- 2) Mempunyai tujuan yang sama.
- 3) Mempunyai nilai-nilai dan aturan yang di taati bersama.
- 4) Mempunyai organisasi yang di taati.

Dengan demikian, Tri Pusat Pendidikan adalah tiga unsur penting yang sangat berperan dalam pendidikan dan menjadi pusat kegiatan pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang menerima pendidikan. Akibat dari perkembangan zaman dan keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, maka kegiatan pendidikan juga dilaksanakan disuatu lembaga yang disebut Sekolah atau Madrasah.

Pendidikan yang dilakukan disekolah atau madrasah disebut pendidikan formal. Masyarakat merupakan tempat atau unsur yang sangat berperan penting dalam pendidikan. lingkungan pendidikan masyarakat di sebut pendidikan nonformal.

Untuk membentuk kepribadian seorang anak hingga menjadi pribadi yang shaleh, cerdas, trampil dan mandiri maka diperlukan suatu pola kerjasama yang intensif antara Keluarga, Sekolah/Madrasah dan Masyarakat. Pola kerjasama awal ditentukan oleh keluarganya dalam hal ini orang tua anak tersebut, orang tua sebagai pemicu, pembimbing dan pemerhati utama bagaimana pendidikan anak selanjutnya disekolahnya ataupun di masyarakatnya.

C. Membangun Strategi Tiga Pilar Pendidikan

Dengan ketiga aspek pendidikan Islam, masing-masing mempunyai ruang lingkup yang secara khusus diberikan dalam lingkungan pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.

1. Lingkungan Pendidikan Keluarga.

Pendidikan keluarga sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup pendidikan keluarga, yaitu waktu atau masa pendidikan keluarga, pelaku pendidikan keluarga dan materi pendidikan keluarga.

a. Masa Pendidikan Keluarga

Pada intinya lembaga keluarga terbentuk melalui pertemuan suami dan isteri yang diistilahkan dengan perkawinan, sehingga berlangsung proses reproduksi, yang melahirkan keturunan. (Shaleh Abd. Azis. 1976:131). Orang tua memegang peranan penting dan memikul tanggung jawab pendidikan anak. Pada saat ini pemeliharaan dan pembiasaan sangat penting dalam pelaksanaan

pendidikan. Kasih sayang orang tua tercermin pada anak akibat hubungan darah diberikan pada anak secara wajar. Sehingga anak merupakan amanah Allah, sebagaimana Allah berfirman (QS. [66] :6)

تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ تَأْمَنُوا فَمَا أَغْنَتْكَ عَنْهُمْ آيَاتُنَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَقِيلًا يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ أُمْشَقٌ ثَقِيلًا لَا يَتَذَكَّرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَفَعَلُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At-Tahrim: 6).

Begitu pentingnya pendidikan dalam keluarga sehingga sebelum anak lahir atau selama bayi dalam kandungan sudah mendapatkan pendidikan yang biasa diistilahkan dengan masa prenatal. Sehubungan dengan itu, Fuaduddin (1999:5), menjelaskan bahwa, melalui fungsi reproduksi setiap keluarga mengharapkan anak memperoleh anak shaleh, keturunan yang berkualitas, sebagai perekat bangunan keluarga, tempat bergantung dihari ma, maupun sebagai generasi penerus cita-cita orang tua sebagai gemerasi penerus, mengharapkan agar anaknya kelak menjadi generasi yang berkuslitas, sehat jasinani, rohani, cerdas, bermoral, taat kepada Allah dan rasulnya serta taat kepada orang tua.

Al-Gazali (Shaleh Abd. Azis. 1976:131), berpendapat bahwa tingkat perkembangan anak terdiri dari lima tingkatan: Pertama, *janin*, yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan. Adanya kehidupan setelah diberi roh oleh Allah. Kedua, tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan dan kebiasaan sehingga mengetahui baik atau buruk. Ketiga, *altamyiz*, tingkat anak yang telah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang sedemikian rupa sehingga telah dapat memhami ilmu. Keempat, yaitu tingkata manusia yang telah berakal sempurna bahkan akal pikirannya telah berkembang secara maksimal sehingga telah menguasai ilmu `artity'. Kelima, *al-auliya* dan *al-anbiya*, yaitu tingkat tertinggi pada perkembangan manusia. Bagi para nabi telah mendapatkan ilmu pengetahuan dari

Tuhan melalui malaikat yaitu ilmu wahyu. Dan bagi para wali telah mendapatkan ilham yang tidak tahu bagaimana dan dari mana ilmu itu didapatkannya. (Hadari nawawi, 1985:150).

b. Subyek Pendidikan Keluarga

Untuk lebih menjelaskan betapa pentingnya pendidikan keluarga itu bagi tiap anak yang nantinya akan berada di tengah-tengah masyarakat sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab atas keluarganya dan juga sadar akan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, maka ada baiknya diketahui terlebih dahulu perbedaan dan kedudukan keluarga dahulu dan zaman sekarang. Dengan demikian dapat lebih jelas mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan penanggung jawab terhadap pendidikan dalam keluarga.

c. Materi Pendidikan Keluarga

Pendidikan dalam keluarga merupakan sendi pendidikan yang paling fundamental dibandingkan dengan sekolah dan masyarakat. Sebab sejak awal masa kehidupannya sang anak menerima pengaruh dari keluarga dan waktu yang dihabiskan di lingkungan keluarga lebih banyak berpengaruh terhadap anak.²⁴

Oleh karena itu menurut al-Gazali (tt: K 56), pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah pendidikan keimanan. Setelah pendidikan keimanan, maka pendidikan selanjutnya adalah pendidikan akhlak, selanjutnya al-Gazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.²⁵

2. Ruang Lingkup Pendidikan Sekolah.

Telah dikemukakan terdahulu orang tua selaku pendidik utama dalam lingkungan keluarga memiliki keterbatasan-keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang harus diberikan kepada anak-anaknya, maka keluarga harus dibantu. Dalam hal ini sekolah yang berkewajiban membantu keluarga atau orang tua dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya.

Pendidikan di sekolah biasanya disebut pendidikan formal, (al-Gazali, tt: K 56), karena pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis dan distandarisasikan. Seperti

halnya dalam ruang lingkup pendidikan keluarga, dalam lingkup pendidikan sekolah juga mempunyai masa atau waktu pendidikan, pelaku pendidikan sekolah dan materi pendidikan sekolah; masa atau waktu, pelaku, dan materi pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Masyarakat

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bangsa. Selanjutnya Soelaeman Joesoef dan Slamet Santoso (1981:61) menjelaskan bahwa; lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup (*life long education*).

Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas, dimasyarakatlah pendidikan itu berlangsung sampai akhir hayatnya. Islam memberikan tempat yang tinggi terhadap pendidikan. Hal itu bukan hanya sekedar konsepsi ajaran yang ideal, tetapi diperaktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Ini dapat dilihat dari pengalaman sejarah kehidupan nabi muhammad SAW, Khulafa *al-Ragyidin* bahkan sampai pada berakhirnya masa kejayaan Islam. Jadi masyarakat merupakan tempat pendidikan yang tidak terformalisasi, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan (M.Quraish Shihab, 1997:178).

RANGUMAN

1. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk individu lahir kedunia dengan suatu *hereditas* tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindahan dari cairan-cairan "germinal" dari pihak orang tuanya. Disamping itu individu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungannya, baik secara fisik, psikologi, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan dimaksud (Wasty Soemanlo, 998:82).
2. Lingkungan pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya suatu pendidikan yang Islami (sesuai dengan ajaran-ajaran Islam) baik

dari segi jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang mulia. Sedangkan macammacam lingkungan pendidikan, ini berbeda menurut para tokoh-tokoh pendidikan tetapi yang lebih signifikan menurut penulisan yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang sering disebut tri pusat pendidikan.

3. Pada dasarnya lingkungan pendidikan mencakup; (1) tempat (lingkungan fisik), keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan dam, (2) kebudayaan (lingkungan budaya) dengan warisan budaya tertentu bahasa, agama, seni, ekonomi, dan pandangan hidup, dan (3) kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, kelompok bermain dan sebagainya.
4. Lingkungan pendidikan sangat terkait antara lingkungan yang satu dengan yang lain, antara lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat dan sebaliknya. Yang jelas antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain saling menunjang.
5. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas, dimasyarakatlah pendidikan itu berlangsung sampai akhir hayatnya. Islam memberikan tempat yang tinggi terhadap pendidikan. Hal itu bukan hanya sekedar konsepsi ajaran yang ideal, tetapi diperaktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Ini dapat dilihat dari pengalaman sejarah kehidupan nabi muhammad SAW, Khulafa *al-Ragyidin* bahkan sampai pada berakhirnya masa kejayaan Islam. Jadi masyarakat merupakan tempat pendidikan yang tidak terformalisasi, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan.

PUSTAKA

- Abd, Rahman Getteng, (1997). *Pendidikan Islam. dalam Pembangunan, Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam.*
- Abdullah Nasih Ulwan. (1981). *Tarbiyah al Aulad fi Islam, Jilid I (Get. III) Beirut: Dar al Salam.*
- Abu Ahmadi dan Nuruhbiyati. (1991). *Ilmu Pendidikan, (Cet.1); Jakrta: Rineka Cipta.*
- Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Gazali, (t.th.), *Ihya Ulumuddin, Juz (al-Qahirah; al-Masyhad al-Husna.*
- Fuaduddin T.M, (1999). *Pengasuk anak (Cet. 1; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan fender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan the Asia Foundation.*

- Hadari nawawi. (1985). *Organisasi Sekolah dan Pengeloaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasan Shadily (t. th.). *Ensiklopedi Indonesia*. (Jilid V). Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoevah.
- Hasbunah,(1999) *Dasar-dasar Pendidikan*, (Cet.I). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Hashein (1976), Tejemahan dari Mutahhari “*Society and History* “Masyarakat dan Sejarah., (Cet. V) Mi'ra: Dar al-Ma aril.
- M. Ngaling Purwanto, (1994), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Cet.1). Bandung: Remaja Rosda karya.
- M. Quraish Shihab, (1997). *Membumikan al-Qurian*, (Cet. XV); Bandung: Mizan
- M. Soedomo, (1987). *Sekitar Eksistensi sekolah*, Yogyakarta: Henedita Offset.
- Muhaimin dan Abd. Mujib, (1993), *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis Keraugka dasar Oprasionalnya* (Cet. I); Bandung: Tirgenda Karya.
- Muhammad ‘Abd. Al-Aliy, (tt.). *The family Structure in Islam*. Maryland: International Grafic Printing Service.
- Muhammad Qutb, *Minhaj al-Tarbiyah*(1401 H.) Dar 4: Syuruq.
- Munir al-Mursiy Sarhan, (1978), *fi Ijtimainat al Tarbiyah*, (Cet. Al-Qahirah: Maktabah al-Anjlu al-Misniyyah.
- Nur Uhbiyati, (1997), *Ilmu Pendidikan Islam Untuk Fakukas Tarbiyah Komponen MKDK*, (Cet. I) ; Bandung: Pustaka Setia.
- Paulo Frcirc, (2000). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, (Cet. I);. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shaleh Abd. Azis.(1976) *aL Tarbiyah. al-Hadisahh Marldatulia, Mabadiuha, Tatbigatuha al-Arnaliyyah*, Jilid III (Cet. VII); Mi'ra: dar al-Ma'arif.
- Soejono Ag.. (1979). *Aliran Baru dalam Pendidikan*. Bagian ke-2 (Cet. I); Bandung: CV. Ilmu.
- Soelaeman Joesoef dan Slamet Santoso (1981), *Pertgantar Pendidikan Sosial* . Surabaya: Usaha nasional.
- Sutari Imam Barnadib. (1986). *Pengantara Ihnu Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: FIP IKIP.
- Wahyoetomo, (1997). *Perguruan Tinggi, Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*. (Cet. I) ; Jakarta: Gema Insani Press.
- Wasty Soemanlo, (1998). *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Zainuddin, (1991). *Seluk Beluk Pendidikan* dari *al-Gaztli* (Cet. I;) Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 6.....	135
TRI PUSAT PENDIDIKAN: PILAR UTAMA PENCAPAIAN	
TUJUAN PENDIDIKAN.....	135
Tujuan Pembelajaran:	135
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu	
untuk memahami:	135
▪ Manusia dan Lingkungan Pendidikan	135
▪ Konsep Dasar Tri Pusat Pendidikan	135
▪ Tripusat sebagai Suatu Lembaga Pendidikan.....	135
▪ Membangun Strategi Tiga Pilar Pendidikan.....	135
A. Konsep Dasar Tri Pusat Pendidikan	137
1. Pengertian Secara Proporsional.....	137
2. Ruang Lingkup	138
B. Tripusat sebagai Suatu Lembaga Pendidikan.....	139
1. Keluarga Sebagai Pusat Pendidikan Utama dari Pertama	139
2. Sekolah dan Fungsi Transformasi Pengetahuan	143
3. Masyarakat dan Bentuk Pelibatannya dalam Pendidikan	145
C. Membangun Strategi Tiga Pilar Pendidikan.....	148
1. Lingkungan Pendidikan Keluarga.	148
2. Ruang Lingkup Pendidikan Sekolah.	150
3. Ruang Lingkup Pendidikan Masyarakat	151
RANGUMAN.....	151
PUSTAKA.....	152

BAB 7

PROFESIONALISME GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami:

- Hakikat Mutu Pendidikan
- Hakikat Profesional
- Etos Kerja dan Profesionalisme Guru
- Tantangan Profesi Guru



untutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Dalam bab ini dibahas tentang mutu pendidikan, apa dan mengapa mutu, etos kerja dan profesionalisme guru serta tantangan dunia pendidikan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan otonomi daerah/desentralisasi pendidikan.

A. Hakikat Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu

Mutu adalah sifat dari benda dan jasa. Setiap orang selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain, sebaliknya orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari diri kita. Ini artinya, mutu bukanlah sesuatu yang baru, karena mutu adalah naluri manusia. Benda dan jasa sebagai produk dituntut mutunya, sehingga orang lain yang menggunakan puas karenanya. Dengan demikian, mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.

Benda dan jasa sebagai hasil kegiatan manusia yang secara sadar dilakukannya disebut kinerja. Kinerja itulah yang dituntut mutunya, sehingga muncul istilah mutu kinerja manusia atau kinerja disebut bermutu jika dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Oleh karena itu, maka suatu produk atau jasa sebagai kinerja harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya.

Dalam pembicaraan tentang mutu, terdapat unsur-unsur yang terkait, yaitu: produk dan jasa, penghasil produk/jasa, pelanggan, kebutuhan dan harapan, produk/jasa yang bermutu dan kepuasan.

Produk dan jasa adalah hasil yang diproduksi karena ada yang memerlukan. Orang yang membuat produk atau jasa disebut penghasil produk/jasa, sedangkan orang yang memerlukan produk/jasa itu disebut pelanggan. Adapun kebutuhan dan harapan adalah cerminan dari apa saja yang diharapkan atau dibutuhkan oleh pelanggan dari pihak penghasil produk/jasa. Adanya produk/jasa yang disebut bermutu bila dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari sekedar kebutuhan dan harapan pelanggan/ penggunaannya, yang ditandai dengan kepuasan.

2. Ciri-ciri Mutu

Ciri-ciri mutu (sebagai bentuk pelayanan pelanggan) ditandai dengan: (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) akurasi pelayanan, (3) kesopanan dan keramahan (unsur menyenangkan pelanggan), (4) bertanggung jawab atas segala keluhan (complain) pelanggan, (5) kelengkapan pelayanan, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi layanan, (8) pelayanan pribadi, (9) kenyamanan, (10) dan ketersediaan atribut pendukung (Slamet, 1999).

Setiap produk/jasa yang bermutu memberikan pelayanan tepat waktu seperti yang disepakati dengan pelanggan. Kemoloran atau tertundanya waktu dari yang telah disepakati menjadi cacat mutu karena cidera janji.

Akurasi pelayanan atau ketepatan produk/jasa seperti yang diminta atau dipesan oleh pelanggan juga merupakan salah satu dari ciri mutu pelayanan. Kesalahan atau kemelencengan dari apa yang dipesan, menyebabkan produk/jasa tersebut tidak bermanfaat bahkan mendatangkan kerugian bagi pelanggan. Untuk itu menjadi penting melakukan proses pendefinisian kebutuhan pelanggan sebelum proses produksi/layanan dilakukan.

Setiap pelayanan yang bermutu harus menyenangkan pelanggan, sehingga kesopanan dan keramah-tamahan dalam berkomunikasi dengan pelanggan menjadi unsur penting untuk menjaga mutu. Ungkapan sehari-hari dalam dunia bisnis: pembeli adalah raja maksudnya adalah berusaha menyenangkan pembeli agar kembali lagi untuk membeli di kesempatan lain.

Setiap penghasil produk/jasa harus berani bertanggung jawab atas segala yang telah diperbuatnya, ia harus mempertanggung jawabkan atas segala resiko yang diakibatkan oleh pekerjaan itu. Semua yang menjadi keluhan (complain) pelanggan harus dipertanggung jawabkan, jika produk tidak sesuai dengan yang dipesan/dibutuhkan sesuai janji kesepakatan sebelumnya, maka ia harus bertanggung jawab untuk menggantinya.

Sebagai penghasil produk/jasa haruslah selengkap mungkin menyediakan sarana dan kemampuan yang diperlukan oleh pelanggan. Ini artinya, bahwa penghasil produk/jasa haruslah profesional dan kompeten dengan bidangnya. Selain itu, sebagai penghasil produk/jasa haruslah memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk/jasa tersebut, baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, atau kemudahan menjangkanya.

Bentuk pelayanan hendaknya juga bervariasi, sehingga banyak pilihan bagi pelanggan. Inovasi haruslah digalakkan sehingga banyak temuan untuk menunjang variasi layanan tersebut.

Sedapat mungkin pelayanan bersifat pribadi lebih ditonjolkan, sehingga tidak terkesan kaku, fleksibel dan terkesan ada penangan khusus bagi pelanggan. Kenyamanan pelayanan harus pula diciptakan, misalnya berhubungan dengan

lokasi/ruangan, fasilitas pelayanan yang memadai seperti petunjuk-petunjuk yang mudah dikenali oleh pelanggan, dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Peranan atribut pendukung seperti lingkungan yang nyaman, kebersihan yang standar, ruangan ber AC, ruang tunggu dan lain-lain yang bersifat penunjang sangat diperlukan bagi suksesnya pelayanan mutu. Oleh karena itu perlu diperhatikan.

Konsep mutu sebenarnya selain bersifat absolut juga bersifat relatif dari pelanggannya. Mutu yang bersifat absolut menunjuk pada suatu produk/jasa yang standar tertentu, dipatok dengan ukuran tertentu oleh suatu lembaga yang memiliki otonomi untuk itu. Mutu suatu produk/jasa yang bersifat relatif berarti tergantung pada konsumennya/pelanggannya bagaimana mereka menetapkan standar kebutuhan dan harapannya.

Mengapa produk/jasa harus bermutu? Dalam persaingan bebas kita seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan harapan konsumen atau pelanggan (customers). Jika produk/layanan hasil kinerja kita tidak bermutu, maka customers akan meninggalkan kita, karena ada alternatif lain yang bisa dipilih oleh mereka. Jika penghasil produk/jasa ingin tetap berlangsung usahanya (dipakai oleh customers), maka ia harus menjaga mutu bahkan meningkatkan mutu produk/jasa layanannya seiring dengan tuntutan kebutuhan dan harapan customers.

3. Sifat-sifat Mutu

Adapun sifat-sifat pokok mutu jasa, menurut Slamet (1999) adalah mengandung unsur-unsur: (1) keterpercayaan (reliability), (2) keterjaminan (assurance), (3) penampilan (tangibility), (4) perhatian (emphaty), dan (5) ketanggapan (responsiveness).

Keterpercayaan dapat dihasilkan dari sikap dan tindakan seperti: jujur, tepat waktu pelayanan, terjaminnya rasa aman dengan produk/jasa yang dipergunakan/diperoleh, dan ketersediaan produk/jasa saat dibutuhkan pelanggan.

Keterjaminan suatu mutu jasa dapat ditimbulkan oleh kondisi misalnya penghasil produk/jasa memang kompeten dalam bidangnya, obyektif dalam pelayanannya, tampil dengan percaya diri dan meyakinkan pelanggannya.

Penampilan adalah sosok dari produk/jasa dan hasil karyanya. Misalnya bersih, sehat, teratur dan rapi, enak dipandang, serasi, berpakaian rapi dan harmonis, dan buatannya baik.

Empati adalah berusaha merasakan apa yang dialami oleh pelanggan (seandainya saya dia) Cara berempati dapat dinyatakan dengan penuh perhatian terhadap pelanggan, melayani dengan ramah dan memuaskan, memahami keinginan pelanggan, berkomunikasi dengan baik dan benar, dan bersikap penuh simpati.

Adapun ketanggapan adalah ungkapan cepat tanggap dan perhatian terhadap keluhan pelanggan. Ungkapan tersebut dapat dinyatakan dengan cepat memberi respon pada permintaan pelanggan dan cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan pelanggan.

Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha jasa yang memberikan pelayanan k pada pelanggannya yang utamanya yaitu kepada mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut.

Para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok (Sallis, 1993). Mereka itu adalah pertama yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (primary external customers). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary external customers). Pelanggan lainnya yang ketiga bersifat tersier adalah lapangan kerja, bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary external customers). Selain itu, yang keempat, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (internal customers). Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun finansial (Karsidi, 2000).

Seperti disebut diatas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

B. Hakikat Profesional

1. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya (Djam Satori, 2003:1.2). Batasan diatas mengandung arti bahwa jabatan atau pekerjaan yang disebut profesi itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, tetapi hanya dapat dilakukan oleh orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk memangku jabatan itu.

Bersumber dari istilah profesi muncul istilah-istilah lain seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Dalam buku Kapita Selekta Kependidikan SD, (Surya dkk, 2000: 45-49) memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut diatas sebagai berikut:

Istilah Profesional mempunyai dua makna. Pertama mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Kedua mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan baik formal maupun informal. Pengakuan formal diberikan oleh badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah atau organisasi profesi. Sedang pengakuan secara informal diberikan oleh masyarakat dan para pengguna jasa suatu profesi. Sebagai contoh, misalnya sebutan “guru profesional” adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal sesuai ketentuan berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatannya maupun dengan latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan, Ijazah, Akta, Sertifikat dan sebagainya. Dengan demikian guru SD yang telah memiliki Diploma 2 dapat dikatakan “guru profesional” karena telah memiliki pengakuan formal, dalam hal ini berupa “Diploma II” dan “Akta II”. Sebutan “guru profesional” juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap penampilan seseorang guru dalam unjuk kerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru.

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Pada dasarnya profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional.

Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan

dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, para guru secara bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada dasarnya profesionalisasi merupakan suatu proses pengembangan keprofesian yang sistematis dan berkesinambungan melalui berbagai program pendidikan baik pendidikan pra jabatan maupun pendidikan dalam jabatan . Program ini dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan badan atau organisasi lain yang terkait. Beberapa program profesionalisasi guru yang telah dan sedang berjalan antara lain program pendidikan guru di LPTK untuk mendidik calon guru yang profesional, program penyetaraan untuk membantu guru mencapai derajat kualifikasi profesional sesuai dengan standar yang berlaku, penataran dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi kemampuan guru.

2. Ciri-ciri Profesi

Diatas telah dikemukakan bahwa profesi itu suatu pekerjaan. Pertanyaan yang segeara muncul, apakah setiap jenis pekerjaan dapat disebut profesi? Bagaimana pendapat anda? Anda akan menjawab “ Ya “ atau “Tidak”. Saya setuju jika anda menjawab “tidak” karena pekerjaan yang disebut profesi itu memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Rachman Nata Widjaya dalam Djama dan Sutrisno (2003:1.4) Pekerjaan yang disebut profesi memiliki ciri-ciri sbb:

- a. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas.
- b. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.
- c. Ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya.
- d. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etik para pelakunya dalam memperlakukan kliennya.
- e. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.
- f. Ada pengakuan dari masyarakat (profesional, penguasa dan anam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.

Somesi dalam (Djama dan Sutrisno 2003 : 1.6) mengemukakan ciri-ciri profesi secara lebih rinci sebagai berikut :

- a. Suatu jabatan yang mempunyai fungsi dan signifikansi sosial.
- b. Jabatan yang menuntut ketrampilan / keahlian tertentu.
- c. Ketrampilan / keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- d. Jabatan itu bersandarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis dan eksplisit, yang bukan sekedar pendapat khalayak umum.
- e. Jabatan itu memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
- f. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
- g. Dalam memberikan layanan pada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
- h. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgment terhadap permasalahan profesi yang dihadapi.
- i. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
- j. Jabatan itu mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Ciri-ciri profesi menurut D. Westby Gibson dalam Djaman dan Satori dkk (2003; 1.7)

- a. Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
- b. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik dan prosedur yang unik.
- c. Diperlukannya persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang mampu melaksanakan suatu pekerjaan profesional.
- d. Dimilikinya mekanisme untuk menjaring, sehingga hanya untuk mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan bekerja untuk lapangan pekerjaan tertentu.
- e. Dimilikinya organisasi profesional, yang disamping melindungi kepentingan anggotanya dari saingan kelompok luar, juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk tindak etis profesional pada anggotanya.

Sutan Zanti Arbi dan Syahmiar Syahrudin (1991/1992:133) juga mengemukakan beberapa ciri pokok jabatan profesional sebagai

berikut :

- a. Pekerjaan itu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal.
- b. Pekerjaan itu mendapat pengakuan dari masyarakat.
- c. Adanya pengawasan dari suatu organisasi profesi seperti IDI< PGRI< dan PERSAHI.
- d. Mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab proses tersebut.

3. Profesi merupakan Suatu Pernnyataan atau Suatu Janji Terbuka

Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah baik. "Baik" dalam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Pernyataan janji itu bukan hanya sekadar keluar dari mulutnya, tetapi merupakan ekspresi kepribadiannya dan tampak pada tingkah lakunya sehari-hari.

Janji yang bersifat etik itu mau tak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Bila dia melanggar janjinya, dia akan berhadapan dengan sanksi tersebut, misalnya hukuman atau protes masyarakat, hukuman dari Tuhan, dan hukuman oleh dirinya sendiri. Jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu, dia akan berbuat sesuai dengan janji tersebut. Janji-janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi bersangkutan, dalam hal ini, Profesi kependidikan.

a. Profesi mengandung Unsur Pengabdian

Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti, bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak, atau menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Misalnya,

profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya bila berhadapan dengan pengadilan, profesi kedokteran adalah untuk kepentingan pasien agar cepat sembuh penyakitnya, profesi kependidikan adalah untuk kepentingan anak didiknya, profesi pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian agar masyarakat lebih sejahtera dalam bidang pangan, dan sebagainya. Dengan demikian, pengabdian yang diberikan oleh profesi tersebut harus sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Dengan pengabdian pada pekerjaan itu, seseorang berarti mengabdikan profesinya kepada masyarakat.

b. Profesi adalah Suatu Jabatan atau Pekerjaan

Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula.

Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, oleh sebab mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal atau malapetaka yang dahsyat. Itu sebabnya, kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom, karena didukung oleh:

- 1) Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian;
- 2) Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi, karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri;
- 3) Kelompok yang tergabung dalam profesi, yang menjaga

jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta;

- 4) Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut;
- 5) Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. (Dr. Sikun Pribadi, 1975).

4. Profesi Keguruan

Apakah pekerjaan guru (tenaga kependidikan) dapat disebut sebagai suatu profesi? Pertanyaan ini muncul karena masih ada pihak yang berpendapat bahwa pekerjaan kependidikan bukan suatu profesi tersendiri. Berbagai alasan yang mereka kemukakan antara lain, bahwa setiap orang dapat menjadi guru asalkan telah mengalami jenjang pendidikan tertentu ditambah dengan sedikit pengalaman mengajar. Karena itu seorang dapat saja mengajar di TK sampai dengan perguruan tinggi, jika dia telah mengalami pendidikan tersebut dan telah memiliki pengalaman mengajar di kelas. Selain dan itu, ada beberapa bukti bahwa pendidikan dapat saja berhasil walaupun si pengajarnya tidak pernah belajar ilmu pendidikan dan keguruan. Banyak orang tua seperti pedagang, petani, dan sebagainya yang telah mendidik anak-anak mereka dan berhasil, padahal dia sendiri tidak pernah mengikuti pendidikan guru dan mempelajari ilmu mengajar. Sebaliknya, tidak sedikit guru atau tenaga kependidikan lainnya atau sarjana pendidikan yang tidak berhasil mendidik anaknya. Jadi, kendati seseorang telah dididik menjadi guru, namun belum menjadi jaminan bahwa anaknya akan terdidik baik. Kritik lain yang sering dilontarkan ialah, hasil pendidikan di sekolah tidak dapat segera dilihat hasilnya, berbeda dengan profesi kedokteran atau teknologi pertanian misalnya.

Pandangan di atas dinilai terlalu picik. Profesi guru hendaknya dilihat dalam hubungan yang Luas. Sejumlah rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Peranan Pendidikan harus dilihat dalam Konteks Pembangunan

Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan manusianya sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Untuk menyukseskan pembangunan perlu ditata suatu sistem pendidikan yang relevan. Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-

orang yang ahli dalam bidangnya. Tanpa keahlian yang memadai maka pendidikan sulit berhasil. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan, tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan sistematis.

b. Hasil Pendidikan tak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat

Hasil pendidikan memang tak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi bisa dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Itu sebabnya proses pendidikan tidak boleh keliru atau salah kendatipun hanya sedikit saja. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli dalam bidang pendidikan dapat merusak satu generasi seterusnya dan akibatnya akan berlanjut terus. Itu sebabnya tangan-tangan yang mengelola sistem pendidikan dari atas sampai ke dalam kelas harus terdiri dari tenaga-tenaga profesional dalam bidang pendidikan.

c. Sekolah adalah Suatu Lembaga Profesional

Sekolah adalah suatu lembaga profesional. Sekolah bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya. Para lulusan sekolah pada waktunya harus mampu bekerja mengisi lapangan kerja yang ada. Mereka harus dipersiapkan melalui program pendidikan di sekolah. Para orang tua telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah. Mereka tidak cukup waktu untuk mendidik anaknya sebagaimana yang diharapkan. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk diberikan kepada anaknya. Sebagian tanggung jawab pendidikan anak-anak tersebut terletak di tangan para guru dan tenaga kependidikan lainnya sebabnya para guru harus dididik dalam profesi kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika kedudukan, fungsi, dan peran guru diakui sebagai suatu profesi.

Sesuai dengan hakikat dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di muka, sudah jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang penuh pengabdian pada masyarakat, dan perlu ditata berdasarkan kode etik tertentu. Kode etik itu mengatur bagaimana seorang guru harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma pekerjaannya, baik dalam hubungan dengan anak didiknya maupun dalam hubungan dengan

teman sejawatnya.

Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Dengan demikian dia memiliki kewenangan mengajar untuk diberikan imbalan secara wajar sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dengan demikian seorang calon guru seharusnya telah menempuh program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

5. Ciri-Ciri Guru yang Memiliki Profesionalisme Tinggi

Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan menampakkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar edial. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar edial. Yang dimaksud standar edial adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi, Ia berkeinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Citra profesi adalah suatu gambaran terhadap profesi guru berdasarkan pemikiran terhadap kinerjanya. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai macam cara, misalnya penampilan, cara bicara, sikap hidup sehari-hari dan sebagainya.
- c. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional, Ia akan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk :
- d. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti lokakarya, seminar, simposium dan sebagainya.
- e. Mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan.
- f. Melakukan penelitian, membuat karya ilmiah dan sebagainya. Mengejar kualitas dan cita-cita profesi, Ia akan berusaha untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Ia akan selalu aktif agar seluruh kegiatan dan perilakunya menghasilkan kualitas yang edial.
- g. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Guru yang memiliki

profesionalisme tinggi akan merasa bangga terhadap profesi yang dipengangnya. Ia menunjukkan rasa percaya diri akan profesinya.

d. Organisasi Profesi Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: "Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru". Lebih lanjut dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

Pasal	Bunyi Pasal
1	2
Pasal 41	<p>(1)Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.</p> <p>(2)Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3)Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.</p> <p>(4)Pembentukan organisasi profesi sebagaimana</p> <p>(5)dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.</p> <p>(6)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.</p>
Pasal 42	<p>Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:</p> <p>(1) menetapkan dan menegakkan kode etik</p> <p>(2) memberikan bantuan hukum kepada guru;</p> <p>(3) memberikan perlindungan profesi guru;</p> <p>(4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan</p> <p>(5) memajukan pendidikan nasional.</p>

6. Etika Kerja Guru

a. Makna Etika

Etika (ethic) bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) nilai mengenai benar dan

salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

b. Hakikat Etika

Etika, pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaikbaiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian akan terciptanya suatu pola-pola hubungan antar manusia yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, dsb.

Sebagai acuan pilihan perilaku, etika bersumber pada norma-norma moral yang berlaku. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling asasi, filsafat hidup (di negara kita adalah Pancasila), budaya masyarakat, disiplin keilmuan dan profesi. Dalam dunia pekerjaan, etika sangat diperlukan sebagai landasan perilaku kerja para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan etika kerja itu, maka suasana dan kualitas kerja dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif.

Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral tersebut di atas.

c. Kode Etik

Rumusan etika kerja yang disepakati bersama itu disebut kode etik. Kode etik akan menjadi rujukan untuk mewujudkan perilaku etika dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan. Dengan kode etik itu pula perilaku etika para pekerja akan dikontrol., dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi dari semua kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian akan terciptanya suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya.

Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-

- undangan yang berlaku.
- 2) Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.
 - 3) Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan.
 - 4) Melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Karena kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi, maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya. Khusus mengenai kode etik guru, di Indonesia, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.

7. Kode Etik Guru

a. Pengertian Kode Etik Guru

Interpretasi tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Berikut ini disajikan beberapa pengertian kode etik.

1) Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

2) Kongres PGRI ke XIII, Tahun 1973

Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam

melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (a) sebagai landasan moral, dan (b) sebagai pedoman tingkah laku.

3) Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), UU No 14 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dari beberapa pengertian tentang kode etik di atas, menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan normanorma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjukpetunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan- larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

b. Tujuan Kode Etik Guru

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi.profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut.

1) Menjunjung tinggi martabat profesi.

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.

Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah

minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

3) Pedoman berperilaku.

Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

4) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

5) Untuk meningkatkan mutu profesi.

Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

6) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

c. Penetapan Kode Etik Guru

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenankan

Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di tangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi

tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

d. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Guru

Seringkali negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa aksi perdata maupun pidana. Sebagai contoh dalam hal ini jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya karena kode merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan; sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik, akan mendapat cela dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggaran dikeluarkan dari organisasi profesi.

e. Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Seperti halnya profesi lain, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan. Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam Kongres ke XIII di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut.

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang

pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpenggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- 4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.
- 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- 7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- 8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- 9) Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

(Sumber: Kongres Guru ke XVI, 1989 di Jakarta).

C. Etos Kerja dan Profesionalisme Guru

1. Makna Etos kerja

Sebenarnya kata "etos" bersumber dari pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Kualitas unjuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini.

2. Unsur-unsur Etos Kerja

Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur

antara lain:

- a. Disiplin kerja; Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya. Disiplin yang dimaksud di sini adalah bukan disiplin yang mati dan pasif, akan tetapi disiplin yang hidup dan aktif yang didasari dengan penuh pemahaman, pengertian, dan keikhlasan.
- b. Sikap terhadap pekerjaan; Sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling berperan, karena sikap mendasari arah dan intensitas unjuk kerja. Perwujudan unjuk kerja yang baik, didasari oleh sikap dasar yang positif dan wajar terhadap pekerjaannya.
- c. Kebiasaan-kebiasaan bekerja; Mencintai pekerjaan sendiri. adalah salah satu contoh sikap terhadap pekerjaan. Demikian pula keinginan untuk senantiasa mengembangkan kualitas pekerjaan dan unjuk kerja merupakan refleksi sikap terhadap pekerjaan. Orientasi kerja, juga termasuk ke dalam unsur sikap seperti orientasi terhadap hasil tambah, orientasi terhadap pengembangan diri, orientasi terhadap pengabdian pada masyarakat. Kebiasaan kerja, merupakan pola-pola perilaku kerja yang ditunjukkan oleh pekerja secara konsisten. Beberapa unsur kebiasaan kerja antara lain: kebiasaan mengatur waktu, kebiasaan pengembangan diri, disiplin kerja, kebiasaan hubungan antar manusia, kebiasaan bekerja keras.

Dengan demikian, etos kerja merupakan tuntutan internal untuk berperilaku etis dalam mewujudkan unjuk kerja yang baik dan produktif. Dengan etos kerja yang baik dan kuat sangat diharapkan seseorang pekerja akan senantiasa melakukan pekerjaannya secara efektif dan produktif dalam kondisi pribadi yang sehat dan berkembang. Perwujudan unjuk kerja ini bersumber pada kualitas kompetensi aspek kepribadian yang mencakup aspek religi, intelektual, sosial, pribadi, fisik, moral, dsb. Hal itu dapat berarti bahwa mereka yang dipandang memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat akan memiliki keunggulan.

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesian kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu: profesi, semi profesi, terampil, tidak terampil, dan quasi profesi.

Gilley dan Egglend (1989) mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini

meliputi aspek yaitu:

- 1) Ilmu pengetahuan tertentu
- 2) Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan
- 3) Berkaitan dengan kepentingan umum

Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi tersebut juga merupakan standar pengukuran profesi guru.

3. Pendekatan Proses Evolusi

Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status professional (peningkatan status). Secara teoritis menurut Gilley dan Egglan (1989) pengertian professional dapat didekati dengan empat perspektif pendekatan yaitu orientasi filosofis, perkembangan bertahap, orientasi karakteristik, dan orientasi non-tradisional.

a. Orientasi Filosofi

Ada tiga pendekatan dalam orientasi filosofi, yaitu pertama lambang keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lissensi, dan akreditasi. Akan tetapi penggunaan lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. Pendekatan kedua yang digunakan untuk tingkat keprofesionalan adalah pendekatan sikap individu, yaitu pengembangan sikap individual, kebebasan personal, pelayanan umum dan aturan yang bersifat pribadi. Yang penting bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh dan bermanfaat bagi penggunaannya. Pendekatan ketiga: eclectic, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode dan konsep dari berbagai sumber, sistim, dan pemikiran akademis. Proses profesionalisasi dianggap merupakan kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. Pendekatan ini berpandangan bahwa pandangan individu tidak akan lebih baik dari pandangan kolektif yang disepakati bersama. Sertifikasi profesi memang diperlukan, tetapi tergantung pada tuntutan penggunaannya.

b. Orientasi Perkembangan

Orientasi perkembangan menekankan pada enam langkah pengembangan profesionalisasi, yaitu:

- 1) Dimulai dari adanya asosiasi informal individu-individu yang memiliki minat terhadap profesi.
- 2) Identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu.
- 3) Para praktisi biasanya lalu terorganisasi secara formal pada suatu

lembaga.

- 4) Penyepepatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu.
- 5) Penentuan kode etik.
- 6) Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu (termasuk syarat akademis) dan pengalaman di lapangan.

c. Orientasi Karakteristik

Profesionalisasi juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi/ pekerjaan. Ada delapan karakteristik pengembangan profesionalisasi, satu dengan yang lain saling terkait:

- 1) Kode etik
- 2) Pengetahuan yang terorganisir
- 3) Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus
- 4) Tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan
- 5) Sertifikat keahlian
- 6) Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan tanggung jawab
- 7) Kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi
- 8) Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh anggota profesi

d. Orientasi Non-Tradisional

Perspektif pendekatan yang keempat yaitu prespektif non-tradisional yang menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, misalnya termasuk pentingnya sertifikasi profesional dan perlunya standarisasi profesi untuk menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan.

Tentu saja, pekerjaan guru tidak diragukan untuk dapat dikatakan sebagai profesi pendidikan dan pengajaran. Namun, hingga kini pekerjaan untuk melakukan pendidikan dan pengajarannya masih ering dianggap dapat dilakukan leh iapa aja. nilah tantangan bagi profesi guru. Paling tidak hal ini masih sering terjadi di lapangan.

Profesionalisme guru perlu didukung oleh suatu kode etik guru yang berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Kelembagaan profesi guru (seperti PGRI) sangat diperlukan untuk menghindari terkotak-kotaknya guru karena alasan

struktur birokratisasi atau kepentingan politik tertentu.

Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasarat untuk menjadi guru profesional.

Menurut Surya (2003) guru yang profesional harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan ketrampilan metodologi. Guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga dan organisasi profesi. Selain itu, guru juga harus mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Disinilah peran Perguruan Tinggi Pendidikan dan organisasi profesi guru (seperti PGRI) sangat penting. Kerjasama antar keduanya menjadi sangat diperlukan. Lembaga Pendidikan dalam memproduksi guru yang profesional tidak dapat berjalan sendiri, kecuali selain harus bekerjasama dengan lembaga profesi guru, dan sebaliknya.

Untuk itu, maka pengembangan profesionalisme guru juga harus mempersyaratkan hidup dan berperannya organisasi profesi guru tenaga kependidikan lainnya yang mampu menjadi tempat terjadinya penyebarluasan dan pertukaran ide diantara anggota dalam menjaga kode etik dan pengembangan profesi masing-masing.

Orientasi mutu, profesionalisme dan menjunjung tinggi profesi harus mampu menjadi etos kerja guru. Untuk itu maka, kode etik profesi guru harus pula ditegakkan oleh anggotanya dan organisasi profesi guru harus pula dikembangkan kearah memiliki otoritas yang tinggi agar dapat mengawal profesi guru tersebut.

D. Tantangan Profesi Guru

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu

kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan.

Perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar.

Wen (2003) seorang usahawan teknologi mempunyai gagasan mereformasi sistem pendidikan masa depan. Menurutnya, apabila anak diajarkan untuk mampu belajar sendiri, mencipta, dan menjalani kehidupannya dengan berani dan percaya diri atas fasilitasi lingkungannya (keluarga dan masyarakat) serta peran sekolah tidak hanya menekankan untuk mendapatkan nilai-nilai ujian yang baik saja, maka akan jauh lebih baik dapat menghasilkan generasi masa depan. Orientasi pendidikan yang terlupakan adalah bagaimana agar lulusan suatu sekolah dapat cukup pengetahuannya dan kompeten dalam bidangnya, tapi juga matang dan sehat kepribadiannya. Bahkan konsep tentang sekolah di masa yang akan datang, menurutnya akan berubah secara drastis. Secara fisik, sekolah tidak perlu lagi menyediakan sumber-sumber daya yang secara tradisional berisi bangunan-bangunan besar, tenaga yang banyak dan perangkat lainnya. Sekolah harus bekerja sama secara komplementer dengan sumber belajar lain terutama fasilitas internet yang telah menjadi sekolah maya.

Bagaimanapun kemajuan teknologi informasi di masa yang akan datang, keberadaan sekolah tetap akan diperlukan oleh masyarakat. Kita tidak dapat menghapus sekolah, karena dengan alasan telah ada teknologi informasi yang maju. Ada sisi-sisi tertentu dari fungsi dan peranan sekolah yang tidak dapat tergantikan, misalnya hubungan guru-murid dalam fungsi mengembangkan kepribadian atau membina hubungan sosial, rasa kebersamaan, kohesi sosial, dan lain-lain. Teknologi informasi hanya mungkin menjadi pengganti fungsi penyebaran informasi dan sumber belajar atau sumber bahan ajar. Bahan ajar yang semula disampaikan di sekolah secara klasikal, lalu dapat diubah menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dari manapun secara individu. (Karsidi, 2004)

Iniilah tantangan profesi guru. Apakah perannya akan digantikan

oleh teknologi informasi, atau guru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang peran profesinya.

Dunia pendidikan harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistim pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan teknologi informasi tersebut. Melalui penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang tepat (sebagai bagian dari teknologi pendidikan), maka perbaikan mutu yang berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus secara konsisten/konstan akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha memilih jenis teknologi informasi yang tepat, sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan.

Pemilihan jenis media sebagai bentuk aplikasi teknologi dalam pendidikan harus dipilih secara tepat, cermat dan sesuai kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya.

Bergesernya paradigma pembangunan yang sentralistik ke desentralistik telah mengubah cara pandang penyelenggara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat itu sendiri dan bukan semata kepentingan negara. Pembangunan seharusnya mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan sekaligus penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya dalam arti yang lebih

luas. Dengan demikian, masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapinya, baik secara individual maupun secara kolektif.

Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peranserta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri. Penguatan partisipasi masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri, lebih-lebih dalam era globalisasi. Peranserta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Kontrol rakyat (anggota masyarakat) terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pembangunan bagi dirinya atau kelompoknya. (Karsidi, 2004)

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian otoritas pemerintah pusat ke daerah, untuk mendistribusikan beban pemerintah pusat ke daerah sehingga daerah dan masyarakatnya ikut menanggung beban tersebut. Tujuannya adalah: (1) mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil di tingkat lokal, (2) meningkatkan partisipasi masyarakat, (3) menyusun program-program perbaikan pada tingkat lokal yang lebih realistis, (4) melatih rakyat mengatur urusannya sendiri, (5) membina kesatuan nasional yang merupakan motor penggerak memberdayakan daerah. Dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah pusat lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan mendasar (menetapkan standar mutu pendidikan secara nasional), sementara kebijaksanaan operasional yang menyangkut variasi keadaan daerah didelegasikan kepada pejabat daerah bahkan sekolah.

Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, ada bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu: (1) Substansi pendidikan yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah, seperti PKN, Sejarah Nasional, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia; (2) Pengendalian mutu pendidikan, berdasarkan standar kompetensi minimum; (3) Kandungan minimal konten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar; (4) Standarstandar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan.

Program-program pembelajaran di sekolah berupa desain kurikulum dan pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan nonkurikuler sampai

pada pengadaan kebutuhan sumber daya untuk suatu sekolah agar dapat berjalan lancar, tampaknya harus sudah mulai diberikan ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pula di lembaga-lembaga pendidikan lainnya nonsekolah, ruang partisipasi tersebut harus dibuka lebar agar tanggung jawab pengembangan pendidikan tidak tertumpu pada lembaga pendidikan itu sendiri, lebih-lebih pada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesigapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dari pihak masyarakat (termasuk orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat) juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagai contoh tentang partisipasi dunia usaha/industri pada era otonomi daerah. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan/sekolah sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan output yang baik dan mengkritiknya jika terdapat output yang tidak baik. Partisipasi dunia usaha/industri terhadap lembaga pendidikan harus ikut bertanggung jawab untuk menghasilkan output yang baik sesuai dengan rumusan harapan bersama. Demikian juga kelompok-kelompok masyarakat lain, termasuk orang tua siswa. Dengan cara seperti itu, maka mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan akan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan dan komponen-komponen lainnya di masyarakat.

PENUTUP

Program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing pelanggan di atas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

Untuk mencapai kondisi guru yang profesional, para guru harus menjadikan orientasi mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku

dalam tugas-tugas profesinya. Karenanya, maka kode etik profesi guru harus dijunjung tinggi.

Dalam perkembangannya, disadari bahwa profesi guru belum dalam posisi yang ideal seperti yang diharapkan, namun harus terus diperjuangkan menuju yang terbaik. Pada saat diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, dipahami bahwa banyak tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi untuk dapat diselesaikan oleh para guru dan lembaga penyelenggara pendidikan.

Tantangan dan peluang tersebut antara lain: berubahnya peran guru dalam manajemen proses belajar mengajar, kurikulum yang terdesentralisasi, pemanfaatan secara optimal sumber-sumber belajar lain dan teknologi informasi, usaha pencapaian layanan mutu pendidikan yang optimal, dan penegakan profesionalisme guru. Para guru mempunyai tantangan untuk dapat beradaptasi dengan sebaik-baiknya dalam situasi transisi, agar dapat memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positifnya. Menyikapi hal-hal demikian, tidak lain maka para guru haruslah dapat mengembangkan suatu perilaku adaptif agar berhasil mengemban profesinya di era otonomi daerah dan era global ini. Dengan cara demikian, karena guru adalah soko guru pendidikan, mudah-mudahan peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah segera akan tercapai.

RANGKUMAN

Dalam pembicaraan tentang mutu, terdapat unsur-unsur yang terkait, yaitu: produk dan jasa, penghasil produk/jasa, pelanggan, kebutuhan dan harapan, produk/jasa yang bermutu dan kepuasan.

Produk dan jasa adalah hasil yang diproduksi karena ada yang memerlukan. Orang yang membuat produk atau jasa disebut penghasil produk/jasa, sedangkan orang yang memerlukan produk/jasa itu disebut pelanggan. Adapun kebutuhan dan harapan adalah cerminan dari apa saja yang diharapkan atau dibutuhkan oleh pelanggan dari pihak penghasil produk/jasa. Adanya produk/jasa yang disebut bermutu bila dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari sekedar kebutuhan dan harapan pelanggan/ penggunaanya, yang ditandai dengan kepuasan.

Program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing

pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

Profesi, pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.

Profesional, merujuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjuk kepada orangnya. Profesionalisasi, proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui inservice training dan atau preservice training. Profesionalisme, merujuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional dan penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi; dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Etos kerja merupakan tuntutan internal untuk berperilaku etis dalam mewujudkan unjuk kerja yang baik dan produktif. Kode Etik Guru di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi yang berwenang sesuai dengan profesinya.

Profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek yaitu: (a) Ilmu pengetahuan tertentu, (b) Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan (c) Berkaitan dengan kepentingan umum. Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi tersebut juga merupakan standar pengukuran profesi guru.

Professional dapat didekati dengan empat prespektif pendekatan

yaitu orientasi filosofis, perkembangan bertahap, orientasi karakteristik, dan orientasi non-tradisional.

Terdapat tantangan dan peluang dalam pengembangan profesi guru antara lain: berubahnya peran guru dalam manajemen proses belajar mengajar, kurikulum yang terdesentralisasi, pemanfaatan secara optimal sumber-sumber belajar lain dan teknologi informasi, usaha pencapaian layanan mutu pendidikan yang optimal, dan penegakan profesionalisme guru. Para guru mempunyai tantangan untuk dapat beradaptasi dengan sebaik-baiknya dalam situasi transisi, agar dapat memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positifnya. Menyikapi hal-hal demikian, tidak lain maka para guru haruslah dapat mengembangkan suatu perilaku adaptif agar berhasil mengembangan profesinya di era otonomi daerah dan era global ini. Dengan cara demikian, karena guru adalah soko guru pendidikan, mudah-mudahan peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah segera akan tercapai.

PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
- Hamalik, Oemar. (2004). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Supriadi, Dedi. (1998). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Surya, Mohamad. (2003). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung : Yayasan Bhakti Winaya
- Depdiknas, 2001. *Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta.
- Djam an Satori dkk, 2003. *Profesi Keguruan 1*, Universitas Terbuka.

- Maman Achdiat, 1981. Pembentukan Profesional Keguruan, Penlok P3G.
- Surya, HM. 2000. Kapita Selekta Kependidikan SD, Universitas Terbuka.
- Sutan Zanti Arbi, Syahmiar Syahrin, 1991/1992. Dasar-Dasar Kependidikan, Dirjen Dikti Depdikbud.
- Gilley, Jerry W. dan Steven A. Egglan, (1989). *Principles of Human Resources Development*. New York: Addison Wesley Pub. Company. Inc.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi (ed). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta.
- _____, (2004). *Reaktualisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Sallis, Edward. (1993). *Total Quality Management in Education*, Kogam Page, London.
- Slamet, Margono, (1999). *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, IPB Bogor.
- Surya, Muhammad. (2003). *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Wen, Sayling. (2003). *Future of Education (Masa Depan Pendidikan)*, alih bahasa Arvin Saputra, Batam: Lucky Publisher.

BAB 7.....	155
PROFESIONALISME GURU	155
DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA	
OTONOMI DAERAH	155
Tujuan Pembelajaran:	155
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu	
untuk memahami:	155
▪ Hakikat Profesional.....	155
▪ Konsep Profesional.....	Error! Bookmark not defined.
▪ Profesi Keguruan.....	Error! Bookmark not defined.
▪ Etika Kerja Guru	Error! Bookmark not defined.
▪ Kode Etik Guru	Error! Bookmark not defined.
▪ Organisasi Profesi Guru	Error! Bookmark not defined.
▪ Etos Kerja dan Profesionalisme Guru	Error! Bookmark not defined.
▪ Tantangan Profesi Guru.....	Error! Bookmark not defined.
A. Hakikat Mutu Pendidikan.....	157
1. Pengertian Mutu.....	157
2. Ciri-ciri Mutu	157
3. Sifat-sifat Mutu	159
B. Hakikat Profesional.....	161
1. Pengertian Profesi	161
2. Ciri-ciri Profesi	162
3. Profesi merupakan Suatu Pernnyataan atau Suatu Janji	
Terbuka.....	164
4. Profesi Keguruan.....	166
5. Ciri-Ciri Guru yang Memiliki Profesionalisme Tinggi	168
6. Etika Kerja Guru	169
7. Kode Etik Guru	171
KODE ETIK GURU INDONESIA	174
C. Etos Kerja dan Profesionalisme Guru	175
1. Makna Etos kerja	175
2. Unsur-unsur Etos Kerja	175
3. Pendekatan Proses Evolusi.....	177
D. Tantangan Profesi Guru.....	179
1. Perkembangan Teknologi Informasi	179
2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan	181
PENUTUP	183
RANGKUMAN.....	184

PUSTAKA..... 186

- Hakikat Mutu Pendidikan
- Hakikat Profesional
- Etos Kerja dan Profesionalisme Guru
- Tantangan Profesi Guru

BAB 8

REFORMASI

PENDIDIKAN NASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- Hakikat Reformasi Pendidikan
- Langkah untuk Reformasi
- Implikasi Reformasi Pendidikan



endidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengembangan sistem pendidikan terkini, seharusnya merupakan perubahan yang mendasar dan menyeluruh, atau lazim disebut dengan reformasi pendidikan. Namun harus diakui bahwa reformasi pendidikan itu masih banyak merupakan wacana ketimbang tindakan konkrit. Usaha reformasi belum didukung oleh konsep yang tepat dan jelas serta belum ada kebijakan yang mantap. Reformasi pada hakekatnya adalah perubahan menyeluruh dan mendasar dalam segala aspek kehidupan. Perubahan menyeluruh dan mendasar ini disebut pula sebagai perubahan paradigma atau perubahan sistemik.

Perubahan ini tidak sekedar menambah apa yang sudah ada seperti misalnya menambah guru dan gedung sekolah (*doing more of the same thing*). Perubahan semacam ini baru merupakan awal atau gelombang pertama reformasi. Gelombang perubahan kedua menambah yang sudah ada dengan yang lebih baik atau melaksanakan yang sudah pernah dilakukan dengan cara yang lebih baik. Contoh gelombang kedua ini misalnya menambah guru yang bergelar sarjana, meningkatkan syarat dosen yang bergelar Doktor, membangun gedung sekolah dilengkapi dengan penyejuk udara, atau meningkatkan efisiensi dalam kegiatan penambahan (*doing more of the same but doing it better*). Pada gelombang ketiga perubahan dilakukan dengan meningkatkan efektivitas sistem yang sudah ada dengan membenahi komponen-komponen tertentu seperti misalnya mengembangkan kurikulum baru atau menggantikan EBTRANAS dengan sistem evaluasi baru (*increasing the effectiveness of the the present system by rearranging its components*) (Banathy, 1991; Miarso,1998a; Reigeluth & Garfinkle,1992).

A. Hakikat Reformasi Pendidikan

1. Pengertian Reformasi

Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa krisis ini dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi di bidang pendidikan [Suyanto dan Hisyam, 2000:1]. Pada era reformasi ini, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan.

Tilaar (1999:3), mengatakan masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Euforia demokrasi sedang marak dalam masyarakat Indonesia. Di tengah euforia demokrasi ini lahirlah berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Upaya untuk membangun suatu masyarakat, bukan pekerjaan yang mudah, karena sangat berkaitan dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Diperlukan berbagai terobosan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan, "dengan kata lain diperlukan suatu paradigma-paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Menurut Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan" [Tilaar, 1998:245].

Berbicara masalah reformasi pendidikan, banyak substansi yang harus direnungkan dan tidak sedikit pula persoalan yang membutuhkan jawaban. Sektor pendidikan memiliki peran yang strategis dan fungsional dalam upaya membangun suatu masyarakat. Pendidikan senantiasa berusaha untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu perubahan, karena pendidikan sebagai "sarana terbaik yang didisain untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka" (Conference Book, London, 1978 :15-17).

Jika kita mau berpikir dengan menempatkan pendidikan dalam dataran rohani, pendidikan tidak memiliki titik henti yang sudah pasti terminalnya, tetapi merupakan sebuah roda yang terus berputar seiring dengan denyut kehidupan itu sendiri. Di sinilah dinamikan pendidikan akan senantiasa tampak dalam dialog segar dan mampu membuka wacana berpikir bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejak jalannya sendiri. Khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan, dan agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri (Suyanto dan Hisyam, 2000:1-2), maka pendidikan Islam dalam perkembangannya setidaknya didisain untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, agar merupakan sebuah potret di kemudian hari.

Apakah reformasi itu? Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Orang-orang yang melakukan atau memikirkan reformasi itu disebut reformis yang tak lain adalah orang yang menganjurkan adanya usaha perbaikan tersebut tanpa kekerasan.

Reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial dan tentu saja termasuk bidang pendidikan. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Oleh karena itu reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa karakteristik reformasi dalam suatu bidang tertentu yaitu adanya keadaan yang tidak memuaskan pada masa yang lalu, keinginan untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang, adanya perubahan besar-besaran, adanya orang yang melakukan, adanya pemikiran atau ide-ide baru, adanya sistem dalam suatu institusi tertentu baik dalam skala kecil seperti sekolah maupun skala besar seperti negara sekalipun.

2. Tindakan Reformasi Pendidikan

Reformasi atau perubahan paradigma dalam pendidikan pada dasarnya adalah melakukan tindakan lain yang berbeda berdasarkan pola pikir yang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Masalah yang kita hadapi sekarang tidak mungkin kita selesaikan dengan cara lama yang telah menimbulkan masalah yang kita hadapi. Perkembangan lingkungan tersebut diantaranya adalah tuntutan atas HAM, desentralisasi pengelolaan, dan demokrasi partisipatif. Dalam bab ini reformasi pendidikan akan dibahas dengan perspektif teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sendiri merupakan disiplin (pengetahuan terapan) yang baru berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970an. Implikasi Reformasi terhadap Persekolahan dan Pendidikan Islam.

Perubahan paradigma dari pola yang serba sentralistik menjadi pola yang desentralistik merupakan konsekuensi dari proses demokratisasi yang pada saat ini tengah diimplementasikan di negara kita. Maraknya tuntutan reformasi total dalam kehidupan berbangsa termasuk didalamnya reformasi pendidikan nasional semakin lama semakin diperlukan, mengingat proses pendidikan nasional merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dipahami apabila penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di mana transaksi layanan tersebut dilakukan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Dengan kata lain upaya untuk mendekatkan *stakeholders* pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut pemerataan dan perluasan layanan, mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan sangatlah beralasan. Inilah gagasan yang melatarbelakangi paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan, yang seperti telah disebutkan di atas, sangatlah erat kaitannya dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, yang ketentuannya telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Produk hukum tersebut mengisyaratkan terj adinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akontabilitas pendidikan.

Reformasi pendidikan menuntut adanya cara berpikir dan bertindak yang berbeda dari apa yang telah ada, dengan mengadakan diagnosis secara menyeluruh atau perubahan paradigma dengan pendekatan yang sistemik. Paradigma yang sistemik kecuali bersifat menyeluruh, harus pula memperhatikan bahwa perubahan mendasar pada salah satu aspek pendidikan, akan mempengaruhi perubahan mendasar pada aspek-aspek lain. Perubahan itu dapat dibedakan dalam empat lapis sistem yang saling berkaitan (*nested systems*). Pada lapis pertama adalah perubahan pada pengalaman belajar; lapis kedua pada sistem belajar-pembelajaran yang memungkinkan terlaksananya pengalaman belajar yang diinginkan seperti misalnya dalam sekolah. Lapis ketiga adalah perubahan pada pengelolaan sistem di wilayah, yang mendukung terselenggaranya sistem pembelajaran, dan lapis keempat adalah perubahan pada sistem perundangan yang mengatur dan menjamin berlangsungnya keseluruhan sistem pendidikan secara nasional. (Banathy,1991; Reigeluth & Garfinkle, 1992).

Berdasarkan hakekat reformasi sebagai pemberdayaan warga, maka sudah seharusnya perhatian utama diberikan pada perubahan pada lapis pertama, yaitu pengalaman belajar, dengan konsekuensi dan implikasi pada perubahan pada lapis kedua sampai keempat. Pendekatan mulai lapis pertama disebut pula sebagai pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*). Selama ini apa yang terjadi adalah pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*), dimana Pemerintah pusat menentukan perundangan dan serangkaian peraturan pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh jajaran di bawah, sampai di ruang kelas atau lingkungan belajar tempat peserta didik atau warga belajar memperoleh dan mengembangkan pengalaman belajarnya.


Sistem pendidikan nasional kita yang lalu pada dasarnya adalah bertujuan untuk membudayakan peserta didik/warga belajar. Kebijakan ditentukan sangat sentralistis (*etatisme*), sehingga tidak memberi peluang bagi wilayah apalagi sekolah dan guru untuk mengembangkan prakarsa yang sesuai dengan karakteristik peserta

didik dan kondisi lingkungan. Pada hakekatnya anak didik diindoktrinasi untuk menelan pelajaran yang diberikan. Gurupun “diprogram” untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya secara baku sesuai dengan pedoman tertentu. Kenyataan ini pada dasarnya mengingkari hak seseorang, atau kurang memanusiaikan para peserta didik/warga belajar.

Dengan pendekatan dari bawah ke atas maka perhatian utama diberikan kepada peserta didik/warga belajar agar mereka menguasai tugas belajar dan mampu mengatasi persoalan belajar. Semua satuan penyelenggara pendidikan, termasuk sekolah, pusat kegiatan belajar masyarakat, perguruan tinggi dsb., wajib mengelola sumber daya yang diperlukan dan mengatur penggunaannya. Pada Gambar 8.1. dapat dilihat pendekatan paradigma lama dan reformatif.

PENDEKATAN LAPIS	PARADIGMA LAMA (<i>Top-down approach</i>)	PARADIGMA REFORMATIF (<i>Bottom-up approach</i>)
Nasional (Sistem Pendidikan)	Menetapkan ketentuan Perundangan bertujuan a.l. untuk membudayakan peserta didik	Menjamin tersedianya aturan pokok dan sumber daya yang diperlukan
Wilayah (Sistem Pengelolaan) Provinsi, Kabupaten & Kota	Menerbitkan Peraturan Petunjuk Operasional dari perundangan yang ada	Menyediakan informasi dan bantuan, menjabarkan aturan serta mem-bagi dan mengawasi sumber daya yang diperlu-kan
Sekolah (Sistem Belajar - Pembelajaran)	Melaksanakan petunjuk dan mengawasi kegiatan	Merancang pedoman pelaksanaan serta me- ngelola sumber daya dan penggunaannya
Pengalaman Belajar	Peserta didik merespons pelajaran yang diberikan	Peserta didik menguasai tugas belajar serta mampu memecahkan masalah belajar

Keterangan:

 = Fokus kebijakan

Gambar 8.1. Perbandingan Antara Paradigma “Top-down” dan “Bottom-up”

Perubahan paradigma ini (dari pembudayaan ke pemberdayaan peserta didik/warga belajar) mempengaruhi semua aspek pendidikan lain, bahkan memicu tumbuhnya serangkaian paradigma lain. Perubahan paradigma ini memunculkan konsep-konsep baru; empat konsep baru yang saya anggap terpenting adalah: pembelajaran; belajar berbasis aneka sumber (*resource-based learning*); pengelolaan berbasis sekolah (*school-based management*); dan pola pembelajaran atau pendidikan alternatif.

a. Pembelajaran

Pembelajaran adalah merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus kepada kepentingan, karakteristik dan kondisi orang lain agar ia/mereka dapat belajar dengan efektif dan efisien. Istilah ini merupakan paradigma baru yang menekankan pada prinsip keragaman peserta didik atau pemelajar (*learner*), dan menggantikan istilah “pengajaran” atau “mengajar” yang menekankan pada prinsip keseragaman. Istilah pengajaran lebih banyak berarti sebagai upaya penyampaian informasi kepada pihak lain. Latar belakang teoritiknya didasarkan pada teori psikologi behavioristik dan teori komunikasi searah. Sedangkan konsep pembelajaran didasarkan pada teori psikologi konstruktivistik dan teori komunikasi konvergensi. Konsep pembelajaran ini merupakan inti pada lapis pengalaman belajar, yaitu dimana peserta didik/pemelajar membangun diri sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungannya.

b. Belajar berbasis aneka sumber (BEBAS),

Belajar berbasis aneka sumber (BEBAS), adalah satu paradigma baru pada lapis kedua dalam pendekatan dari bawah, yaitu sistem belajar dan pembelajaran. Sistem belajar-pembelajaran kebanyakan masih sangat memusat pada peran guru (*teacher-centered learning*) – tanpa guru tidak terjadi belajar. Beberapa konsep baru cara belajar seperti CBSA (cara belajar siswa aktif) dan belajar keterampilan proses telah diperkenalkan dan dilaksanakan (di atas kertas). Namun ke dua konsep tersebut masih mengacu pada paradigma lama yaitu memusatnya pada peran guru. Reformasi paradigma dengan BEBAS memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik/warga belajar untuk memilih dan menentukan sendiri sumber yang digunakannya untuk belajar. Tugas utama guru dan dosen serta setiap tenaga kependidikan adalah menumbuh-kembangkan sikap (termasuk

sikap ilmiah) dan membangkitkan motivasi belajar dengan memberikan keteladanan. Di dalam kelas, guru/dosen merupakan pengelola kegiatan belajar yang lebih banyak berupa memberikan bantuan interaktif dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar. Peserta didik/pemelajar lebih banyak dituntut untuk mampu belajar mandiri serta belajar secara kooperatif dengan teman sejawat dan orang lain dalam lingkungannya.

c. Pengelolaan Berbasis Sekolah,

Pengelolaan pembelajaran, pada dasarnya adalah perubahan pada lapis ketiga (sistem pengelolaan), dan merupakan konsekuensi langsung dari perubahan paradigma pengalaman belajar pada lapis pertama dan BEBAS pada lapis kedua. Arti pengelolaan berbasis sekolah ini adalah : pelimpahan wewenang pada lapis sekolah untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber-sumber berdasarkan aturan akuntabilitas yang berkaitan dengan sumber tersebut. Tujuan pengelolaan berbasis sekolah adalah agar sekolah dapat :

- 1) meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber
- 2) meningkatkan efektivitas sekolah melalui perbaikan mutu belajar-pembelajaran
- 3) lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi kustomer
- 4) menambah kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti pendidikan
- 5) memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk keluarga untuk berpartisipasi dalam menyelenggaraan pendidikan.

Meskipun sekolah diberikan otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan, namun sekolah tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Ada beberapa rambu-rambu konseptual maupun legal yang harus diikuti. Salah satu rambu-rambu konseptual tersebut adalah visi, misi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

d. Pola Pendidikan Alternatif,

Pola pendidikan alternatif sebenarnya bukan merupakan hal yang baru samasekali. Bahkan pada awal diselenggarakannya pendidikan ribuan tahun yang lalu, pendidikan berlangsung dengan berbagai pola : ada yang diselenggarakan di rumah oleh orangtua

sendiri, di tempat ibadah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Kemajuan zaman kemudian justru menyeragamkan pola-pola yang berbeda itu ke dalam suatu struktur dan lembaga yang disebut sekolah. Paradigma pendidikan baru yang intinya memberdayakan masyarakat (termasuk peserta didik/warga belajar dan orangtua/keluarga mereka) menuntut adanya kebebasan kepada warga masyarakat untuk belajar apa saja yang diminati dan dibutuhkan, asal tidak bertentangan dengan kaidah moral dan falsafah bangsa. Demikian pula dalam melaksanakan prinsip belajar sepanjang hayat, seharusnya diberikan kesempatan dan kebebasan kepada warga masyarakat tanpa melihat usianya untuk memperoleh pendidikan apa saja, dari siapa saja, di mana saja, pada jalur dan jenjang mana saja dan kapan saja, yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pribadi, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

1) Pengertian Pendidikan Alternatif

Pengertian “pendidikan alternatif” meliputi sejumlah besar cara pemberdayaan peserta didik/warga belajar yang dilakukan berbeda dengan cara yang konvensional. Meskipun caranya berbeda, namun semua pola pendidikan alternatif mempunyai tiga kesamaan yaitu : a) pendekatannya yang lebih bersifat individual; b) memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik/warga belajar, orangtua/keluarga mereka, dan para pendidik; dan c) dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan.

Pertimbangan ontologis pendidikan alternatif meliputi sejumlah postulat sebagai berikut : a) manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda; b) manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri; c) manusia berkembang sesuai dengan potensi genetika dan lingkungan yang mempengaruhinya; d) manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah dan membentuk kepribadiannya.

Dengan serangkaian postulat ini maka hakekat pendidikan alternatif adalah memberikan kemungkinan pendidikan yang sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kondisi manusia yang bersangkutan. (Miarso, 1998.b).

2) Bentuk Pendidikan Alternatif

Berbagai bentuk pendidikan alternatif adalah :

- a) Pendidikan di rumah (*home schooling*) yang diselenggarakan

- oleh orangtua/ keluarga
- b) Pendidikan di tempat ibadah, termasuk pendidikan pesantren
 - c) Pendidikan bagi peserta didik/warga belajar yang bermasalah (mereka yang menjadi korban kemiskinan, kriminalitas, pertikaian dsb.) seperti pendidikan bagi anak jalanan.
 - d) Pendidikan terprogram yang direkayasa melalui berbagai bentuk sarana seperti teks terprogram, pembelajaran berbasis komputer (*computer based instruction*) dll.
 - e) Pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), termasuk berbagai macam kursus dan kegiatan belajar tidak terstruktur.
 - f) Pendidikan terbuka yang memberikan kesempatan kepada siapa saja, untuk belajar apa saja yang diperlukan, kapan saja, dan dimana saja.
 - g) Pendidikan berjaringan yang menekankan terjadinya interaksi beragam dengan semua pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kompetensi yang diinginkan oleh masing-masing peserta didik/pemelajar.

Berbagai bentuk pendidikan alternatif ini yang merupakan bagian integral dalam reformasi paradigma pendidikan pada lapis keempat yaitu sistem pendidikan.

Perubahan tersebut merupakan unsur imperatif dalam masyarakat madani, dan karena itu perlu terus dikembangkan dan dibina dengan dukungan kebijakan dan pendanaan.

Mengingat bahwa pendidikan itu merupakan investasi sumberdaya manusia jangka panjang dan berlangsung seumur hidup, maka reformasi menyeluruh tidak mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek. Pembaharuan itu perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh – yaitu meliputi seluruh komponen dalam sistem pendidikan. Tuntutan akan pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran telah mendorong tumbuh dan berkembangnya disiplin keilmuan yang disebut teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berusaha menjawab bagaimana konsep-konsep pembaharuan pendidikan dan pembelajaran dapat dilaksanakan.

A. Konsep dan Kontribusi Teknologi Pendidikan

Semua bentuk teknologi adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk sesuatu tujuan tertentu, yang pada intinya adalah mempermudah manusia dalam memperingan usahanya,

meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Teknologi itu pada hakekatnya adalah bebas nilai, namun penggunaannya akan sarat dengan aturan nilai dan estetika. Teknologi merupakan suatu bidang yang tak terpisahkan dengan ilmu pengetahuan, seperti misalnya teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi komunikasi, dan tentunya juga teknologi pendidikan. Setiap teknologi, tak terkecuali teknologi pendidikan, merupakan **proses** untuk menghasilkan nilai tambah, sebagai **produk** atau piranti untuk dapat digunakan dalam aneka keperluan, dan sebagai **sistem** yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan untuk suatu tujuan tertentu.

1. Teknologi Pendidikan sebagai Disiplin Keilmuan

Teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan berpegangan pada serangkaian postulat sebagai berikut:

- a. Lingkungan kita senantiasa berubah. Perubahan itu ada yang direkayasa, ada yang dapat diperkirakan, namun sebagian besar tidak dapat kita ketahui sebelumnya.
- b. Jumlah penduduk semakin bertambah, meskipun dengan prosentase yang mengecil. Mereka semua perlu belajar, dan belajar itu berlangsung seumur hidup, di mana saja, dan dari siapa saja.
- c. Sumber-sumber tradisional semakin terbatas, karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Kecuali itu harus pula diciptakan sumber baru, dan didayagunakan sumber yang masih belum terpakai (*idle*).
- d. Adalah hak setiap pribadi untuk dapat berkembang semaksimal mungkin, selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan
- e. Masyarakat berbudaya teknologi, yaitu bahwa teknologi merupakan bagian yang tertanam (*imbedded*) dan tumbuh dalam setiap masyarakat, dengan kadar yang berbeda.

Berdasarkan postulat itu kita ketahui bahwa ada serangkaian gejala belajar yang belum tergarap secara baik. Gejala itu adalah:

- a. Adanya sejumlah besar orang yang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus, maupun yang dapat diperoleh secara mandiri
- b. Adanya berbagai sumber baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa, tetapi belum dapat dimanfaatkan untuk

keperluan belajar.

- c. Perlu adanya suatu usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut agar dapat terpenuhi hasrat belajar setiap orang.
- d. Perlu adanya pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien dan selaras.

Ke empat gejala ini merupakan rujukan bidang garapan teknologi pendidikan, yang antara lain berfungsi untuk memberikan kesempatan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, termasuk menjangkau peserta didik/pemelajar di tempat yang jauh dan terasing dan melayani sejumlah besar dari mereka yang belum memperoleh kesempatan pendidikan, meningkatkan efektivitas dan daya tarik belajar, mendayagunakan berbagai sumber untuk keperluan belajar, serta untuk memperoleh akses terhadap berbagai informasi sebagai bagian dari tuntutan belajar.

2. Pendekatan Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai, dan meneliti proses, sumber dan sistem **belajar** pada manusia. Teknologi pendidikan berpegangan pada enam pendekatan dalam menjalankan fungsinya, yaitu :

- a. Pendekatan isomeristik berupa penggabungan berbagai kajian/bidang keilmuan (teori sistem, psikologi, komunikasi, informatika, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik dsb.) ke dalam suatu kebulatan tersendiri;
- b. Pendekatan bersistem dan mensistem, dengan memandang sesuatu secara menyeluruh serta berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan
- c. Pendekatan sinergistik yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri.
- d. Pendekatan efektivitas dan efisiensi dengan jalan mendayagunakan sumber yang sengaja dikembangkan dan sumber yang tersedia.
- e. Pendekatan produktivitas dengan memberikan masukan tambahan atau masukan baru menggantikan yang lama dengan hasil yang meningkat
- f. Pendekatan inovatif dengan mengkaji permasalahan secara holistik

dan kemudian mencari jawaban baru yang belum ada sebelumnya.

Berdasarkan pendekatan itu maka teknologi pendidikan tidak hanya membantu memecahkan masalah belajar dalam konteks sekolah, namun dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat, dengan mengembangkan dan/atau menggunakan beraneka sumber. Dalam konteks sekolah teknologi pendidikan berkembang dari apa yang semula dikenal dengan istilah didaktik dan metodik. Namun karena belajar tidak hanya dalam konteks sekolah, tetapi dalam seluruh konteks masyarakat, maka teknologi pendidikan beroperasi dimana belajar itu diperlukan, baik oleh perorangan, kelompok maupun organisasi.

3. Kontribusi Teknologi Pendidikan dalam Pembaharuan Sistem Pendidikan

Kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam lima kategori yaitu: (a) Penyediaan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar, (b) Pengintegrasian konsep, prinsip dan prosedur dalam sistem pendidikan, (c) Pengembangan sistem belajar-pembelajaran yang inovatif, (d) Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar dan pembelajaran, dan (e) Peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif.

Kelima kategori ini dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan karena saling berkaitan dan menunjang, antara lain:

- a. Kategori pertama meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga dalam bidang teknologi pendidikan. Pendidikan keahlian pada jenjang Sarjana telah dimulai pada tahun 1976, dan Pascasarjana pada tahun 1978. Sedangkan pelatihan tenaga telah dimulai tahun 1972 meliputi tenaga terampil dalam memproduksi media pembelajaran, hingga tenaga terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Termasuk pada jenjang pendidikan tinggi adalah program PPAI (Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional) yang antara lain menyelenggarakan pelatihan keterampilan pembelajaran dosen perguruan tinggi.
- b. Kategori kedua meliputi konsep pembelajaran yang menggantikan

pengajaran, konsep sumber belajar, konsep belajar berbasis aneka sumber, prinsip pengembangan potensi peserta didik yang beragam, prinsip pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*), serta prosedur proses pembelajaran dan penilaian. Semua konsep, prinsip, dan prosedur ini telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, dan tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 serta berbagai peraturan turunannya, seperti standar proses pembelajaran, standar sarana dan prasarana dan standar penilaian.

- c. Kategori ketiga meliputi pengembangan berbagai pola pembelajaran alternatif karena adanya dorongan internal kebutuhan akan pendidikan. Pola itu meliputi SMP Terbuka, belajar di rumah (*homeschooling*), pembelajaran terprogram (PAMONG), pembuatan berbagai paket atau sumber belajar (Kejar Paket A, B dan C, modul untuk belajar mandiri, media audiovisual dll.), dan pemanfaatan lingkungan untuk belajar (*community and environment-based learning*).
- d. Kategori keempat terkait erat dengan pola ketiga, namun lebih didasarkan pada faktor eksternal, yaitu tersedianya berbagai sarana yang ada dalam masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk penerapannya meliputi serial program siaran televisi ACI (Aku Cinta Indonesia, 1984-1985), penataran guru melalui siaran radio dan televisi, paket belajar multimedia, pembelajaran berbantuan komputer (CAI = computer assisted instruction), dan pengembangan sistem belajar berjaringan (*e-learning* dan *online learning*), untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- e. Kategori kelima terutama ditujukan untuk peningkatan kemampuan mereka yang berkarya dalam masyarakat atau dalam dunia dan lapangan kerja. Kemampuan itu sendiri dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu : (1) kemampuan memperoleh informasi yang diperlukan; (2) kemampuan untuk mengolah dan menggunakan informasi hingga menjadi pengetahuan yang mendasari kebijakan (*wisdom*); dan (3) kemampuan untuk membentuk sikap positif terhadap diri dan lingkungannya. Jelaslah bahwa peran penyampaian misi dan informasi pendidikan hanya merupakan sebagian dari peran teknologi pendidikan.

B. Langkah-langkah untuk Reformasi

Mencermati kondisi sekarang ini apa yang perlu dilakukan, nampaknya hal yang urgen adalah kita harus menyusun langkah-langkah untuk reformasi pendidikan dan harus melepaskan diri dari paradigma Orde Baru, karena pola pikir kita, pandangan, bertindak dan berbuat sekarang ini masih menggunakan paradigma produk pendidikan selama era Orde Baru. Maka "untuk menghapuskan ciri dan eksese negatif proses dan hasil pendidikan selama Orde Baru, pemerintah sekarang perlu dengan sadar mengambil berbagai kebijakan reformasi secara substansial, dan kebijakan tersebut perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa ini [Suyanto dan Hisyam, 2000:8).

Untuk menjawab persoalan tersebut, saat ini pemerintah telah memiliki tujuh poin arah kebijakan program pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1999- 2004, sebagai berikut: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi, (2)meningkat kemampuan akademik dan profesional, (3) melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum, (4) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, (5) melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen, (6) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik masyarakat maupun pemerintah, dan (7) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah" (GBHN,1999-2000:23-24). Tujuh poin strategi arah kebijakan program pendidikan nasional yang dicanakan, bisa diharapkan dan meyakinkan bahwa pendidikan nasional kita secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keunggulan kompetitif di masa akan datang.

Maka dengan tujuh poin sasaran kebijakan program pendidikan nasional tersebut, perlu dijabarkan secara operasional dengan menata kembali kondidisi pendidikan nasional kita yaitu perlu ditempuh berbagai langkah baik pada bidang manajemen, perencanaan, sampai pada praksis pendidikan di tingkat mikro. Beberapa usulan langkah-langkah reformasi pendidikan nasional untuk menyongsong milenium ketiga adalah

sebagai berikut:

1. Merumuskan Visi dan Misi

Merumuskan visi dan misi pendidikan nasional kita yaitu : "(1) Pendidikan hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis. (2) Pendidikan hendaknya memiliki misi agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh komponen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi terdidik" [Suyanto dan Hisyam, 2000:8].

2. Isi dan Substansi Pendidikan Nasional

Isi dan substansi pendidikan nasional yaitu : (1) Substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreativitas siswa dalam totalitasnya. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pendidikan dasar tidak semata-mata hanya mengacu pada NEM. Persoalan-persoalan yang terkait dengan paradigma baru mengenai keberhasilan seseorang perlu mendapatkan perhatian secara emplementatif. (2) Substansi pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hendaknya membuka kemungkinan untuk terjadinya pengembangan individu secara vertikal dan horizontal. Pengembangan vertikal mengacu pada struktur keilmuan, sedangkan pengembangan horizontal mengacu pada keterkaitan dan relevansi antar bidang keilmuan. (3) Pendidikan tinggi hendaknya jangan semata-mata hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja. Tetapi lebih jauh dari itu harus memperkuat kemampuan dasar mahasiswa yang memungkinkan untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global. (4) Pendidikan nasional perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan dalam kelas belajar atas dasar kemampuan akademik. (5) Pengembangan sekolah perlu menggunakan pendekatan *community based education*. Dalam model ini, sekolah dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. (6) Untuk menjaga relevansi outcome pendidikan, perlu diimplementasikan filsafat rekonstruksionisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praksis pendidikan. Dengan berorientasi pada filsafat ini, pendidikan akan

mampu merekonstruksi berbagai bentuk penyakit sosial, mental dan moral yang ada dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya akan dapat ditanamkan sikap-sikap toleransi etnis, rasial, agama, dan budaya dalam konteks kehidupan yang kosmopolis dan plural [Suyanto dan Hisyam, 2000:11-12]..

3. Manajemen dan Anggaran

Ketiga, manajemen dan anggaran yaitu : (1) Perguruan tinggi perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan accountability quality assurance. Dengan prinsip ini pada akhirnya perguruan tinggi harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, orang tua, mahasiswa, maupun pemerintah. (2) Manajemen pendidikan sekolah dasar hendaknya berada dalam satu sistem agar terjadi efisiensi administrasi dan efisiensi pembinaan akademik para guru. (3) Pendidikan tinggi hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibel dan dinamis agar memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan tuntutan eksternal yang dihadapinya. (4) Pengembangan akademik di perguruan tinggi perlu fleksibilitas yang tinggi agar tercipta kondisi persaingan akademik yang sehat. (5) Guru dan dosen harus diberdayakan secara sistematis dengan melihat aspek-aspek, antara lain : kesejahteraan, rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, dan perlindungan profesi. (6) School based management perlu dikembangkan dalam kerangka desentralisasi atau devolusi pendidikan, agar lembaga-lembaga pendidikan dapat mempertahankan akuntabilitasnya terhadap stake holder pendidikan nasional. (7) Pendidikan hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai agar dapat mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan. Untuk itu, perlu ada peningkatan anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25% dari APBN yang sedang berjalan. Karena anggaran pendidikan di Indonesia sangat rendah sehingga tidak mampu untuk mendukung berbagai inovasi di bidang pendidikan [Suyanto dan Hisyam, 2000:11-13].

Usulan-usulan reformasi pendidikan nasional tersebut, apabila dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, mendasar dan perlu ada realisasi yang nyata, maka bangsa Indonesia siap untuk memasuki

melienium ketiga. Sebab fondasi dan pilar-pilar pendidikan yang dibangun akan mampu berdiri kokoh menghadapi badai dan gelombang sebesar apa pun yang akan terjadi.

Maka, untuk mengantisipasi perubahan dan langkah-langkah yang diusulkan pada pendidikan nasional tersebut, untuk pendidikan Islam perlu dipersiapkan dengan melakukan terobosan pemikiran kembali suatu konsep pendidikan Islam yang baru yang dapat menjawab tantangan dan perubahan milineum ketiga. Sebab pendidikan Islam perlu dikembalikan kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat. Pendidikan Islam perlu melakukan pembaruan dengan mewujudkan visi dan misi baru. Karena apabila kita ingin melakukan perubahan pendidikan Islam menuju masyarakat global pada milineum ketiga harus mempunyai visi yang jelas, "yaitu visi yang sesuai dengan konstitusi ialah mewujudkan hak-hak asasi manusia dan mengembangkan tanggung jawab anggota masyarakat yang dicita-citakan" [Tilaar, 1999:4].

Oleh karena itu, "sistem pendidiakn Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan [Azyumardi Azra, 1999:57] yang terjadi. Maka, pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional, juga ikut mengalami perubahan politik bangsa pada era reformasi ini dituntut untuk merumuskan kembali visi pendidikan Islam yang baru untuk mewujudkan perannya yaitu membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Islam Indonesia.

C. Implikasi Reformasi Pendidikan

1. Reformasi pada Tingkat Pendidikan Perskolahan

Sebagai produk inovatif, tuntutan logisnya diperlukan pemahaman mengenai konsep tersebut dalam konteks persekolahan di Indonesia, bagaimana kebijakan-kebijakan pendukungnya, bagaimana mensosialisasikan ide tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bagaimana rancangan konstruksi implementasi kurikulum, kondisi-kondisi apa yang perlu dipenuhi untuk kepentingan implementasi tersebut, dan perlunyaantisipasi terhadap masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi.

Tinjauan ini memilih dua topik utama yang mendominasi

paradigma baru pendidikan dan menyita banyak perhatian masyarakat dan dunia pendidikan selama ini, yaitu (1) Desentralisasi pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (School-based Management, SBM), (2) Pembaharuan kurikulum yang mengarah pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence-based Curriculum, CBC).

a. Manajemen Berbasis Sekolah (School-based Management)

Dalam rangka reformasi pembangunan nasional yang lebih berorientasi kepada pengembangan potensi daerah secara optimum, pemerintah bersama DPR menetapkan UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut merupakan perbaikan terhadap UU No.5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU Otonomi Daerah ditetapkan secara eksplisit bahwa daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan dan mengelola berbagai sektor pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan, kecuali yang menyangkut urusan pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, agama, kebijakan moneter, dan sistem peradilan. Kelima sektor ini tetap merupakan pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Salah satu sektor penting pembangunan masyarakat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah pembangunan bidang pendidikan. Selama ini, pembangunan bidang pendidikan hampir seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat secara sentralistik, baik yang menyangkut kurikulum, sistem pengelolaan, sistem evaluasi, maupun sistem pembiayaannya. Kebijakan pengelolaan sistem pendidikan yang sentralistik ini mengakibatkan kurangnya pengembangan potensi daerah untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam kurikulum 1994, misalnya, semua daerah dituntut untuk melaksanakan kurikulum nasional secara sama rata, tanpa melihat bahwa setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ada alokasi “muatan lokal”, namun hal ini belum bisa mengakomodasi kepentingan daerah, karena alokasinya terlalu sedikit dan strategi penetapannya yang masih sentralistik.

Sejalan dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah, maka pengelolaan sistem pendidikan secara bertahap didesentralisasikan

kepada daerah. Untuk mendukung upaya desentralisasi pengelolaan pendidikan ini, perlu dicari model pengelolaan sistem pendidikan yang mampu mendukung pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia di daerah masing-masing, sehingga dengan sistem desentralisasi ini mutu pendidikan menjadi makin baik dan makin meningkat secara signifikan. Masalah yang muncul adalah model manajemen pendidikan bagaimanakah yang dapat mendukung upaya pemanfaatan potensi daerah tersebut?. Sebagai option dari upaya pemecahan masalah ini, maka para ahli mengusulkan untuk mengadopsi model *School-Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) sebagai model pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi sistem pengelolaan pendidikan.

Perubahan pengelolaan sekolah dengan sistem MBS akan memunculkan berbagai perubahan pada berbagai hal, yang salah satunya perubahan dalam manajemen mutu tenaga kependidikan di sekolah. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan (guru) dalam MBS merupakan hal yang cukup mendasar, yang mampu membawa perubahan pada setiap unsur sekolah. Hal tersebut berimplikasi dengan munculnya strategi/program sekolah untuk merencanakan, membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan personil, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui profesionalisme tenaga kependidikan.

1) Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis Sekolah (MBS) merupakan transliterasi dari istilah *School-Based Management* (SBM) sebagai suatu model pengelolaan sekolah secara desentralisasi di tingkat sekolah. MBS merupakan sistem pengelolaan sekolah yang menjadikan lembaga sekolah sebagai institusi yang memiliki otonomi luas dengan segala tanggungjawabnya untuk mengembangkan dan melaksanakan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang disepakati. Sekolah memiliki kewenangan luas untuk menetapkan berbagai kebijakan teknis operasional sekolah dengan berbagai implikasinya sesuai dengan kebutuhan aktual siswa atau masyarakat. Dalam MBS, sekolah juga memiliki kewenangan luas untuk menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya sesuai dengan prioritas kebutuhan aktual sekolah (Calwell and Spinks, 1988; Department of Education of Quesland, 1990; Mohrman and Wohlstetter, 1994).

Secara teoritis, pengelolaan sekolah dalam MBS ditandai oleh adanya karakteristik dasar pemberian otonomi sekolah yang luas dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung program sekolah. Otonomi yang luas diberikan kepada institusi lokal sekolah untuk mengelola berbagai sumberdaya yang tersedia dan mengalokasikan dana yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah secara umum dan mutu hasil belajar siswa. Sekolah diberi kewenangan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta tuntutan masyarakat setempat. Dengan otonomi luas ini, sekolah dapat meningkatkan kinerja staf dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam mengambil keputusan bersama dan bertanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil (Patterson, 1993).

Selain otonomi yang luas, sekolah juga didukung oleh adanya partisipasi yang tinggi dari pihak orangtua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah dalam merealisasikan program-program sekolah. Orangtua dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan finansial, tetapi bersama “school council” merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah secara umum. Masyarakat menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai nara sumber atau organisator kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa dan prestise sekolah secara keseluruhan. Orangtua dan masyarakat juga terlibat secara aktif dalam proses kontrol kualitas pengelolaan sekolah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan MBS, sekolah dituntut untuk memiliki tingkat “accountability” yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan MBS akan bervariasi dari satu sekolah dengan sekolah yang lainnya atau antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini sangat tergantung dari persiapan aspek-aspek pendukung implementasi MBS di tingkat sekolah serta kemampuan sumber daya manusia pelaksana di tingkat sekolah.

Implementasi MBS dalam pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia, khususnya sekolah dasar, memerlukan modifikasi

konsep dan aplikasi sesuai dengan kondisi aktual sekolah, agar inovasi yang ditawarkan dapat dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar MBS. Selain itu, penetapan MBS secara praktis perlu dukungan berbagai faktor yang dewasa ini secara aktual ada sekolah, sehingga MBS mampu meningkatkan pengelolaan SD dengan lebih baik.

a) Persyaratan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan pelaksanaan MBS di negara maju, maka secara konseptual dan praktis dapat diidentifikasi bahwa implementasi MBS secara efektif menuntut adanya persyaratan dasar yang kondusif sebagai berikut:

b) Pemberian Otonomi Yang Luas Kepada Sekolah.

Pelaksanaan MBS di tingkat sekolah perlu didasari dan didukung oleh adanya pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam pengembangan program-program sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan yang dikehendaki. Sekolah perlu diberikan kewenangan yang jelas dan luas untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah juga perlu memiliki kewenangan untuk memberdayakan berbagai potensi yang tersedia di sekolah sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dalam pelaksanaan program-program sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Kewenangan yang diberikan kepada sekolah perlu dijelaskan secara rinci disertai tugas dan tanggungjawabnya. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada sekolah dari lembaga yang lebih tinggi harus ditetapkan dalam dokumen yang disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan orangtua dapat memahami berbagai aspek yang menjadi kewenangan sekolah dalam proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah.

c) Praktek Kepemimpinan Demokratis dan Profesional

Pelaksanaan MBS di tingkat sekolah memerlukan praktek-praktek kepemimpinan yang demokratis dari pimpinan sekolah dalam berbagai aspek kegiatan sekolah. Kepala Sekolah harus mampu menjadikan staf sekolah yang lain, khususnya guru-guru, sebagai suatu “team-work” yang solid untuk bekerja sama melaksanakan berbagai program sekolah. Penetapan keputusan-

keputusan penting yang menyangkut program sekolah dan implementasinya perlu melibatkan seluruh staf sekolah melalui “participatif decision making process”. Dengan melibatkan staf sekolah dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, maka diharapkan para staf memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan program-program sekolah yang berkaitan dengan tugas masing-masing staf sekolah, secara profesional.

d) Pemberdayaan Fasilitas Pendidikan yang Efektif dalam Mendukung Program Pembelajaran

Pelaksanaan MBS untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa perlu didukung oleh kelayakan fasilitas belajar yang ada di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah harus berupaya memberdayakan pemanfaatan fasilitas belajar yang tersedia secara optimal. Fokus kegiatan pemberdayaan ini meliputi: pengadaan, pemanfaatan, penggalan, maupun monitoring penggunaan fasilitas belajar yang ada dan dapat disediakan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pembelajaran siswa. Kepala Sekolah dituntut untuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait untuk menyediakan ataupun mengupayakan tersedianya fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa, baik ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dengan segala koleksinya, maupun fasilitas pendukung lainnya. Pemberdayaan fasilitas ini merupakan peluang dan tantangan bagi pimpinan sekolah dan guru untuk menentukan prioritas pengadaan sesuai dengan dana yang tersedia.

e) Pengembangan Kinerja Profesional dan Budaya Kerja “Team-Work”.

Pelaksanaan MBS yang efektif memerlukan budaya kerja yang bersifat “team-work” antara pimpinan sekolah, guru-guru, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program-program sekolah. Pimpinan sekolah perlu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi guru dan siswa untuk bekerja secara optimal dalam berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Budaya kerja yang bersifat “team-work” ini akan tercipta dengan baik apabila orang memahami tugas dan tanggungjawabnya secara pasti dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah.

Selain itu, pimpinan sekolah dan guru dituntut untuk menunjukkan kinerja profesional yang tinggi dalam pekerjaannya.

Dalam MBS, setiap orang dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing secara proporsional. Kepala Sekolah sebagai manajer dituntut untuk memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi sebagai manajer yang mengatur penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tuntutan atau target yang disepakati. Guru sebagai fasilitator belajar yang profesional dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran siswa sesuai dengan program-program belajar yang ditetapkan.

f) Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua yang Tinggi dan Intensif

Pelaksanaan MBS akan efektif apabila masyarakat dan orangtua memberikan dukungan dan partisipasi yang tinggi terhadap program-program sekolah. Partisipasi masyarakat dan orangtua yang tinggi merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak di sekolah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan orangtua ini terlihat dalam berbagai wujud kegiatan, antara lain: keterlibatan secara aktif dalam dewan sekolah yang bertugas merumuskan visi, misi, dan program kerja sekolah, menyediakan berbagai bentuk bantuan finansial dan non-finansial untuk mendukung pelaksanaan program sekolah, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program sekolah yang disepakati, dan menyediakan dukungan bagi peningkatan anggaran pendidikan dari pemerintah setempat dengan berbagai strategi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence-based Curriculum)

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri, dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar.

Kurikulum yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Kompetensi dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan,

ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya.

Kurikulum berbasis kompetensi mengembangkan kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Kompetensi ini terdiri atas kemampuan akademik, keterampilan hidup, pengembangan moral, pembentukan karakter yang kuat, kebiasaan sehat, semangat bekerjasama, dan apresiasi estetika terhadap dunia sekitarnya. Secara ringkas kurikulum mengembangkan keharmonisan pemilikan kemampuan logika, etika, estetika, dan kinestetika. Dengan demikian, kurikulum dapat membantu peserta didik agar berkembang sebagai individu sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta tumbuh menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

1) Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang dinamik dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika

Kurikulum merupakan input instrumental yang digunakan untuk menyeimbangkan pengalaman belajar yang mengembangkan etika, estetika, logika, dan kinestetika.

b) Kesamaan memperoleh kesempatan

Setiap orang berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Untuk itu perlu adanya jaminan keberpihakan kepada peserta didik yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan sosial, yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjamin persamaan memperoleh kesempatan pendidikan.

c) Memperkuat identitas nasional

Kurikulum harus menanamkan dan mempertahankan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia melalui pemahaman terhadap pemeliharaan identitas nasional, patriotisme, sikap nonsektarian, kemampuan untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang ditimbulkan oleh agama, ideologi, wilayah, bahasa, dan jender, sehingga bermanfaat dan mengembangkan kesadaran, semangat, dan kesatuan nasional.

d) Menghadapi abad pengetahuan

Globalisasi dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi menyebabkan semakin meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga diperlukan kurikulum yang mendorong untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dan kemampuan berpikir dan belajar dalam mengakses, memilih, menilai pengetahuan, dan mengatasi situasi.

e) Menyongsong tantangan teknologi informasi dan komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi berpotensi untuk menyediakan kemudahan belajar elektronik atau belajar dengan kabel on-line yang mempermudah akses ke dalam informasi dan ilmu pengetahuan baru yang tidak tertulis dalam kurikulum, oleh karena itu diperlukan kurikulum yang luwes dan adaptif terhadap berbagai pengetahuan baru sesuai dengan keadaan zaman.

1) Mengembangkan keterampilan hidup

Pendidikan perlu menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan hidup yang terjadi di masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam kurikulum perlu dimasukkan keterampilan hidup agar peserta didik memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku adaptif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif.

2) Mengintegrasikan unsur-unsur penting ke dalam kurikuler

Kurikulum perlu memuat dan mengintegrasikan pengetahuan dan sikap tentang budi pekerti, hak asasi manusia, pariwisata, lingkungan hidup, dan nilai-nilai universal lainnya yang disesuaikan dengan sifat mata pelajaran pokok yang relevan dan perkembangan kemampuan peserta didik.

3) Pendidikan alternatif

Pendidikan tidak hanya terjadi secara formal di sekolah tetapi juga harus terjadi di mana saja, meliputi pendidikan non formal, pendidikan terbuka, pendidikan jarak jauh, sistem lain yang lentur yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non pemerintah.

4) Berpusat pada anak sebagai pembangun pengetahuan

Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi akan mendorong mereka untuk membangun pengetahuannya sendiri.

5) Pendidikan multikultur dan multibahasa

Pendidikan perlu menerapkan metodik yang produktif dan kontekstual untuk mengakomodasikan sifat dan sikap masyarakat pluralistik dalam kerangka pembentukan jati diri bangsa.

6) Penilaian berkelanjutan dan komprehensif

Penilaian berkelanjutan mengacu kepada penilaian yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri dengan proses penilaian yang dilakukan secara transparan. Penilaian harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup aspek kompetensi akademik dan keterampilan hidup.

7) Pendidikan sepanjang hayat

Pendidikan harus berlanjut sepanjang hidup manusia dalam rangka untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar tentang dunia yang berubah dalam segala bidang. Dalam hal ini kurikulum harus menyediakan kompetensi dan materi yang berguna bagi peserta didik bukan hanya untuk kepentingannya di masa sekarang, tetapi juga kepentingannya di masa yang akan datang dengan memberikan fondasi yang kuat untuk inkuiri dan memecahkan masalah yang merupakan titik awal untuk menguasai cara berpikir bagaimana berpikir dan belajar sepanjang hidupnya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Guru dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Mengingat begitu pentingnya peranan antara guru dan peserta didik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif. Guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran.

1) Fungsi Guru

Ada lima fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai:

- a) Guru sebagai manajer, Sebagai *manajer* dalam pembelajaran, seorang guru pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan. Dengan demikian guru bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa.
- b) Guru sebagai fasilitator, Sebagai *fasilitator*, seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan (kesempatan) kepada siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-

satunya sumber belajar bagi peserta didik, namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada peserta didiknya

- c) Guru sebagai moderator, Sebagai *moderator*, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Guru merupakan motor atau daya penggerak dari semua komponen pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d) Guru sebagai motivator, Sebagai *motivator*, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu.
- e) Guru sebagai *evaluator*, guru bertugas mengevaluasi (menilai) proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik hasil (prestasi) belajar siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik

Untuk melaksanakan fungsinya yang sangat menentukan tersebut, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai. Tanpa kemampuan yang cukup, sulit diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar akan tercapai. Guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi siswanya, guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan dan metode pengajaran. Selain itu gurupun harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswanya.

2) Kemampuan Guru

Dengan kata lain seorang guru harus memiliki kemampuan pribadi, kemampuan profesional dan kemampuan sosial.

- a) Kemampuan pribadi meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain.
- b) Kemampuan profesional meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- c) Kemampuan sosial meliputi keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran.

2. Implikasi Bagi Perguruan Tinggi

Konsep dan prinsip yang dikembangkan dalam teknologi pendidikan sejak tahun 1974, sekarang ini telah tertampung dalam ketentuan perundangan (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Salah satu konsep tersebut adalah pembelajaran (Pasal 1 butir 20) dan salah satu prinsip adalah penyelenggaraan pendidikan secara sistemik dengan system terbuka dan multimakna (Pasal 4 ayat 2). Ke dua hal tersebut mempunyai implikasi yang banyak, jauh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini hanya dibahas salah satu implikasi yang sekarang sedang banyak mendapat sorotan, yaitu belajar berjaringan.

Belajar berjaringan (*online learning*) merupakan suatu konsep yang berkembang dari konsep sebelumnya. Belajar di sekolah dengan tatap muka secara teratur antara pendidik dan peserta didik, dapat dimaknai sebagai belajar tradisional, atau terarah (*directed*) atau terikat (*bounded*). Tradisional karena telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, dimana selalu dituntut adanya gedung dengan ruang kelas yang dilengkapi dengan bangku dan papan tulis, guru yang bertugas mengajar, dan siswa yang dikelompokkan dalam tiap kelas dan duduk berjajar dengan rapi. Terarah karena segala sesuatu yang diajarkan atau dipelajari telah ditentukan arahnya, termasuk tujuannya, isinya, jadwalnya bahkan baju seragamnya. Terikat karena adanya aturan tertentu yang harus diikuti seperti lama waktu belajar, persyaratan kenaikan kelas, dan tempat duduk berjajar.

Mengingat makin banyaknya kebutuhan belajar, dan sementara itu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tradisional tidak mampu melayani berbagai kebutuhan tersebut, baik jumlah yang memerlukan serta ragam jenis kebutuhan yang diinginkan, maka berkembanglah sistem alternatif yang dikenal dengan berbagai sebutan seperti belajar sendiri (*autodidact*), bebas bebas (*independent learning*), kursus ekstensi (*extension course*), studi korespondensi, dan belajar jarak jauh (*distance learning*). Belajar sendiri dan bebas, memungkinkan seseorang untuk berkembang sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhanyang dirasakan. Belum tentu apa yang mereka kuasai melalu belajar sendiri dan bebas tersebut mendapat pengakuan atau penghargaan dari masyarakat. Sementara belajar melalui kursus ekstensi, korespondensi dan jarak

jauh selalu mengartikan adanya pendidik (guru, instruktur, dosen) yang mengendalikan kegiatan belajar secara fisik terpisah dari peserta didik. Pendidik itu menentukan bahan yang harus dipelajari, serta berbagai persyaratan lain seperti ujian, praktikum dsb.

Latarbelakang perkembangan konsep belajar berjaringan:

a. Konsep globalisasi,

Konsep globalisasi, dimana dituntut agar kita menyadari bahwa lingkungan kita sebagai lingkungan global seperti misalnya pelestarian alam, hak azasi manusia dll.. Dalam lingkungan global itu diperlukan adanya interkoneksi yang semakin luas, terutama karena ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah bersinergi. Interkoneksi tersebut berarti makin banyak dan luasnya cakupan kegiatan kita: apa yang kita lakukan secara lokal perlu disesuaikan dengan perspektif nasional dan global. Kecuali itu globalisasi juga meningkatkan saling kebergantungan kita baik dalam perkembangan social budaya maupun dalam kemajuan teknologi.

b. Bahwa Belajar Itu Pada Hakekatnya Merupakan Bagian Terpenting Dari Proses Sosial

Belajar merupakan kegiatan interaksi yang termediasi dalam lingkungan social; perkembangan kemampuan setiap orang baik meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, berlangsung melalui interaksi dalam lingkungan sosial; kegiatan belajar yang bermakna adalah yang diakui oleh lingkungan sosial; perkembangan lingkungan termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan interaksi sosial yang meluas dan beragam. Dengan demikian kegiatan belajar itu interaksi antara pemelajar (learner) dengan dengan sesama warga belajar, interaksi dengan guru/dosen/instruktur, interaksi dengan kelompok, interaksi dengan isi ajaran, dan interaksi dengan berbagai sumber belajar lain termasuk narasumber dan program.

c. Bahwa Tiap Orang Harus Memperoleh Kesempatan untuk Membangun Potensi Dirinya Semaksimal Mungkin

Ditinjau dari perspektif psikologis, pengakuan ini merupakan pendekatan psikologi konstruktivistik, dimana tiap orang akan membangun pengetahuan, sikap dan keterampilan sendiri setelah mencernakkan apa yang diperoleh dan dialami. Tentu saja

pembangunan potensi tersebut harus bertolak dari kondisi dan karakteristik masing-masing warga belajar, serta berpegangan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan Negara.

Berbeda dengan belajar sendiri dan bebas, dalam sistem belajar berjaringan ada perancah (*scaffold*) yang dibangun oleh pengelola kegiatan belajar berjaringan. Perancah ini dibangun berdasarkan identifikasi karakteristik pemelajar yang dijadikan sasaran atau subyek, identifikasi kebutuhan, kondisi lingkungan dan sifat ajaran. Pengertian perancah ini berbeda dengan rambu-rambu, karena perancah merupakan bantuan pembelajaran secara interaktif, yaitu berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Makin tinggi tujuan belajar yang perlu dikuasai, makin tinggi perancah belajar yang diperlukan. Proses selanjutnya didelegasikan atau menjadi tanggung jawab dari pemelajar sendiri dengan dukungan dan pengawasan dari unit/lembaga yang ada di daerah domisili pemelajar.

Inti dari belajar berjaringan adalah terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik, sesama peserta didik, peserta didik dengan berbagai sumber belajar lain, dan peserta didik dengan lingkungannya. Pelaksananya belajar berjaringan adalah bila peserta didik menguasai berbagai kemampuan tertentu, dan menjalin kerjasama kolaboratif dengan kelompok kecil, kelompok besar dan bahkan kelompok maya. Persyaratan peserta didik adalah : mampu mengarahkan diri, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, proaktif, mahir berkomunikasi secara tertulis, menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, dan terbuka untuk menghargai pendapat orang lain dan bersedia mengadakan perubahan pada diri maupun lingkungannya. Dengan demikian belajar berjaringan dapat juga terlaksana di sekolah, namun memerlukan perubahan peran guru.

Belajar berjaringan memang sangat memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/CIT). Teknologi komunikasi dan informasi sebagai suatu produk dan proses telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi segenap kehidupan kita dalam berbagai bentuk aplikasi. Alvin Toffler (1980) menggambarkan perkembangan itu sebagai revolusi yang berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama timbul dalam bentuk teknologi pertanian; gelombang kedua ditandai dengan

adanya teknologi industri; dan gelombang ketiga merupakan revolusi teknologi elektronik dan informatik. Teknologi terakhir ini mendorong tumbuhnya “*telecommunity*”.

Berdasarkan pengkajian Komisi PBB Untuk Pembangunan Pengetahuan dan Teknologi (United Nations Commission on Science and Technology for Development /UNCSTD) pada tahun 1998, integrasi antara teknologi informasi dan komunikasi secara positif mempengaruhi pembangunan di semua sektor. Oleh karena itu disarankan agar semua negara anggota PBB memanfaatkan potensi TIK secara produktif, agar menuju tercapainya masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*). Masyarakat berpengetahuan sendiri dirumuskan sebagai masyarakat dimana semua anggotanya berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, dengan terlebih dahulu memilikiketerampilan dasar yang diperlukan dan memperoleh semua informasi yang diperlukan. Sementara itu tugas pemerintah adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dan aturan yang diperlukan, dan tugas dunia usaha dan industri untuk mengembangkan prasarana TIK.

Pemerintah telah menyadari perlunya memanfaatkan potensi TIK untuk pembangunan. Pada tahun 1996 telah dibentuk tim Nusantara 21, yang bertugas untuk mencermati perkembangan TIK, serta merumuskan kebijakan untuk mengambil manfaatnya yang optimal guna pembangunan dalam berbagai sektor, dan mengkaji pengurang dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Pada tahun 1997 diganti menjadi tim telematika. Dan akhirnya pada tahun 2006 dibentuk Dewan TIK Nasional (DeTIKNas – Keppres No. 20/2006) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan ketua pelaksana hariannya Menteri Komunikasi dan Informasi. DeTIKNas ini berugas untuk : 1) merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan TIK; 2) melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK; 3) melakukan koordinasi nasional dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas TIK, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK; dan 4) memberikan masukan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien. Salah satu prioritas kebijakan (*flagship*) yang dikembangkan adalah pendidikan, atau pengembangan TIK untuk

keperluan pendidikan.

3. Implikasi Terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, maupun pemerintah. Karena penting, maka pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistimatis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini [Suyanto dan Hisyam, 2000:17]. Upaya pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat. Maka, mau tidak mau pendidikan harus didisain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan. Oleh karena itu, tuntutan perubahan pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada konsep, kurikulum, proses, fungsi, tujuan, manajemen lembaga lembaga pendidikan, dan sumber daya pengelola pendidikan.

a. Pembaruan Pendidikan Islam Suatu Keharusan

Pembaruan pendidikan merupakan suatu proses multi demensional yang kompleks, dan tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru [Jusuf Amir Faisal, 1995:65], dan senantiasa berorientasi pada kebutuhan dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembaruan pendidikan tidak akan memiliki ujung akhir sampai kapanpun. "Mengapa demikian? Karena persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia itu sendiri masih ada. Pembaruan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri, apalagi dalam abad informasi seperti saat ini, tingkat obsolescence dari program pendidikan menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam sistem produksi dapat mengembangkan teknologi dengan kecepatan yang amat tinggi kerana ia harus bersaing dengan pasar ekonomi secara global, sehingga perhitungan efektivitas dan efisiensi harus menjadi pilihan utamanya [Suyanto dan Hisyam, 2000:17]. Tetapi sebaliknya disisi lain, "dunia pendidikan tidak dapat dengan mudah mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di

masyarakat sebagai akibat sulit diterapkannya perhitungan-perhitungan ekonomi yang mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap semua unsurnya. Tidak semua pembaruan pendidikan dapat dihitung atas dasar efisiensi dan untung rugi karena pendidikan memiliki misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi, yaitu misi kemanusiaan" [Suyanto dan Hisyam, 2000:17].

Suatu usaha pembaruan pendidikan karena adanya tantangan kebutuhan dan perubahan masyarakat pada saat itu, dan pendidikan juga diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan dan perubahan masyarakat tersebut. Dengan demikian, pendidikan sebenarnya lebih bersifat konservatif, karena selalu mengikuti kebutuhan dan perubahan masyarakat. Sebagai contoh: misalnya, pada masyarakat agraris, konsep pendidikan didisain agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada era tersebut, begitu juga apabila perubahan masyarakat menjadi masyarakat industrial dan era informasi, maka pendidikan juga didisain mengikuti irama perkembangan masyarakat industri dan masyarakat era informasi, dan seterusnya. Demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan dari perubahan zaman yang begitu cepat.

Sebagai ilustrasi, pada saat Amerika mengejar kemajuan teknologi ruang angkasa Rusia, maka pada saat itu pendidikannya ditekankan pada Iptek. Demikian juga pada saat Amerika mengejar kemajuan ekonomi Jepang dan Jerman, maka pada saat itu pendidikannya ditekankan pada ekonomi. Dan akhir-akhir ini, ketika dirasakan lemahnya integrasi bangsa Amerika, maka pendidikan ditekankan untuk membangun integrasi bangsa (Sizer, 1992). Dengan indikator tersebut, akan menjadi lebih mudah mengidentifikasi krisis pendidikan yang terjadi, dengan didasarkan pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan pendidikan itu [Anas Syahrul dan Zaidie, 1999:29).

Ketika dunia menghadapi gerakan globalisasi, Amerika Serikat, dalam dokumen *America 2000: An Education Strategy*, terdapat enam tujuan pendidikan nasional Amerika Serikat. Salah satunya bahwa Amerika Serikat meminginkan memiliki pengaruh

secara global. Maka untuk mencapai cita-cita itu, pendidikan nasional diformulasikan sebagai: *US students will be first in the world in science and mathematics achievement* [Suyanto dan Hisyam, 2000:22]. Dengan demikian, Amerika Serikat dalam salah satu strategi pendidikannya menginginkan mahasiswa dan para pelajarnya memiliki prestasi yang unggul di dunia dalam hal menguasai ilmu pengetahuan dan matematika.

Keadaan pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan pembaruan. "Tujuan pembaruan itu akhirnya ialah untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya [Suyanto dan Hisyam, 2000:18]. Tetapi pada kenyataannya sampai kini, "pendidikan nasional terperangkap di dalam sistem kehidupan yang operatif sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat banyak [Tilaar, 1998:26]. Kenapa demikian, karena sistem pendidikan pada era Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasinya yang cukup baik di bidang pendidikan. Kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif nampak kita rasakan selama Orde Baru Berkuasa [Suyanto, 1999:3], mungkin sampai saat reformasi sekarang ini.

Pada sistem pendidikan Orde Baru, ada tiga ciri utama yang dapat dicermati di dalam pendidikan nasional kita sampai sekarang ini. "Pertama, adalah sistem yang kaku dan sentralistik; yaitu suatu sistem yang terperangkap di dalam kekuasaan otoritas pasti akan kaku sifatnya. Karena ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat, telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kedua, sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme dan konseisme (cronyism). ketiga, sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktek-praktek memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas [Tilaar,1998:26-28]. Di samping itu, sistem pendidikan kita sekarang ini belum mengantisipasi masa depan [Ahmad Tafsir, 1999:7] dan perubahan masyarakat.

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi hal yang sama, kenapa? Karena pendidikan Islam termasuk sub-sistem pendidikan nasional, juga terdesain mengikuti budaya dan politik bangsa yang dibangun pada masa Orde Baru. Sehingga gambaran pendidikan kaku, kurang kreatif, dan melahirkan manusia yang brutal juga bisa terjadi pada pendidikan Islam, apalagi secara intern pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan dalam berbagai aspek yaitu persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, dan namajemen pengelolaan. Memang patut diakui, upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja.

Usaha pembaruan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh dan terkesan tambal sulam, sehingga "sebagain besar sistem pendidikan Islam, belum dikelola secara profesional" [Azyumardi Azra, 1999:59]. Hal inipun didukung dengan "upaya pembaruan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat oleh berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai dengan tenaga ahli yang belum siap melakukan perubahan.

Untuk itu, pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas" [Muslih Usa, 1991:11]. Dengan kenyataan ini, semestinya "sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasi diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan" [Azyumardi Azra, 1999:57], apabila tidak, maka pendidikan Islam di Indonesia akan ketinggalan dalam persaingan global.

Mencermati permasalahan kondisi pendidikan yang dikemukakan, maka ada dua alasan pokok yang perlu dilakukan pembaruan pada pendidikan Islam di Indonesia, yaitu : Pertama, konsepsi dan praktek pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan Islam yang sangat sempit yang hanya atau terlalu menekankan pada kepentingan akhirat. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal sekarang ini, seperti madrasah dan pesantren, kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masyarakat yang selalau mengalami perubahan dan politik bangsa

Indonesia yang sedang mengalami perubahan.

b. Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

Untuk menghadapi tuntutan dan perubahan masyarakat menuju masyarakat milenium ketiga, diperlukan usaha pembaruan pendidikan Islam secara terencana, sistimatis dan mendasar, yaitu:

1) Perubahan Pada Konsepsi, Praktek, dan Isi Program Pendidikan Islam

Usaha perubahan pada konsepsi, praktek, dan isi program pendidikan Islam dilakukan upaya pembaruan sebagai berikut: (a) perlu pemikiran untuk menyusun kembali "konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada fitrah atau potensinya (Anwar Jasin, 1985:7-8) dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada pada manusia sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, (b) pendidikan Islam harus didisain menuju pada integritas antara ilmu-ilmu naqlih dan ilmu-ilmu 'aqlih, untuk tidak menciptakan jurang pemisah antara ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama dan ilmu bukan ilmu agama atau ilmu umum. Karena, dalam pandangan Islam, semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah SWT. (c) "pendidikan didisain menuju tercapainya sikap dan perilaku "toleransi", lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (d) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (e) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur" [Suroyo, 1991: 45-48] (f) pendidikan Islam didisain untuk menyiapkan generasi Islam yang berkualitas untuk mampu menjawab tantangan dan perubahan masyarakat dalam semua sektor kehidupan dan siap memasuki milenium ketiga, (g) pendidikan Islam perlu didisain secara terencana, sistimatis, dan mendasar agar lentur terhadap perubahan masyarakat dan peradaban.

2) Perubahan pada Kelembagaan Pendidikan Islam

Usaha perubahan pada kelembagaan pendidikan Islam yaitu (a) perlu menyusun visi dan misi pendidikan Islam menuju milenium ketiga, (b) perlu penataan dan memodernisasika manajemen pendidikan Islam, (c) lembaga pendidikan dikelola

secara profesional dengan didasarkan pada prinsip kreatif, otonom, demokratis, transparan, berkualitas, relevan, dan efisiensi, (d) sistem rekruting yang transparan dan berkualitas, (e) pengelola lembaga pendidikan Islam perlu lapang dada, berani, dan terbuka untuk dapat menerima murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa non-Islam.

Mereka dapat mempelajari dan mengetahui Islam melalui institusi-institusi pendidikan Islam, bukan dari institusi-institusi non-Islam. "Al-Azhar, menurut Fazlur Rahman suatu lembaga tradisional yang terbesar dewasa ini" [Fazlur Rahman, 1997:281], juga menerima mahasiswa-mahasiswa non-muslim belajar di Al-Azhar. Terobosan menerima masiswa non-Muslim, sudah dilakukan oleh Magister Studi Islam UII, yaitu dengan menerima seorang Pastor untuk belajar di Magister Studi Islam UII. Hal ini, juga ikuti oleh Fakultas Ilmu Agama Islam UII, dengan menerima mahasiswa non-Muslim yaitu seorang Pastor menjadi mahasiswa pendengar untuk beberapa mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa tersebut.

Usulan-usulan yang dikemukakan di atas, sebagai indikator usaha pembaruan pendidikan Islam. Tetapi suatu usaha pembaruan pendidikan dapat terencana dan terarah dengan baik apabila didasarkan pada kerangka dasar filsafat dan teori pendidikan yang mantap. Untuk itu, filsafat pendidikan dapat dikembangkan dengan menggunakan asumsi-asumsi dasar yang kokoh, dan jelas tentang manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungannya dengan lingkungan, alam semesta, akhirnya, dan hubungan vertikal dengan Maha Pencipta. Sedangkan, teori pendidikan dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara pendekatan filosofis dan pendekatan empiris" [Anwar Jasin,1985:8]. Maka, kerangka dasar pertama pembaruan pendidikan Islam adalah konsepsi filosofis dan teoritis pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia yang hubungannya dengan masyarakat, lingkungan dan ajaran Islam.

Apabila kita akan mengadakan perubahan pendidikan Islam, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan

(sosial dan kultural). Tanpa kerangka dasar filosofis dan teoritis yang kuat maka pembaruan pendidikan Islam tidak punya pondasi yang kuat dan juga tidak mempunyai arah yang pasti [Anwar Jasin, 1985:9]. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka dasar sistimik [Anwar Jasin,1985:10] yaitu kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan Islam harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat, bangsa dan negara serta kepentingan umat di mana pendidikan itu diterapkan. Apabila terlepas dari konteks masyarakat tersebut, maka pendidikan akan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat, bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tuntutan perubahan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia.

PENUTUP

Perkembangan terkini sistem pendidikan dan pembelajaran mempunyai implikasi yang banyak, jauh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam makalah ini hanya dipaparkan beberapa konsep dan prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan semangat reformatif.

Dalam tataran mikro (misalnya pengembangan pengalaman belajar di kelas) perlu dikembangkan berbagai strategi pembelajaran yang menarik, merangsang, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif dan kreatif. Pada tataran meso (pada unit penyelenggara kegiatan pendidikan) perlu dikembangkan kurikulum dan tenaga pendidik yang kompeten. Sedang pada tataran makro (pada satuan pendidikan) perlu disediakan berbagai aturan, sarana dan anggaran yang diperlukan. Perubahan pada tataran mikro saja tidak akan banyak pengaruhnya dalam usaha penyesuaian pendidikan dengan perkembangan terkini. Namun awal dari usaha pembaharuan memang harus dimulai dari adanya komitmen dari para dosen dengan dukungan moral dan kebijakan kelembagaan.

Pada prinsipnya, kebutuhan umat Islam pada era reformasi ini amat mendesak, yaitu peningkatan kualitas untuk menghadapi perubahan menuju milenium ketiga. Maka, pendidikan Islam haruslah dipersiapkan dan diupayakan untuk menuju masyarakat tersebut dengan merumuskan visi pendidikan Islam yang baru untuk membangun dan meningkatkan mutu manusia dan masyarakat Muslim. Apabila tidak melakukan pembaharuan, maka pendidikan Islam akan tetap terbelakang dan tidak mampu bersaing dan

tersingkir dalam kehidupan komunitas masyarakat pada milineum ketiga.

RANGKUMAN

1. Perubahan paradigma dari pola yang serba sentralistik menjadi pola yang desentralistik merupakan konsekuensi dari proses demokratisasi yang pada saat ini tengah diimplementasikan di negara kita. Maraknya tuntutan reformasi total dalam kehidupan berbangsa termasuk didalamnya reformasi pendidikan nasional semakin lama semakin diperlukan, mengingat proses pendidikan nasional merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dipahami apabila penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di mana transaksi layanan tersebut dilakukan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu.
3. Upaya untuk mendekatkan *stakeholders* pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut pemerataan dan perluasan layanan, mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan sangatlah beralasan. Inilah gagasan yang melatarbelakangi paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan, yang seperti telah disebutkan di atas, sangatlah erat kaitannya dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, yang ketentuannya telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Produk hukum tersebut mengisyaratkan terj adinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akontabilitas pendidikan.
4. Usulan-usulan reformasi pendidikan nasional tersebut, apabila dapat dilaksanakan secara terencana, sistimatis, mendasar dan perlu ada

realisasi yang nyata, maka bangsa Indonesia siap untuk memasuki milenium ketiga. Sebab fondasi dan pilar-pilar pendidikan yang dibangun akan mampu berdiri kokoh menghadapi badai dan gelombang sebesar apa pun yang akan terjadi.

5. Untuk mengantisipasi perubahan dan langkah-langkah yang diusulkan pada pendidikan nasional tersebut, untuk pendidikan Islam perlu dipersiapkan dengan melakukan terobosan pemikiran kembali suatu konsep pendidikan Islam yang baru yang dapat menjawab tantangan dan perubahan milenium ketiga. Sebab pendidikan Islam perlu dikembalikan kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat. Pendidikan Islam perlu melakukan pembaruan dengan mewujudkan visi dan misi baru. Karena apabila kita ingin melakukan perubahan pendidikan Islam menuju masyarakat global pada milenium ketiga harus mempunyai visi yang jelas, "yaitu visi yang sesuai dengan konstitusi ialah mewujudkan hak-hak asasi manusia dan mengembangkan tanggung jawab anggota masyarakat yang dicita-citakan" [Tilaar, 1999:4].

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, (1999) *Pendidikan untuk Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Lathifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 5 September 1999.
- Anas Syahrul Alimi dan M.Fadhilah Zaidie (Editor), *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan Indonesia*, Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof.Dr.Djohar,MS, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Anwar Jasin, (1985) *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam : Tinjauan Filosofis*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 10 Oktober 1985.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Logo Macana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Boediono, (1997) *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Banathy, Bela H. (1991). *Systems Design of Education. A journey to create the future*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications
- Brozo, W, Brobst, A. and Moje, E. (1994). *A Personal View of Teacher Change*. *Childhood Education*, 7 (2), 70-72
- Bruce, J., & Marsha, W. (1980). *Models of Teaching*. New Jersey:

- Prentice Hall Inc
- Calwell, B.J. and Spinks, J.M. 1988. *Towards the Self-Managing School*. London: The Falmer Press.
- Conference Book, London, 1978.
- Dabbagh, Nada & Brenda Bannan-Ritland. (2005). *Online Learning. Concept, strategies and application*. Columbus,OH : Pearson.
- Djamaluddin Ancok, (1998) Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Manusia di Milenium Ketiga, UII, Yogyakarta,.
- Fazlur Rahman, Islam (1997), *Terj.,Ahsin Mohammd*, Bandung: Pustaka.
- Fullan, Michael. (1992). *The Meaning of Educational Change*. Toronto: OISE Press.
- Gafur, A. (1999). *Disain Instruksional*. Solo: Tiga Serangkai
- Hamalik., O. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hannaway, J. and Carnoy, M. (Ed.). 1995. *Decentralization and School Improvement: Can We Fulfill The Promise?*. San Francisco, CA: Jossey Bass Publishers.
- H.A.R. Tilar, (1998) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21* (Cet. I) Magelang,Tera Indonesia,
- _____, (1999) *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,
- Joyce. B. Weil, M. and Showers, B. (1992). *Model of Teaching (fourth edition)*. Boston: Allyn and Bacon Publishing Co.
- Jusuf Amir Faisal, (1995) *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Muslim Usa (editor), Cet. I, (1991) *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta:Tiara Wacana,
- Pusat Kurikulum-Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas
- Sa'ud, Udin S. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai Wujud Nyata Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan*. Makalah disaj ikan dalam Seminar Nasional: “Strategi manajer pendidikan dalam menghadapi desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan”, tanggal 17-18 Juli 2000 di UPI, Bandung (tidak diterbitkan).

- _____ (2001). *Strategi dan Model Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management) Menuju Sekolah Mandiri*. Makalah disajikan dalam diskusi panel “Sosialisasi Konsep dan Model MBS” bagi para Kepala SD se Kota Bandung, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2001.
- _____, 2002. *Prospek dan Tantangan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di Tingkat Sekolah* (Makalah Seminar dan Lokakarya)
- Selkov-Brecher, J.L. 1992. *A Successful Model for School-Based Planning*. Educational Leadership Journal, September 1992.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2000.
- Suyanto, Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21, Makalah : Seminar Nasional "Mencari Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Menghadapi Milenium Ketiga, 9 November 1999, ISPI dan Primagama, Yogyakarta, 1999.
- Soleh Salahuddin, (1998) *Urgensi Reformasi Pendidikan dalam Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total*, Ed. Musa Kazhim, Pustaka, Hidayat, 1998.
- Soroyo, (1999) *Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*, dalam Buku: Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, (Editor: Muslih Usa). Yogyakarta. Tiara Wacana,
- Marilyn, K., & Quanrantalory. (1987). *Effective Teaching. Principles and Practice*. London: Scott, Foresman and Company
- Mohrman, S.A; Whhlstetter, P. and Associates. 1993. *School-Based Management: Organizing for High Performance*. San Francisco, CA: Jossey Bass Co.
- Miarso, Yusufhadi. (2005). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustekom-Kencana
- Reigeluth, Charles M. and Robert J. Garfinkle. (eds.)(1994). *Systemic Change in Education*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications Toffler, Alvin. **The Third Wave**. London : Pan Books Ltd.
- Tim Teknis Bappenas. 1999. *School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: Bappenas.
- Peraturan/Perundangan-undangan:**
- UNSCD. (1998) *Knowledge Society*. Published for and on behalf of The United Nations. Oxford, NY : Oxford University Press.

- Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- World Bank Report. 1999. *From Crisis to Recovery*. Jakarta: World Bank Office.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Perangkat Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Eselonisasi Jabatan Dinas Daerah.
- GBHN, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, Tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Arkola, Surabaya, 1999.
- Department of Education, Quesland, AU. 1990. *Focus on School: The Future Organization of Educational Services for Students*. Brisbane, AU: Dept. of Educational Publications.
- Depdikbud. 1995. Perbandingan Pendidikan di Indonesia dengan Negara Lain. Jakarta: Pusat Informatika, Balitbng Depdikbud.

BAB 8.....	189
REFORMASI	189
PENDIDIKAN NASIONAL.....	189
Tujuan Pembelajaran:	189
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:	189
▪ Hakikat Reformasi Pendidikan	189
▪ Langkah untuk Reformasi	189
▪ Implikasi Reformasi Pendidikan.....	189
A. Hakikat Reformasi Pendidikan	191
1. Pengertian Reformasi	191
2. Tindakan Reformasi Pendidikan	193
B. Langkah-langkah untuk Reformasi	204
1. Merumuskan Visi dan Misi	205
2. Isi dan Substansi Pendidikan Nasional.....	205
3. Manajemen dan Anggaran	206
C. Implikasi Reformasi Pendidikan.....	207
1. Reformasi pada Tingkat Pendidikan Perskolahan.....	207
2. Implikasi Bagi Perguruan Tinggi	218
3. Implikasi Terhadap Pendidikan Islam.....	222
PENUTUP	228
RANGKUMAN.....	229
DAFTAR PUSTAKA	230

BAB 9

STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- Hakikat Strategi Pendidikan Nasional
- Strategi Pendidikan Nasional Hakikat Reformasi Pendidikan
- Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.
- Implikasi bagi Pendidikan Islam



alam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern.

Dua persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, secara internal, bangsa Indonesia menghadapi krisis multidimensional, persatuan bangsa yang merenggang, demokratisasi pada semua aspek kehidupan, desentralisasi manajemen pemerintahan, dan kualitas pendidikan belum menunjukkan kemampuan kompetitif. Kedua, secara eksternal, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pasar global, kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan kompetitif dan inovatif, dan *networking* tanpa batas.

Untuk bangsa Indonesia dapat *survival*, bahkan dapat tampil secara berarti dalam percaturan di tengah-tengah masyarakat dunia, kondisi tersebut di atas tidak harus dihindari, melainkan wajib dihadapi dengan semangat dan kemampuan yang tinggi oleh setiap warga dan segenap bangsa Indonesia. Upaya yang sangat strategi untuk menghadapinya adalah memantapkan sistem pendidikan nasional, dan menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang bertanggung jawab.

Jika upaya pembenahan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, maka diharapkan bangsa Indonesia mampu mengangkat martabat bangsa dan negara.

A. Hakikat Strategi Pendidikan Nasional

1. Definisi Strategi

a. Definisi strategi

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, p.15, 2004).

Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).

Pengertian strategi secara umum; Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Sedangkan secara khusus; Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.

- 2) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- 3) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- 4) Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- 5) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005).

c. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.

1) Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat

jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun ke dalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

3) Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4) Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
- Strategi isu strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996).

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, p 104, 1996).

d. Jenis-jenis Strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

1) Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

2) Strategi Intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

3) Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

4) Strategi Defensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang

menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut.

Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut.

Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.

e. Strategi Umum Michael Porter

Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. (David, p.231, 2004).

2. Hakikat Pendidikan Nasional

a. Definisi Pendidikan

Definisi/pengertian pendidikan menurut beberapa ahli. Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, 1889 - 1959) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: "Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya".

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 1991:232, tentang *Pengertian / definisi Pendidikan*, yang berasal dari kata "didik", Lalu kata ini mendapat awalan kata "me" sehingga menjadi "mendidik" artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Pendidikan, menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada vtuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Sedangkan John Stuart Mill (filosof Inggris, 1806-1873 M) menjabarkan bahwa Pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.

Menurut John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup.

Hal senada juga dikemukakan oleh Edgar Dalle bahwa *Pendidikan* merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Thompson mengungkapkan bahwa Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

Ditegaskan oleh M.J. Longeveled bahwa Pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Prof. Richey dalam bukunya '*Planning for teaching, an Introduction to Education*' menjelaskan Istilah 'Pendidikan' berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Ibnu Muqaffa (*salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H- 143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah*) mengatakan bahwa : "Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santaan akal dan rohani."

Plato (*filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 SM-346 M*) menjelaskan bahwa Pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesemurnaan.

Berdasarkan beberapa Pengertian definisi Pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan merupakan Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain" (Langeveld).

Dalam konteks pembahasan ini, Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation dan Character Building) yang membina suatu bangsa yang mampu atas tanggungjawab sendiri menyelesaikan Revolusinya, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa Agama adalah unsur mutlak dalam rangka Nation dan Character Building sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. tahun 1960.

b. Tujuan Pendidikan Nasional

Mengenai tujuan dari pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, GBHN merumuskannya sbb.: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa". Selanjutnya GBHN menegaskan pula bahwa "Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia". (Bandingkan, GBHN, Bab IV, bagian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, 2. Pendidikan ayat a dan b).

Rumusan GBHN mengenai tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai itu menurut hemat saya sudah cukup mengungkapkan berbagai aspek utama dari harkat dan martabat kemanusiaan, dan yang sekaligus juga merupakan kualitas manusia Indonesia yang dicita-citakan, secara komprehensif dan mendasar. Melalui proses pendidikan manusia Indonesia diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya yang menyangkut aspek-aspek religiositas, moralitas, intelektualitas, profesionalitas, nasionalitas dsb. itu secara lebih baik dan terarah.

Pendidikan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pada fihak lain pendidikan nasional juga berfungsi untuk menjamin dan melestarikan keberhasilan pembangunan. Dengan demikian ada hubungan dialektis antara pendidikan nasional dan pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, pendidikan nasional harus mampu mengantisipasi dan mempengaruhi perkembangan dan arah pembangunan, sedangkan pembangunan harus mampu menjamin terlaksananya pendidikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan.

c. Paradigma Pendidikan Nasional

1) Paradigma Pendidikan dan Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang memperlakukan anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anak menemukan bakat atau minatnya. Guru sebagai fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya serta menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki. Guru bukan hanya memberikan pengajaran yang dibutuhkan melainkan juga memberikan teladan hidup dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

2) Paradigma Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Paradigma pembelajaran sepanjang hayat berarti bahwa pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran

dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Dengan paradigma ini baik peserta didik maupun pendidik menjadi subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Hidup adalah pembelajaran. Pendidik dan peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka, jarak jauh, ataupun secara otodidaktif. Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

3) Paradigma Pendidikan untuk Semua yang Inklusif

Paradigma pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak azasi manusia minimal pada tingkat pendidikan dasar. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa. Paradigma ini merupakan salah satu paradigma dan prinsip penjaminan mutu pendidikan nasional. Konsekuensi dari paradigma ini adalah bahwa setiap individu berhak dan wajib mengikuti dan menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayainya, karena pendidikan tingkat ini merupakan kunci awal dari pembelajaran sepanjang hayat. Sejalan dengan itu, buta aksara, yang merupakan indikasi kegagalan yang bersifat residual dari program wajib belajar, menjadi sangat penting untuk dituntaskan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah

menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma pendidikan ini juga menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan. Sekolah-sekolah inklusif menerima semua anak di masyarakat tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, status HIV/AIDS dan status kesehatan serta latar belakang sosial, ekonomi, etnis, agama atau bahasa. Penyelenggaraan sekolah yang inklusif juga merangkul keberagaman agama di Indonesia sehingga tidak terjadi pembedaan berdasarkan keyakinan yang dianutnya.

4) Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

PuP3B yang merupakan terjemahan dari *Education for Sustainable Development* (EfSD) merupakan paradigma pendidikan baru yang diprakarsai oleh PBB melalui UNESCO dengan tujuan agar pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional).

Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan Planet Bumi, dan bahkan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Paradigma ini pun menghendaki keberlanjutan kesehatan lingkungan dengan cara menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, melestarikan komponen-komponen dalam ekosistem, dan menjaga keseimbangan interaksi antarkomponen dalam ekosistem. Selain itu, setiap bentuk intervensi manusia atas keseimbangan ekosistem baik itu melalui upaya-upaya

pengembangan yang dosis intervensinya rendah sampai dengan pembangunan yang dosis intervensinya tinggi harus dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan, tidak mengancam keberlanjutan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui.

PuP3B juga menghendaki keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sebagai bagian integral dari ekosistem. Dengan kata lain, PuP3B menghendaki manusia yang melestarikan keberlanjutan peradabannya tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya. PuP3B hanya akan terwujud apabila paradigma pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, yang mengidamkan subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan, betul-betul dilaksanakan. Tanpa adanya manusia pembelajar yang seperti itu, sulit sekali PuP3B bisa terwujud. PuP3B juga menghendaki bahwa pendidikan untuk semua yang inklusif dan tanpa diskriminasi betul-betul dilaksanakan, karena adanya sebagian masyarakat yang tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat akan menjadi sumber ketidakberlanjutan keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif PuP3B, pendidikan bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi solusi. Pendidikan menjadi masalah jika pendidikan tidak mengadopsi paradigma PuP3B, sehingga menghasilkan manusia yang tidak peduli akan keberlanjutan keberadaan dirinya, komunitas masyarakatnya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, kebudayaannya, dan lingkungan alamnya. Namun pendidikan bisa menjadi solusi jika pendidikan yang dilakukan dapat membangun kesadaran kritis tentang PuP3B. Selama ini ada paradoks. Semakin orang terdidik, semakin menjadi masalah, karena tingkat konsumsinya cenderung meningkat dan dilakukan dengan cara-cara yang boros sumberdaya dan merusak lingkungan. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan keseimbangan ekosistem. Yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Apapun yang dilakukan manusia terhadap ekosistem pasti akan ada akibatnya. Pada akhirnya muncul kesadaran bahwa bumi merupakan satu sistem yang “tertutup”. Ketika sumberdaya alam habis, maka sumberdaya alam itu tidak akan bisa diperoleh dari planet lain. Substansi lain yang harus ada dalam PuP3B adalah pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik dengan visi jangka panjang.

Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Bumi adalah habitat semua manusia, karena itu nilai keadilan, tanggung-jawab sosial, dan demokrasi harus dikembangkan. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan.

Ada dua aspek pembelajaran dalam PuP3B. Aspek pertama adalah pembelajaran individual, yang menyangkut wawasan, nilai-nilai, dan kemampuan individual. Aspek kedua adalah pembelajaran sosial, yang menyangkut pengembangan modal sosial dan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran akan menumbuhkan kemampuan kerjasama pada berbagai skala ekosistem, sehingga bisa melakukan adaptasi berlanjut pada skala ekosistem.

d. Isu-isu strategis

1) Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi warga Indonesia. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya sangat banyak yang mengalami mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya. Kondisi yang demikianlah yang membuat pemerataan pendidikan sembilan tahun belum dapat dituntaskan, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutunya.

2) Kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang.

Pembangunan sektor pendidikan telah diupayakan dari tahun ke tahun, sehingga tidak sedikit masyarakat yang illiterate sudah dapat dientaskan. Namun masih saja kualitas pendidikan secara nasional belum dapat membanggakan, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

3) Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki

Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat. Sudah sangat banyak lulusan pendidikan pada semua jenjang telah dihasilkan, namun mereka

tidak sepenuhnya memiliki kesiapan yang memadai, sehingga dapatlah dipahami manakala masih banyak lulusan yang merasa kesulitan dalam merebut peluang kerja, apalagi mengembangkan lapangan kerja sendiri.

4) Lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang.

Lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang. Manajemen pendidikan telah diupayakan dibenahi, baik infra struktur maupun sistem, implementasi, dan evaluasinya. Namun masih sangat banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan secara produktif.

e. Arah Kebijakan Pendidikan

1) Pemberdayaan Lembaga Pendidikan.

Kebijakan pendidikan nasional pada semua jenjang baik kini maupun ke depan terutama telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan, sehingga memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan lembaga pendidikan ini lebih didasarkan pada pemberian trust kepada lembaga untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab.

2) Desentralisasi Pendidikan

Keragaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan baik dilihat dari jenis dan njenjangnya tidaklah relevan lagi jika semua pengelolaan pendidikan disentralkan, sebagaimana pada era-era sebelumnya. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mewujudkan setiap program dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga dapat dijamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

3) Akuntabilitas Pendidikan.

Institusi dan sumber daya pendidikan dalam menunjukkan kegiatannya sering kali lepas dari tanggung jawabnya. Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada public, maka setiap institusi seharusnya mampu menunjukkan kinerjanya secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan. Kegiatan pendidikan tidak hanya menghabiskan biaya yang telah disepakati, namun sejauh mana dapat diwujudkan dalam kegiatan

yang bermakna.

4) Relevansi Pendidikan

Program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan pada jamannya. Namun lepas dari itu tetap berbagai kegiatan yang diciptakan perlu dirahkan juga untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kebutuhan dalam hidupnya.

5) Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam proses pendidikan. Oleh karena di samping pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung terjadinya proses pendidikan, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun substantive, sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya.

B. Strategi Pendidikan Nasional.

1. Kebijakan strategi pendidikan nasional

Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan nasional, maka ada beberapa strategi pendidikan nasional.

a. Demokratisasi Pendidikan,

Upaya dapat dilakukan dengan mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan pendidikan untuk semua, memungkinkan terjadinya pemberdayaan dan pendayagunaan institusi masyarakat, memberikan perhatian tersendiri terhadap kelompok khusus, dan mengupayakan pendirian unit pendidikan.

b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Semua Jenjang

Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang yang diwujudkan dengan melakukan pembaharuan kurikulum pada semua jenjang, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas proses dan evaluasi pendidikan, meningkatkan peran supervisi pendidikan, dan meningkatkan kualitas penelitian.

c. Meningkatkan Relevansi Pendidikan

Meningkatkan relevansi pendidikan yang dapat dimanifestasikan dengan pengembangan kecakapan dasar, menata program sesuai

dengan kepentingan kelanjutan studi dan memasuki dunia kerja, menciptakan proses pendidikan yang manusiawi, dan membangun iklim pendidikan yang inklusif.

d. Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pendidikan Relevansi Pendidikan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan yang dapat diwujudkan dengan penegakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Pendidikan berbasis masyarakat, penegakkan Otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, penerapan dalam pendanaan pendidikan yang berbasis kinerja, dan pemantapan keberadaan dan fungsi akreditasi lembaga pendidikan semua jenjang, dan mengupayakan debirokratisasi pendidikan

2. Pilar-Pilar Strategis

Pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama serta akhlak mulia
- b. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- c. Proses Pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- d. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan
- e. Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- f. Penyediaan Sarana Belajar yang mendidik
- g. Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan
- h. Penyelenggaraan Pendidikan yang terbuka dan merata
- i. Pelaksanaan wajib belajar
- j. Pelaksanaan otonomi satuan pendidikan
- k. Pemberdayaan peran masyarakat
- l. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat
- m. Pelaksanaan Pengawasan dalam Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional

3. Enam Tahapan Strategi Pendidikan Nasional

a. Strategi I

Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal bermutu; pelaksanaan diklat bidang TK bermutu; dan penyediaan tenaga kependidikan TK/TKLB bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- 2) Perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- 3) Keluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; serta
- 4) Ketersediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD.

Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah masa yang berharga dan sangat penting bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya yang dapat diperoleh melalui pendidikan anak usia dini (PAUD), yang meliputi TK/ RA untuk anak usia 5-6 tahun, serta kelompok bermain, taman penitipan anak, dan berbagai program serupa untuk anak usia 3-4 tahun. Selain itu beberapa muatan penyiapan anak usia dini untuk belajar di SD/MI diberikan juga di Posyandu dan program Bina Balita. Posyandu yang pada awalnya merupakan program layanan kesehatan bagi ibu dan anak usia dini, kini telah dilengkapi dengan muatan pendidikan. Demikian juga Bina Balita yang memberikan layanan pendidikan pemeliharaan kesehatan anak bagi orangtua, terutama ibu, yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun.

b. Strategi II

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui:

- 1) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Paket A dan Paket

- B bermutu; penyediaan diklat bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu; penyediaan tenaga kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota;
- 2) perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
 - 3) perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; serta
 - 4) penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar.

c. Strategi III

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui:

- 1) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota, yang meliputi penyediaan guru SMA/SMLB/SMK bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Paket C bermutu; penyediaan diklat bidang SMA/SMLB/SMK bermutu; dan penyediaan tenaga kependidikan SMA/SMLB/SMK bermutu yang merata antarkabupaten dan kota;
- 2) perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA/SMLB dan SMK bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota;
- 3) perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota; serta
- d. ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran; data dan informasi berbasis riset; dan standar mutu pendidikan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah.

Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (demand driven) guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (match) antara employee dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan

pendidikan vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya. Pendidikan vokasi melayani sistem ekonomi, sistem sosial, dan politik serta menjadi jawaban/terobosan pembangunan ekonomi kreatif.

Selanjutnya, pendidikan vokasi pada tingkat menengah memiliki peranan yang sangat besar terhadap tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan vokasi memiliki multi-fungsi antara lain:

- (a) sosialisasi yaitu transmisi dan konkretisasi nilai-nilai ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan jasa;
- (b) kontrol sosial yaitu kontrol perilaku dengan norma-norma kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan;
- (c) seleksi dan alokasi yaitu mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;
- (d) asimilasi dan konservasi budaya yaitu absorpsi antar budaya masyarakat serta pemeliharaan budaya lokal;
- (e) mempromosikan perubahan demi perbaikan karena pendidikan kejuruan tidak sekedar mendidik dan melatih ketrampilan yang ada, tetapi juga harus berfungsi sebagai pendorong perubahan, akulturasi perubahan dan enkulturasi atau pembawa perubahan bagi masyarakat. Pendidikan kejuruan tidak hanya adaptif tetapi juga harus antisipatif.

d. Strategi IV

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara dilaksanakan melalui:

- 1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara yang meliputi pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi, dan akademik; penyediaan dosen; penyediaan dan perluasan akses PT; penyediaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, serta berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan

- 2) ketersediaan data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan tinggi, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi.

e. Strategi V

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui:

- 1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota; dan perluasan dan pemerataan akses kursus dan pendidikan life skill bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota;
- 2) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.

f. Strategi VI

Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan dilakukan melalui:

- 1) penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja
- 2) penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen
- 3) penyediaan dan pendayagunaan buku ajar, kebahasaan, e-pendidikan, kehumasan, dan sistem sekolah sehat yang meliputi perwujudan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan pendidikan; perwujudan layanan prima dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah; penyediaan TIK untuk e-learning dan e-administrasi pada semua satuan pendidikan dan satker; perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilar pemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; dan perwujudan

sekolah sehat dan kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;

- 4) penguatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan yang meliputi pencapaian intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel, pencapaian audit investigasi sesuai dengan standar audit, dan perwujudan pelayanan prima dalam manajemen operasional.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia, di antaranya:

1. Mentalitas birokrat sektor pendidikan

Pengelolaan pendidikan tidak akan lebih produktif manakala pimpinan lebih menunjukkan penampilan birokratis, dibandingkan dengan penampilan profesional. Penampilan birokratis cenderung mengatasi persoalan pendidikan lebih bersifat administratif dan birokratis, daripada pendekatan yang bernuansa akademik-profesional dan humanistik. Tentu saja untuk beberapa hal masih juga diperlukan pendekatan administratif.

2. Politisasi Birokrasi pendidikan.

Dampak negatif otonomi pendidikan memungkinkan terjadinya pembinaan karir tanpa batas, sehingga siapapun dapat mengelola birokrasi pendidikan. Jika birokrasi pendidikan dikelola dengan cara dan pendekatan seperti ini, maka pengembangan pendidikan tidak akan pernah menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memuaskan semua stakeholder.

3. Penghargaan terhadap profesi pendidikan

Profesi pendidikan tidak akan pernah menggairahkan, selama penghargaan yang diberikan masih belum menjanjikan dan memberikan prestisius bagi siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, baik secara material maupun non-material, perlu terus diupayakan peningkatan penghargaan bagi profesi pendidikan.

4. Mayoritas tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa kebijakan pendidikan belum dapat diwujudkan secara optimal, karena mayoritas tenaga kependidikan masih menunjukkan tingkat kualifikasi dan

kompetensi masih berada di bawah kualifikasi dan kompetensi minimal.

5. Kepedulian Masyarakat Bisnis dan Industri yang Masih Rendah.

Implementasi kebijakan pendidikan nampaknya tidak bisa lepas dari kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mereka belum sepenuhnya menunjukkan dukungannya baik berupa dukungan material yang memadai, maupun menyiapkan space untuk tempat melakukan praktek, atau mengirimkan tenaga ahlinya ke tempat pendidikan.

D. Implikasi bagi Pendidikan Islam

Untuk dapat membangun generasi Islam yang cerdas dan peduli bangsa, komponen pendidikan Islam seharusnya ikut ambil peran penting dalam membangun pendidikan bangsa. Selain dari itu komponen pendidikan Islam perlu menjadikan pendidikan sebagai panglimanya dalam membangun ummat. Akhirnya yang sangat diharapkan bahwa semua komponen pendidikan Islam dengan segala levelnya, perlu berpartisipasi aktif dan langsung dalam berkontribusi terhadap pembenahan sistem pendidikan nasional, baik dalam mengembangkamn kebijakan, implementasi, sampai pada memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan nasional.

E. Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran tentang strategi pendidikan nasional yang dapat disampaikan dalam bab ini, semoga dapat dijadikan bahan refleksi untuk membangun ummmat Islam menuju pembentukan insan yang lebih bermartabat. Tentu saja yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita dapat menjadikan pendidikan Islam sebagai instrumen utama dalam mengantarkan ummat Islam menjadi hamba yang selalu taat kepada Ilaahi Rabbi, dan menjadi khalifah di atas bumi yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian.

RANGKUMAN

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa

yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Pendidikan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pada fihak lain pendidikan nasional juga berfungsi untuk menjamin dan melestarikan keberhasilan pembangunan. Dengan demikian ada hubungan dialektis antara pendidikan nasional dan pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, pendidikan nasional harus mampu mengantisipasi dan mempengaruhi perkembangan dan arah pembangunan, sedangkan pembangunan harus mampu menjamin terlaksananya pendidikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan.

Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan nasional, maka ada beberapa kebijakan strategi pendidikan nasional. (1) Demokratisasi Pendidikan, (2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Semua Jenjang, (3) Meningkatkan Relevansi Pendidikan, (d) Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pendidikan Relevansi Pendidikan.

Sedangkan untuk mencapainya melalui enam tahapan strategi (1) Strategi I Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota, (2) Strategi II Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota.(3) Strategi III Perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraangender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, dan kota. (4) Strategi IV Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya sainginternasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.(5) Strategi V Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (6) Strategi VI Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan.

PUSTAKA

- Fernandez perez, Miguel . 1982 . *Krisis Dalam Pendidikan*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. Ed. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Tilaar, H.A.R. (1998), *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Penerbit Tera Indonesia
- _____,(2000), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- _____, (2002). *Pendidikan dan Masyarakat Madani Indonesia* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahab, Rochmat, (2003), *Mencermati RUUSPN dikaitkan dengan Masa Depan Bangsa*, (paper), Yogyakarta:
- http://riyanbuno.blogspot.com/2010_07_01_archive.html. diunduh 7 Mei 2012.

BAB 9.....	235
STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL.....	235
Tujuan Pembelajaran:	235
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:	235
▪ Hakikat Strategi Pendidikan Nasional.....	235
▪ Strategi Pendidikan Nasional Hakikat Reformasi Pendidikan 235	
▪ Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.	235
▪ Implikasi bagi Pendidikan Islam	235
A. Hakikat Strategi Pendidikan Nasional.....	237
1. Definisi Strategi.....	237
2. Hakikat Pendidikan Nasional	241
B. Strategi Pendidikan Nasional.....	251
1. Kebijakan strategi pendidikan nasional	251
Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan nasional, maka ada beberapa strategi pendidikan nasional.....	251
Upaya dapat dilakukan dengan mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan pendidikan untuk semua, memungkinkan terjadinya pemberdayaan dan pendayagunaan institusi masyarakat, memberikan perhatian tersendiri terhadap kelompok khusus, dan mengupayakan pendirian unit pendidikan.	251
Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang yang diwujudkan dengan melakukan pembaharuan kurikulum pada semua jenjang, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas proses dan evaluasi pendidikan, meningkatkan peran supervisi pendidikan, dan meningkatkan kualitas penelitian.	251
2. Pilar-Pilar Strategis	252
3. Enam Tahapan Strategi Pendidikan Nasional	252
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.	257
1. Mentalitas birokrat sektor pendidikan.....	257
2. Politisasi Birokrasi pendidikan.....	257

3. Penghargaan terhadap profesi pendidikan.....	257
4. Mayoritas tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan.	257
5. Kepedulian Masyarakat Bisnis dan Industri yang Masih Rendah.....	258
D. Implikasi bagi Pendidikan Islam	258
E. Penutup	258
RANGKUMAN.....	258
PUSTAKA	260

BAB 9.....	235
STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL.....	235
A. Hakikat Strategi Pendidikan Nasional.....	237
1. Definisi Strategi.....	237
2. Hakikat Pendidikan Nasional	241
B. Strategi Pendidikan Nasional.....	251
1. Kebijakan strategi pendidikan nasional.....	251
2. Pilar-Pilar Strategis	252
3. Enam Tahapan Strategi Pendidikan Nasional	252
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.	257
1. Mentalitas birokrat sektor pendidikan.....	257
2. Politisasi Birokrasi pendidikan.....	257
3. Penghargaan terhadap profesi pendidikan.....	257
4. Mayoritas tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan.	257
5. Kepedulian Masyarakat Bisnis dan Industri yang Masih Rendah.....	258
D. Implikasi bagi Pendidikan Islam	258

BAB 10

PENDIDIKAN ISLAM DAN KEMAJUAN SAINS

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- Sekilas Tentang Pendidikan Islam
- Perkembangan Sains
- Pendidikan Islam dan Perkembangan Sains

Pendidikan merupakan media yang sangat efektif dalam membentuk dan membangun sikap dan pikiran serta kepribadian manusia. Kelemahan sistem pendidikan oleh suatu kelompok masyarakat akan berimplikasi pada keterbelakangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi keharmonisan pada hubungan masyarakat secara umum.

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat esensial bagi manusia, melalui pendidikan manusia bisa belajar menghadapi berbagai fenomena kehidupan yang semakin kompleks. Melihat urgensi pendidikan Islam memosisikan pada tempat yang sangat tinggi dan mulia dalam doktrin agama.

Islam bukan hanya sebuah agama tetapi juga basis peradaban. Islam, bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga implementasi dan pelaksanaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa fenomena baru dalam dunia pendidikan Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Hubungan antara pendidikan Islam dengan masyarakat sangat erat. Hal ini dilihat lewat peranan pendidikan Islam dalam menyikapi fenomena sosial. Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan sosial dimana *output* pendidikan formal kurang dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial sebagai akibat dari perubahan yang terjadi melalui perkembangan sosial dan teknologi modern.

Slogan *Life Long Education* (pendidikan seumur hidup) secara sosial kultural harus dibangun dan ditumbuh kembangkan untuk mewujudkan kebutuhan dan harapan masyarakat (Ahmadi, 1991). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat signifikan untuk memberi arah dan nilai terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat (Sudirman, 1987).

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Alquran adalah membina keunggulan yang handal, baik secara intelektual maupun moral sprituil, sehingga dengan keunggulan intelektual dan spiritual inilah manusia menjadi mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah.

A. Sekilas Tentang Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pengertian pendidikan Islam, oleh para ahli berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut Marimba (1998), pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Nur Uhbiyati (1997) mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan orang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar memiliki kepribadian muslim. Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.

Menurut Bawani (1991) menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan proses penggalan, pembentukan, pendayagunaan dan pengembangan pola fikir, dzikir, dan kreasi manusia melalui pengajaran, bimbingan, latihan dan pengabdian yang dilandasi dan dinafasi oleh ajaran-ajaran Islam, sehingga terbentuk pribadi muslim sejati yang mampu mengontrol, mengatur dan merencanakan kehidupan, dilakukan sepanjang zaman dengan penuh tanggung jawab, semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan latihan terhadap jasmani dan rohani manusia dengan melakukan penggalan, pembentukan, pendayagunaan, dan pengembangan pola fikir dan pola dzikir serta kreasinya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi dua dimensi pokok yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Kedua tujuan tersebut antara lain:

a. Tujuan Sementara

Tujuan sementara pendidikan Islam berkaitan dengan tujuan instruksional yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Tujuan sementara ini bisa berbeda-beda tergantung dari hasil yang ingin dicapai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam tersebut.

Menurut Nur Uhbiyati (1997) bahwa tujuan sementara pendidikan Islam adalah sasaran yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan sementara di sini yaitu tercapainya kemauan seperti kecakapan jasmani, pengetahuan membaca, pengetahuan tentang ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan jasmani dan rohani dan sebagainya.

Misalnya tujuan pengajaran pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah:

- Memberi ilmu pengetahuan agama Islam
- Memberikan pengertian tentang agama Islam sesuai tingkat kecerdasannya dan memupuk jiwa keagamaan
- Membimbing anak didik agar mereka beramal saleh dan berakhlak mulia (Zuhairini, 1983).

Tujuan ini berbeda dengan pengajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau yang sederajat. Tujuan tersebut antara lain:

- Menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia, menghayati dan mengamalkan ajarannya dan menjadi manusia yang berkepribadian bulat, utuh, percaya diri
- Memiliki pengetahuan, pengalaman keterampilan yang luas serta sikap untuk melanjutkan pelajaran ke Madrasah Aliyah atau sekolah lanjutan lainnya dan dapat berbakti pada masyarakat sambil mengembangkan diri guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat.
- Memiliki pengetahuan agama dan umum dan kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat

Setiap lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam bebas menetapkan tujuan sementara yang hendak dicapai, tetapi tidak boleh berlawanan dengan Alquran dan Sunnah sebagai landasan pokok ajaran Islam.

b. Tujuan Akhir

Tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian muslim. Kepribadian muslim di sini adalah kepribadian yang seluruh

aspeknya merealisasikan dan mencerminkan ajaran Islam.

Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah swt bukan hanya sekedar ajaran-ajaran yang perlu diketahui saja, tetapi perlu diterapkan diseluruh dimensi kehidupan manusia. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai sarana aktualisasi pendidikan bukan hanya ditujukan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar memahami ajaran Islam.

Athiyah (1993) mengatakan bahwa para ahli pendidikan sepakat tujuan akhir dari pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak peserta didik dengan segala macam ilmu pengetahuan yang belum mereka ketahui, tetapi maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa *fadhilah* (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka dengan kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur.

Pendidikan Islam harus diorientasikan untuk mengarahkan peserta didik untuk memahami dan mengamalkan seluruh ajaran Islam agar terbentuk kepribadian yang mulia. Maka tujuan pokok pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan mendidik jiwa. Semua mata pelajaran haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap guru haruslah memperhatikan dan memikirkan akhlak keagamaan adalah akhlak tertinggi sedang akhlak mulia adalah tiang dari pendidikan Islam.

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Alquran adalah membina keunggulan yang handal, baik secara intelektual maupun moral sprituil, sehingga dengan keunggulan intelektual dan spiritual inilah manusia menjadi mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah (Qutub, 1400 H).

Dengan demikian, ajaran Islam bukan sekedar konsep semata tetapi diamalkan oleh umat Islam secara *kaffah* dalam perilaku sehari-hari.

3. Pendidikan Islam dan Harapan Masyarakat

Secara historis, peradaban-peradaban besar dunia yang pernah jaya mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran, karena kegagalan pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pencerahan dan kecerdasan suatu bangsa.

Pendidikan adalah suatu tindakan yang secara sengaja

dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memelihara kelangsungan hidupnya (Langgulung, 1980). Artinya pendidikan merupakan pilihan bagi masyarakat untuk melestarikan identitasnya agar dapat hidup layak dalam suatu komunitas.

Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara meresahkan fungsionalitas lembaga pendidikan Islam. Keberadaan lembaga pendidikan Islam oleh sebagian kalangan dianggap kurang relevan dan kurang akomodatif dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Dualisme pendidikan Islam pada suatu sisi dan posisi pendidikan Islam termarginalkan oleh peradaban barat yang eksploratif pada sisi yang lain membuat upaya pengembangan pendidikan Islam kurang kondusif dalam memberikan kontribusi positif ke arah pembangunan masyarakat.

Menyikapi persoalan dualisme pendidikan Ahmad Tafsir (1995) menegaskan bahwa inti beragama terletak pada pola sikap dan perilaku. Karena inti pendidikan Islam adalah bagaimana membentuk pola sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak disangsikan lagi, telah membawa revolusi dan perubahan radikal dalam kehidupan moderen yang semakin kompetitif. Hampir tidak dapat dipastikan bahwa tidak satu bidang pun dalam kehidupan ini yang tidak tersentuh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Azra, 1998).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantar barat menggapai kemajuan pesat di berbagai aspek kehidupan menyadarkan para pemerhati pendidikan Islam untuk melakukan usaha-usaha pengembangan lembaga pendidikan Islam, agar relevan dan akomodatif terhadap kebudayaan masyarakat.

Tokoh pembaharu Islam Muhammad Abduh memiliki ide dan gagasan yang cemerlang tentang pembahasan modernisasi di berbagai bidang seperti kebangsaan, kemasyarakatan, kegamaan dan pendidikan (Nasution, 1991).

Peranan pendidikan Islam dalam masyarakat selalu menjadi perbincangan yang aktual. Dalam setiap pandangan mengenai

pendidikan Islam memerlukan analisis mengenai masyarakat untuk mengetahui apakah pendidikan Islam sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu atau sebagai ide untuk membangun masyarakat.

Beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para pakar mengenai fungsi pendidikan. Hasan Langgulung (1980) mengemukakan beberapa fungsi pendidikan yaitu :

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan penting dalam pendidikan
2. Memindahkan ilmu pengetahuan dari suatu generasi ke generasi yang lain
3. Memindahkan nilai-nilai untuk menjaga keutuhan dan kelanjutan hidup suatu masyarakat.

S. Nasution (1999) mengemukakan bahwa ada beberapa harapan yang ingin dicapai seseorang untuk mendapatkan pendidikan yaitu:

1. Mendapatkan kesempatan kerja dan menjadi tenaga yang terampil dan profesional
2. Untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan mentransmisi kebudayaan
3. Sebagai alat transformasi kebudayaan.

Dari beberapa fungsi dan harapan masyarakat terhadap pendidikan maka pendidikan dan kelembagaan harus menata diri dengan melakukan perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang lebih relevan dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat modern tanpa harus kehilangan arah dan tujuan pendidikan yang jelas.

Dalam konteks modern seperti sekarang ini integralisasi ilmu pengetahuan Islam mutlak dilakukan (Mudhafir, 2000). Ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak merubah pola pikir masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak harus kehilangan fungsi dan peranan dalam pembangunan masyarakat yang rasional, kritis dan bermartabat.

Ide dan gagasan pembaharuan pendidikan Islam sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program pembaharuan (modernisme) Islam secara keseluruhan. Modernisme

Islam adalah pembaharuan (modernisme) pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan harus diperbaharui secara kerangka modernitas.

Dengan mempertahankan pemikiran dan sistem kelembagaan Islam masa lalu (tradisional) tidak akan menguntungkan atau bahkan akan memperpanjang nestapa ketidak berdayaan kaum muslimim dalam berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan pada umumnya modernisasi atau pembangunan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pada suatu sisi pendidikan dipandang sebagai variabel modernisasi (pembangunan/development). Tanpa pendidikan yang memadai akan sulit bagi masyarakat manapun untuk mencapai kemajuan. Karena itu banyak ahli pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan kunci (jalan) ke arah modernisasi, tetapi di lain sisi pendidikan sebagai obyek modernisasi dalam pembangunan.

Pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern (modernizing) seperti masyarakat Indonesia pada dasarnya berfungsi untuk memberi kaitan antara anak didik dengan lingkungan sosial kulturalnya yang terus berubah.

Fungsi pokok di era sekarang ini menjadi wahana bagi integrasi sosial yang sehat, ajang persiapan bagi generasi menapaki masa depan yang lebih cerah, menciptakan tenaga-tenaga yang kreatif, profesional dan handal yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi kelanjutan program pembangunan.

B. Perkembangan Sains

1. Islam dan Pengetahuan/Sains

Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi dunia modern sekarang, adalah mewariskan sejumlah teori pengetahuan tentang alam semesta dan cara-cara menerapkan pengetahuan tentangnya. Dalam banyak hal, hubungan antara ilmu pengetahuan (sains) dengan cara-cara menerapkannya (teknologi) telah banyak dicontohkan dan diujicobakan oleh sejumlah sarjana muslim pada sekitar abad ke-9 - 13 M.. Mereka bukan hanya ditopang oleh pengetahuan dan pengalamannya, tapi juga anugrah yang melimpah dengan mendapat

fasilitas dari pemerintahan, terutama pada masa-masa kejayaan Abbasiyah di Baghdad.

Sebelum melahirkan teknologi, pengembangan sains lebih dahulu mereka dapatkan, bukan hanya dari hasil-hasil temuan mereka sendiri, tapi juga mereka dapatkan dari sejumlah sumber yang berasal bukan hanya dari dalam doktrin Islam saja. Kebanyakan pengetahuan tentang hukum-hukum alam, ilmu ukur dan matematika, fisika dan geometrika sampai ilmu gaya dan berat mengenai bermacam-macam benda, mereka peroleh dari warisan Yunani,, Persia, India dan Mesir. Pengetahuan sains ini mereka kuasai terlebih dahulu sebelum mengembangkan teknologi. Karena ilmu-ilmu tersebut adalah sebagai dasar-dasar bagi pengembangan teknologi berikutnya. Perbedaan yang mendasar antara sains dan teknologi adalah, sains lebih banyak berbicara tentang teori dan pengetahuan mengenai macam-macam objek baik yang bersifat mendasar maupun universal, objektif dan sistematis.

Sedangkan teknologi lebih bersifat praktis, yakni ilmu tentang cara-cara menerapkan pengetahuan sains untuk memanfaatkan alam semesta bagi kesejahteraan dan kemudahan serta kenyamanan umat manusia. Keduanya sama-sama bersifat netral bagi kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya sekedar pengetahuan, maupun sebagai alat bagi kemudahan mereka hidup.

Beberapa contoh sains dan teknologi Islam, yang berkaitan dengan warisan Hellenisme Yunani adalah filsafat, astronomi, fisika, geometrika, kimia, pertambangan dan metalurgi, matematika, kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Dalam bidang matematika kontribusi Islam telah mengenalkan system bilangan India, dengan mengenalkan bilangan baru nol (0) dengan sebuah titik (.). Hal ini telah mempermudah bagi proses penghitungan berikutnya, sekalipun dengan jumlah klipatan yang sangat panjang. Penulisan bilangan pertama adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizm (w.875 M), selanjutnya Abul Hasan al-Uqlidisy (w.953), Umar Khayyam (w.1131). Sedangkan dalam bidang astronomi pengaruh Babilonia dan India sangat terasa, apalagi sejak diterjemahkannya risalah India, Siddhanta ilmu perbintangan para raja sejak tahun 711 M di Baghdad. Abu Ma'syar al-Falaky al-Balkhy merupakan di antara tokoh yang paling terkenal dalam membuat ramalan-ramalan perbintangan, karyanya, Kitab al-Uluf.

Bidang fisika yang paling menonjol adalah mengenai teori optik yang dikembangkan oleh Ibn al-Haitsam dalam karyanya “Kitab al-Manadzir”, al-Khaziny (w. 1040 M) juga mengurai tentang gaya gravitasi spesifik dalam karyanya “Kitab Mizan al-Hikmah”. Pengobatan dalam Islam mereka dapatkan banyak dari Persia atau Mesopotamia, India dan lainnya. Muhammad Ibn Zakariya al-Razy (w. 925 M) seorang dokter dan penulis kitab pengobatan yang cukup terkenal, juga Ibn Sina dengan Qonun fi al-Thib-nya. Keduanya sama-sama telah membuktikan penguasaannya dalam hal teknologi farmasi dan kedokteran. Dan hampir menjadi sebuah kebiasaan bahwa para ahli ini biasa merangkap dalam profesinya, selain sebagai filosof, astronom juga ahli dalam farmasi dan kedokteran.

Salah satu contoh pengembangan teknologi lainnya dalam Islam adalah ditemukannya penerapan teori-teori fisika dalam menentukan arah waktu dengan membuat jam melalui mekanisme gerak (escapement) air raksa, yang dibuat oleh al-Muradi pada abad ke 11 M. Termasuk Ridwan dan al-Jazary juga membuat jam dari gerakan air yang disambungkan dalam gir-gir bersegmen dan episiklus. Kincir air untuk mengambil air dari saluran yang lebih rendah untuk dinaikkan ke lokasi yang lebih atas, juga telah biasa digunakan di Murcia Spanyol, dan contohnya masih berfungsi sampai abad ke13 M.

2. Sumbangan Islam Terhadap Sains dan Peradaban Dunia

Perlu diketahui bersama, sisi gelap dalam pola pendidikan yang dirumuskan oleh Amerika dan Eropa yaitu tidak adanya muatan nilai ruhiyah, dan lebih mengedepankan logika materialisme serta memisahkan antara agama dengan kehidupan yang dalam hal ini sering disebut paham Sekulerisme. Implikasi yang bisa dirasakan namun jarang disadari adalah adanya degradasimoral yang dialami oleh anak bangsa. Banyak kasus buruk dunia pendidikan yang mencuat di permukaan dimuat oleh beberapa media massa cukup meresahkan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsayang lebih baik. Sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushulfiqh.

Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masihmenjadi acuan perkembangan sains dan teknologi berasal dari kaum musliminyaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi), Ibnu

Khawarizm (bapak matematika), IbnuBatutah (bapak geografi), Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika), Al-Battani(Bapak Astronomi), Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia), Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Mereka dikenal tidak sekadar paham terhadap sains dan teknologi namun diakui kepekarannya pula di bidang ilmu diniyyah. Dalam buku milik Mehdi Nakosteen (2003, hal.85) disebutkan beberapa kontribusi muslim terhadap dunia pendidikan sebagai berikut :

- a. Melalui abad keduabelas dan sebagian abad ke tiga belas, karya-karya Muslim tentang sains, filsafat, dan bidang-bidang lain telah diterjemahkan kedalam bahasa latin, terutama dari bahasa Spanyol dan memperkaya kurikulum barat, khususnya Eropa barat laut
- b. Orang-orang Muslim, telah memberi kepada Barat metode eksperimental, sekalipun masih kurang sempurna.
- c. Sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab
- d. Karya-karya terjemahan mereka, terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran, sudah digunakan sebagai teks (kuliah) didalam kelas-kelas sekolah tinggi, jauh ke dalam pertengahan abad ke tujuh belas.
- e. Mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa, dipelajari kembali itu dengan kebudayaan-kebudayaan klasik dan lainnya, sehinggamembantu menghasilkan (abad) Renaissance.
- f. Mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa, mereka telah mendirikan ratusan sekolah tinggi sebelum Eropa
- g. Mereka memelihara pemikiran Greco-Persian ketika Eropa bersikap tidak toleran terhadap kebudayaan-kebudayaan.
- h. Mahasiswa-mahasiswa Eropa di dalam Universitas Muslim membawakembali (ke negaranya) metode-metode baru tentang pengajaran
- i. Mereka telah memberi kontribusi tentang pengetahuan rumah sakit-rumah sakit, sanitasi dan makanan kepada Eropa. (Nakosteen, Kontribusi Islam Terhadap Dunia Barat, 2003, hal. 85)

3. Sarjana-Sarjana Muslim dan Karya Ilmiahnya

Sejak sekitar abad ke-8 M hingga abad ke-20 M, Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan, baik dalam bidang ilmu filsafat, kalam, tasawuf maupun sains, teknologi, dan seni. Apa-pun bidangnya,

mereka adalah tokoh-tokoh langkayang telah memperkaya dunia ilmu pengetahuan bahkan secara khusus menjadisimbol kemajuan peradaban Islam. Berikut diantara sarjana-sarjana Muslim terkenal beserta karyanya yang penulis kutip dari berbagai sumber.

a. Ibnu Musa Al-Khawarizmi (Astronom, Penemu Algoritma dan Aljabar).

Tak banyak anak didik yang tahu, siapa yang orang yang dikenal sebagai bapak dan penemu dua cabang ilmu matematika, yaitu Algoritma dan Aljabar. Dialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan Muslim penemu Algoritma dan Aljabar. Nama Algoritma sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Al-Khawarizmi. Di kalangan ilmuwan Barat ia lebih dikenal dengan nama Algorizm. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (770-840 M.) ilmuwan yang berjasa besar dalam memajukan ilmu pengetahuan ini lahir di Khawarizm (Kheva), kota di selatan sungai Oxus (kini Uzbekistan) pada tahun 770 M. kedua orang tuanya kemudian pindah ke sebuah tempat diselatan kota Baghdad (Irak), ketika ia masih kecil. Al-Khawarizmi hidup dimasa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yakni Al-Makmun, yang memerintah pada 813-833 M. (Sucipto, *The Great Muslim Scientist*, 2008, hal: 16).

Sejarah mencatat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai orang yang memperkenalkan konsep Al-Goritma dalam Matematika. Ia adalah penemu beberapa cabang ilmu dan konsep matematikayang dikenal sebagai astronomgeografer. Selain Algoritma, teori Aljabar juga merupakan buah fikirnya.

Nama Aljabar sendiri diambil dari bukunya yang terkenal, yakni *Al-Jabr wa-al-Muqabilah*. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen dan kotangen serta konsep diferensiasi. Tak hanya itu, di bidang ilmu ukur, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma serta hitungan desimal. Sayangnya beberapa sarjana Barat seperti John Napier (1550-1620 M.) dan Simon Stevin (1548-1620 M.) mengklaim bahwa penemuan tersebut merupakan hasil pemikiran mereka. Masih berkaitan dengan masalah perhitungan, ternyata Al-Khawarizmi juga seorang ahli ilmu bumi. Bukunya *Kitab Surat Al-ard*, menjadi dasar ilmu bumi Arab. Naskah itu hingga kini masih disimpan di Strassburg, Jerman oleh Abdul Fida, seorang ahli ilmu bumi terkenal (Sucipto, hal. 17-18).

Petualangan dan pengabdian panjangnya itu baru berakhir pada tahun 840 M. ketika Sang Khaliq memanggilnya. Al-Khawarizmi meninggalkan warisan khazanah dalam ilmu pengetahuan dunia.

b. Ibnu Khaldun (Bapak Ilmu Sosiologi Politik).

Sejatinya pemikir dan ulama peletak dasar ilmu sosiologi dan politik melalui karya magnumopusnya, *Al Muqaddimah*.

Ia lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H/ 27 Mei 1332 dengan nama Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun. Moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman yang bermigrasi ke Sevilla, Andalusia (Spanyol). Namunkeluarganya harus pindah ketika Sevilla dikuasai Kristen (Sucipto, hal. 47). Pendidikannya dimulai di Tunisia dan di Fez (Maroko) dengan mempelajari berbagai bidang ilmu: menghafal Al-Qur'an, mempelajari tata bahasa, hukum Islam (syari'ah), hadis, retorika, filologi dan puisi. Selain itu ia mempelajari sastra Arab, filsafat, matematika dan astronomi. Khaldun sangat terlibat dengan politik. Kariernya di bidang politik membawanya keluar masuk istana, ia sebagai pemenang maupun pecundang. Usia mudanya dihabiskan sebagai pendamping, penasihat sultan serta menduduki beraneka jabatan. Kariernya menanjak saat ia membantu Sultan Abu Salem dalam menjatuhkan Al-Mansyur, musuh politiknya. Ia diberi jabatan sekretaris selama lebih dari dua tahun, lalu ditugaskan sebagai qadi (hakim). Sultan Abu Salim tak lama kemudian dijatuhkan oleh Wazir Omar. Gagal mendapatkan kedudukan di pemerintahan yang baru, Ibnu Khaldun meninggalkan Fez dan pergi ke Andalusia. Salah satu di antara karya Ibnu Khaldun bahwa ia memetakan masyarakat dengan interaksi sosial, politik, ekonomi dan geografi yang melingkupinya. Pendekatan ini dianggap menjadi terobosan yang sangat signifikan. Menurutnya, organisme dapat tumbuh dan matang karena sebab-sebab nyata yang mempengaruhinya. Formasi masyarakat, fikiran yang dituangkan dalam karya besarnya, *Muqaddimah*, misalnya, dikatakan sebagai hasrat manusia untuk berkumpul, bersaing, lalu memperebutkan kepemimpinan. Mereka diikat dengan solidaritas ashabiyah (ungkapan pra-Islam) yang diarahkan oleh para pimpinannya. Ia memperkirakan bahwa solidaritas itu berlangsung empat generasi. Model ini menempatkan Ibnu Khaldun sebagai penganut teori siklus sejarah. Masyarakat lahir,

tumbuh, berkembang, lalu mati untuk digantikan yang lain, demikian seterusnya (Sucipto, hal. 49).

Kontribusi Ibnu Khaldun dalam Ilmu pengetahuan memang tidak sedikit. Setidaknya berkatnyalah dasar-dasar ilmu sosiologi politik dan filsafat dibangun, tak heran jika warisannya itu banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Seorang sejarawan Barat, Dr Boer, menulis "Ibnu Khaldun tak pelak lagi, adalah orang pertama yang mencoba menerangkan dengan lengkap evolusi dan kemajuan suatu kemasyarakatan, dengan alasan adanya sebab-sebab dan faktor-faktor tertentu, iklim, alat, produksi, dan lain sebagainya, serta akibat-akibatnya pada pembentukan cara berfikir manusia, dan pembentukan masyarakatnya. Dalam derap majunya peradaban ia mendapatkan keharmonisan yang terorganisasikan dalam dirinya sendiri."

c. Jabir Ibnu Hayyan (Bapak Kimia)

Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa embrio persenjataan nuklir yang banyak digunakan oleh negara-negara maju, entah mereka gunakan untuk hal-hal positif maupun negatif, semua itu bermula dari ilmu kimia. Sebenarnya ilmu kimia sudah ada sejak puluhan abad silam. Memang belum pada bentuk modern seperti sekarang yang telah diadopsi sedemikian canggihnya. Ilmu kimia di kemudian hari berkembang sangat pesat dan dikenal banyak orang. Tapi, hanya sedikit yang mengetahui siapa sejatinya orang pertama yang menemukan ilmu eksakta tersebut. Ia adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan (721-815 H.) ilmuwan muslim pertama yang menemukan dan mengenalkan disiplin ilmu kimia tadi.

d. Ibnu Sina

Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abū 'Alī al-Husayn bin 'Abdullāh bin

Sīnā. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia), dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia (Iran). Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu." pekerjaannya yang paling terkenal adalah *The Book of Healing* dan *The Canon of Medicine*, dikenal juga sebagai *Qanun* (judul lengkap: *Al-Qanun fi At Tibb*). (http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina, dikutip tanggal 2-10-2009)

e. Ibnu Majid

Ibnu Majid adalah seorang navigator Arab terbesar yang bergelar "singa laut". Pada usianya yang ke-15, Ibnu Majid sudah memimpin sebuah pelayaran. Navigator yang lahir di Julfar, Mesir, tahun 1421 M ini memilikinama lengkap Shihabud Din Ahmad bin Majid bin Muhammmad bin Amir bin Duwayk bin Yusuf bin Husain bin Abi Ma'lak as-Sa'di bin Abi ar-Raka'ib an-Najdi. Sifat yang patut kita teladani dari Ibnu Majid adalah ketekunannyadalam mempelajari ilmu navigator yang ia dapatkan dari ayah dan kakeknyadengan cara menjalankan kapal laut atau kapal teerbang. Selain itu, ia jugamenguasai ilmu geografi dan astronomi sebagai syarat utama untuk menjadinavigator ulung.

Diantara buku-buku karya Ibnu Majid berjudul *al-Hijaziah* (sejarahnegei hijaz), *Urjuza* (melagukan syair dengan prosa raja-raja) terdiri dari 3 jilid, *Hawiyatul-Ikhtisar fi Ushul Ilmil-Bihar* (ringkasan ilmu navigator) yang ia tulis pada tahun 1490 M. Buku ini berisi tentang rute-rute laut sepanjang pantai India hingga Sumatera, Cina, Taiwan dan sepanjang pantai Samudra Hindia, serta tanda-tanda dekatnya daratan. (<http://frahasti.wordpress.com/2009/01/31/ibnu-majid>, dikutip tanggal 2-10-2009)

f. Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi, Ibnu Rusyid, 1126-Marrakesh, Maroko, 10 Desember 1198) dalam bahasa Arab *دششرب* dan dalam bahasa Latin Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Abu

Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.

Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai "Kadi" (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Di antara karyanya adalah: *Bidayat Al-Mujtahid* (kitab ilmu fiqih), *Kulliyat fi At-Tib* (buku kedokteran), *Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at* (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat). Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan; dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd, dikutip tanggal 2-10-2009)

C. Pendidikan Islam dan Perkembangan Sains

Dalam menghadapi perkembangan IPTEK modern yang melanda dunia Islam bersamaan dengan ekspansi Barat ke dunia Islam, telah menimbulkan beberapa persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Islam.

Pola pendidikan yang kurang memberikan ruang terhadap kreativitas berpikir dan semangat rasional serta daya kritik tampaknya kurang tanggap terhadap fenomena-fenomena baru sehingga terkesan tidak dapat memberikan jawaban tuntas terhadap tantangan peradaban modern yang dihadapi (Sumantri, 1988).

Sementara itu sistem pendidikan modern yang dikembangkan penguasa mengabaikan pendidikan agama pada gilirannya meninggalkan kesan di masyarakat bahwa pendidikan agama Islam sebagai lembaga pendidikan kelas dua dan pada akhirnya termarginalkan secara sosial kultural, yang akhirnya dominasi sistem pendidikan modern (sekuler) yang dianggap lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Menurut Kleden (1987) mengemukakan perkembangan pendidikan sekuler dengan materi inti, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah industri, menipisnya ozon atmosfer, bahkan ancaman kemusnahan spesies makhluk hidup.

Ilmu pengetahuan dan teknologi diakui akan membawa fasilitas kehidupan yang menyenangkan dan menina-bobokan manusia, namun pada saat yang sama manusia harus kehilangan nilai dan identitasnya.

Daya kehidupan manusia tidak saja digantikan oleh energi mesin, tetapi pola pikir manusia juga dikendalikan oleh materialisme hedonistik (Sumantri : 1988).

1. Realitas Pendidikan Islam

Adapun kenyataan bahwa kualitas pendidikan Islam dalam menyikapi perkembangan modern, baru diperdebatkan oleh pakar pendidikan, tidaklah berarti bahwa persoalan ini adalah suatu masalah menjelang tahap lepas landas pembangunan. Pendidikan Islam merupakan salah satu masalah penting dalam semua usaha pembangunan termasuk pembangunan manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu menentukan dari posisi mana yang hendak dipersoalkan untuk peningkatan kualitas pendidikan Islam, apakah sebagai tujuan pengembangan dan pembentukan manusia atau sebagai sarana manusia berkualitas untuk berkiprah di tengah masyarakatnya.

Mungkinkah ditemukan suatu metode di dalam pendidikan Islam yang mampu mencetak manusia-manusia dengan efisiensi dan produktivitas serta efektivitas yang tinggi, dalam menyikapi perubahan ?

Eksistensi pendidikan dan kelembagaan Islam sangat bergantung pada kemampuannya memadukan antara kualitas tekno-ekonomis (yang dibutuhkan sains dan teknologi modern)

dengan kualitas psikososial (kebijakan moral) yang tidak mungkin diabaikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya (Soejatmiko, 1984).

Secara praktis bagaimana pendidikan dan kelembagaan Islam mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman disamping menetralsisir dampak negatif perkembangan sains dan teknologi modern. Sains dan teknologi sangat dibutuhkan dalam konteks dewasa ini, tetapi bukan berarti harus kehilangan nilai (pegangan) sebagai arah menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Oleh sebab itu, persoalan kualitas pendidikan Islam dalam cara perkembangan modern diposisikan secara profesional. Untuk jangka pendek persoalan yang dihadapi adalah menentukan dan menumbuhkan sistem pendidikan yang relevan dengan situasi dan perkembangan modern, sementara untuk jangka panjang bagaimana kualitas pendidikan dapat mendukung *human growth*. *Human growth* merupakan pertumbuhan manusia yang meneliti tanpa merasa kurang, awasi orang lain, secara sosial efektif dan merasa mampu serta bebas memiliki tanggung jawab bagi kehidupan sendiri, keluarga dan komunitas (Soejatmiko, 1984).

Dalam rumusan yang lebih tegas persoalan pendidikan dan kelembagaan Islam adalah mengatasi situasi di mana manusia (khususnya kualitas mentalnya) lebih dianggap sebagai beban atau hambatan kemajuan. Pada urutannya pendidikan Islam harus menjadikan manusia sebagai aset terpenting sebagai pelaku perubahan dan kemajuan itu sendiri.

Dalam konteks modern, sains dan teknologi dikelompokkan dalam ilmu teoritis dan ilmu praktis, cita-cita ilmu teoritis ialah memberikan penjelasan tentang suatu kenyataan tanpa sikap keberpihakan dan tanpa pengaruh oleh keinginan tertentu. Dengan sikap seperti ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan yang berasal dari realitas obyektif.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika ilmu teoritis diterapkan untuk suatu penggunaan tertentu, maka akan dimasuki oleh wilayah ilmu praktis yang secara teknis tidak sesuai dengan realitas yang ada. Pertama masalah nilai (ilmu pengetahuan bebas nilai atau tidak), kedua unsur kehidupan (mengandung ideologi atau tidak). Celah inilah yang sebenarnya harus dijabatani oleh sistem pendidikan Islam modern.

2. Peran Islam Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi, misalnya, terbukti amat bermanfaat. Dengan ditemukannya mesin jahit, dalam 1 menit bisa dilakukan sekitar 7000 tusukan jarum jahit. Bandingkan kalau kita menjahit dengan tangan, hanya bisa 23 tusukan per menit (Qardhawi, 1997). Dahulu Ratu Isabella (Italia) di abad XVI perlu waktu 5 bulan dengan sarana komunikasi tradisional untuk memperoleh kabar penemuan benua Amerika oleh Columbus (?). Lalu di abad XIX Orang Eropa perlu 2 minggu untuk memperoleh berita pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. Tapi pada 1969, dengan sarana komunikasi canggih, dunia hanya perlu waktu 1,3 detik untuk mengetahui kabar pendaratan Neil Armstrong di bulan (Winarno, 2004). Dulu orang naik haji dengan kapal laut bisa memakan waktu 17-20 hari untuk sampai ke Jeddah. Sekarang dengan naik pesawat terbang, kita hanya perlu 12 jam saja. Subhanallah...

Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Bom atom telah menewaskan ratusan ribu manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Pada tahun 1995, Elizabetta, seorang bayi Italia, lahir dari rahim bibinya setelah dua tahun ibunya (bernama Luigi) meninggal. Ovum dan sperma orang tuanya yang asli, ternyata telah disimpan di "bank" dan kemudian baru dititipkan pada bibinya, Elenna adik Luigi (Kompas, 16/01/1995). Bayi tabung di Barat bisa berjalan walau pun asal usul sperma dan ovumnya bukan dari suami isteri (Hadipermono, 1995). Bioteknologi dapat digunakan untuk mengubah mikroorganisme yang sudah berbahaya, menjadi lebih berbahaya, misalnya mengubah sifat genetik virus influenza hingga mampu membunuh manusia dalam beberapa menit saja (Bakry, 1996). Kloning hewan rintisan Ian Willmut yang sukses menghasilkan domba kloning bernama Dolly, akhir-akhir ini diterapkan pada manusia (human cloning). Lingkungan hidup seperti laut, atmosfer udara, dan hutan juga tak sedikit mengalami kerusakan dan pencemaran yang sangat parah dan berbahaya. Beberapa varian tanaman pangan hasil rekayasa genetika juga diindikasikan berbahaya bagi kesehatan manusia. Tak sedikit yang memanfaatkan

teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya (cyber crime) dan untuk mengakses pornografi, kekerasan, dan perjudian.

Di sinilah, peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja, seraya mengeliminasi dampak negatifnya semiminal mungkin? Sejauh manakah agama Islam dapat berperan dalam mengendalikan perkembangan teknologi modern? Tulisan ini bertujuan menjelaskan peran Islam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut.

a. Paradigma Hubungan Agama-Iptek

Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan (sains) adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah (scientific method) (Jujun S. Suriasumantri, 1992). Sedang teknologi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari (Jujun S. Suriasumantri, 1986). Perkembangan iptek, adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek (Agus, 1999). Agama yang dimaksud di sini, adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw, untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (dengan aqidah dan aturan ibadah), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (dengan aturan akhlak, makanan, dan pakaian), dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (dengan aturan mu'amalah dan uqubat/sistem pidana) (An-Nabhani, 2001).

Bagaimana hubungan agama dan iptek? Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 (tiga) jenis paradigma (Lihat Yahya Farghal, 1990: 99-119): Pertama, paradagima sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Sebab, dalam ideologi sekularisme Barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan (fashl al-din 'an al-hayah). Agama tidak dinafikan eksistensinya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan tuhan. Agama tidak mengatur kehidupan umum/publik. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Agama dan iptek

sama sekali terpisah baik secara ontologis (berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal), epistemologis (berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan).

Paradigma ini mencapai kematangan pada akhir abad XIX di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi ajaran Kristen (khususnya teks Bible) dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Semula ajaran Kristen dijadikan standar kebenaran ilmu pengetahuan. Tapi ternyata banyak ayat Bible yang berkontradiksi dan tidak relevan dengan fakta ilmu pengetahuan. Contohnya, menurut ajaran gereja yang resmi, bumi itu datar seperti halnya meja dengan empat sudutnya. Padahal faktanya, bumi itu bulat berdasarkan penemuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelayaran Magellan. Dalam Bible dikatakan: “Kemudian daripada itu, aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru angin bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.” (Wahyu-Wahyu 7:1)

Kalau konsisten dengan teks Bible, maka fakta sains bahwa bumi bulat tentu harus dikalahkan oleh teks Bible (Adian Husaini, Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal, www.insistnet.com) Ini tidak masuk akal dan problematis. Maka, agar tidak problematis, ajaran Kristen dan ilmu pengetahuan akhirnya dipisah satu sama lain dan tidak boleh saling intervensi.

Kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, dus, tidak ada hubungan dan kaitan apa pun dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrem. Dalam paradigma sekuler, agama berfungsi secara sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia-tuhan. Sedang dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada (in-exist) dan dibuang sama sekali dari kehidupan.

Paradigma tersebut didasarkan pada pikiran Karl Marx (w. 1883) yang ateis dan memandang agama (Kristen) sebagai candu masyarakat, karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. Karl Marx mengatakan: “*Religion is the sigh of the oppressed creature, the*

heart of the heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people.” (Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas, jiwa dari suatu dunia yang tak berjiwa, sebagaimana ia merupakan ruh/spirit dari situasi yang tanpa ruh/spirit. Agama adalah candu bagi rakyat) (Lihat Karl Marx, *Contribution to The Critique of Hegel’s Philosophy of Right*, termuat dalam *On Religion*, 1957:141-142) (Ramly, 2000: 165-166).

Berdasarkan paradigma sosialis ini, maka agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan iptek. Seluruh bangunan ilmu pengetahuan dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide dasar materialisme, khususnya Materialisme Dialektis (Yahya Farghal, 1994: 112). Paham Materialisme Dialektis adalah paham yang memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus melalui proses dialektika, yaitu melalui pertentangan-pertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembangannya sendiri (Ramly, 2000: 110).

Ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Aqidah Islam –yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam al-Qur`an dan al-Hadits– menjadi qa`idah fikriyah (landasan pemikiran), yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia (An-Nabhani, 2001).

Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan Aqidah Islam, bukan lepas dari aqidah itu. Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun (artinya): “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” (Qs. al-‘Alaq [96]: 1).

Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari Aqidah Islam, karena iqra` haruslah dengan bismi rabbika, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah, yang merupakan asas Aqidah Islam (Al-Qashash, 1995: 81).

Paradigma Islam ini menyatakan bahwa, kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu (Yahya Farghal, 1994: 117). Firman Allah

SWT: “Dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.” (Qs. an-Nisaa` [4]: 126). “Dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.” (Qs. ath-Thalaq [65]: 12).

Itulah paradigma yang dibawa Rasulullah Saw (w. 632 M) yang meletakkan Aqidah Islam yang berasas *Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah* sebagai asas ilmu pengetahuan. Beliau mengajak memeluk Aqidah Islam lebih dulu, lalu setelah itu menjadikan aqidah tersebut sebagai pondasi dan standar bagi berbagai pengetahuan. Ini dapat ditunjukkan misalnya dari suatu peristiwa ketika di masa Rasulullah Saw terjadi gerhana matahari, yang bertepatan dengan wafatnya putra beliau (Ibrahim). Orang-orang berkata, “Gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim.” Maka Rasulullah Saw segera menjelaskan:

“Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi keduanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengannya Allah memperingatkan hamba-hamba-Nya...” [HR. al-Bukhari dan an-Nasa`i] (Al-Baghdadi, 1996: 10).

Dengan jelas kita tahu bahwa Rasulullah Saw telah meletakkan Aqidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan, sebab beliau menjelaskan, bahwa fenomena alam adalah tanda keberadaan dan kekuasaan Allah, tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang. Hal ini sesuai dengan aqidah muslim yang tertera dalam al-Qur`an:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal.” (Qs. Ali ‘Imran [3]: 190).

Inilah paradigma Islam yang menjadikan Aqidah Islam sebagai dasar segala pengetahuan seorang muslim. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan shaleh tapi sekaligus cerdas dalam iptek. Itulah hasil dan prestasi cemerlang dari paradigma Islam ini yang dapat dilihat pada masa kejayaan iptek Dunia Islam antara tahun 700 – 1400 M. Pada masa inilah dikenal nama Jabir bin Hayyan (w. 721) sebagai ahli kimia termasyhur, Al-Khawarizmi (w. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi, Al-Battani (w. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika, Al-Razi (w. 884) sebagai pakar kedokteran, optalmologi, dan kimia, Tsabit bin Qurrah (w. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik, dan masih

banyak lagi (Tentang kejayaan iptek Dunia Islam lihat misalnya M. Natsir Arsyad, 1992; Hossein Bahreisj, 1995; Ahmed dkk, 1999; Eugene A. Myers 2003; A. Zahoor, 2003; Gunadi dan Shoelhi, 2003).

b. Peran Dimainkan Islam dalam Iptek

1) Aqidah Islam Sebagai Dasar Iptek

Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu aqidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw.

Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor Barat dalam segala-galanya; dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan, mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam, diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Eksistensi paradigma sekuler itu menjelaskan pula mengapa tetap diajarkan konsep pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. Misalnya Teori Darwin yang dusta dan sekaligus bertolak belakang dengan Aqidah Islam.

Kekeliruan paradigmatis ini harus dikoreksi. Ini tentu perlu perubahan fundamental dan perombakan total. Dengan cara mengganti paradigma sekuler yang ada saat ini, dengan paradigma Islam yang memandang bahwa Aqidah Islam (bukan paham sekularisme). Namun di sini perlu dipahami dengan seksama, bahwa ketika Aqidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari al-Qur`an dan al-Hadits, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolok ukur al-Qur`an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya (Al-Baghdadi, 1996: 12).

Jika kita menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, agronomi, dan seterusnya, harus didasarkan pada ayat tertentu, atau hadis tertentu. Kalau pun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains, itu

adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu (lihat Qs. an-Nisaa` [4]:126 dan Qs. ath-Thalaq [65]: 12), bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. Misalnya saja dalam astronomi ada ayat yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pancaran cahaya dan panas (Qs. Nuh [71]: 16), bahwa langit (bahan alam semesta) berasal dari asap (gas) sedangkan galaksi-galaksi tercipta dari kondensasi (pemekatan) gas tersebut (Qs. Fushshilat [41]: 11-12), dan seterusnya. Ada sekitar 750 ayat dalam al-Qur`an yang semacam ini (Lihat Al-Baghdadi, 2005: 113). Ayat-ayat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah sehingga meliputi segala sesuatu, dan menjadi tolok ukur kesimpulan iptek, bukan berarti bahwa konsep iptek wajib didasarkan pada ayat-ayat tertentu.

Jadi, yang dimaksud menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada al-Qur`an dan al-Hadits, tapi yang dimaksud, bahwa iptek wajib berstandar pada al-Qur`an dan al-Hadits. Ringkasnya, al-Qur`an dan al-Hadits adalah standar (miqyas) iptek, dan bukannya sumber (mashdar) iptek. Artinya, apa pun konsep iptek yang dikembangkan, harus sesuai dengan al-Qur`an dan al-Hadits, dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits itu. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits, maka konsep itu berarti harus ditolak. Misalnya saja Teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern sekarang. Berarti, manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama, Nabi Adam AS, tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. Ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang menegaskan, Adam AS adalah manusia pertama, dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Adam AS itu, bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi Teori Darwin (Zallum, 2001). Firman Allah SWT: “(Dialah Tuhan) yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menciptakan keturunannya dari sari pati air yang hina (mani).” (Qs. as-Sajdah [32]: 7).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Qs. al-Hujuraat [49]: 13).

Implikasi lain dari prinsip ini, yaitu al-Qur`an dan al-Hadits hanyalah standar iptek, dan bukan sumber iptek, adalah bahwa umat Islam boleh mengambil iptek dari sumber kaum non muslim (orang kafir). Dulu Nabi Saw menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah, padahal strategi militer itu berasal dari tradisi kaum Persia yang beragama Majusi. Dulu Nabi Saw juga pernah memerintahkan dua sahabatnya mempelajari teknik persenjataan ke Yaman, padahal di Yaman dulu penduduknya adalah Ahli Kitab (Kristen). Umar bin Khatab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal (Kas Negara), yang berasal dari Romawi yang beragama Kristen. Jadi, selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, iptek dapat diadopsi dari kaum kafir.

2) Syariah Islam Standar Pemanfaatan Iptek

Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek, adalah bahwa Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimana pun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan, adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah diharamkan syariah Islam.

Keharusan tolok ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya (termasuk menggunakan iptek) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Antara lain firman Allah:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan...” (Qs. an-Nisaa` [4]: 65).

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya...[i/]” (Qs. al-A`raaf [7]: 3).

Sabda Rasulullah Saw: “[i]Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka perbuatan itu tertolak.” [HR. Muslim].

Kontras dengan ini, adalah apa yang ada di Barat sekarang dan juga negeri-negeri muslim yang bertaqlid dan mengikuti Barat secara membabi buta. Standar pemanfaatan iptek menurut mereka adalah

manfaat, apakah itu dinamakan pragmatisme atau pun utilitarianisme. Selama sesuatu itu bermanfaat, yakni dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka ia dianggap benar dan absah untuk dilaksanakan. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama.

Keberadaan standar manfaat itulah yang dapat menjelaskan, mengapa orang Barat mengaplikasikan iptek secara tidak bermoral, tidak berperikemanusiaan, dan bertentangan dengan nilai agama. Misalnya menggunakan bom atom untuk membunuh ratusan ribu manusia tak berdosa, memanfaatkan bayi tabung tanpa melihat moralitas (misalnya meletakkan embrio pada ibu pengganti), mengkloning manusia (berarti manusia bereproduksi secara a-seksual, bukan seksual), mengeksploitasi alam secara serakah walaupun menimbulkan pencemaran yang berbahaya, dan seterusnya.

Karena itu, sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan diganti dengan standar yang benar. Yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala ilmu yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, yang amat mengetahui mana yang secara hakiki bermanfaat bagi manusia, dan mana yang secara hakiki berbahaya bagi manusia. Standar itu adalah segala perintah dan larangan Allah SWT yang bentuknya secara praktis dan konkret adalah syariah Islam.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2 (dua). Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma Islam, dan bukannya paradigma sekuler, yang seharusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Jadi, syariah Islam-lah, bukannya standar manfaat (utilitarianisme), yang seharusnya dijadikan tolok ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek.

Jika dua peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, insyaallah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Mari kita simak firman-Nya:

“Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)

itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. al-A’raaf [7]: 96).

PENUTUP

Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah swt. bukan hanya sekedar ajaran-ajaran yang perlu diketahui, tetapi juga perlu diterapkan di seluruh dimensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai sarana aktualisasi pendidikan bukan hanya ditujukan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar memahami ajaran Islam, tetapi diamalkan oleh umat Islam secara *kaffah* dalam perilaku sehari-hari .

Upaya pengembangan modernisasi pendidikan Islam, harus tetap dilakukan untuk menjawab berbagai fenomena dan persoalan-persoalan baru akibat dari perkembangan sains dan teknologi modern saat ini. Pendidikan Islam harus mampu menjawab harapan-harapan masyarakat yang semakin kompleks. Jika tidak, maka dunia pendidikan Islam akan kehilangan penggemar di tengah-tengah masyarakat yang mulai maju dan berkembang baik pola pikir maupun cara dan gaya hidupnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat dan pengembangan sistem pendidikan harus dilihat secara paralel, pengembangan kualitas manusia seimbang antara rasio dengan moral (kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral spiritual).

Prinsip relevansi kurikulum pendidikan Islam dengan kebutuhan dan harapan masyarakat termasuk dunia kerja harus menjadi kenyataan, karena konsep *Link and Match* (kesesuaian dan kesepadanan) harus menjadi landasan dari setiap kebijakan pendidikan.

Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya, wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan Syariah Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat (pragmatisme/utilitarianisme) seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur, bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek, didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam). Umat Islam boleh memanfaatkan iptek, jika telah dihalalkan

oleh Syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

RANKUMAN

1. Upaya pengembangan modernisasi pendidikan Islam, harus tetap dilakukan untuk menjawab berbagai fenomena dan persoalan-persoalan baru akibat dari perkembangan sains dan teknologi modern saat ini. Pendidikan Islam harus mampu menjawab harapan-harapan masyarakat yang semakin kompleks. Jika tidak, maka dunia pendidikan Islam akan kehilangan penggemar di tengah-tengah masyarakat yang mulai maju dan berkembang baik pola pikir maupun cara dan gaya hidupnya.
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat dan pengembangan sistem pendidikan harus dilihat secara paralel, pengembangan kualitas manusia seimbang antara rasio dengan moral (kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral spiritual).
3. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada 2 (dua). Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (qa'idah fikriyah) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi Aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya, wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan Syariah Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat (pragmatisme/utilitarianisme) seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur, bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek, didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam). Umat Islam boleh memanfaatkan iptek, jika telah

dihalalkan oleh Syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

DAFTAR PUS TAKA

- Abdul Hamid Abu Sulaiman (1994). *Permasalahan Metodologis Dalam Pemikiran Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Agus, Bustanudin. 1999. *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial : Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ahmed, Shabir et.al. 1999. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Bangil : Al-Izzah.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Bagil : Al-Izzah.
- . 2005. "Al-Qur'an Mu'kijizat Yang Abadi". *Jurnal Al-Insan*. Vol I, No. 1, Januari 2005. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan.
- Amin, Husayn Ahmad, (1996) *Seratus Tokoh Islam*.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizham Al-Islam*. Tanpa Tempat Penerbit : Hizbut Tahrir.
- Arsyad, M. Natsir. 1992. *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah : Dari Jabir Hingga Abdus Salam*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Ash-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi, (2000) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur`andan Tafsir*, Semarang, Putra Rizki Putra.
- Athiyah, al- Habsy M. 1993. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan*. Get VIII. Jakarta : Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi. 1998. *Esei-Esie Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Get. I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Bahreisj, Hossein. 1995. *Menengok Kejayaan Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Bakry, Nurchalis et.al. 1996. *Bioteknologi dan Al-Qur`an Referensi Dakwah Dai Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Bawani, Imam dan Isa Anshori. 1991. *Cendikiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Get. I. Surabaya : Bina Ilmu.
- Bernard Lewis, (1996) *the Arab In History*, Harper London, Colophons Books.
- Dewan Pimpinan Penerbit, (2002) *Ensiklopedi Islam*, (Perpustakaan Nasional RI), Jakarta.PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.

- Gunadi, RA & M. Shoelhi (Ed.). 2003. *Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*. Jakarta : Penerbit Republika.
- Hadipermono, Syeichul. 1995. *Bayi Tabung dan Rekayasa Genetika*. Surabaya : Wali Demak Press.
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_scientists
- <http://frahasti.wordpress.com/2009/01/31/ibnu-ajid>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd
- http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina
- Kleden, Iqnas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Get I LP3ES.
- Komponen MKDK*. Get.I. Bandung: Pustaka Setia.
- Langgulong, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Get I. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Marimba, Ahmad D. 1986. *Pengantar filsafat Pendidikan*. Get. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Masood, Ehsan, (2009) *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim Pelopoor Hebat di Bidang Sains Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Munthoha, (1998) *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press.
- Myers, Eugene A.2003. *Zaman Keemasan Islam Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat (Arabic Thought and Western World in The Golden Age of Islam)*. Alih bahasa M.M. el-Khoiry. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Nakosteen, Mehdi, (2003) *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat*, Cet.2, Surabaya:Risalah Gusti.
- Nasution, Harun. 1991. *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Get II. Jakarta : Bulan Bintang.
- Nasution, S, 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Get II. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Get I. Jakarta : Rineka Gipta.
- _____, 1997. *Ilmu Pendidikan Islam (IPI) untuk Fakultas tarbiyah*
Komponen MKDK. Get.I. Bandung: Pustaka Setia.
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Qutub, Muhammad. 1400 H. *Manhaj Tarbiyah al-Islamiyah*. Jilid I. Cet. IV. Kairo: Dar al- Syuruq.

- Ramly, Andi Muawiyah. 2000. Peta Pemikiran Karl Marx [Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis]. Yogyakarta : LKiS.
- Soejatmiko, 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta : LP3ES.
- Sucipto, Hery, (2008) *The Great Moslem Scientist*, Cet.1, Jakarta; Grafindo KhazanahIlmu.
- Sudirman, N. 1987. *Ilmu Pendidikan*. Cet I. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Suriasumantri, Jujun S.(1986). Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik. Jakarta : PT Gramedia
- _____,(1988). *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*. Jakarta : Gramedia.
- _____,(1992). Ilmu Dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu. Cetakan X. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sunanto, Musyriyah, (2004) *Sejarah Islam Klasik*, Cet.2, Jakarta; Prenada Media.
- Supriyadi, Dedi, (2008) *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tafsir, Ahmad. (1995). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung : Rosdakarya.
- Winarno, Budi. 2004. Globalisasi Wujud Imperialisme Baru. Yogyakarta : Tajidu Press.
- Zahoor, A. 2003. Dominasi Ilmuwan Muslim Tahun 700 – 1400 M. Jakarta : Bina Mitra Press.
- Zallum, Abdul Qadim. 2001. Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarkanluaskannya. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- Zubair, A. Charis. 1997. Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 10.....	261
PENDIDIKAN ISLAM DAN KEMAJUAN SAINS	261
Tujuan Pembelajaran:	261
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:.....	261
▪ Sekilas Tentang Pendidikan Islam.....	261
▪ Perkembangan Sains.....	261
▪ Pendidikan Islam dan Perkembangan Sains	261
A. Sekilas Tentang Pendidikan Islam.....	263
1. Pengertian Pendidikan Islam.....	263
2. Tujuan Pendidikan Islam.....	263
3. Pendidikan Islam dan Harapan Masyarakat.....	265
B. Perkembangan Sains	268
1. Islam dan Pengetahuan/Sains.....	268
2. Sumbangan Islam Terhadap Sains dan Peradaban Dunia	270
3. Sarjana-Sarjana Muslim dan Karya Ilmiahnya.....	271
C. Pendidikan Islam dan Perkembangan Sains.....	276
1. Realitas Pendidikan Islam	277
2. Peran Islam Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi.....	279
PENUTUP	288
RANKUMAN	289
DAFTAR PUS TAKA	290

Sekilas Tentang Pendidikan Islam
Perkembangan Sains
Pendidikan Islam dan Perkembangan Sains

BAB 11

MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DAN EFISTEMOLOGI ILMU

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami:

Modernisasi Pendidikan Islam

- Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah
- Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perubahan Perkembangan Kebudayaan
- Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Konteks Nasional

Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam

- Realitas Pendidikan Islam
- Mengurai Problematika Pendidikan Islam
- Merekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam



Perkembangan dunia telah melahirkan suatu perubahan dalam semua aspek, termasuk dalam struktur sosial, kultur, sistem pendidikan, dan tidak tertutup kemungkinan bagi pesantren.

Perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia yang berkaitan dengan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini mempengaruhi dinamika keilmuan di lingkungan pesantren. Gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad ke-20 Masehi, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi modernis Islam, seperti Jamat Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.¹ (Mahmud Yunus; 1995: 12).

Pada awal perkembangan gagasan modernisme pendidikan Islam terdapat dua kecenderungan pokok yang mendasari upaya ke arah modernisasi organisasi-organisasi Islam di atas. Di satu pihak adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional. (Azyumardi Azra, 1999:90)

Pada pihak lain terdapat upaya yang bertitik tolak justru dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Di sini lembaga pendidikan Islam yang sebenarnya telah ada sejak waktu lama dimodernisasi. Sistem pendidikan pesantren dan surau yang merupakan lembaga pendidikan Islam asli (pribumi) dimodernisasi, misalnya dengan mengambil atau mencontoh aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran, dan sebagainya³. (Azyumardi Azra, 1999: 91)

A. Modernisasi Pendidikan

Sistem pendidikan nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan global dewasa ini. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan.

Diakui Azyumardi Azra (1999: 7) bahwa hampir seluruh negara muslim tidak mempunyai kebijakan (*policy*) dan perencanaan nasional yang jelas, menyeluruh, terpadu, dan terarah untuk pengembangan sains. Bahkan, dalam banyak kasus merupakan bidang yang paling terlantar dari kebijaksanaan nasional yang terlalu bertitik tekan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini kontras dengan negara-negara maju yang memberikan perhatian khusus pada kebijaksanaan pendidikan dalam arti luas, bahkan melebihi kebijaksanaan luar negeri atau militer. Sebab, kegagalan pada pengembangan pendidikan nasional secara luas dapat menghambat perkembangan secara menyeluruh di masa depan.

Tantangan dan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, dalam berbagai bidang kehidupan semakin berat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi yang amat cepat, eskalasi pasar bebas antarnegara dan bangsa yang semakin meningkat, iklim kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan yang semakin ketat, dan tuntutan demokratisasi serta masalah hak azasi manusia merupakan tantangan yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia agar bisa hidup terus dan bertahan dalam percuturan kehidupan antarbangsa di dunia. (Zamrozi, 2000: 158)

Bangunan pendidikan selama ini berpedoman pada konsep *input-output analysis*. (Indra Djati Sidi, 2001:14) Paradigma yang mempunyai akar teori pada bidang ekonomi produksi ini berkeyakinan bahwa apabila input diperbaiki, maka secara otomatis *output* akan menjadi baik pula. Ini dikarenakan lembaga pendidikan tidak bisa disamakan dengan pabrik dalam dunia industri, sebab *input* pendidikan bukan input yang statis melainkan input dinamis yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor proses dan konteks pendidikan dewasa ini.

1. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah

Dalam sejarah pendidikan Indonesia maupun dalam studi kependidikan, sebutan pendidikan Islam umumnya dipahami sebatas sebagai "ciri khas"

jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Malik Fadjar, 1998:3)

Batasan yang sama juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. (USPN.No.20 Tahun 2003: 14.)

Malik Fadjar, (1998: 3), ketika mengutip pendapat Zarkowi Soejoeti mengemukakan bahwa Pendidikan Islam paling tidak mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, lembaga pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang hams diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan. *Kedua*, lembaga pendidikan yang memberikan perhatian dan yang menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan. *Ketiga*, mengandung dua pengertian di atas dalam arti lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kaj iannya. Selanjutnya Malik Fajar menegaskan bahwa konsep pendidikan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Zarkowi Soejoeti tersebut walaupun belum memadai secara falsafi untuk disebut sebagai pendidikan Islam, tetapi dapat dijadikan sebagai pengantar dalam memahami pendidikan Islam secara lebih mendasar. Berdasarkan pengertian ini, Malik Fadjar berpendapat bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal yaitu *insan kdmil* atau muslim paripurna. Malik Fadjar, (1998: 4),

Tujuan ini sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih berat lagi. Dalam pembicaraan ini jenis dan pengertian pendidikan Islam mencakup ketiga-tiganya, karena memang ketiga-tiganya itu yang selama ini tumbuh serta berkembang di Indonesia dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah maupun kebijakan pendidikan secara nasional. Bahkan, tidak berlebihan kalau secara politis dikatakan bahwa kehadiran dan keberadaannya merupakan bagian dari andil umat Islam dalam perjuangan maupun dalam mengisi kemerdekaan.¹² Malik Fadjar, (1998: 4),

Azyumardi Azra (2000: 132) berpendapat bahwa banyak yang bisa dijual dari Islam,¹³ termasuk aspek disiplin, kerja keras, keadilan, demokrasi, musyawarah, HAM, perdamaian dan sebagainya. Orang Islam percaya bahwa Islam adalah *rahmatan li al-alamin*. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan menciptakan *insan kamil*. Terbinanya kepribadian muslim atau *insan kdmil* yang merupakan ketetapan tujuan pendidikan Islam masih merupakan *idea statis*, tetapi kualitasnya dinamis dan berkembang nilainilainya. Tujuan pendidikan Islam itu sarat dengan nilai-nilai fundamental yang memungkinkan terwujudnya kepribadian muslim atau *insan Winn* yaitu yang kondisi fisik dan mentalnya merupakan satu kesatuan secara terpadu. Sehingga dalam penampilan dan kegiatannya tidak terjadi dikotomi antara jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi.(Malik Fadjar, 1994: 21-22) Konsep integralitas keilmuan bertujuan menjadi cerminan insan yang paripurna.

Sedangkan menurut Hamka, untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, maka eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kemestian yang harus diajarkan, meskipun pada sekolah-sekolah umum. Namun, dalam tataran operasional prosesnya tidak hanya dilakukan sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu yang mereka peroleh mampu membuahkan suatu sikap yang baik sesuai dengan pesan nilai ilmu yang dimilikinya.(Hamka, 1962: 204)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh (1848-1905) yang menyatakan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dalam prosesnya mampu mengembangkan seluruh fitrah peserta didik terutama fitrah akal dan agamanya. Dengan fitrah ini peserta didik akan dapat mengembangkan daya berpikir secara rasional. Sementara melalui fitrah agama akan tertanam pilar-pilar kebaikan pada diri peserta didik yang selanjutnya terimplikasi dalam seluruh aktivitas hidupnya.(Muhammad Abduh,1972: 117)

Dalam konteks ini sejalan dengan pandangan Malik Fadjar bahwa agama adalah sains dan akal adalah teknologi. Untuk itu, tugas utama pendidikan adalah menciptakan sosok peserta didik berkepribadian yang paripurna.

Sedangkan berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, Athiyah al-Abrasyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam menyimpulkan lima tujuan yang asasi dalam pendidikan Islam, yaitu: untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan untuk mencari rezeki dan menjaga kemaslahatan,

menumbuhkan roh ilmiah pada anak didik dan memenuhi rasa keingintahuannya serta memungkinkan untuk mengkaji berbagai ilmu, menyiapkan anak didik untuk menguasai profesi tertentu. (M.A. al-Abrasyi, 1969: 37). Di samping itu dengan pendidikan, seseorang dimungkinkan mengenal diri dan alam sekitarnya. Selanjutnya Ahmad Tafsir (1994: 46) menyatakan bahwa tujuan pendidikan terkait dengan pandangan hidup. Jika pandangan hidupnya adalah Islam, maka tujuan pendidikan harus dari ajaran Islam. Hasan Syahatah (1981:19) menegaskan bahwa pendidikan akan mewujudkan keseimbangan din seseorang dalam bentuk pemenuhan kebutuhan badan, jiwa, pikiran, dan perbuatan yang akan melahirkan akhlak yang mulia, kasih sayang, dan tolong menolong. Al-Kailani (Majid Irsän al-Kailäni, 1988: 83) menyatakan bahwa pendidikan Islam berorientasi pada kelangsungan eksistensi manusia dan juga peningkatan harkat kemanusiaannya.²¹ Sedangkan menurut al-Nahlawi (1996: 20) bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembebasan dan penyelamatan anak didik. (Ahmad Fu'ad al-Ahwani: t.th: 97). Sehingga ia dapat mengenal agama, baik secara teori maupun prakteknya. (Ahmad Fu'ad al-Ahwani: t.th: 97)

Sementara itu Muhammad Abduh (Muhammad Rasyid Ridha, 1931.jld II:17) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa dan menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁴ Dan rumusan ini dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh adalah tujuan yang luas, mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Tujuan pendidikan tersebut diprediksi dalam rangka pencapaian hasil.(Jum C. Nunnalli, t.th.:16)

Pendidikan perlu menjadi bekal demi kesiapan manusia untuk memahami keberagaman manifestasi nilai-nilai dalam pen kehidupannya sebagai anggota masyarakat.²⁶ (Fuad Hasan 1992 : 64), Sedangkan peserta didik harus diperkenalkan pada berbagai bidang. Perkenalan itu akhirnya membuka perspektif bagi seseorang untuk membuat pilihan, apakah ia ingin menjadi *homo religiosus*, *homo aestheticus*, *homo politicus*, *homo economicus*, *homo academicus*, dan sebagainya.²⁷

Azyumardi Azra (1999, h. 10.), menjelaskan bahwa pendidikan Islam mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: *Pertama*, penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah. *Kedua*, pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian, setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni, agar

potensipotensi yang dimilikinya dapat teraktualisasi dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Di sini pengetahuan bukan hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian terdapat konsistensi antara apa-apa yang diketahui dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan memang bukan sekadar transfer pengetahuan, pembinaan mental jasmani dan intelek semata, tetapi bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pelaku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. (Ki Hajar Dewantara, 1962: 19).

Semangat progresif yang terkandung dalam pendidikan sebagaimana definisi di atas, tampak mengingatkan kita pada pesan Khalifah Umar yang mengatakan bahwa anak-anak muda masa sekarang adalah generasi di masa yang akan datang. (Abudin Nata, 2001: 9). Dunia dan kehidupan yang akan dihadapi berbeda dengan dunia yang sekarang, untuk itu apa yang akan diberikan pada anak didik harus memperlihatkan kemungkinan relevansi dan kegunaannya di masa datang.

2. Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perubahan Perkembangan Kebudayaan

Modernisasi pendidikan Islam dilihat dari perubahan perkembangan kebudayaan dan peradaban dunia sekarang ini, memang sulit dielakkan. Sistem dan kelembagaan pesantren sulit untuk bisa maju tanpa modernisasi. Tetapi modernisasi sistem dan kelembagaan pesantren berlangsung bukan tanpa problem atau kritik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kritik yang berkembang di tengah masyarakat muslim, khususnya di kalangan pemikir pendidikan Islam dan pengelola pesantren sendiri kelihatannya semakin vokal. (Azyumardi Azra, 1999:93)

Namun terlepas dari ada atau tidak kritik tersebut, dalam kasus-kasus tertentu, modernisasi pendidikan terbukti banyak

membawa dampak positif yang akhirnya mampu mengembangkan potensi pendidikan dan potensi pengembangan masyarakat sekitar.

Adapun sikap pesantren dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan (modernisasi) di masyarakat berbeda-beda dari sekian pesantren. Dan sikap pondok pesantren tersebut digolongkan sebagai berikut: (a) Pondok pesantren yang menolak sistem baru dan tetap mempertahankan sistem tradisionalnya; (b) Pondok pesantren yang mempertahankan sistem tradisionalnya, dan memasukkan sistem baru dalam bentuk sekolah yang bercorak klasikal, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Institut/Sekolah Tinggi; (c) Pondok pesantren yang tetap mengajarkan kitab klasik, namun di lingkungan pondok menyelenggarakan sekolah umum, seperti SD, SMP, SMA dan Universitas. (Atmaturida, 200: 28).

a. Model Perkembangan Pesantren

Sejalan dengan pandangan di atas, Ahmad Maghfurin dalam Abdurrachman Mas'ud (2002) memperkenalkan empat model pesantren yang berkembang dewasa ini, yaitu:

Model 1, Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al- din*) bagi para santrinya. Semua materi yang diajarkan di pesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab yang berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan (7-13 H) yang dikenal dengan nama *kitab kuning*. Pesantren model ini masih banyak dijumpai sampai sekarang, seperti Pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur, beberapa pesantren di daerah Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan lain-lain;

Model 2, Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal. Para santri yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah lain. Sebagai contoh adalah Pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah yang diasuh oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudz;

Model 3, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah (sekolah umum berciri Khas Islam di bawah naungan DEPAG) maupun sekolah (sekolah umum di bawah naungan DEPDIKNAS) dalam berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi yang tidak hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan melainkan juga fakultas-fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur adalah contohnya;

Model 4, Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam di mana para santri -santrinya belajar di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi di luarnya. Pendidikan agama di pesantren model ini diberikan di luar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.⁶ (Abdurrachman Mas'ud, 2002:149).

Dari itulah dapat dipahami bahwa modernisasi telah melahirkan suatu perubahan dalam semua aspek, termasuk dalam struktur sosial, kultur, sistem pendidikan, dan tidak tertutup kemungkinan bagi pesantren. Perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia yang mempengaruhi dinamika keilmuan di lingkungan pesantren, direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern. Seperti model pengelolaan pesantren yang semakin hari berkembang terutama dalam nuansa kajian keilmuan yang tidak saja mempertahankan sistem wetonan dan sorogan, malah diperkaya dengan media yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi modernis Islam, seperti Jamat Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. (Yunus, 1995: 12)

b. Modernisasi Pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran di Pondok Pesantren

Dalam banyak tulisan, pondok seperti ini merupakan kategori pondok modern. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Abwihda, bahwa kurikulum pendidikan pesantren modern merupakan perpaduan antara pesantren salaf dan sistem sekolah. Dengan cara seperti ini diharapkan akan mampu memunculkan *output* pesantren yang berkualitas yang tercermin dalam sikap aspiratif, progresif, dan tidak "ortodok" sehingga santri bisa secara cepat beradaptasi dalam setiap bentuk perubahan peradaban dan bisa

diterima dengan baik oleh masyarakat, karena mereka bukan golongan eksklusif dan memiliki kemampuan yang siap pakai. (Abawihda, RA.2002: 89)

Dari asimiliasi tiga tipe pengelolaan pendidikan tersebut kemudian disintesis menjadi sebuah pola modernisasi pengelolaan pendidikan dan pengajaran pondok pesantren yang oleh sebagian orang dianggap unik dan menarik untuk dikaji. Dengan cara seperti ini Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri Narmada mampu mengkondisikan pendidikan dan pengajaran yang lebih hidup dan kompetitif dengan perkembangan zaman. Kenyataan ini sejalan dengan pendapatnya Al-Jumbilati dan At-Tuwasini, bahwa tujuan pendidikan Islam tidaklah selalu paten di sepanjang periode perkembangan Islam, tetapi harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban zaman.¹⁷ (Steenbrink, 1986:22)

Kualitas dan kuantitas guru menjadi salah satu poin utama yang diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran, karena dalam banyak hal, guru sangat sering berinteraksi dengan siswa (santri). Guru dengan tutur kata dan tingkahnya akan menjadi contoh dan tauladan yang pertama bagi siswa. Dengan demikian, peningkatan kualitas guru dalam berbagai upaya merupakan upaya peningkatan mutu proses dan mutu hasil pendidikan dan pengajaran yang ada di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri Narmada. Hal di atas senada dengan pendapat Suwendi, bahwa sebagai suatu profesi, guru harus melaksanakan peran profesi (*professional role*), yakni memiliki kualifikasi profesional. Artinya, para guru dapat menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, serta dapat memberikan/mengamalkan ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada siswanya. (Suwendi, 2004: 3)

Banyak manfaat yang dirasakan Pondok Pesantren dijadikan sebagai obyek studi banding, yaitu mempertinggi wawasan pengetahuan pendidikan dan pengajaran, santri dan ustadz dapat belajar bahasa asing secara langsung pada orang asing yang melakukan studi banding, dan biasanya mereka tinggal bersama santri dalam waktu lebih dari dua bulan. Manfaat lain dengan studi banding pihak luar negeri, yakni pondok memperoleh bantuan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pengajaran, misalnya bantuan dana pembangunan asrama santri, ruang kelas,

bantuan computer, LCD, dan sebagainya. Sedangkan manfaat jangka panjang adalah adanya kesinambungan hubungan baik antara Pondok Pesantren dengan pihak luar negeri, misalnya dalam bentuk pertukaran informasi jarak jauh lewat internet, bantuan rutin setiap tahun, dan pengiriman utusan-utusan untuk studi banding berikutnya. Faktor pendukung lain dari peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran adalah seringnya Pondok Pesantren dijadikan *project plan* perguruan tinggi.

Kedua faktor pendukung pendidikan dan pengajaran tersebut di atas merupakan salah satu bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya jaringan kerjasama (*networking*) yang dibangun oleh Pondok Pesantren Nurul Haramain. Wahid menjelaskan, bahwa menghadapi persaingan iklim yang ketat di era global sekarang, mustahil bagi suatu pondok pesantren bertahan dengan kekuatan sendiri. Membangun jejaring merupakan suatu keniscayaan yang tak terelakkan agar pondok pesantren mampu berkembang mencapai kemajuan. (Marzuki Wahid, 2001),

Kemudian kerjasama orangtua santri dan masyarakat juga dibangun dengan baik, dan sangat mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Orangtua santri dan masyarakat merupakan faktor yang paling mendasar dan menunjang eksistensi pondok, karena pondok merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pada masyarakat. Menurut Rahardjo, sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah pada pondok pesantren lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat didasarkan pada kepemilikan lingkungan. (Dawam Raharjo, 1965: 22).

c. Komponen yang Dikembangkan dalam Modernisasi Pengelolaan Pendidikan di Pondok Pesantren

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak pernah berhenti dengan inovasi pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Beberapa komponen penting yang dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran sebagai upaya peningkatan mutu:

1) Program pengembangan ilmu-ilmu dasar.

Program pengembangan ilmu-ilmu dasar maksudnya adalah pengembangan kemampuan santri terhadap beberapa mata pelajaran pokok yang dianggap menjadi *basic* bagi seorang santri untuk mempermudah mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ada empat mata pelajaran yang termasuk dalam kategori ilmu dasar yaitu; Matematika, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Program pengembangan ilmu-ilmu dasar ditujukan bagi santri yang baru masuk di Pondok Pesantren pada awal semester ganjil, yaitu kelas I MTs dan kelas I MA. Program ini diberlakukan selama tiga bulan awal, atau sampai ujian tengah semester. Selama program ini berlangsung, siswa tidak diajarkan mata pelajaran-mata pelajaran lain, hanya memperdalam lima mata pelajaran tersebut setiap harinya. Program ini sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Banyak manfaat yang dirasakan dengan program ini, di antaranya; (a) tingkat kesiapan siswa untuk menerima pelajaran semakin baik; (b) daya serap siswa terhadap materi semakin cepat; (c) kreativitas dan motivasi belajar siswa meningkat.¹⁹

(a) Optimalisasi Fungsi Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

KKM merupakan satu wadah tempat bergabungnya madrasah-madrasah yang ada di suatu wilayah dan berada di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten. Tujuannya adalah meningkatkan kerja sama antar madrasah. Kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan mutu masing-masing madrasah, pertukaran informasi, dan kemudahan dalam pengelolaan madrasah. Beberapa bentuk kerja KKM adalah; diklat guru dan staf tata usaha madrasah; pertukaran guru antar madrasah; penyusunan naskah soal ujian semester; dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti kemah bhakti santri .

(b) Program Kelas Multimedia.

Peningkatan kualitas pendidikan juga ditempuh dengan membuat kelas multimedia, yaitu sarana kelas yang dilengkapi dengan satu unit komputer, Televisi, VCD, *sound sistem* dan CD-CD pembelajaran untuk berbagai bidang studi. Keberadaan kelas multimedia ini sangat terasa sekali manfaatnya untuk kelancaran proses belajar. Santriwati bisa belajar tidak hanya dari suara tetapi

juga bisa melihat bentuk visual (gambar) dari bidang studi yang dipelajari. Kelas-kelas kosong juga bisa ditanggulangi dengan adanya kelas-kelas multimedia ini. Kelas multimedia ini salah satu kelas yang diminati santri dan menjadi motivasi tersendiri bagi santri untuk lebih giat dan lebih senang belajar, karena pembelajaran di kelas multimedia langsung bersama gambar di samping suara dan keterangan guru, sehingga santri sangat senang dibawa ke kelas multimedia.

(c) Peningkatan peran Organisasi Santri, sebagai Wadah untuk mencetak Siswa yang Belajar dan sebagai Pembelajar.

Pada intinya setiap bagian dari organisasi ini membantu Pimpinan Pesantren dalam menegakkan sunnah. Untuk memudahkan mereka dalam menjalankan roda organisasi maka semua bagian memiliki program-program kerja yang diletakkan dan dirumuskan oleh semua anggota. Hal ini supaya semua anggota merasa memiliki organisasi dan tertanam dalam diri mereka kesadaran untuk menjaga nama baik organisasi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di Pondok Pesantren tampak bahwa program pengelolaan pendidikan dan pengajaran dilakukan dalam berbagai aspek yang berkaitan langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan mutu proses pendidikan dan terutama peningkatan hasil pendidikan itu sendiri. Terlihat jelas bahwa pengelolaan pendidikan formal selalu berorientasi pada mutu. Pimpinan pondok bersama-sama dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik kepala madrasah, pengasuhan santri, guru (*asdtidz*), dan organisasi santri, terus melakukan upaya pemantapan internal seperti; peningkatan kualitas dan kuantitas guru, pengadaan fasilitas dan multimedia pembelajaran, optimalisasi kegiatan-kegiatan siswa yang berbasis keterampilan dan kreativitas.

3. Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Konteks Nasional

Pembaruan pendidikan menuntut adanya cara berpikir dan bertindak yang berbeda dari apa yang telah ada dengan mengadakan diagnosis secara menyeluruh atau perubahan paradigma dengan pendekatan yang sistemik. Paradigma yang sistemik mestilah bersifat menyeluruh serta memperhatikan sebuah asumsi mendasar bahwa perubahan mendasar pada salah satu aspek pendidikan akan mempengaruhi perubahan mendasar pada

aspek-aspek lain. (Zamrozi, 2000: 159).

Perbedaan perubahan sebagaimana Yusufhadi Miarso (2005: 694), bahwa perubahan itu dapat dibedakan pada empat lapis sistem yang saling berkaitan. Pada lapis pertama adalah perubahan pada pengalaman belajar, lapis kedua pada sistem pembelajaran yang menekankan terlaksananya pengalaman belajar yang diinginkan, seperti dalam sekolah. Lapis ketiga adalah perubahan pada pengalaman sistem pembelajaran, dan lapis keempat adalah perubahan pada sistem perundangan yang mengatur dan menjamin berlangsungnya keseluruhan sistem pendidikan secara nasional.³² Selanjutnya Miarso (2005: 696-698) menjelaskan bahwa berdasarkan hakikat pembaruan sebagai pemberdayaan warga, sudah seharusnya perhatian utama diberikan pada perubahan lapis pertama, yaitu pengalaman belajar, dengan konsekuensi dan implikasi perubahan pada lapis kedua sampai keempat. Pendekatan mulai lapis pertama disebut pula sebagai pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*). Selama ini apa yang terjadi adalah pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*), di mana pemerintah pusat menentukan perundangan dan serangkaian peraturan pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh jajaran di bawah sampai di ruang kelas atau lingkungan belajar tempat peserta didik atau warga belajar memperoleh dan mengembangkan pengalaman belajarnya.

Dengan pendekatan dari bawah ke atas, perhatian utama diberikan kepada peserta didik agar mereka menguasai tugas belajar dan mampu mengatasi persoalan belajar. Semua satuan penyelenggara pendidikan, termasuk sekolah, pusat kegiatan belajar masyarakat, perguruan tinggi, dan sebagainya, wajib mengelola sumber daya yang diperlukan dan mengatur penggunaannya.

Perubahan paradigma mempengaruhi semua aspek pendidikan lain, bahkan memicu tumbuhnya serangkaian paradigma lain. Perubahan paradigma ini memunculkan konsep-konsep baru seperti belajar berbasis aneka sumber, pengelolaan berbasis sekolah dan pola pembelajaran atau pendekatan alternatif. (Yusufhadi Miarso, 2005: 696-698).

Kesadaran untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesungguhnya telah tertanam kuat dalam jiwa para pendiri negara republik tercinta ini. Di antara isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Citacita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ini mengisyaratkan pentingnya

memberikan pendidikan yang unggul dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai modal untuk meraih kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. (Abudin Nata, 2000: 5)

Kehidupan pada milenium ketiga benar-benar berada pada tingkat persaingan global yang sangat ketat. Artinya, siapa saja yang tidak memenuhi syarat kualitas global akan tersingkir secara alami dengan sendirinya. Untuk itu patut diperhatikan metafora John F. Kennedy, yaitu; "*Change is a way of life. Those who look to the past or present will miss the future*". Metafora ini pantas diterjemahkan ke dalam kepentingan reformasi pendidikan. Artinya, reformasi pendidikan harus tetap berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global. (Suyanto dan Jihad Hisyam, 2000: 2)

Untuk merespons tantangan globalisasi dan modernisasi pendidikan Islam dalam konteks nasional dapat juga dilihat pada pandangan Malik Fadjar sebagai praktisi pendidikan yang mengatasi dualisme dan dikotomi menuju otonomi antara lain gagasannya adalah:

a. Pengembangan Fakultas Cabang Menjadi STAIN

Dalam merespons perkembangan globalisasi, Malik Fadjar (ketika menjabat Dirjen Binbagais Departemen Agama) mengusulkan pembenahan dan rasionalisasi organisasi Perguruan Tinggi Agama Islam atau IAIN.³⁷ (Suwito, 2001) Hasil dari rasionalisasi organisasi pada tahap praktisnya melahirkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 yang menetapkan fakultas cabang di lingkungan IAIN berubah menjadi STAIN. (Malik Fadjar, 2005: 35).

Hal yang mendasari munculnya gagasan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Malik Fadjar bahwa nama fakultas cabang itu sebenarnya bertentangan dengan undang-undang. Struktur Perguruan Tinggi yang benar adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Diploma, bukan fakultas cabang. Untuk kepentingan ini, Malik Fadjar melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kalangan; dengan Depdiknas, Departemen Anggaran, Bappenas, Menpan, dan juga para anggota DPR. Terbitlah kemudian Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 yang menyatakan 33 Fakultas Cabang LAIN menjadi STAIN. (Direktori PTAIN: 2000-2001).

Gagasan memerdekakan fakultas cabang ini menjadi STAIN menurut Sofian Effendi muncul dari Malik Fadjar sendiri sesuai dengan pengalaman sebelumnya memimpin UMM. Perguruan Tinggi yang diinginkan oleh Malik Fadjar adalah *Islamic Studies*, yaitu pengembangan lembaga

pendidikan dengan pendekatan modern yang didukung dengan berbagai aspek ilmu. Jadi, gaya dan semangat Malik Fadjar itu identik dengan Mukti Ali. (Muhammad Idris, 2008: 40)

Sementara itu Azyumardi Azra (Muhammad Idris, 2008: 41-43) berpendapat bahwa tujuan Malik Fadjar dalam mengembangkan gagasan perubahan IAIN menjadi UIN kemudian pemisahan fakultas-fakultas cabang menjadi STAIN, supaya fakultas itu bisa mandiri dan dengan kemandiriannya bisa meningkatkan kualitas, tidak tergantung ke induknya yang selama ini dipandang kurang bisa memperhatikan, mengelola dan mengembangkannya dengan baik. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa gagasan sentral pemikiran Malik Fadjar ini adalah modernisasi dan pembaruan pendidikan Islam.

Terkait dengan pengembangan jurusan menjadi STAIN ini menurut Husni Rahim bahwa gagasan Malik Fadjar ini sangat baik dan memberdayakan, tetapi daerah lebih mengedepankan kekuasaan dari pada kualitas dan fatalnya di daerah termasuk dosennya sangat kurang memperhatikan SDM. Hal ini seharusnya ada aturan yang menyikapi sehingga lebih mengedepankan kualitas daripada kekuasaan. Jadi, idenya bagus, tetapi ketika pelaksanaan di daerah tidak dijalankan secara komprehensif.

Patut diapresiasi keberanian kebijakan yang diambil oleh A. Malik Fadjar, dengan terbentuknya 33 buah STAIN maka pengembangan IAIN mengalami babak baru. Dengan pendirian STAIN-STAIN ini, studi Islam di daerah-daerah diharapkan berkembang menjadi lebih mandiri. Dampaknya mulai terasa, sejumlah STAIN yang lebih kuat dapat berkembang lebih cepat,⁴⁴ <http://www.ditperta.net/artikel/atho01.htm>. Tanggal 19 Desember 2007. Kedudukan IAIN Sebagai Perguruan Tinggi. bahkan berubah menjadi UIN seperti halnya UIN Malang. Akan tetapi, STAIN yang lebih lemah akan semakin lemah, karena transfer dan subsidi tenaga dari manajemen dari bekas IAIN induknya menjadi sulit terjadi. Dampak lain dari pendirian STAIN ialah bahwa kurikulum IAIN sejak 1997 ternyata telah diatur dan diperlakukan seperti STAIN, khususnya dalam mengelompokkan MKDK dan MKK sehingga para dosen IAIN merasa seolah-olah kehilangan keberadaan fakultas mereka dan perbedaan kurikulum IAIN antar fakultas menjadi semakin tidak jelas. Sebabnya ialah bias dan dipakainya asumsi STAIN yang tentu saja tidak mempunyai fakultas-fakultas, bahkan nama-nama fakultas itu disebut sebagai nama jurusan pada STAIN.

b. Pengembangan Jurusan di STAIN/IAIN

Memahami dan merespons dinamika perkembangan pendidikan, Malik Fadjar (ketika Dirjen) secara praktis mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/107/ 1998 Tertanggal 13 Mei 1998 tentang Penyelenggaraan Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Islam, Program Studi Tadris Matematika, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Program Diploma II (D-2) Pendidikan Agama Islam, Program Studi Kependidikan Islam; Jurusan Psikologi; Jurusan Adab/Bahasa Program Studi Bahasa Arab, Program Studi Bahasa Inggris; Jurusan Syariah Program Studi Ahwalus Syakhshiyah (Peradilan Agama) dan Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) pada STAIN Malang. (Malik Fadjar Fadjar, 2005: 36-37)

Di samping itu, Malik Fadjar (ketika Menag) mengeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/138/1999, tentang Penyelenggaraan Jurusan Psikologi dan Jurusan Tarbiyah program studi Tadris IPS pada STAIN Malang. Pengembangan jurusan tersebut secara praktis merupakan respons positif dan konstruktif pada pengembangan lembaga pendidikan. (Depag RI, 1999). Dengan begitu, lembaga tersebut diharapkan akan lebih mengalami kemajuan dan menguntungkan pada semua lini kehidupan.

Menurut Malik Fadjar, (1998: 36) sesungguhnya gagasan tersebut dulu sudah ada di IAIN, seperti jurusan dan program studi; ada Jurusan Tadris MIPA, Bahasa Inggris, Tata Negara, Civic Ekonomi, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. (Suwito: 2001) Akan tetapi, mengapa itu kemudian dihapuskan? Mengapa generasi berikutnya tidak mampu melanjutkan ide-ide besar yang dirintis pendahulunya?

Gagasan Malik Fadjar tentang pengembangan jurusan dalam kerangka pendidikan Islam tersebut di atas merupakan bibit dari konsep "*wider mandate*" (mandat yang di perluas), di mana peran Malik Fadjar waktu itu sebagai pembuka pintu *wider mandate* tersebut. (Muhammad Idris, 2008: 48-51). Adapun tujuan dari *wider mandate* pada tahap praktisnya adalah untuk membuka jurusan umum dan mengembangkan lembaga pendidikan dalam merespons modernisasi dan globalisasi. Inilah target yang ingin dicapai oleh Malik Fadjar sebagaimana yang diungkapkan oleh Sofyan Effendi. Di samping itu menurut Tarmizi Taher adalah untuk mencapai pasar kerja yang kompetitif, baik pada masa itu maupun pada masa sekarang.

Sementara itu menurut Azyumardi Azra bahwa dalam rangka men-

dukung perubahan IAIN menjadi UIN, maka perlu ada persiapan terlebih dahulu. Penyiapan itulah yang disebut dengan mandat yang lebih luas (*wider mandate*) yaitu dengan mengembangkan atau membentuk jurusan-jurusan umum yang selama ini belum ada di IAIN. Sehingga IAIN tidak lagi terbatas pada ilmu-ilmu agama, melainkan juga mencakup ilmu-ilmu umum.⁵¹

c. Pengembangan STAIN/MIN Menuju Universitas

Gagasan perubahan STAIN/IAIN menjadi UIN yang diangankan Malik Fadjar (2005:37) bukan sekedar perubahan "papan nama", tetapi sebagai model "reintegrasi keilmuan" yang menunjuk kepada satu bentuk pengembangan, peningkatan dan pemantapan status akademik yang lebih proporsional dan profesional.

Gagasan tersebut sejalan dengan semangat *wider mandate* (mandat diperluas) untuk memberikan wewenang kepada PTAI agar membuka jurusan sesuai kebutuhan pasar supaya bisa lebih modern dan mandiri.

Lembaga pendidikan tinggi agama sudah hams mendapatkan *wider mandate*, sebagai respons atas berbagai tantangan baru yang dihadapainya. Dengan mandat lebih luas ini, antara lain, IAIN secara praksis diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu normatif dengan ilmu-ilmu obyektif. (Fachry Ali, 2000: 371). Tujuan dari perluasan mandat ini adalah reproduksi manusia akademis yang siap pakai dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh dinamika di era global.

Malik Fadjar (2005:37) menyatakan bahwa UIN ke depan dapat menjadi model sistem pendidikan Islam yang memiliki "kualitas tinggi" dibandingkan dengan PTN/PTS yang lain yang memiliki status, peran dan fungsi yang sama, di samping memiliki otonomi lebih luas baik dalam pengembangan akademik, manajemen maupun admistrasinya.⁵⁴ Dengan penataan elemenelemen lembaga pendidikan secara menyeluruh yang didesain dengan teknologi yang maju, maka lembaga pendidikan Islam akan mampu memenuhi logika persaingan pasar ke depan.

Dengan berubahnya IAIN Jakarta menjadi UIN, misalnya, dapat diasumsikan sebagai langkah dinamis untuk "membangun sistem pendidikan yang integralistik dan komprehensif dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan intelektual yang profesional dan bermoral". (IAIN Syahida, 2005: 5)

Dan berbagai latar belakang dan tujuan tersebut, terlihat bahwa ide

perubahan lembaga PTAI bersumber dari perenungan internal dan eksternal tentang posisi dan fungsi yang selama ini dijalani oleh LAIN serta respons terhadap realitas yang berkembang dalam masyarakat. (Suwito dan Suparto, 2000: 155)

Perenungan internal telah merevisi cara pandang IAIN dan Departemen Agama tentang konstruksi keilmuan yang "sesungguhnya" yang bersifat non-dikotomis. Sedangkan perenungan eksternal telah "membuka mata" mereka tentang kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di masyarakat sehingga perlu disikapi secara konkret. Perenungan seperti ini telah membawa perubahan mental akademik yang sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lain dan menyatukan ilmu yang dikotomi menuju otonomi sehingga akan melahirkan wawasan keilmuan yang lebih luas dan lues.

UIN yang dicita-citakan sebagai *center of excellence* bagi pengembangan keilmuan pada umumnya dan keilmuan Islam pada khususnya, sehingga terbentuk komunitas ilmiah-religius (*religious-scientific community*) yang bersendikan ajaran agama, bukan sekadar pengawal, penjaga, dan pelestari tradisi yang ada. UIN diharapkan tidak saja piawai sebagai pencetak 'guru agama' dan kiai tradisional, melainkan bagaimana bisa melahirkan kiai-kiai profesional di dalam mengurus pesantren perikanan, pesantren peternakan, pesantren perkebunan, pesantren pertambangan, pesantren perindustrian, dan sebagainya. Tentu dengan pengejawantahan secara profesional di setiap bidang akademik yang dibuka. (Malik Fadjar. 2005: 38)

Apa yang digagas oleh dapat memberi pemahaman bahwa pengembangan STAIN/ IAIN menuju UIN kiranya merupakan langkah strategis dan futuristik. Melalui pengembangan STAIN/ IAIN menuju UIN ini, Malik Fadjar meyakini bahwa umat Islam bisa memainkan peran yang sesungguhnya di dalam pergaulan global. Memaknai ini, Malik Fadjar mengemukakan: bahwa masa depan harus dijemput dengan menggunakan sarana pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan hams dipacu ke arah masa depan manusia. Di sinilah sesungguhnya makna pentingnya secara terus-menerus memperbarui sistem pendidikan Islam. Ungkapan *long life education*, sejatinya sudah disuguhkan oleh Nabi saw. ketika menyuruh para sahabat belajar ilmu ke Cina (*uthlub al-'ilm wa law bi al- shin*) yang artinya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina (hadis) dan mencari ilmu sejak lahir sampai mati (*uthlub al-'ilm min al-mandi ila al-land*) yang artinya carilah ilmu sejak dari buaian sampai engkau meninggal dunia (hadis). Untuk itu, manusia hams senantiasa belajar dan belajar (*learn how to*

learn). Belajar itu merupakan rekreasi ke arah masa depan. (Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi; 2004:178) Gagasan pembaruan tersebut di atas tidak dapat dibayangkan seandainya tidak ada Malik Fadjar (Mendiknas) dan Azyumardi Azra (Rektor UIN Jakarta) waktu itu yang gigih mengubah pola pikir masyarakat dari dikotomi menuju otonomi pendidikan. Integrasi pendidikan tersebut diikuti oleh lembaga-lembaga lain dalam rangka merespons tantangan globalisasi dan otonomisasi.

Perubahan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan nasional. (Zamrozi, 2000: 160) Untuk itu dalam pembaruan terdapat dua hal yang perlu dilakukan: a) mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan; dan b) memfokuskan reformasi yang bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap reformasi pendidikan. Dengan kata lain, reformasi pendidikan harus didasarkan pada realitas sekolah yang ada bukan didasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata. Reformasi hendaknya didasarkan fakta dan hasil penelitian yang memadai dan valid, sehingga dapat dikembangkan program reformasi yang utuh, jelas, dan realistis.⁶⁰ (Suyanto, 2006: 7)

Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, bangsa Indonesia memerlukan inovasi yang pesat dalam dunia pendidikan. Menjadi bangsa yang berprestasi memerlukan keunggulan yang kompetitif dalam berbagai bidang. Bukan zamannya lagi mengandalkan murah tenaga kerja untuk mendukung dan membenarkan konsep keunggulan komparatif dan kompetitif. (Suyanto, 2006: 7) Dalam konteks untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif sebagai *outcome* suatu pendidikan patut kiranya dikaji pendapat Michael Porter yang mengungkapkan bahwa: *the ability to sustain an advantage from cheap labor or even from economies of scale-these are the old paradigms. These paradigms are being superseded. Today, the only way to have an advantage is through innovation and upgrading.* (Michael Porter, 1997: 54)

Dari pendapat Porter di atas, jika bangsa Indonesia ingin menghasilkan berbagai keunggulan kompetitif dari *outcome* pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pengembangan sistem pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan, pendidikan nasional hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu bergantung pada pihak

lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demikian itu justru akan menjadi beban bagi bangsa dan negara, sekaligus bagi masyarakat. (Suyanto 1977: 4).

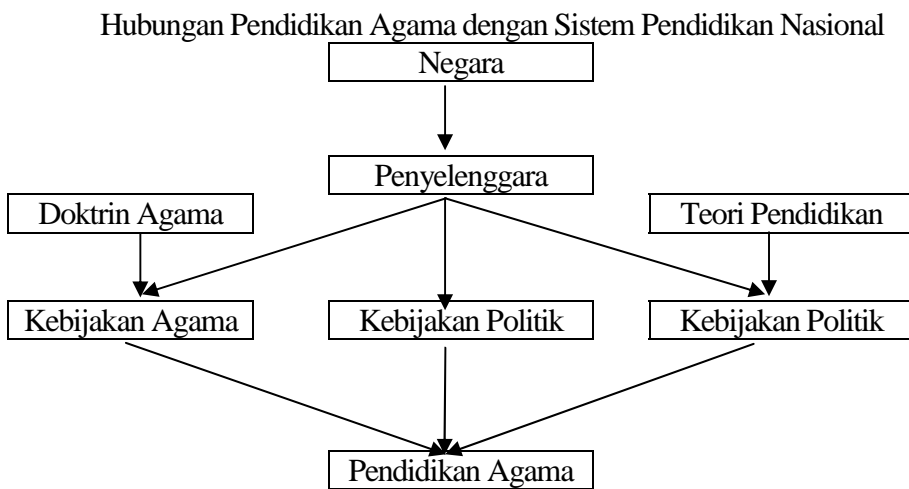
Menurut Azyumardi Azra, (2002) perumusan konsep tentang reformasi pendidikan, arah barn pendidikan nasional, yang bisa disebut sebagai salah satu fungsi pokok dan tujuan akhir pendidikan, adalah mempersiapkan individu anak didik dan warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan, melembagakan, dan mengembangkan masyarakat madani Indonesia, yang akan dibahas lebih rinci di bawah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijaksanaan pendidikan nasional jangka panjang seharusnya bertumpu pada usaha-usaha: *pertama*, menjamin kesempatan (*equity*) bagi setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lingkungan masing-masing, dan pada saat yang sama juga memberikan peluang yang luas bagi peningkatan kemampuan pendidikan masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi diversifikasi program pendidikan. *Kedua*, menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia dalam menghadapi tantangan global, dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. *Ketiga*, menyelenggarakan sistem pendidikan yang demokratis dan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) bagi masyarakat dan seluruh *stakeholders* lainnya. *Keempat*, mengurangi peranan pemerintah, sehingga lebih merupakan fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan, dan pada saat yang sama merampingkan birokrasi pendidikan agar lebih fleksibel dalam merespons perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan kerangka arah dan kebijakan pendidikan nasional jangka panjang itu, selanjutnya dapat dirumuskan arah, kebijakan dan strategi pendidikan nasional, baik untuk jangka menengah dan jangka pendek. Rincian-rincian dari semua arah, kebijakan, dan strategi pendidikan tersebut agaknya tidak perlu dikemukakan di sini. Yang penting ditekankan adalah bahwa sistem dan proses pendidikan nasional, sekali lagi, mestilah memberikan penekanan sangat kuat bagi penyiapan anak bangsa agar memiliki kemampuan, kecakapan, dan motivasi dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani Indonesia. Di sini juga jelas, bahwa "*nation and character building*" harus menjadi inti dan salah satu tujuan pokok pendidikan nasional.

Upaya pembaruan diarahkan kepada sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, pemberdayaan sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta pembaruan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Pembaruan dimaksud didukung dengan kebijakan politik yang diarahkan untuk meningkatkan peran DPR/MPR dan lembaga tinggi negara lainnya dengan menegakkan fungsi dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pembagian kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 10.1.berikut ini:

Gambar: 10.1



Sumber dikembangkan: dari (Muhamad Idris, 2009: 26)

Bertolak dari hal di atas dapat dipahami bahwa kebijakan agama diperlukan oleh pendidikan agama sebagai penegak eksistensi dogmatik. Kebijakan pendidikan dibutuhkan sebagai penegak eksistensi struktural. Adapun kebijakan politik diperlukan sebagai peletak dan penegak dasar yuridis (M. Saerozi, 2003: 267-268)

Oleh karena itu, pendidikan harus berperan sebagai sarana pemberdayaan (*empowerment*) yang secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan. Pendidikan Islam yang berdaya dan

memberdayakan akan mewujudkan apabila:

- 1) Memiliki visi, misi, dan orientasi strategis ke depan yang jelas;
- 2) Memiliki legitimasi sosial, intelektual, dan moral yang kuat;
- 3) Berbasis pada masyarakat dan merespons tuntutan zaman;
- 4) Dikelola dengan manajemen modern yang profesional, rasional; terbuka, akuntabel, humanis, memiliki akses, kerja sama, dan kemitraan global.

PENUTUP

Pembaruan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut dapat dilihat antara lain berubahnya fakultas cabang di lingkungan IAIN menjadi STAIN. Jurusan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar. Di antaranya: Jurusan Tarbiyah program studi pendidikan Islam, program studi tadaris matematika, program studi tadaris ilmu pengetahuan alam, program diploma II (D-2) pendidikan agama Islam, program studi kependidikan Islam. Jurusan Psikologi, Jurusan Adab/Bahasa program studi bahasa Arab, program studi bahasa Inggris, Jurusan Syariah program studi ahwalus syakhsiyah (peradilan agama) dan program studi muamalah (ekonomi Islam) pada STAIN Malang. IAIN/STAIN menuju UIN. Hal tersebut merupakan respons positif dan konstruktif terhadap tantangan dunia pendidikan yang menglobal. Dengan demikian dapat memproduksi alumni-alumni yang memiliki *competitive advantage*, daya saing yang handal dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Perubahan IAIN menjadi UIN, dapat dilihat antara lain diresmikannya UIN Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang. Menyusul kemudian UIN Pekanbaru Riau, UIN Makassar dan UIN Bandung.

Gagasan pembaruan tersebut merupakan respons positif dan konstruktif dari tantangan globalisasi, otonomisasi, dan modernisasi dalam upaya memajukan dunia pendidikan secara rasional dan nasional. Upaya tersebut sebagai salah satu fungsi terlaksananya sistem dan kebijakan pemerintah secara nasional. Tujuannya agar pendidikan agama lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional.

B. Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam

1. Realitas Pendidikan Islam

Berbicara tentang pendidikan Islam lazimnya memunculkan gambaran yang memilukan dalam pikiran kita tentang ketertinggalan, kemunduran, dan arah tujuan yang tidak jelas. Hal ini muncul

manakala pendidikan Islam dihadapkan dengan modernisasi dan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan sains Barat, di samping ketika dikaitkan dengan kenangan masa kejayaan Islam dimasa lalu.

Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia sekitar abad ke-7 sampai abad ke-15. Setelah itu, masa keemasan itu mulai melayu, statis, bahkan mundur hingga abad ke-21 ini. (Syamsul Ma'arif, 2007: 18).

Sebagai agen peradaban dan perubahan sosial, pendidikan islam berada dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perubahan positif yang berarti bagi perbaikan dan kemajuan peradaban umat islam, baik pada dataran intelektual teoritis maupun praktis. Pendidikan Islam bukan hanya sekedar proses transformasi nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi dan modernisasi. Tetapi yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan lewat pendidikan Islam tersebut mampu berperan aktif sebagai generator yang memiliki pawer pembebas dari tekanan dan himpitan keterbelakangan sosial budaya, kebodohan, ekonomi dan kemiskinan di tengah mobilitas sosial yang begitu cepat.

Kehadiran pendidikan Islam jika ditinjau dari kelembagaan maupun dari nilai-nilai yang ingin dicapainya masih memenuhi tuntutan yang bersifat formalitas dan bukan sebagai tuntutan yang bersifat substansial, yakni tuntutan untuk menelorkan pribadi-pribadi aktif penggerak sejarah dan pemain gesit-tangkas pelopor dan produsen peradaban Islam dimasa mendatang.

Sementara itu, pendidikan Islam dalam perkembangannya memunculkan dua pola pikiran yang kontradiktif. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda, baik pada aspek materi, sistem pendekatan, maupun dalam bentuk kelembagaannya. Hal itu merupakan akumulasi dari respon sejarah pemikiran manusia dari masa ke masa terhadap adanya kebutuhan akan pendidikan. Dua model pikiran itu adalah pendidikan Islam tradisional dan pendidikan Islam modernis. Pendidikan islam tradisional lebih menekankan pada aspek doktriner normatif yang cenderung eksklusif-literalis, dan apologis. Sedangkan pendidikan Islam modernis yang lebih menekankan pada daya pemikiran kritis yang lama-kelamaan terlihat

mulai kehilangan identitas keislamannya atau ruh-ruh mendasar islamnya.

Ketertinggalan pendidikan Islam, salahsatunya juga dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Dengan kata lain pendidikan Islam masih memisahkan antar akal dan wahyu, ayat qouliyah dan ayat kauniyah serta pikir dan zikir. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan paradigmatic, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, yang disebabkan karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep abdullah (manusia sebagai hamba), ketimbang sebagai konsep khalifatullah (manusia sebagai khalifah Allah).

Saat ini, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme historik dan realisme. Dalam artian bahwa, satu sisi umat Islam berada pada romantisme historis di mana mereka bangga karena pernah memiliki para pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan besar dan mempunyai kontribusi yang besar pula bagi pembangunan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia serta menjadi transmisi bagi khazanah Yunani, namun di sisi lain mereka menghadapi sebuah kenyataan, bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Hal ini pun didukung dengan pandangan sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat “diharamkan”. Hal ini berdampak pada pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam yang masih berkutat apa yang oleh Muhammad Abed al-Jabiri, pemikir asal Maroko, sebagai epistemologi bayani, atau dalam bahasa Amin Abdullah disebut dengan *hadharah an-nash* (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks), di mana pendidikan hanya bergelut dengan setumpuk teks-teks keagamaan yang sebagian besar berbicara tentang permasalahan fikih semata. <http://annajib.wordpress.com/2012/05/7>.

Semua faktor kelemahan tradisi ilmiah dikalangan umat Muslim dan problematika yang kompleks terjadi dalam pendidikan Islam, menyebabkan pendidikan Islam selalu berada dalam ketertinggalan dan secara teoritis tidak akan mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan liberalis dan humanisasi. Oleh karena itu,

keterlanjuran krisis ini hemat penulis jangan hanya dilihat dalam prespektif negatif, tetapi harus dilihat dalam kaca mata dinamika ilmu pengetahuan Islam, dengan jalan merekonstruksi bangunan epistemologi yang masih menggunakan paradigma yang lama untuk diganti dengan paradigma yang baru sesuai dengan konteks (kebutuhan) sekarang atau kekinian.

Dengan asumsi inilah dicoba untuk diungkapkan berbagai permasalahan dalam pendidikan Islam, epistemologi pendidikan Islam dan dari sinilah, kemudian dicarikan alternatif baru -reformasi-pemikiran epistemologis yang tentunya lebih realistis, inovatif, tegas dan dinamis.

2. Mengurai Problematika Pendidikan Islam

Pendidikan Islam saat ini, berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengesankan. Hal ini terjadi karena pendidikan Islam mengalami keterpurukan jauh tertinggal dengan pendidikan Barat. Pendidikan Islam sekarang cenderung mengekor dan berkiblat pada Barat. Dengan *supremacy knowledge* yang dikuasai oleh negara-negara maju, maka hampir dalam semua aspek kehidupan seperti pertahanan dan persenjataan, komunikasi dan informasi, ekonomi, teknologi, perdagangan, pendidikan dan bahkan pengembangan ilmu pengetahuan negara-negara Muslim masih bergantung kepada dunia Barat.

Banyak para pemikir pendidikan Islam telah ikut andil dan aktif meyumbangkan ide dan pemikirannya untuk menyelesaikan beberapa problema yang menjadi virus untuk menggrogoti sistem pendidikan Islam. Mereka selalu memberikan kritikan, masukan, dan menawarkan solusi-solusi alternatif yang bisa dipakai untuk mengobati penyakit yang sedang diderita sistem pendidikan Islam saat ini. Namun, pendidikan Islam tampaknya belum mampu untuk bangkit dari keterpurukan dan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapinya baik itu tantangan eksternal maupun internal.

Mengapa pendidikan Islam sampai saat ini masih jauh tertinggal dengan Barat dan berada dalam keterpurukan, dan mengapa pola pendidikan Islam yang digunakan selama ini terkesan lambat untuk membentuk manusia cerdas, kritis, kreatif, dan bermoral? apa faktor-faktor penyebabnya? <http://annajib.wordpress.com/2012/05/7>. Berikut ini akan diuraikan

secara singkat beberapa problematika yang sedang dialami oleh pendidikan Islam saat ini, yaitu:

Pertama: format kurikulum yang tidak jelas orientasinya. Orientasi pendidikan Islam masih tidak terarah pada tujuan yang semestinya sesuai dengan orientasi Islam. Pendidikan Islam masih meniti beratkan pada pembentukan ‘abd atau hamba Allah dari pada kholifatullah. Akhirat disini, tentu saja segala-galanya, hanya saja berkaitan dunia nya belakangan. Di samping itu, masih bersifat deventive artinya menyelamatkan kaum muslimin dari segala pencemaran dan pengerusakan yang ditimbulkan oleh gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu yang dapat mengancam standar-standar moralitas tradisional Islam.

Kedua: implementasi pendidikan Islam masih memelihara warisan lama, sehingga ilmu yang dipelajari adalah ilmu klasik dan ilmu modern tidak tersentuh. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan hanyalah kitab klasik dan dianggap sebagai ukuran baku dan primadona yang dapat menjawab semua persoalan konterporer.

Ketiga: umat Islam cenderung terbuai dengan romantisme masa lalu, sehingga mereka sulit dan enggan melakukan reformasi dan pembaharuan. Mereka seperti orang yang berjalan mundur, lupa bahwa mereka sedang menghadapi arus globalisasi dan modernisasi yang begitu deras. Mereka larut dalam lamunan mimpi dan meninggalkan realitas sesungguhnya. Hal ini, menyebabkan pendidikan Islam kalah cepat dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan IPTEK yang dikembangkan oleh Barat.

Keempat: model pembelajaran pendidikan Islam masih menekankan dan mempertahankan pada pendekatan intelektual verbalistik dan menegasi interaksi edukatif dan komunikasi humanistik antara guru dan murid. Sehingga sistem pendidikannya masih mandul, terbelakang dan mematikan daya kritis anak, dan terpaku pada kapasitas keilmuan pendidiknya. Model seperti ini belum mencerdaskan dan memerdekakan anak didik.

Kelima: sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam. Terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Dari realita ini maka akan

tampak adanya perbedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan antara dunia dan akhirat.

Keenam: persoalan konseptual-teoritis ini ditandai dengan adanya paradigma dikotomi dalam dunia pendidikan Islam antara agama dan bukan agama, wahyu dan akal serta dunia dan akhirat. Terjadinya dikotomi *islamic knowledge* dan *non islamic knowledge* mengakibatkan ilmu-ilmu aqliyah yang menjadi pilar bagi sains dan teknologi menjadi pudar, bahkan lenyap dari tradisi keilmuan dan pendidikan Islam. Pada saat yang sama, ilmu-ilmu aqliyah tadi mengalami transmisi ke dunia Barat. Akhirnya, umat Islam pun menjadi terperangah dengan *supermacy knowledge* yang dikuasai Barat dan mengalami ketergantungan kepada mereka dalam hampir semua aspek kehidupan.

Ketujuh: kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial sehingga peserta didik jauh dari lingkungan sosio-kultural mereka. Pada saat mereka lulus dari lembaga pendidikan Islam mereka akan mengalami *social-shock*. Seperti pendidikan Islam model pesantren yang mengesampingkan materi sains.

Kedelapan: realitas pola pendidikan Islam yang selama ini dipakai cenderung mematikan kreatifitas dan memenjarakan peserta didik. Pendidikan hanya menuntut anak didik untuk selalu patuh dan tidak memberikan ruang kebebasan sedikitpun untuk bersikap kritis dan rasional. Pendidikan Islam terlanjur menitik beratkan pada penimbunan fakta-fakta dan melupakan belajar berfikir. Akibatnya adalah stagnasi yang menjerus pada keadaan statis dan akhirnya macet dan beku dalam berfikir dan bertindak.

Kesembilan: interaksi guru dan murid seperti subjek dan obyek. Sistem pendidikan islam banyak tidak didukung oleh guru-guru yang demokratis, yang memberikan kebebasan kepada anak didik untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan argumentatif. Pendapat guru di sini adalah “segalanya” dan pasti benar adanya, yang tidak boleh dibantah apalagi dikritik. Mengkritik guru bisa “kuwalat” dan tidak barokah, adalah slogan yang sering didengungkan kepada anak didik agar memiliki rasa ta’dhim dan takut kepada gurunya. Akibatnya, anak didik selalu ketakutan dan tidak berdaya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri.

Kesepuluh: materi dan bahan ajar sudah tidak layak lagi diajarkan, karena tidak sesuai lagi dengan literatur perkembangan jaman.

Kesebelas: metode pembelajaran yang selama ini digunakan lebih menitik beratkan pada sistem hafalan bukan proses berfikir logis. Proses pembelajaran yang hanya berkutat dalam persoalan menghafal definisi, konsep-konsep, teori-teori ini dapat menutup pintu untuk bisa menelorkan konsep dan ide anak didik sendiri.

Keduabelas: adanya kesalahan prespektif kebanyakan guru dan umat muslim terhadap anak yang baik. Mereka berpendapat bahwa anak yang baik adalah anak yang memiliki kategori anak yang manis, patuh, pandai menyesuaikan diri dan memiliki disiplin yang kuat. Sementara anak dalam kategori nakal atau durhaka adalah anak yang suka mengkritik, tidak patuh, dan bandel. Sehingga proses pendidikan bukan mendorong anak didik menemukan jati diri yang cerdas, kritis, dan kreatif melainkan justru membawa ke arah wawasan yang dekat ke proses penjinakan dan domestikasi subjek didik.

Ketiga belas: tidak harmonisnya akal dan wahyu. Umat Islam masih banyak yang hanya memandang bahwa akhirat adalah segala-galanya. Sehingga mereka hanya terkesan asik berkutat dengan persoalan-persoalan yang ada kaitan dengannya. Belajar logika, filsafat, matematika, kimia, biologi, dan sains lainnya hukumnya haram. Sementara belajar fiqih, ushul fiqih, tafsir, ilmu-ilmu agama lainnya adalah wajib dan mulia, disertai keyakinan bahwa hal itu bisa menghantarkan kesurga. Perspektif diskriminatif seperti ini harus segera direformasi, jika umat Islam ingin bangkit dari keterbelakangan dan kebodohan. Masalah ini dapat terselesaikan dengan cara mengintegrasikan akal dan wahyu menjadi satu kesatuan fungsional dalam proses pendidikan Islam. (Syamsul Ma'arif, 2007: 33)

Keempat belas: rendahnya kualitas intelektual dan penguasaan terhadap teknologi serta profesionalitas tenaga pendidik. Hal ini ditandai dengan kurangnya unsur kreativitas dan produktifitas, kapasitas intelektual yang memadai, karakteristik, skill yang direalisasikan dengan hasil kerja dan kinerja yang baik di era globalisasi ini. Unsur kreativitas, diskusi, problem solving, discovery masih menjadi barang langka dalam proses belajar

mengajar. (Syamsul Ma'arif, 2007:51). Hal ini sudah maklum, karena tenaga pendidik sekarang ini merupakan produk pendidikan Islam model klasik.

Kelimabelas: bentuk kurikulum pendidikan Islam masih sekuler. Hal ini terbukti adanya perbedaan antara materi agama dan umum serta masih berdiri sendiri-sendiri. Jika ada sekolah yang ingin memadukan antara keduanya, maka yang terjadi justru terjadi penumpukan materi yang memberatkan siswa sekaligus menjajah dunia bermain anak seperti yang terjadi MI, MTs, MA, bahkan sampai ada sekolah full day school.

Keenambelas: terjadinya proses imperialisme epistemologi Barat terhadap pemikiran Islam. Dunia Barat saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut mempengaruhi negara-negara diseluruh dunia. Tidak dipungkiri, Barat memberikan sumbangan yang besar terhadap sains dan teknologi modern. Rahasia kemajuan Barat terletak pada pendekatan sains dan epistemologinya. Epistemologi yang dikuasai oleh ilmuwan-ilmuwan Barat digunakan untuk mewujudkan temuan-temuan baru dalam sains dan teknologi. Epistemologi yang dikembangkan ilmuwan Barat itu selanjutnya mempengaruhi pemikiran para ilmuwan diseluruh dunia seiring dengan pengenalan dan sosialisasi sains dan teknologi mereka. Epistemologi itu dijadikan acuan dalam mengembangkan pemikiran para ilmuwan di masing-masing negara, akhirnya secara praktis mereka terbaratkan; pola pikirnya, pijakan berpikirnya, metode berpikirnya, cara mempersepsi terhadap pengetahuan dan sebagainya mengikuti gaya Barat semuanya. Secara sadar atau tidak sadar mereka telah terbelenggu oleh pengaruh Barat. Padahal epistemologi yang semestinya dijadikan sarana penalaran yang bisa mewujudkan dinamika pemikiran, berubah menjadi penyeragaman cara-cara berpikir. Seolah-olah hanya ada satu model berpikir yang mesti diikuti. Kondisi yang semacam ini makin membuktikan bahwa sesungguhnya telah terjadi proses imperialisme epistemologi Barat terhadap pemikiran masyarakat dunia termasuk Islam. (Qomar, Mujamil, 2005: 43)

Ketujuhbelas: fenomena kurikulum pendidikan Islam atau kajian keislaman saat ini masih banyak pada dataran rasional, intelektual, etis, dan irfani, sedikit di wilayah ilmu terapan, skill atau teknologi. (Abdur Rahman Assegaf, 2007: 34) Kita masih senang

bergumul dengan pengetahuan al-qur'an, tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, kalam, tasawuf, akhlak, sejarah, pemikiran Islam, ilmu pendidikan, dan teoritik keilmuan lainnya ketimbang pengalaman, keahlian, ketrampilan, dan teknologi yang sifatnya empiris-positivistik-aplikatif.

Mengapa kita berada dalam kondisi seperti ini, paling tidak ada dua alasan. Pertama, karena *doing, experience, atau skill* dianggap hal yang sekuler, profan, dan inferior jika dibandingkan dengan *knowing, intelektual, atau irfani*. Kedua, karena umat Islam memang tidak mampu untuk itu, terutama dalam kemampuan epistemologi-metodologis-positivistik. Sebenarnya masih banyak problematika yang perlu dikaji dan dikoreksi dan ditemukan solusinya seperti (1). Rendahnya sarana fisik, (2). Rendahnya kualitas guru, (3). Rendahnya kesejahteraan guru, (4). Rendahnya prestasi siswa, (5). Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, (6). Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, (7). Mahalnya biaya pendidikan dan lain sebagainya, agar pendidikan Islam ke depan dapat bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan, maka harus dilakukan reformasi epistemologi pendidikan Islam.

3. Merekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam

Sebelum kita membahas bagaimana membenahi epistemologi pendidikan Islam, perlu kita kaji terlebih dahulu seputar pengertian, ruanglingkup, objek, tujuan, landasan epistemologi, dan pendidikan Islam, dengan tujuan agar kita dapat menentukan alternatif yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan problematika yang sedang dialami oleh pendidikan Islam saat ini.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Epitemologi

Apa sebenarnya epistemologi itu? Dari beberapa literatur dapat disebutkan bahwa Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari obyek yang ingin dipikirkan. (Qomar, Mujamil, 2005: 1)

Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani *epiteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan.

Secara terminology, Dagobert D Renes dalam kamusnya

Dictionary of Philosophy, (1971) menjelaskan bahwa: *epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge.* (Runes, 1971: 94) Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *theory of knowledge*. Istilah epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh JF Ferrier pada tahun 1854.

Dalam pengertian terminologis ini, Miska Muhammad Amin, mengatakan bahwa epistemologi terkait dengan masalah- masalah yang meliputi: a) filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan, b) metoda, sebagai metoda, bertujuan mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan c) sistem, sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri.

D.W. Hamlyn (Amin Husni, 1986: 100) Mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan pengandai-pengandaiannya serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan.⁸ Selanjutnya, pengertian epistemologi yang lebih jelas, diungkapkan oleh Azyumardi Azra bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. (Muhammad Yusuf Musa, *Bain Al-Din*, h.91)

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, kiranya dapat dirinci aspek-aspek yang menjadi cakupan epistemologi atau ruang lingkungannya, yaitu meliputi hakekat, sumber, dan validitas pengetahuan.

b. Objek dan Tujuan Epistemologi

Objek epistemologi menurut Jujun S. Suriasumantri berupa “Sege-nap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan”. (Qomar, Mujamil, 2005: 8). Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran atau objek teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi menghantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang

harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran , mustahil tujuan bisa terealisasi, sebaliknya tanpa tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah.

Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan epistemologi tersebut? Jacques Martain mengatakan, “Tujuan epistemologi bukanlah hal utama menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu.” (Qomar, Mujamil, 2005: 8). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan -kendatipun tidak bisa dihindari- akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan.

Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan ini menumbuhkan kesadaran bahwa jangan sampai dia puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan, tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan, sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Keadaan pertama hanya berorientasi pada hasil, sedangkan keadaan kedua lebih berorientasi pada proses. Seseorang yang mengetahui prosesnya, tentu akan dapat mengetahui hasilnya, tetapi seseorang yang mengetahui hasilnya acapkali tidak mengetahui prosesnya. Contoh, seorang guru dapat mengajarkan kepada siswanya bahwa empat kali lima sama dengan dua puluh ($4 \times 5 = 20$) dan siswa mengetahui, bahkan hafal. Namun, bagi siswa yang cerdas tidak pernah puas dengan pengetahuan dan hafalannya itu. Dia akan mengejar bagaimana prosesnya, empat kali lima sama dengan dua puluh. Maka guru yang profesional akan menerangkan proses tersebut secara rinci dan mendetail, sehingga siswa benar-benar mampu memahaminya dan mampu mengembangkan perkalian angka-angka lain. Dengan demikian, seseorang tidak sekedar mengetahui sesuatu atas informasi orang lain, tetapi benar-benar tahu berdasarkan pembuktian kontekstual melalui proses itu.

c. Landasan Epistemologi

Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, sebab ia merupakan tempat berpijak. Bangunan pengetahuan menjadi mapan, jika memiliki landasan yang

kokoh. Landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah merupakan penentu layak-tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan.

Dari pengertian, ruang lingkup, objek, dan landasan epistemologi ini, dapat kita disimpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh.

d. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani-rahani menurut hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut Islam, yang berarti menitikberatkan kepada bimbingan jasmani-rohani berdasarkan ajaran Islam dalam membentuk akhlak mulia. (Moh. Shofan, 2004: 49).

Hamdani Ihsan dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Pendidikan Islam” menuliskan bahwa menurut Syekh Muhammad A. Naquib Al-Atas Pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. (Ihsan, Hamdani, 1998: 16).

Musthafa Al-Ghulayaini mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak pada masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk memanfaatkan tanah air. (Ihsan, Hamdani, 1998: 16). Syahminan Zaini, dalam bukunya Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam, agar terwujud kehidupan manusia yang bahagia dan makmur. (Syahminan Zaini, 1986: 4) .

Menurut Zuhairini pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam, memikirkan, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Zuhairini, 1995: 152)

Dari beberapa definisi tersebut, tampak sekali penekanan pendidikan Islam kepada pembentukan kepribadian, akhlak, mengembangkan fitrah dan semua potensi manusia secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam, sehingga diharapkan menjadi muslim yang baik, memiliki pola pikir logis-kritis, beriman, bertaqwa, berguna bagi diri dan lingkungannya, dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran Islam.

e. Membenahi Epistemologi Pendidikan Islam

Reformasi epistemologi Islam dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan demi menghasilkan pendidikan bermutu dan yang mencerdaskan, terlebih dalam krisis kekinian yang menyangkut pengetahuan dan pendidikan Islam saat ini. Krisis yang terjadi dalam dunia pengetahuan dan pendidikan Islam saat ini menyebabkan tradisi keilmuan menjadi beku dan mandek, sehingga pendidikan Islam sampai saat ini masih belum mampu menunjukkan perannya secara optimal.

Untuk mengatasi kelemahan dan problematika dalam pendidikan Islam tersebut harus dilakukan pembaruan-pembaruan (merekonstruksi pendidikan) secara komprehensif agar terwujud pendidikan Islam ideal yang mencerdaskan dan bermoral dengan cara merekonstruksi epistemologi pendidikan Islamnya. Epistemologi pendidikan Islam ini meliputi; pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pendidikan Islam, asal-usul, sumber, metode, sasaran pendidikan Islam.

Dalam pembahasan ini epistemologi pendidikan Islam lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan Islam, dari pada komponen-komponen lainnya, sebab metode atau pendekatan tersebut paling dekat dengan upaya mengembangkan pendidikan Islam, baik secara konseptual maupun aplikatif. Epistemologi pendidikan Islam bisa

berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang.

Pendekatan epistemologi membuka kesadaran dan pengertian siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan diperlukan cara atau metode tertentu, sebab ia menyajikan proses pengetahuan di hadapan siswa dibandingkan hasilnya. Pendekatan epistemologi ini memberikan pemahaman dan keterampilan yang utuh dan tuntas. Seseorang yang mengetahui proses sesuatu kegiatan pasti mengetahui hasilnya. Sebaliknya, banyak yang mengetahui hasilnya tetapi tidak mengetahui prosesnya. Berbeda siswa yang hanya diberikan roti kemudian dia menikmatinya, dengan siswa yang diajak untuk membuat roti, kemudian menikmatinya. Tentunya pengetahuan siswa yang mengetahui proses pembuatan roti sampai menikmati itu lebih utuh, kokoh, dan berkesan.

Seandainya pendekatan epistemologi ini benar-benar diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam, maka dalam waktu dekat insya Allah siswa dapat memiliki kemampuan memproses pengetahuan dari awal hingga wujud hasilnya. Jika pendidikan Islam mengedepankan pendekatan epistemologi dalam proses belajar mengajar, maka pendidikan Islam akan banyak menelorkan lulusan-lulusan yang berjiwa produsen, peneliti, penemu, penggali, dan pengembang ilmu pengetahuan. Karena epistemologi merupakan pendekatan yang berbasis proses, maka epistemologi melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis, yaitu:

- a. Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai, mengajarkan agama lewat bahasa ilmu pengetahuan, dan tidak mengajarkan sisi tradisional saja, tetapi sisi rasional. Selain itu, perlu ditambahkan lagi dengan penggunaan indera dan akal pada wilayah obyek ilmu, sedangkan wahyu memberikan bimbingan atau menuntun akal untuk mewarnai ilmu itu dengan keimanan dan nilai-nilai spiritual.
- b. Merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya,

pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar.

- c. Merubah paradigma idiologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah SWT. Sebab, paradigma idiologis ini -karena otoritasnya-dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Praktis paradigma idiologis tidak memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran bebas bertanggung jawab secara argumentatif. Padahal, wahyu sangat memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi, menemukan, ilmu pengetahuan (ayat kauniyah) dengan petunjuk wahyu Allah SWT. (Q.S. Al-Alaq: 1-5). Dan paradigma ilmiah saja tanpa berpijak pada wahyu, tetap akan menjadi sekuler. Karena itu, agar epistemologi pendidikan Islam terwujud, maka konsekuensinya harus berpijak pada wahyu Allah.
- d. Guna menopang dan mendasari pendekatan epistemologi ini, maka perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual ini, menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Sebab segala ilmu pengetahuan yang bersumber pada hasil penelitian pada alam semesta (*ayat kauniyah*) maupun penelitian terhadap ayat qouliyah atau naqliyah (*al-qur'an dan sunnah*) merupakan ilmu Allah SWT. Ini berarti bahwa semua ilmu bersumber dari Allah. Realisasinya, bagi penyusun kurikulum yang berbasis tauhid ini harus memiliki pengetahuan yang komperhensif tentang Islam. Karena kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, hal-hal yang sifatnya masih melangit, dogmatis, dan transendental perlu diturunkan dan dikaitkan dengan dunia empiris di lapangan. Ilmu-ilmu yang berbasis pada realitas pengalaman empiris, seperti sosiologi, psikologi, filsafat kritis yang sifatnya membumi perlu dijadikan dasar pembelajaran, sehingga ilmu betul-betul menyentuh persoalan-persoalan dan pengalaman empiris.
- e. Epistemologi pendidikan Islam diorientasikan pada hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu. Maksudnya orientasi pendidikan Islam ditekankan pada perumbuhan yang integrasi antara iman, ilmu, amal, dan akhlak. (Al-Mujadalah: 11). Semua dimensi ini bergerak saling melengkapi satu sama lainnya,

sehingga perpaduan seluruh dimensi ini mampu menelorkan manusia paripurna yang memiliki keimanan yang kokoh, kedalaman spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, dan memiliki budi pekerti mulia yang berpijak pada “*semua bersumber dari Allah, semua milik Allah, difungsikan untuk menjalankan tugasnya sebagai kholifah Allah dan sebagai abdullah, dan akan kembali kepada Allah (mentauhidkan Allah)*”. Bisa dikatakan bahwa hasil produk integrasi ini adalah *manusia yang beriman tauhidiah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, bertaqwa ilahiyah, berakhlak robbaniyah dan berperadaban islamiyah*.

- f. Konsekuensi yang lain adalah merubah pendekatan dari pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual atau aplikatif. Dari sini pendidikan Islam harus menyediakan berbagai media penunjang untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Menurut perspektif Islam bahwa media pendidikan Islam adalah seluruh alam semesta atau seluruh ciptaan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW: “*tafakkaruu fil kholqi walaa tafakkaruu fil kholiq, fainnakum laa taqdiruuna qodrohu*” yang artinya “*berpikirlah kamu sekalian tentang makhluk ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memikirkan-Nya.*” (HR.Abu Syekh dari Ibn Abas).

Adanya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan penguasaan materi yang komperhensif tentang materi ajar yang terintegrasi antara ilmu dan wahyu. Setelah kita mengetahui beberapa konsekuensi logis dari penerapan pendekatan epistemologi, perlu kita mengetahui sumber ilmu pengetahuan atau cara memperoleh ilmu pengetahuan. Menurut Mujamil Qomar ditinjau dari cara memperolehnya, adakalanya pengetahuan pendidikan diperoleh setelah mengalami. Ini merupakan pengetahuan pendidikan secara aposteriori (oleh Imam Ghazali disebut *ilmu nazari*) atau menurut istilah Barat disebut *empirisme*. Adakalanya pengetahuan pendidikan diperoleh sebelum mengalaminya, hanya melalui perenungan dan penggagasan. Hal ini disebut pengetahuan pendidikan apriori (oleh Imam Ghazali disebut *ilmu awali*) atau menurut istilah Barat disebut *rasionalisme*. (Mujamil Qomar, 2005: 262). Jika pengetahuan pendidikan yang pertama bersumber dari indera, maka pengetahuan pendidikan yang kedua bersumber dari akal. Sedangkan asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan dalam

pendidikan Islam adalah dari Allah SWT. Karena itu, jika dibandingkan dengan pengetahuan yang bersumber dari indera dan akal, maka masih ada tingkatan pengetahuan yang jauh lebih tinggi, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan petunjuk wahyu. Pengetahuan yang bersumber dari indera ataupun akal, kebenarannya bersifat nisbi. Artinya, jika ada penelitian dan pembuktian lain yang berhasil mematahkan hasil penelitian pertama, maka hasil penelitian pertama tidak berlaku lagi dan yang digunakan adalah hasil penelitian kedua, begitu seterusnya. Sedangkan pengetahuan yang bersumber pada petunjuk wahyu, kebenarannya bersifat mutlak. Mujamil menambahkan bahwa di samping itu, masih ada pengetahuan yang diperoleh secara cuma-cuma dari Tuhan melalui mimpi, intuisi, ilham, dan semacamnya. (Mujamil Qomar, 2005: 262).

Betapapun besarnya kekuatan akal untuk menjalankan proses berpikir, bernalar, merenung, menggagas, berspekulasi, dan berimajinasi untuk menemukan pengetahuan baru, tetapi perlu ditegaskan lagi bahwa akal memiliki *keterbatasan*. Kemampuan akal sangat terbatas. Banyak realita yang diakui ada, tetapi akal tidak mampu menjangkaunya. Kenyataan ini dapat dijadikan peringatan agar manusia tidak bersifat arogan setelah menemukan dari sedikit ilmu Allah yang tersembunyi dibalik sunnatullah atau alam ciptaan-Nya.

Kita tahu bahwa epistemologi Barat memiliki ciri-ciri pendekatan skeptif (keragu-raguan atau kesangsian), pendekatan rasional-empirik, pendekatan dikotomik, pendekatan positif-objektif, dan pendekatan yang menentang dimensi spiritual. Sedangkan epistemologi pendidikan Islam selama ini terkesan masih bersifat teologis, doktrinal, pasif, sekuler, mandul, jalan ditempat, dan tertinggal jauh dengan epistemologi pendidikan Barat terutama sains dan teknologi. Dalam hal ini, alternatif yang mujarab untuk mencairkan kebekuan epistemologi dalam bangunan pendidikan Islam dan untuk menyelamatkan umat Islam dan peradabannya akibat epistemologi Barat, maka kita harus melakukan reformasi pada epistemologi pendidikan Islam yang sudah terbaratkan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Metode-metode yang dikembangkan Dengan cara membangun epistemologi yang berpijak pada Al-qur'an dan As-sunnah yang

didesain dengan mempertimbangkan konsep ilmu pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan dan karakter ilmu dalam perspekti Islam yang bersandar pada kekuatan spiritual yang memiliki hubungan harmonis antara akal dan wahyu, interdependensi akal dengan intuisi dan terkait nilai-nilai spiritual. Epistemologi Pendidikan Islam seperti ini, menjadi tumpuan harapan dalam membangun kehidupan umat Islam yang lebih baik dengan suatu peradaban Islam yang lebih mapan dan stabil. Epistemologi pendidikan Islam seperti ini menekankan totalitas pengalaman dan kenyataan (empirisme) serta menganjurkan banyak cara untuk mempelajari alam (rasionalisme), sehingga ilmu yang diperoleh dari wahyu maupun akal, dari observasi maupun intuisi, dari tradisi maupun spekulasi teoritis benar-benar mencetak generasi-generasi yang seimbang antara intelektual, skill, dan spiritualnya serta moralitasnya.

- b. Kita harus memprioritaskan epistemologi pendidikan Islam yang berbasis proses tauhid, pengalaman empirik, di mana dari realitas empirik ini kemudian diamati, dikaji, dan diteliti dengan mengandalkan metode observasi dan eksperimentasi disertai tehnik-tehniknya dengan spirit tauhid keimanan. Langkah ini menekankan bahwa epistemologi harus dimaknai sebagai proses, prosedur, cara atau kerja metodologi penelitian guna mencapai pengetahuan baru, bukan epistemologi dalam makna sumber atau alat untuk mencapai pengetahuan. Kemudian, muatan-muatan teologis atau hegemoni teologi atas epistemologi harus dihilangkan sedemikian rupa sehingga epistemologi menjadi independen atau berdiri sendiri.
- c. Orientasi atau penekanan pada knowing (ma'rifah), pengetahuan teoritik, atau akademik yang cenderung menjadikan siswa pasif dalam belajar di bawah otoriter guru, perlu dirubah ke arah orientasi epistemologi pendidikan Islam yang menekankan pada doing, aktivitas dan kreativitas, atau kerja profesional yang menjadikan siswa aktif dan kreatif dalam belajar. Dalam proses doing, aktivitas, kreativitas tersebut nilai-nilai spiritual dan moralitas masuk di dalamnya, sehingga di samping siswa menemukan ilmu pengetahuan baru dia juga mengakses nilai-nilai spiritual secara bersamaan.

d. Mengembangkan metode atau pendekatan yang lebih mencerdaskan siswa dari pada pendekatan tradisional yang menekankan pendekatan hafalan saja, seperti (1) metode *'aqli* (proses berpikir atau rasional) yaitu metode yang dipergunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria kebenaran melalui proses berpikir yang bisa diterima akal. Metode ini memandang bahwa segala sesuatu dianggap benar, jika bisa diterima rasio (lihat Ali 'Imran, 190-191); (2) metode *dzauqi*, hikmah, atau jelajah qolbu (metode intuitif) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan jalan mengasah kepekaan qolbu siswa agar pengetahuan yang tiba-tiba itu muncul, walaupun tanpa didahului oleh pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Dalam istilah agama intuitif adalah ilham. "*Siapa yang mampu menjaga keikhlasan hatinya selama 40 hari lamanya, maka akan dipancarkan dari dalam hatinya sumber-sumber (seperti mata air) ilmu hikmah*" (Al-Hadits); (3) metode *jadali* (metode dialogis atau diskusi) yaitu metode untuk menggali pengetahuan dengan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk tanya-jawab antara dua orang atau lebih berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan di hadapan wahyu (lihat surat An-Nahl : 111 dan 125); (4) metode *moqaranah* (komparatif) yaitu metode dengan membandingkan teori atau praktik maupun dua pendapat tokoh dengan tujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan dan kelebihan atau pun memadukan pengertian dan pemahaman supaya diperoleh ketegasan yang dimaksud dari permasalahan yang ada. (lihat surat : surat Al-Hasyr: 20); (5) metode *naqdi* (kritik) yaitu metode untuk menggali pengetahuan dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi ilmu kemudian menawarkan solusi-solusinya. Metode ini bisa dikatakan dengan wasiyah atau nasehat (lihat surat al-"ashr ayat 1-3); (6) metode *muhasabah* (koreksi atau evaluasi) yaitu metode untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara melakukan koreksi dan evaluasi terhadap pengetahuan untuk ditemukan kekurangan-kekurangan dan ditawarkan alternatif baru sebagai solusinya. Umar bin Khothab berkata: "*hasibuu qobla antuhaasabuu*". Artinya: "*koreksilah dirimu, sebelum kelak kamu dikoreksi Allah*".

Untuk membangun daya kritis atau intelektual siswa ini, harus disandarkan pada wahyu, nilai-nilai spiritual, maupun metode ilmiah secara integral yang implementasinya berbasis proses tauhid. Wahyu berfungsi memberikan dorongan, arahan, bimbingan, pengendalian, kontrol terhadap pelaksanaan metode tersebut. Nilai-nilai spiritual atau etika Islami berfungsi menanamkan etika Islam pada siswa saat proses metode itu berlangsung. Sedangkan metode ilmiah dijadikan acuan mendasar untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat empirik, rasional, dan ilmiah. Integrasi ini akan dapat merubah bangunan epistemologi pendidikan Islam yang nantinya diharapkan mampu menjadi solusi praktis untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju.

PENUTUP

Reformasi epistemologi Islam dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan demi menghasilkan pendidikan bermutu yang mencerdaskan, terlebih dalam krisis kekinian yang menyangkut pengetahuan dan pendidikan umat saat ini. Krisis yang terjadi dalam dunia pengetahuan dan pendidikan umat saat ini didasari rendahnya motivasi belajar umat serta kurangnya rasa cinta dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bingkai ketauhidan.

Proses sekularisasi pendidikan lewat jalur epistemologi, telah menggeser dimensi moral dan spiritual dari pendidikan Islam, di samping kurangnya pengetahuan dan kelemahan intelektual. Selain itu, ketergantungan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi wujud nyata dari keterbelakangan umat yang mengakibatkan krisis intelektual yang semakin parah.

Dalam epistemologi sekuler hanya didasarkan pada kekuatan akal (rasional) dan empiris semata, sedangkan dalam epistemologi pendidikan Islam pengetahuan tak hanya didasari oleh dua faktor tersebut, tetapi juga bersumber pada wahyu yang berasal dari Al-Quran dan As Sunnah. Wahyu itu justru menjadi kualitas tertinggi dari ilmu pengetahuan dasar. Wahyu melindungi akal dari kesalahan dan menyediakan informasi tentang suatu hal yang tidak kasat mata mengingat akal tidak bisa memahami secara penuh dunia yang empiris tanpa bantuan, sekaligus wahyu berperan sebagai imam bagi akal. Wahyu yang membimbing, mengarahkan, mengontrol, dan memberikan inspirasi terhadap epistemologi. Selain itu, pengetahuan manusia dalam disiplin ilmu juga sangat terbatas, sehingga wahyu

diperlukan bagi manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Akal manusia bisa diperdaya dan kecerdasannya pun terbatas dalam menginterpretasikan beragam persepsi. Di sisi lain, manusia tidak bisa mengetahui hal yang tak kasat mata, di mana masa lalu dan masa depan diyakini tidak dapat diketahui.

Untuk mengatasi kendala-kendala, kelemahan-kelemahan, problematika pendidikan Islam serta untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik tersebut, perlu melakukan reformasi atau merekonstruksi epistemologi pendidikan Islam. Dengan adanya reformasi epistemologi pendidikan Islam ini diharapkan kualitas belajar dan penelitian akan tercapai sehingga dapat mendorong peserta didik dan pengajar untuk melakukan proses KBM dalam bingkai tauhid. Di samping itu, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam ini bertujuan untuk mewujudkan model pendidikan Islam yang mencerdaskan. Semoga tulisan kecil ini, dapat ikut andil dalam membenahi sistem pendidikan Islam saat ini untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik. Wallahu a'lam.

RANGKUMAN

Perubahan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu dalam pembaruan terdapat dua hal yang perlu dilakukan: a) mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan; dan b) memmuskan reformasi yang bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap reformasi pendidikan. Dengan kata lain, reformasi pendidikan harus didasarkan pada realitas sekolah yang ada bukan didasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata. Reformasi hendaknya didasarkan fakta dan hasil penelitian yang memadai dan valid, sehingga dapat dikembangkan program reformasi yang utuh, jelas, dan realistis.

Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, bangsa Indonesia memerlukan inovasi yang pesat dalam dunia pendidikan. Menjadi bangsa yang berharkat memerlukan keunggulan yang kompetitif dalam berbagai bidang. Bukan zamannya lagi mengandalkan murahnya tenaga kerja untuk mendukung dan membenarkan konsep keunggulan komparatif dan kompetitif.

Saat ini, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme historik dan realisme. Dalam artian bahwa, satu sisi umat Islam berada pada romantisme historis di mana mereka bangga karena pernah memiliki para pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan besar dan mempunyai kontribusi yang besar pula bagi pembangunan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia serta menjadi transmisi bagi khazanah Yunani, namun di sisi lain mereka menghadapi sebuah kenyataan, bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Hal ini pun didukung dengan pandangan sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat “diharamkan”. Hal ini berdampak pada pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam yang masih berkuat apa yang oleh Muhammad Abed al-Jabiri, pemikir asal Maroko, sebagai epistemologi bayani, atau dalam bahasa Amin Abdullah disebut dengan *hadharah an-nash* (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks), di mana pendidikan hanya bergelut dengan setumpuk teks-teks keagamaan yang sebagian besar berbicara tentang permasalahan fikih semata.

Reformasi epistemologi Islam dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan demi menghasilkan pendidikan bermutu dan yang mencerdaskan, terlebih dalam krisis kekinian yang menyangkut pengetahuan dan pendidikan Islam saat ini. Krisis yang terjadi dalam dunia pengetahuan dan pendidikan Islam saat ini menyebabkan tradisi keilmuan menjadi beku dan mandek, sehingga pendidikan Islam sampai saat ini masih belum mampu menunjukkan perannya secara optimal.

Untuk mengatasi kelemahan dan problematika dalam pendidikan Islam tersebut harus dilakukan pembaruan-pembaruan (merekonstruksi pendidikan) secara komprehensif agar terwujud pendidikan Islam ideal yang mencerdaskan dan bermoral dengan cara merekonstruksi epistemologi pendidikan Islamnya. Epistemologi pendidikan Islam ini meliputi; pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pendidikan Islam, asal-usul, sumber, metode, sasaran pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. Athiyah (1975) *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha*, Mesir::Isa al-Babi al-Halabi.
Al-Ahwani, Ahmad Fu'ad, *Al-Tarbiyyah fī al-Islam*, (tt) Kairo: Dar al-

- Ma'arif.
- Al-Ainain, Abu Khalil Abu (tt.). *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fi al-Qur'an al-Karim*, t.t: Dar al-Fikr al-Arabi,
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib (1984) *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan,.
- Ali, Fachry, (2000). *Kontinuitas dan Perubahan: Catatan Sejarah Sosial Budaya Alumni IAIN dalam Problem dan Prospek IAIN*, Jakarta: Ditbinperta.
- Arief, Armai, (2005). *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press.
- Arifin, Muzayyin, (1987) *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bina Aksara,.
- Ashraf, (1985) *New Horizon in Muslim Education*, London: The Islamic Academy, Cambridge University,
- Assegaf, Abdur Rahman, (2007). *Pendidikan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press
- Atmaturida (2001). *Sistem Pengelolaan Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,
- Azra, Azyumardi, (2002) *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002.
- <http://www.Problematika Pendidikan Islam Masa Kini dan Akan Datang.com>
- <http://annajib.wordpress.com/2010/02/12/rekonstruksi-epistemologi-pendidikan-islamupaya-mewujudkan-pendidikan-islam-yang-mencerdaskan/>. Syamsul Afandi. (Diunduh, tgl 6 Juni 2012)
- Ihsan, Hamdani, (1998). "*Filsafat Pendidikan Islam*" (Bandung: CV Pustaka Setia,
- Langgulong, Hasan, (1987). *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,
- Ma'arif, Syamsul, (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Machfudz Ibawi, "*Modus Dialog di Perguruan Tinggi Islam*", dalam Amin Husni et.al., *Citra Kampus Religius Urgensi Dialog Konsep Teoritik Empirik Dengan Konsep Normatif Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986)
- Madjid, Nurcholis, (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: Paramadina.
- Mas'ud, Abdurrachman, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

- Moh. Shofan, (2004). *“Pendidikan Berparadigma Profetik; Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam”* Jogjakarta:UGM Press.
- M. Natsir, (1997). *Dasar-dasar Ilmu Mendidik*, Jakarta: Mutiara,
- Nawawi, Hadari, (1995) *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: UGM Press,
- Imarah, *al-A'mal al-Kämil Li al-Imam Muhammad Abduh*, juz III, Bairut: alMuassasah al-Arabiyah li al-Dirasah wa al-Nashr, 1972, Juz III.
- Ismail, SM., Nurul Huda, (2002). (eds.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qomar, Mujamil,. *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Raharjo, Dawam, (1965). *Pondok Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Ridla, Muhammad Jawad, (tt.). *Al-Fikr Al-Tarbawiy Al-Islamiy; Muqoddimah fi Usulih Al-Ijtimaiyyah wa Al-Aqlaniyah*, t.k.: Dar Al-Fikr Al-Arabiy..
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*.(Jakarta: LP3ES,
- Suwendi, (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,
- Syahminan Zaini, (1986). *“Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam”* Jakarta: Kalam Mulia,
- Wahid, Marzuki, (2001). *Dinamika Pendidikan Islam, Respon Pesantren terhadapModernisasi Pendidikan*. Jakarta: Litbang Dep. Agama RI,
- Yunus, Mahmud, (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya,
- Zamrozi, (2000). *Paradigma Pendidikan di Masa Depan*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Zuhairini, (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 11.....	293
MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM	293
DAN EFISTEMOLOGI ILMU.....	293
Tujuan Pembelajaran:	293
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami:	293
A. Modernisasi Pendidikan	295
1. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah	295
2. Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perubahan Perkembangan Kebudayaan.....	299
3. Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Konteks Nasional	305
B. Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam.....	315
1. Realitas Pendidikan Islam	315
2. Mengurai Problematika Pendidikan Islam	318
3. Merekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam.....	323
PENUTUP	334
RANGKUMAN.....	335
DAFTAR PUSTAKA	336

Modernisasi Pendidikan

- Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah
- Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perubahan Perkembangan Kebudayaan
- Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Konteks Nasional

Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam

- Realitas Pendidikan Islam
- Mengurai Problematika Pendidikan Islam
- Merekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam

BAB 12

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- Hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- Definisi dan Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- Prinsip-prinsip Tatakelola Sekolah yang Baik
- Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah
- Implementasi Pengembangan Berbasis Madrasah



masalah rendahnya mutu pendidikan kita bukan hanya sekedar akibat kekurangan *input* pendidikan, bahkan beberapa pengamat pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa *input* pendidikan bukanlah penyebab utama yang mengakibatkan lambatnya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana manajemen pendidikan tersebut yang dimulai dari sistem pendidikan dan landasan hukum, pendelegasian wewenang, sampai kepada keterlibatan masyarakat. Itu berarti bahwa pengaruh input dalam meningkatkan mutu pendidikan juga merupakan sebuah proses yang melibatkan peranan manajemen. Peranan manajemen ini dapat disimpulkan dengan melihat darimana, bagaimana, dan untuk apa input tersebut disediakan serta pertanggungjawaban yang harus dilakukan pihak pengelola terhadap pemberi input tersebut (Depdiknas, 2006:1).

Berhubungan dengan penjelasan di atas, saat ini sedang berlangsung perubahan orientasi manajemen yang berorientasi kepada pasar sehingga aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul. Selain itu, pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat sehingga kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis. Perubahan-perubahan ini dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah otonomi dimana masyarakat menjadi aktor utama dalam setiap kegiatan.

Perubahan-perubahan ini berpengaruh juga terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan bermakna negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah.

Selain itu, sistem sentralisasi kebijakan juga membawa dampak ketergantungan terhadap sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit

tatanan di bawah atau masyarakat.

A . Hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Latar Belakang

Sejak beberapa waktu terakhir, kita dikenalkan dengan pendekatan baru dalam manajemen sekolah yang disebut sebagai manajemen berbasis sekolah (school based management) atau disingkat MBS. Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 *American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals*, menerbitkan dokumen berjudul *school based management, a strategy for better learning*. Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah (Dharma, 2003).

2. Konsep MBS

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dikembangkan dari hasil penelitian tentang sekolah efektif, dimana sejak tahun 1999, Depdiknas telah melakukan uji coba terhadap sekolah negeri dan swasta untuk menerapkan MBS dengan nama awal Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Konsepnya berupa desentralisasi manajemen sumber-sumber daya ke tingkat sekolah yang meliputi pengetahuan, teknologi, kewenangan, bahan, orang, waktu, dan keuangan. Keputusan yang dibuat di tingkat sekolah hams dalam kerangka kebijakan nasional Dengan demikian, sekolah masih hams bertanggung jawab kepada pemerintah atau pemerintah daerah, tidak hanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pendidikan. Dalam konsep MBS, desentralisasi pendidikan mencakup tiga hal, yaitu; manajemen berbasis lokasi, pendelegasian wewenang, dan inovasi kurikulum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem manajemen bam dalam pengelolaan pendidikan. Sistem ini disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Secara yuridis, MBS mempackan sebuah semangat otonomi yang juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Kemudian Rencana Strategis Depdikas Tahun 2005-2009, bagian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dinyatakan bahwa pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam rangka penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penerapan MBS dijamin oleh peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah";
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran (3) "terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based management)";
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087 Tahun 2004 Tentang Standar Akreditasi Sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah (Depdiknas, 2006:3).

Konsep MBS dapat dilihat dari berbagai bidang. Namun dalam penelitian ini, MBS akan dibahas dari pendekatan operasional. Dalam pendekatan operasional, MBS hams dilihat dari variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek operasional MBS, dimana operasional MBS adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik Prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik tersebut adalah peningkatan partisipasi, peningkatan transparansi, dan peningkatan akuntabilitas. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana MBS dari segi

operasionalnya yaitu prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yang variabelnya adalah peningkatan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penelitian ini akan melihat bagaimana MBS dilihat dari proses operasionalnya di lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagian wewenang dan tanggungjawab pendidikan telah diserahkan kepada sekolah sesuai dengan konsep MBS. Untuk melaksanakan wewenang tersebut, sekolah harus mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik. Dengan diberlakukannya konsep MBS, pada saat ini sekolah, telah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Definisi dan Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Manajemen

Istilah dan pengertian manajemen (management) lahir di dua negara yakni Amerika Serikat, dipelopori oleh F.W. Taylor (1856-1915), dan di Perancis, oleh Henri Fayol (1841-1925). Di Perancis sendiri istilah yang dikenal untuk pengertian ini adalah administration (bahasa Perancis), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris antara lain oleh Luther Gullick dengan Management (Westra, 2002:25). Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, istilah manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi di dalamnya tergantung sudut pendekatan dan pandangan para ahli manajemen. Salah satu ahli manajemen yaitu G.R. Terry, membagi fungsi-fungsi manajemen dalam empat bidang yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling (pengendalian), (Hasibuan, 2005:3-9).

Salah satu pendapat yang mendefinisikan manajemen jika ditinjau dari bidang pendidikan adalah Made Pidarta (2004:4), yang menyebutkan bahwa dalam pendidikan manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sekolah

Sekolah dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu, sekolah dalam pendekatan sistem dan sekolah dalam pendekatan aktor. Dalam pendekatan sekolah sebagai sebuah sistem, maka sekolah akan dilihat dari sudut lembaga atau organisasional. Artinya, sekolah akan dilihat dalam bentuk organisasi yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendekatan aktor, sekolah akan dilihat dari seluruh stakeholder yang tergabung dalam sekolah. *Stakeholders* sekolah meliputi pimpinan sekolah, masyarakat, pegawai sekolah, dan siswa. Kelompok masyarakat dibatasi dalam ruang lingkup orangtua siswa yang tergabung dalam komite sekolah.

a. Sekolah dalam Pendekatan Sistem

Dalam penelitian ini, sesuai dengan konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah, maka sekolah dapat diartikan sebagai sebuah sistem. Sekolah atau pendidikan bila ia dipandang sebagai sistem, maka ia termasuk sistem terbuka. Sistem terbuka artinya sekolah atau pendidikan itu tidak mengisolasi diri dari lingkungannya melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dan kerjasama (Pidarta, 2004:24).

Departemen Pendidikan Nasional, dalam buku panduan Manajemen Berbasis Sekolah, menjelaskan secara lengkap tentang sekolah sebagai sebuah sistem sebagai berikut:

- 1) Sekolah sebagai sistem tersusun dari konteks, *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. Konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada output, output berpengaruh pada outcome. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing komponen sistem yang dimaksudkan:
- 2) Konteks adalah eksternalitas yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan karenanya harus diinternalisasikan ke dalam penyelenggaraan sekolah. Konteks meliputi kemajuan IPTEK, nilai dan harapan masyarakat, dukungan pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan yuridis, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan tuntutan pengembangan diri serta peluang tamatan untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk terjun ke masyarakat;
- 3) *Input* sekolah adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar. *Input* digolongkan menjadi dua yaitu yang diolah dan pengolahannya. *Input* yang diolah adalah siswa dan input pengelola meliputi visi, misi, tujuan, sasaran; kurikulum; tenaga

- kependidikan; dana; sarana dan prasarana, regulasi sekolah, organisasi sekolah, administrasi sekolah, budaya sekolah, dan peran masyarakat dalam mendukung sekolah;
- 4) Proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain Proses meliputi manajemen, kepemimpinan, dan utamanya proses belajar-mengajar. Dalam pendidikan, proses adalah kejadian berubahnya siswa belum terdidik menjadi siswa terdidik;
 - 5) *Output* pendidikan adalah hasil belajar (prestasi belajar) yang merefleksikan seberapa efektif proses belajar mengajar diselenggarakan. Peningkatan prestasi belajar ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan dasar dan kemampuan fungsional;
 - 6) *Outcome* adalah dampak jangka panjang dari output/hasil belajar, baik dampak bagi individu tamatan maupun bagi masyarakat. Outcome memiliki dua dimensi yaitu kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja dan pengembangan diri tamatan (Depdiknas, 2006:5-6).

Sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam otonomi, untuk meningkatkan kinerja sekolah, maka diperlukan pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah meliputi pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan fasilitas (peralatan dan perlengkapan), pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah-masyarakat, dan pengelolaan iklim sekolah. Implementasi dari pemberian kewenangan dan tanggungjawab secara benar akan memberikan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku warga sekolah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

b. Sekolah dalam Pendekatan Aktor

Secara sederhana, Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan kegiatan pelaksanaan pendidikan yang menyangkut peran serta kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki sekolah. Keberhasilan pelaksanaan MBS dalam meningkatkan kinerja sekolah dapat dilihat dari bagaimana masing-masing peranan dilaksanakan dan bagaimana hubungan antara pemegang peranan itu sendiri sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yaitu:

1) Kepala Sekolah

Kata "kepala sekolah" tersusun dari dua kata yaitu "kepala" yang dapat

diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, dan "sekolah" yaitu sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seseorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberdayakan komponen-komponen yang ada di sekolah yaitu guru, komite sekolah, dan siswa.

Kepemimpinan dalam konteks MBS merupakan sebuah peran yang harus dijalankan oleh kepala sekolah dan para wakilnya. Danim (2002:121) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia juga menjelaskan bahwa aktivitas kepala sekolah sebagai pimpinan terjelma dalam bentuk memberi perintah, membimbing, dan mempengaruhi kelompok kerja atau orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Sebagai seorang pemimpin, maka seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial terutama untuk menyusun program atau mengambil keputusan yang harus diterapkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, dan pembagian pelaksanaan tugas, menguasai dan mampu mengambil kebijaksanaan serta keputusan yang bersifat memperlancar dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Sementara itu, hubungan kepala sekolah dengan orangtua murid (komite sekolah), guru sebagai bawahannya, dan siswa harus terjalin dengan baik. Kepala sekolah harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua murid dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal pendanaan (keuangan). Kepala sekolah juga harus memberikan kesempatan bagi guru dalam pembuatan kebijakan dalam menyusun kerangka desain strategi dan arah pengembangan sekolah terutama dalam peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan untuk murid, kepala sekolah harus mampu menciptakan suasana yang baik

sehingga memacu semangat siswa dalam peningkatan prestasi belajar.

2) Komite Sekolah

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan kutipan dari Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah:

Komite Sekolah bertujuan untuk:

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- b) Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berperan sebagai:

- a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan

- penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - (1) kebijakan dan program pendidikan;
 - (2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - (3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - (4) kriteria tenaga kependidikan;
 - (5) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - e) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
 - g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002).

Hubungan antara Komite Sekolah dengan *stakeholder* lainnya juga diatur dalam Keputusan Menteri tersebut. Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite-komite sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep MBS dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 (pasal 56) merupakan dasar hukum yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Pasal 56 ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Undang-undang ini juga memberikan hak dan kewajiban kepada komite sekolah/madrasah dalam hal peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui pertimbangan, arahan dan dukungan

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah. Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (cognitive), sikap/nilai (affective), dan keterampilan (psychometer) kepada anak didik. Tugas guru di lapangan pengajaran berperan juga sebagai pembimbing proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian tugas dan peranan guru adalah mengajar dan mendidik.

Berdasarkan pengalaman di Australia Barat, hasil penelitian Dellar dari Curtin University, pelaksanaan MBS menunjukkan peningkatan partisipasi guru pada pembuatan keputusan dan perencanaan pengembangan sekolah. Guru dapat terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki sekolah dan memberikan masukan kepada pimpinan tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam peningkatan mutu sekolah. Bahkan dari hasil penelitian tersebut, sekitar 54% mengindikasikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak secara otomatis menjadi jaminan bagi keefektifan proses pembelajaran (Danim, 2002:221-223).

3) Siswa

Siswa dalam MBS bukan hanya sekedar sebagai input tetapi juga berperan dalam penilaian tentang prestasi sekolah yang bersangkutan. Hal ini biasanya dapat dilihat disetiap menjelang tahun ajaran baru dimana terjadi penumpukan calon siswa yang ingin diterima di lembaga pendidikan atau sekolah favorit. Namun lebih daripada itu, siswa juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam kesuksesan pelaksanaan MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menilai mutu pendidikan, indikator utama yang dipergunakan adalah bagaimana kualitas siswa yang menjadi lulusan sekolah tersebut. Pendidikan dapat dikatakan bermutu jika siswa lulusan sekolah tersebut dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan mampu bersaing dalam bursa kerja atau mungkin

membuka lapangan pekerjaan baru.

Danim (2002:77) secara tegas mengatakan bahwa selain komite sekolah, siswa merupakan salah satu komponen integral dalam mendiskusikan program-program yang akan dilaksanakan. Hal ini diutarakan dengan pertimbangan bahwa dalam mendiskusikan program tersebut, yang paling menentukan bukanlah darimana ide itu, melainkan apakah ide yang ada benar-benar bermakna bagi organisasi sekolah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan, siswa dapat memberikan saran tentang bagaimana program yang baik untuk dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program itu dilaksanakan.

3. Peran Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem ini, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Dalam buku panduan Manajemen Berbasis Sekolah yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional pada Tahun 2006, Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesankeluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada (Depdiknas, 2006:10). Partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb), didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan

pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan sampai tahap evaluasi.

Pengertian lain dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah, yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, egaliter, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam jaminan mutu, profesional, efisien dan efektif, dalam rangka peningkatan mutu (Slamet, 2006:34). Dalam pelaksanaan MBS ini dituntut kemampuan profesional dan manajerial dari semua komponen warga sekolah di bidang pendidikan agar semua keputusan yang dibuat sekolah didasarkan atas pertimbangan mutu pendidikan. Khususnya kepala sekolah harus dapat memposisikan sebagai agen perubahan di sekolah.

Danim (2002:22), secara sederhana mendefinisikan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah. Pembuatan Keputusan merupakan inti dari keseluruhan proses dan substansi tugas manajemen sekolah. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa melalui MBS, pihak sekolah dan para stakeholder mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Keputusan yang diambil menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan setiap pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kewenangan ini, pihak sekolah dapat mengidentifikasi setiap masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pendidikan di sekolah sekaligus mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yusufhadi Miarso dengan mendefinisikan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai pelimpahan wewenang pada lapis sekolah untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber-sumber berdasarkan aturan akuntabilitas yang berkaitan dengan sumber tersebut (Miarso, 2004:728). Pengelola sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap pemakaian sumber daya yang ada. Pemberian wewenang kepada sekolah dibatasi pada pemanfaatan sumber daya dengan berdasarkan kepada pertanggungjawaban pengelola sekolah kepada setiap pemberi sumber daya tersebut. Dengan demikian, pihak sekolah tidak hanya bertanggungjawab kepada pimpinan yang lebih tinggi atau instansi pemerintahan tetapi

juga kepada para *stakeholder*.

Pendapat lain yang memberikan pengertian tentang MBS adalah pendapat Hadiyanto dan Subijanto (2005). Manajemen Berbasis Sekolah pada dasarnya merupakan pemberian kebebasan pada sekolah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen yang bertumpu pada situasi dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Sekolah diharapkan mengenali seluruh infrastruktur yang berada di sekolah, seperti guru, peserta didik, sarana prasarana, finansial, kurikulum, sistem informasi. Komponen-komponen tersebut merupakan unsur-unsur manajemen yang harus difungsikan secara optimal dalam arti perlu direncanakan, diorganisasi, digerakkan, dikendalikan, dan dikontrol (Hasbullah, 2006:56). Berdasarkan pengertian ini, MBS pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Sekolah yang Baik merupakan Kunci keberhasilan MBS

Manajemen Berbasis Sekolah ditujukan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektifitas, produktifitas, dan inovasi pendidikan (Depdiknas, 2006).

1. Peningkatan Partisipasi

Partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan sekolah (Slamet, 2006:34).

Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan

lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai "rasa memiliki" terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya, makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggungjawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu saja melibatkan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi.

Peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan sekolah mempunyai beberapa tujuan yang berguna untuk mensukseskan pelaksanaan MBS. Tujuan utama dari peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan MBS adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran, keterampilan), moral, finansial, dan material/barang;
- b. Memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- c. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah, baik sebagai *advisor, supporter, mediator, controller, resource linker, and education provider*;
- d. Menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* dan menjadikan aspirasi *stakeholders* sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2006:13).

2. Peningkatan Transparansi

Dalam ruang lingkup sekolah, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Keterbukaan/transparansi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui MBS. Keterbukaan/transparansi ini ditunjukkan dalam semua kegiatan yang dilakukan sekolah yang meliputi

pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya (Slamet, 2006:36).

Dengan kata lain, transparansi merupakan sebuah sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dalam dunia pendidikan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang secara langsung dapat diterima oleh stakeholders pendidikan. Kebebasan informasi ini harus dapat dipahami dan dimonitor sehingga penggunaannya benar-benar ditujukan untuk pencapaian tujuan. Dalam beberapa tulisan mengenai MBS, para pengamat pendidikan beranggapan bahwa masalah transparansi merupakan isu kunci keberhasilan MBS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Para pengamat pendidikan beranggapan bahwa selama ini, terutama sebelum era desentralisasi dan reformasi, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah sangat tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orangtua murid dan sebagian besar guru tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah, tidak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah, tidak dilibatkan di dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah dsb.

Pengelolaan yang tidak transparan berdampak negatif bagi pengembangan sekolah karena masyarakat dan orangtua murid akan meragukan apakah kalau mereka diminta untuk ikut memikirkan kekurangan pendanaan pendidikan, sumbangan yang mereka berikan akan benar benar dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan

Sama halnya dengan peningkatan partisipasi, peningkatan transparansi dalam pelaksanaan MBS juga memiliki tujuan. Pengembangan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Depdiknas dalam Panduan Manajemen Berbasis Sekolah, 2006:14).

3. Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan penyelenggaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Slamet, 2006:37). .

Dengan demikian, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orangtua siswa, dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat menilai apakah program MBS telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Jika berhasil, maka pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Sebaliknya jika program tidak berhasil, maka pemerintah perlu memberikan teguran sebagai hukuman atas kinerjanya yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Demikian pula, para orangtua siswa dan anggota masyarakat dapat memberikan penilaian apakah program ini dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara individual dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika berhasil, maka orangtua peserta didik perlu memberikan semangat dan dorongan untuk peningkatan program yang akan datang. Jika kurang berhasil, maka orangtua siswa dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan penjelasan sekolah atas kegagalan program MBS yang telah dilakukan. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main dalam melaksanakan program pada tahun-tahun yang akan datang.

Pada dasarnya, pengertian akuntabilitas yang diberikan oleh Slamet tidak hanya berupa pertanggungjawaban administratif keuangan saja, tetapi mencakup pula penggunaan/ pemanfaatan, dan hasil kinerjanya. Sebagai contoh kalau sekolah membeli buku pelajaran, tidak cukup hanya menunjukkan bukti kwitansi pembelian dan tersedianya buku yang dibeli. Akuntabilitas mencakup harga buku yang wajar, kualitas buku yang dibeli, penggunaan buku secara efektif dan hasil belajar siswa.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas adalah sebuah kesatuan yang saling berkaitan. Peningkatan partisipasi harus diikuti peningkatan transparansi dan kemudian akan diikuti peningkatan akuntabilitas yang

mempengaruhi tujuan.

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan dapat dipercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus bertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk bertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Depdiknas dalam Panduan Manajemen Berbasis Sekolah, 2006:14).

D. Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah

1. Faktor Keberhasilan pendidikan

Faktor keberhasilan pendidikan yang dapat dilihat secara umum adalah:

- a. Terserapnya tamatan di dunia kerja sesuai dengan kompetensi pada program keahliannya.
- b. Mampu mengembangkan diri dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Mampu bersaing dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun pada kenyataannya indikator keberhasilan tersebut tampaknya belum dapat sepenuhnya diwujudkan oleh semua penyelenggara pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sehingga memunculkan pernyataan yang memvonis bahwa mutu pendidikan nasional masih rendah. Pada penyelenggara pendidikan atau sekolah yang berhubungan langsung terhadap output (mutu) kelulusan tidak dapat dituding sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara mutlak. Meskipun telah diupayakan berbagai langkah oleh pemerintah dengan metode dan perumusan oleh pakar-pakar pendidikan namun belum menghasilkan hasil yang menggembirakan. Terlalu kompleks permasalahan yang timbul yang harus ditangani secara menyeluruh dan bertahap.

Sebagian pendapat menganggap bahwa yang menjadikan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata karena

adanya beberapa faktor yang antara lain:

- a. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan metode *Educational Production Function Approach* atau *Input Output Analysis Approach* tidak dilaksanakan secara konsekuen.
- b. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga penyelenggara pendidikan sangat tergantung birokrasi yang sangat panjang dan sering kebijakan yang seragam tersebut tidak sesuai dengan kenutuhan sekolah.
- c. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua/wali siswa masih sangat kurang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

2. Manajemen berbasis sekolah (MBS)

Howard M. Carlisle menyatakan : *Management is the process by which the element of a group are integrated, coordinated, and efficiently achieve objective* (Manajemen adalah proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien).

Dengan demikian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan dengan melibatkan secara menyeluruh elemen-elemen yang ada pada sekolah untuk mencapai tujuan (mutu pendidikan) yang diharapkan secara efisien. Atau dapat diartikan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi (kewenangan) yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif yaitu melibatkan semua warga sekolah berdasarkan kesepakatan bersama.

Dengan adanya otonomi (kewenangan) yang lebih besar diharapkan sekolah memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengelola sekolah dan memilih strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan serta dapat memilih pengembangan program yang lebih sesuai dengan potensi kebutuhan daerah dimana lulusannya akan diproyeksikan.

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

a. Tujuan Umum MBS :

Memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

b. Tujuan Khusus MBS

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada.
- 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang ingin dicapai.

4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang bernuansa otonomi, kemandirian dan demokratis.

- a. Otonomi, mempunyai makna bahwa kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah dalam mencapai tujuan sekolah (mutu pendidikan) menurut prakarsa berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dalam bingkai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Kemandirian, mempunyai makna bahwa dalam pengambilan keputusan tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan metoda dalam memecahkan persoalan yang ada, mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta peka dan dapat memanfaatkan peluang yang ada.
- c. Demokratif, mempunyai makna seluruh elemen-elemen sekolah dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah (mutu pendidikan) sehingga memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen warga sekolah.

5. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah tentunya tidak terlepas dari pendekatan Input, Proses, Output Pendidikan.

a. Input Pendidikan

- 1) Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas.
- 2) Tersedianya sumber daya yang kompetitif dan berdedikasi.
- 3) Memiliki harapan prestasi yang tinggi.
- 4) Komitmen pada pelanggan.

b. Proses Pendidikan

- 1) Efektifitas dalam proses belajar mengajar tinggi.
- 2) Kepemimpinan yang kuat.
- 3) Lingkungan sekolah yang nyaman.
- 4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
- 5) Tim kerja yang kompak dan dinamis.
- 6) Kemandirian, partisipatif dan keterbukaan (transparasi).
- 7) Evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
- 8) Responsif, antisipatif, komunikatif dan akuntabilitas.

c. Output yang diharapkan

Pada dasarnya output yang diharapkan merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan secara umum.

6. Langkah-langkah Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Untuk merumuskan implementasi manajemen berbasis sekolah harus ada tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada langkah awal perumusan MBS, hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah :

- 1) Mengidentifikasi sistem, budaya dan sumber daya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dirubah dengan memperkenalkan terlebih dahulu format yang baru dan tentunya lebih baik.
- 2) Membuat komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggung jawab, jika terjadi perubahan sistem, budaya dan sumber daya yang cukup mendasar.
- 3) Hadapilah penolakan terhadap perubahan dengan memberi pengertian akan pentingnya perubahan demi mencapai tujuan bersama.
- 4) Berkerja dengan semua unsur sekolah dalam menjelaskan atau memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana dan program-program penyelenggaraan MBS.
- 5) Menggaris bawahi prioritas sistem, budaya dan sumber daya yang belum ada dan sangat diperlukan.

b. Mengidentifikasi Tantangan Nyata Sekolah

Pada umumnya tantangan sekolah bersumber pada output (lulusan) sekolah yang meliputi kualitas, produktifitas, efektifitas dan

efisiensi. Maka sangat diperlukan identifikasi dari hasil analisis output untuk mengetahui tingkat kualitas, produktifitas, efektifitas dan efisiensi dari output yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan.

c. Merumuskan visi, misi, tujuan sasaran sekolah

Sasaran yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

- 1) Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.
- 2) Misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi tersebut.
- 3) Tujuan adalah apa yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan kapan tujuan itu mungkin dicapai.
- 4) Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan tujuan sekolah.

Rumusannya harus berupa peningkatan yang spesifik, terukur, jelas kriterianya dan disertai indikator yang rinci.

d. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran.

Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah unsur-unsur kegiatan beserta unsur-unsur pendukungnya yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Se jauh mana kesiapan fungsi-fungsi tersebut terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran.

e. Melakukan analisis potensi lingkungan (analisis SWOT)

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Prinsip analisis SWOT adalah :

- 1) Kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki ?
- 2) Bagaimana memanfaatkannya ?
- 3) Kelemahan-kelemahan apa yang kita miliki ?
- 4) Bagaimana meminimalkannya ?
- 5) Peluang-peluang apa yang ada ?
- 6) Bagaimana memanfaatkannya ?
- 7) Ancaman apa yang mungkin menghambat keberhasilan ?
- 8) Bagaimana mengatasinya ?

f. Memilih langkah-langkah alternatif pemecahan persoalan.

Dalam setiap kegiatan dimungkinkan adanya permasalahan yang timbul. Hendaklah kita tidak menghindari masalah akan tetapi harus kita hadapi dengan solusi pemecahan yang sudah kita rencanakan sebelumnya.

g. Menyusun Rencana Program Peningkatan Mutu.

Penyusunan program peningkatan mutu harus disertai langkah-langkah pemecahan persoalan yang mungkin terjadi. Fungsi yang terlibat beserta unsur-unsurnya membuat rencana program untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta bersama-sama merealisasikan rencana program tersebut. (rencana program biasanya tertuang dalam renstra sekolah).

h. Melaksanakan Rencana Program Peningkatan Mutu

Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu maka fungsi-dungsi terkait hendaknya memanfaatkan sumber daya secara maksimal, efektif dan efisien.

i. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.

j. Merumuskan Sasaran Peningkatan Mutu Baru.

Dari hasil evaluasi kita dapat memperoleh tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga dapat memperbaiki kinerja program yang akan datang. Disamping itu evaluasi juga sangat berguna sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk merumuskan sasaran (tujuan) peningkatan mutu untuk tahun yang akan datang.

PENUTUP

Dalam mengatasi masalah rendahnya peningkatan kepercayaan warga sekolah bahwa di dalam sekolah tidak ada praktik-praktik KKN, pihak sekolah memperluas akses informasi, laporan pertanggungjawaban yang baik, dan keikutsertaan orangtua siswa dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Sedangkan untuk mengatasi masalah peningkatan kepuasan warga sekolah, pihak sekolah biasanya mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan rencana kegiatan dan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat menerima keputusan dengan pertimbangan kemampuan pihak lain dan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya melembagakan MBS, diantaranya: Pertama, Perlu dilakukan penataran dan pelatihan atau kegiatan sosialisasi pihak-pihak terkait terutama dari Dinas Pendidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan sumberdaya dan sumber dana yang ada. Dengan adanya kegiatan tersebut maka warga sekolah dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana sekolah harus dikelola dan mengerti akan peranan dan fungsinya;

Kedua; Melakukan pembinaan bagi warga sekolah, khususnya orangtua siswa, tentang proses penyelenggaraan pendidikan guna mengubah paradigma orangtua yang selalu memperhatikan hasil akhir tanpa mengetahui bagaimana hasil itu dicapai.

Ketiga; Untuk meningkatkan kepercayaan warga sekolah bahwa di dalam sekolah tidak ada praktik-praktik KKN, setiap warga sekolah harus benar-benar menghindari pelaksanaan praktik-praktik KKN. Dan untuk mengatasi kecurigaan terjadinya praktik-praktik KKN seperti di masa lalu, masing-masing pihak harus melakukan penjelasan yang benar dan perencanaan yang logis, transparan, dan masuk akal, maka seluruh pihak dapat memahami maksud dan tujuan sekolah;

Keempat; Untuk meningkatkan pengetahuan warga sekolah, khususnya orangtua siswa, terhadap penyelenggaraan sekolah perlu dibuat sebuah sistem atau tata cara yang dapat memberikan dan menyediakan informasi kepada seluruh pihak. Misalnya saja, membuat papan informasi atau situs tentang seluruh informasi sekolah;

Kelima; Untuk meningkatkan kepuasan warga sekolah, memang diperlukan dana dan daya yang sesuai. Untuk mencapai hal tersebut memang tidak mudah. Namun perlu dilakukan penyesuaian antara pengeluaran yang diberikan dengan hasil yang dicapai sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan menghasilkan nilai positif bagi sekolah antara lain :

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas.
3. Pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal :
 - a. Menetapkan sasaran peningkatan mutu

- b. Menyusun rencana peningkatan mutu
 - c. Melaksanakan rencana peningkatan mutu
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu.
4. Penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya
 5. Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi
 6. Dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab.
 7. Menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif.

E. Implementasi Pengembangan Berbasis Madrasah

Implementasi pengembangan Madrasah akan terlaksana, apabila madrasah diberi kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didik. Pemerintah tinggal membuat standar yang diatur dan disepakati secara nasional sebagai indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu.

Untuk mewujudkan pengembangan mutu madrasah tersebut, Veithzal Rivai menyatakan bahwa, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan meliputi: proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi program madrasah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan peserta didik, hubungan madrasah dengan masyarakat, dan pengelolaan iklim madrasah. (Feithzal Rivai&Sylviyana Murni, 1997:165-168)

Sementara E. Mulyasa (2007: 39.), berpendapat, bahwa implementasi rencana pengembangan madrasah, adalah manajemen terhadap komponen-komponen pendidikan itu sendiri yang mencakup antara lain; 1) kurikulum dan program pengajaran, 2) tenaga kependidikan, 3) kesiswaan, 4) keuangan, 5) sarana/prasarana pendidikan, 6) pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat, 7) manajemen pelayanan khusus.

Di lain pihak, Ibrahim Bafadhal, (2006: 58) berpendapat bahwa: domain manajemen yang di desentralisasikan mencakup seluruh aspek pengembangan madrasah antara lain adalah; a) manajemen pembelajaran, b) manajemen kesiswaan, c) manajemen kepegawaian, d) manajemen sarana/prasarana, e) manajemen keuangan, f) manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat, g) manajemen layanan khusus. Adapun sebagian urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab madrasah dalam

kerangka pengembangan mutu madrasah sebagai berikut:

1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran

Sebelum adanya otonomi pendidikan, pemerintah memiliki otoritas yang sangat kuat dalam penentuan kurikulum, dan hampir tidak ada ruang bagi guru untuk melakukan inovasi-inovasi penyesuaian baik atas pertimbangan psikologi anak, ataupun tuntutan lokal dari daerah di mana madrasah berada, sehingga guru tidak memiliki keterlibatan emosional terhadap kurikulum yang diajarkannya, dan begitu juga madrasah yang hanya berada pada subordinasi untuk melaksanakan paket-paket pelajaran yang dirancang dari pusat.

Untuk itu, Wiles-Bondi amat relevan untuk diangkat sebagai salah satu *opsi* pemikiran dalam memberlakukan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam teorinya itu Bondi menyebutkan, bahwa pengembangan kurikulum adalah pekerjaan dan usaha bersama-sama. Pengembangan kurikulum harus melibatkan banyak orang, baik dalam madrasah maupun di luar madrasah. Guru yang akan melaksanakan kurikulum akan lebih besar menentukan sukses dan tidaknya perubahan kurikulum. Demikian juga siswa harus menjadi bagian dari proses kurikulum. Komite madrasah juga harus ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. (Dede Rosyada, 1997: 77)

Sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki tugas memfasilitasi berbagai kepentingan madrasah, mulai dari prasarana, sarana pembelajaran, perpustakaan, laboratorium dan pembinaan SDM, baik guru, kepala madrasah, maupun para pengelola yayasan, sehingga mampu mengembangkan lembaga pendidikan yang dikelolanya menjadi yang terbaik, dapat melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan memiliki kemampuan daya saing yang unggul di era globalisasi.

Di lain pihak, E. Mulyasa, (2007: 40), menyatakan bahwa Manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.

Dengan demikian perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan, dan jadwal pembelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan belajar peserta didik, serta peningkatan perbaikan pengajaran serta pengisian waktu jam kosong.

Selain itu Ibrahim Bafadhal, (2006) mengatakan, bahwa manajemen pembelajaran meliputi (1) perencanaan yakni analisis materi pembelajaran (AMP), penyusunan kalender pendidikan, penyusunan program tahunan (prota) dengan memperhatikan kalender pendidikan dan hasil analisis materi pelajaran, penyusunan program caturwulan atau semester berdasarkan program tahunan yang telah disusun, penyusunan program satuan pembelajaran (PSP), penyusunan rencana bimbingan dan penyuluhan. (2) pengorganisasian yakni pembagian tugas mengajar dan tugas lain, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan, penyusunan jadwal kegiatan pengayaan, penyusunan jadwal kegiatan ekstra kulikuler, dan penyusunan jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan. (3) Pengarahan yakni pengaturan pelaksanaan kegiatan pembukaan tahun ajaran baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. (4) pengawasan yakni supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Terkait dengan rencana pengembangan mutu madrasah, maka pelaksanaan kurikulum perlu keterlibatan masyarakat, agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol, sehingga madrasah dituntut kooperatif, dan juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, serta menilai kurikulum.

Kurikulum muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan masing-masing daerah lebih meningkatkan relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan local mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. (Rusman, 2009: 4-5)

Dalam hal ini madrasah boleh memperkaya apa yang diajarkannya. Artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari yang

harus, seharusnya, dan yang dapat diajarkan. Madrasah juga boleh memodifikasi kurikulum dan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

2. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di madrasah. Tujuannya adalah menata proses mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi; a) perencanaan penerimaan siswa baru, b) pembinaan siswa, c) kelulusan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan siswa baru, Rohiyat menawarkan beberapa konsep, antara lain yaitu; 1) penetapan daya tampung, 2) penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, 3) pembentukan panitia siswa baru. (Rohiyat, 2009,:25).

Statemen di atas harus dimaknai bahwa manajemen kesiswaan yang menyangkut layanan siswa; mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan, pemantapan untuk melanjutkan madrasah, untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni.

Terkait dengan pembinaan siswa, menyatakan bahwa ada lima hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa di antaranya; a) memberikan orientasi kepada siswa siswa baru, b) mencatat kehadiran siswa, c) mencatat prestasi siswa, d) membina disiplin siswa, dan e) membina siswa yang telah tamat belajar. (Rohiyat, 2009: 26).

Ibrahim Bafadhal, (2006:19) mempunyai konsep yang menarik tentang manajemen kesiswaan yang mencakup (1) perencanaan, yakni sensus anak usia pramadrasah, perencanaan daya tampungnya, perencanaan penerimaan siswa baru, (2) pengorganisasian, yakni pengelompokan siswa berdasarkan pola tertentu (3) pengarahan, yakni pembinaan disiplin belajar siswa, pencatatan kehadiran siswa, pengaturan perpindahan siswa, dan pengaturan kelulusan siswa, (4) pengawasan yakni pemantauan siswa, penilaian siswa.

Selain itu Sutisna (1985:45) memberikan pandangan bahwa tanggung jawab kepala madrasah dalam mengelola bidang kesiswaan di antaranya: (1) kehadiran murid di madrasah dan

masalah-masalah yang berhubungan dengan dengan itu; (2) penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan murid ke kelas dan program studi; (3) evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar; (4) program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa; (5) pengendalian disiplin murid; (6) program bimbingan dan penyuluhan; (7) program kesehatan dan pengamanan; dan (8) penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.

Ditinjau dari konteks pendidikan nasional, maka manajemen kesiswaan merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan yang sejalan dengan program kurikuler. Program kurikuler para siswa lebih ditekankan kepada kemampuan intelektual dan mengacu pada kemampuan berfikir ilmiah, sistimatis, dan terarah. Program kokurikuler diarahkan agar siswa memahami bahwa ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang termasuk dalam kurikuler. Para siswa diarahkan tentang pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak, kepribadian bangsa dan bernegara, ketrampilan dan kemandiriannya, olahraga dan kesehatan.

3. Manajemen Kepegawaian

Personalia dalam konteks lembaga pendidikan dibatasi dengan sebutan pegawai. personel di madrasah meliputi unsur guru (tenaga pengajar) dan unsur karyawan (tenaga administrasi) secara lebih terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel madrasah, yaitu; kepala madrasah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga madrasah. (Hasbulah, 1998: 111). Terkait dengan manajemen kepegawaian Ibrahim Bafadhal (2006:60) berpendapat, bahwa manajemen kepegawaian mencakup perencanaan yakni analisis pekerjaan di madrasah, penyusunan formasi guru dan pegawai, perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas guru dan pegawai. Pengarahan yakni pembinaan professional guru dan pegawai, pembinaan karir guru dan pegawai, pembinaan kesejahteraan guru dan pegawai, pengaturan pemindahan guru dan pegawai, dan pengaturan pemberhentian guru dan pegawai. Pengawasan meliputi pemantauan kinerja guru dan pegawai, dan penilaian kinerja guru dan pegawai.

Selanjutnya Rohiyat (2009:66) mengatakan bahwa manajemen kepegawaian (pengelolaan ketenagaan) terdiri dari

analisis kebutuhan, perencanaan dan rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (*reward and punishment*) hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah (guru, tenaga administrasi, laboran, dsb.) dapat dilakukan oleh madrasah, kecuali yang menyangkut dengan pengupahan/imbai jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.⁶¹ Bertolak dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka manajemen kepegawaian di madrasah yang menjadi tanggungjawab kepala madrasah menuntut kemampuan dalam manajemen personalia yang memadai, kerana telah menjadi tuntutan bahwa kepala madrasah harus ikut bertanggungjawab akan keberhasilan atau kegagalan anggota madrasah.

4. Manajemen Sarana/Prasarana

Pengelolaan fasilitas yang dilakukan oleh madrasah termasuk salah satu komponen dasar dalam manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah dan termasuk fungsi yang didesentralisasikan. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya sangat kompleks, namun demikian untuk telaah dapat ditelusuri dari berbagai segi, yaitu dari segi jenis, proses, dan manfaat. Menurut E. Mulyasa (2007:49) bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar (gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat dan media pengajaran) adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran (halaman, kebun, tanaman madrasah, jalan menuju madrasah) tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar maka komponen tersebut termasuk sarana pendidikan.

Veithzal Rizal, (1999:166) juga berpendapat, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Sementara itu Ibrahim Bafadhal (2006:61-62) berpendapat bahwa manajemen sarana/prasarana mencakup perencanaan yakni, analisis kebutuhan sarana/ prasarana madrasah, perencanaan dan

pengadaan sarana dan prasarana madrasah. Pengorganisasian meliputi pendistribusian sarana/prasarana madrasah, penataan sarana/prasarana madrasah. Pengarahan menyangkut pemanfaatan sarana/ prasarana madrasah secara efektif dan efisien, pemeliharaan sarana/prasarana madrasah, inventarisasi sarana/prasarana madrasah, dan penghapusan sarana dan prasarana madrasah. Pengawasan yakni pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana madrasah, penilaian kinerja sarana dan prasarana madrasah.

Di lain pihak Rohiyat (2003:66), mengatakan bahwa Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh madrasah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa madrasah yang lebih mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

Pendapat Rohiyat di atas, dapat dipahami bahwa Kegiatan sarana/prasarana meliputi; (a) perencanaan kebutuhan, (b) pengadaan, (c) penyimpanan, (d) penginventarisasian, (e) pemeliharaan, dan (f) penghapusan sarana/prasarana pendidikan. Indikasi dari permasalahan tersebut di atas jika dikaji secara mendalam, tentunya memerlukan upaya yang serius dari kepala madrasah untuk mengelola sarana dan prasaran dengan baik sehingga dapat menciptakan madrasah yang bersih, rapi, indah dan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun siswa untuk berada di madrasah.

5. Manajemen Keuangan (pembiayaan)

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana pimpinan madrasah menghimpun dana dan mendistribusikannya sehingga tujuan lembaga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Kaitan dengan manajemen keuangan, maka Komariah & Cepi Triatna, (2006:56) berpendapat, bahwa keuangan madrasah meliputi, penggalian sumber-sumber dana pendidikan, pemanfaatan dana dan pertanggungjawabannya manajemen dana pendidikan

diawali dengan pembuatan RAPBS yang disusun oleh madrasah dengan memanfaatkan dana yang tersedia secara rutin dari pemerintah. Kekurangan dana yang dialokasikan (pemerintah) dapat didiskusikan dengan dewan madrasah dan pihak orang tua untuk menutupi kekurangannya.

Selain itu Rusman berpandangan, bahwa Manajemen keuangan di madrasah terutama berkenaan dengan kiat madrasah dalam menggali dana, mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan madrasah, cara mengadminitrasikan dana madrasah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di madrasah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber-sumber lainnya. (Rusman, 2006:129)

Mencermati beberapa pandangan di atas memberikan gambaran bahwa Perencanaan keuangan dalam rangka peningkatan mutu berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Selanjutnya pengelolaan manajemen keuangan berbasis madrasah, sedikitnya ada dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja madrasah (RAPBM).

a. Penyusunan Anggaran Pembiayaan

Dalam rangka penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan berbasis madrasah atau disebut juga belanja madrasah (ABM), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi: *pertama* sumber pendapatan dan *kedua* pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan. Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan penyusunan anggaran diantaranya, *pertama* perencanaan anggaran; yakni kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan dalam bentuk operasional yang bisa diukur, menganalisis komponen-komponen yang mencapai tujuan, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; *kedua* mempersiapkan

anggaran; antara lain menyesuaikan kegiatan sesuai mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dengan lengkap, dan bahan-bahan yang telah tersedia; *ketiga* mengelola pelaksanaan anggaran; yakni mempersiapkan pembukuaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengevaluasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; *keempat* memilai pelaksanaan anggaran; antara lain menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomentasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. (Depag. 2004: 82)

b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)

Pengembangan rencana anggaran belanja madrasah (RABM) pada umumnya ada tiga langkah, yakni pada tingkat kelompok kerja; pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah; sosialisasi dan legalitas. (Degpag.: 83-84) *Pertama* pada tingkat kelompok kerja. Kelompok kerja yang dibentuk madrasah, yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memilki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasi, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil identifikasi tersebut kemudian menentukan alokasi mana yang sangat mendesak dan yang tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mendesak dan mengganggu kegiatan pendidikan, khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya dengan dana yang tersedia; *kedua* pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah. Kerjasam antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka pengembangan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM; *ketiga* sosialisasi dan legalitas, setelah RAPBM disepakati dengan komite madrasah selanjutnya di sosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas dan mengajukan usulan RSPBM, kepada kantor wilayah departemen agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

Hal yang senada juga dikatakan Ibrahim Bafadal (2006:62), menjelaskan bahwa manajemen keuangan mencakup perencanaan meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM). Pengorganisasian yakni pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBM. Pengarahan meliputi pelaksanaan anggaran madrasah, pembukuan keuangan madrasah, pertanggung jawaban keuangan madrasah. Pengawasan meliputi pemantauan keuangan madrasah, penilaian kinerja manajemen keuangan madrasah.

E. Mulyasa (2007:49) berpendapat bahwa komponen utama dalam manajemen keuangan meliputi; prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan.⁷² dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator (pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran), ordonator (pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan dan bendaharawan (pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban).

Hal semacam ini didasari pada kenyataan bahwa madrasahlah yang memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi penggunaan keuangan sudah seharusnya dilimpahkan kepada madrasah. Madrasah harus diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, dalam rangka eningkatan mutu pendidikan.

c. Manajemen Hubungan Madrasah dan Masyarakat

Hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan mitra untuk mengembangkan madrasah. Madrasah tidak maju tanpa bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu, kemitraan dengan masyarakat harus terus terjalin.

Terkait dengan hubungan madrasah dan masyarakat, Suyanto (2008:83) berpandangan bahwa kontribusi masyarakat di dalam pembangunan pendidikan, tidak hanya menyangkut soal pendanaan pendidikan atau dukungan sarana prasaran pendidikan, tetapi yang

tak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut terlibat di dalam formulasi kebijakan maupun pengembangan model-model pendidikan yang lebih mengakar pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan, baik dalam konteks lokal maupun nasional. (Suyanto, 2008:83)

Sementara Ibrahim bafadal (2006:62) berpandangan bahwa manajemen humas mencakup perencanaan yakni analisis kebutuhan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah, menyusun program hubungan madrasah dengan masyarakat. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas melakukan program hubungan madrasah dengan masyarakat. Pengarahan menyangkut menciptakan hubungan madrasah dengan orang tua siswa, mendorong orang tua menyediakan lingkungan belajar yang efektif, mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat, mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dan mengadakan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Di lain pihak Hamzah B. Uno, (2007:92) berpendapat bahwa fungsi komite madrasah adalah sebagai berikut; (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan, dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Menurut Mulyasa (2002) dalam Veityhzal Rivai, bahwa hubungan madrasah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk: (1) memajukan mutu pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, serta (3) mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan madrasah.

Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, maka humas pada dasarnya tidak hanya bersifat publisitas belaka, namun jauh dari itu bagaimana madrasah membangun jalinan kerja untuk kondisi sekarang dan yang akan datang merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Hubungan madrasah dan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara madrasah, personil madrasah, dan anggota masyarakat.

6. Manajemen Layanan Khusus

Pengelolaan iklim madrasah (fisik dan non-fisik) yang kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan madrasah yang aman dan tertip, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga madrasah, kesehatan madrasah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh-contoh iklim madrasah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim madrasah sudah merupakan kewenangan madrasah sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

Terkait dengan iklim madrasah, Ibrahim Bafadal (2006:63) berpandangan, bahwa dalam perencanaan iklim madrasah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) analisis kebutuhan program layanan khusus bagi warga madrasah, 2) penyusunan program layanan khusus bagi warga madrasah, 3) pengorganisasian meliputi pembagian tugas melaksanakan program layanan khusus bagi warga madrasah, 4) pengarahan mencakup pengaturan pelaksanaan antar jemput siswa, 5) pengaturan pelaksanaan asrama siswa, 6) pengaturan pelaksanaan makan siang siswa, 7) pengaturan pelaksanaan program koperasi madrasah, dan 8) pengaturan pelaksanaan program layanan khusus lainnya, 9) pengawasan yakni pemantauan program layanan khusus, 10) penilaian kinerja layanan khusus bagi warga madrasah.

Menurut E. Mulyasa, (2007:52-53) bahwa manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan madrasah. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya dikelas melalui belajar mandiri baik dimadrasah maupun dirumah. Selain itu manajemen layanan khusus lainnya kesehatan dan keamanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu, "...manusia yang memiliki kehatan jasmani dan rohani". Untuk kepentingan tersebut, madrasah mengembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan madrasah melalui usaha kesehatan madrasah (UKS), dan berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerja sama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat, disamping itu madrasah harus memberikan pelayanan keamanan kepada warga madrasah agar mereka dapat melaksanakan tugas dan belajar dengan tenang dan nyaman.

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di madrasah dalam rangka untuk mendukung proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dari fasilitas lain untuk mencapainya. Keberhasilan belajar tersebut di antaranya harus ditunjang dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan madrasah, bimbingan konseling, dan kantin madrasah.

RANGKUMAN

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dikembangkan dari hasil penelitian tentang sekolah efektif, dimana sejak tahun 1999, Depdiknas telah melakukan uji coba terhadap sekolah negeri dan swasta untuk menerapkan MBS dengan nama awal Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Konsepnya berupa desentralisasi manajemen sumber-sumber daya ke tingkat sekolah yang meliputi pengetahuan, teknologi, kewenangan, bahan, orang, waktu, dan keuangan. Keputusan yang dibuat di tingkat sekolah harus dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, sekolah masih harus bertanggung jawab kepada pemerintah atau pemerintah daerah, tidak hanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pendidikan. Dalam konsep MBS, desentralisasi pendidikan mencakup tiga hal, yaitu; manajemen berbasis lokasi, pendelegasian wewenang, dan inovasi kurikulum.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen yang bertumpu pada situasi dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Sekolah diharapkan mengenali seluruh infrastruktur yang berada di sekolah, seperti guru, peserta didik, sarana prasarana, finansial, kurikulum, sistem informasi. Komponen-komponen tersebut merupakan unsur-unsur manajemen yang harus difungsikan secara optimal dalam arti perlu direncanakan, diorganisasi, digerakkan, dikendalikan, dan dikontrol (Hasbullah, 2006:56). Berdasarkan pengertian ini, MBS pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah ditujukan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian wewenang dan tanggungjawab yang

lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektifitas, produktifitas, dan inovasi pendidikan.

DARTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. *Konsep dan Teori Manajemen Berbasis Sekolah*. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Dharma, Agus, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Belajar dari Pengalaman Orang Lain*. Artikel Pendidikan Network.
- E. Mulyasa, (2007) *Manajemen Berbasis Sekolah*, (konsep strategi dan implementasi). Bandung:Rosda Karya
- Hadiyanto dan Subijanto, 2005. *Pengembalian Kebebasan Guru Untuk Mengkreasi Iklim Kelas Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- Harry, Rakim, 2008. *Pengembangan Sistem Informasi Sekolah (SISKO)*. <http://pelangi.dit-plp.go.id>, on 14-02-2008 11:18
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan: Keijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indrastuti, Noor 2006. *PAKEM, Antara Menakutkan dan Menyenangkan: Studi Kasus SDN Sukarasa II, Kec. Malangbong, Kab. Garut*. www.mbs-sd.org. 04, Februari, 2009.
- Miarso, Yusufhadi, 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Kencana, Jakarta.
- Pidarta, Made, 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, (2009) *Manajemen Pendidikan, Aplikasi dan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta, Prenada Media Group,
- _____, (2006) *Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Imam Suprayogo, (2004) *Memelihara Sangkar Ilmu*, UIN Malang: Citra Mentari Group.
- Robins, Stephen P. dan Mery Coulter, 2004. *Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia, Indeks Kelompok Gramedia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995. *Metodologi Penelitian Survei*. Putaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Slamet PH, 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Income Generating Activity*. Buletin Pelangi Pendidikan Edisi V, Agustus 2006.
- Sudarwan Danim, (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi, Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2008, hlm: 28-29
- Suyanto, Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media, Jakarta.
- Sugen Listyo Prabowo, (2008) *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah*, Malang.
- Syarafuddin, (2005) *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Umaedi, 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu*. Digandakan oleh: Proyek Peningkatan Mutu SLTP Jakarta.
- Westra, Pariata, 2002. *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Redaksi, Warta MBS No. 8 Thn. 2006. *Peningkatan Mutu Pendidikan, Upaya Yang Harus Terus Menerus Kita Lakukan*. http://www.mbs-sd.org/warta_mbs.php?id=24
- Zuriah, Nurul, (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087 Tahun 2004 Tentang Standar Akreditasi Sekolah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

BAB 12.....	339
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.....	339
Tujuan Pembelajaran:	339
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:	339
▪ Hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	
▪ Definisi dan Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	
▪ Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah	
▪ Implementasi Pengembangan Berbasis Madrasah	
A. Hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	341
1. Latar Belakang	341
2. Konsep MBS	341
3. Landasan Yuridis.....	342
B. Definisi dan Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	343
1. Manajemen	343
2. Sekolah	343
3. Peran Manajemen Berbasis Sekolah	350
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Sekolah yang Baik merupakan Kunci keberhasilan MBS.....	352
1. Peningkatan Partisipasi	352
2. Peningkatan Transparansi.....	353
3. Peningkatan Akuntabilitas	354
D. Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah	356
1. Faktor Keberhasilan pendidikan.....	356
2. Manajemen berbasis sekolah (MBS).....	357
3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	357
4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	358
5. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	358
6. Langkah-langkah Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	359
E. Implementasi Pengembangan Berbasis Madrasah	363
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran	364
2. Manajemen kesiswaan.....	366
3. Manajemen kepegawaian	367
4. Manajemen Sarana/Prasarana.....	368
5. Manajemen Keuangan (pembiayaan)	369
6. Manajemen Layanan Khusus.....	374

BAB 12.....	339
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.....	339
A. Hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	341
1. Latar Belakang	341
2. Konsep MBS	341
3. Landasan Yuridis.....	342
B. Definisi dan Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	343
1. Manajemen	343
2. Sekolah	343
3. Peran Manajemen Berbasis Sekolah	350
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Sekolah yang Baik merupakan Kunci keberhasilan MBS.....	352
1. Peningkatan Partisipasi	352
2. Peningkatan Transparansi	353
3. Peningkatan Akuntabilitas	354
D. Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah	356
1. Faktor Keberhasilan pendidikan.....	356
2. Manajemen berbasis sekolah (MBS).....	357
3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	357
4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	358
5. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	358
6. Langkah-langkah Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	359
E. Implementasi Pengembangan Berbasis Madrasah	363
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran	364
2. Manajemen kesiswaan.....	366
3. Manajemen kepegawaian	367
4. Manajemen Sarana/Prasarana.....	368
5. Manajemen Keuangan (pembiayaan)	369
6. Manajemen Layanan Khusus.....	374

▪

BAB 13

PARADIGMA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM:

(ANTARA IDEALITA DAN REALITA)

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

- Paradigma Baru Manajemen Pendidikan
- Manajemen Pendidikan Islam
- Operasionalisasi Manajemen Pendidikan Islami pada Institusi
- Analisis Manajemen



masalah pendidikan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya di Indonesia masih terus dikaji, diteliti, dan sebagian hasil-hasilnya ada yang bisa dilaksanakan, dan banyak pula yang masih tersimpan dalam laci, tidak tersosialisasikan dan mengendap di ruang arsip yang sunyi dan sepi. Padahal biaya untuk kegiatan tersebut sangat besar, jika dibandingkan dengan kebutuhan impor beras menjelang awal tahun 2007 lalu, tetapi pemanfaatannya tidak maksimal, untuk tidak disebut mubadzir.

Reformasi pendidikan dewasa ini yang dilaksanakan, seperti laporan Tim Depdiknas(2001) menggunakan pendekatan, yaitu : (1) Berangsur-angsur sesuai kesiapan sumber daya dan perangkat aturan; (2) Partisipatori reformasi pendidikan dijalankan dengan meningkatkan peran/keterlibatan pihak terkait pendidikan; (3) Komprehensif reformasi dilaksanakan dengan meliputi semua aspek pendidikan mencakup aturan, organisasi, kurikulum, evaluasi, guru-guru, stakeholder, juga keuangan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. (Syarifudin, M., 2005:8).

Masalah pengolahan pendidikan Islam yang kini difokuskan adalah membuat terobosan dan mengujicobakan hasil berbagai kajian dan penelitian sambil menemukan alternative solusi dan paradigma dalam meningkatkan mutu kelembagaan dan SDM. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sudah lama melaksanakan manajemen secara alami dan konvensional, masih banyak aspek yang perlu dikaji untuk memenuhi apa yang disebut TQM (Total Quality Management.² Disi lain peningkatan mutu SDM sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam pun sudah banyak dilaksanakan baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang cukup besar menghabiskan biaya dengan harapan agar dapat mendongkrak kinerja yang lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Banyak pilihan sebenarnya terhadap manajemen pendidikan Islam saat ini yang telah dilaksanakan. Di lingkungan Madrasah saja, baik Manajemen Mutu Terpadu (MMT), Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), atau manajemen perubahan madrasah menuju kearah pemberdayaan personal dan potensi madrasah untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif antara satu madrasah dengan madrasah lain telah lama dilaksanakan. Tetapi hasilnya masih terus dipantau, dikaji, dan diteliti kembali.

A. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan

Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Dalam tulisan ini dibahas tentang paradigma baru dalam pendidikan, apa dan mengapa mutu, etos kerja dan profesionalisme guru serta tantangan dunia pendidikan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan otonomi daerah/desentralisasi pendidikan.

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, dikenal dengan paradigma baru manajemen pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu (Wirakartakusumah, 1998).

1. Mutu

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan.

Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk atau hasil dan jasa tersebut.

2. Otonomi

Pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi

paling tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/staf non akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Dalam penerapannya di sekolah, misalnya, paling tidak bahwa guru/pengajar semestinya diberikan hak-hak profesi yang mempunyai otoritas di kelas, dan tak sekedar sebagai bagian kepanjangan tangan birokrasi di atasnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (*values*) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini memerlukan transparansi (keterbukaan) dari semua pihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk penggunaan semua sumberdayanya.

4. Akreditasi

Akreditasi merupakan suatu pengendalian dari luar melalui proses evaluasi tentang pengembangan mutu lembaga pendidikan tersebut. Hasil akreditasi tersebut perlu diketahui oleh masyarakat yang menunjukkan posisi lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan independen yang berwenang. Di Indonesia pelaksanaan akreditasi pendidikan untuk Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan sekolah-sekolah menengah ke bawah oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

5. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat, serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi, kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Evaluasi bisa dilakukan secara internal atau eksternal. Suatu evaluasi akan lebih bermanfaat bila dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu evaluasi terpenting dalam pendidikan adalah evaluasi diri (*self evaluation*) yang dilakukan bertahap dan terus menerus atas seluruh komponen-komponen pendidikan.

B. Manajemen Pendidikan Islam

1. Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen merupakan terjemahan secara langsung dari kata manajemen yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan.(Ramayulis, 2004: 235). Manajemen berakar dari kata kerja *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, atau mengelola. (John M Echols dan Hasan Shadily, 1993: 362). Pengertian yang sama dengan pengertian dan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang dapat kita temukan dalam al-Qur'an: Q.S. 32:5 dan Q.S 10:31.

Pertama, QS As-Sajadah 5; sebagaimana firman-Nya;

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu" [1190]. (Q.S.As-Sajadah [32]:05). [1190] maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. ayat Ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagunganNya.

Kedua, Q.S Yunus 31, sebagaimana Firman-Nya;

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup [689] dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?" (Q.S Yunus [10]: 31). [689] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah.

Pada prinsipnya kedua ayat di atas, terdapat kata *Yudabbiru al-amra* yang berarti mengatur urusan. Ahmad al-Syawi menafsirkan bahwa Allah adalah pengatur alam (manager) karena manusia yang diciptakan-Nya telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

James H Donnelu (1984: 99), mendefinisikan: Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh suatu orang/lebih untuk mengatur kegiatan-kegiatan melalui orang lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Kadarman dan Yusuf, (1996: 10), mendefinisikan manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang bersifat sosial ekonomi-teknik. Sementara Sondang P.Siagian menyatakan bahwa manajemen adalah kemampuan/keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (Kadarman dan Yusuf, 1996: 10).

George R.Terry (1973) dalam bukunya *The Principles of Management* mengemukakan bahwa manajemen merupakan “sebuah kegiatan”, pelaksanaannya disebut *managing* dan orang yang melakukannya disebut *manager*. Individu yang menjadi manajer bertugas menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat managerial yang penting diantaranya ialah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatunya seorang diri saja. (Syarifudin, M., 2005: 6). Selanjutnya Syarifudin (2005: menegaskan bahwa; “Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dengan fungsi dasar dan proses manajemennya adalah *planning, organizing, actuating* dan *controlling*”. Semuanya dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika menilik arti manajemen sebagaimana diuraikan diatas, maka manajemen dapat kita lihat sebagai sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui orang lain dan bekerjasama dengannya. Proses itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan, Pendidikan Islam merupakan proses trans-internalisasi nilai-nilai islman kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manajemen dalam pendidikan

Islam dapat di definisikan sebagai proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan/lainnya) baik perangkat keras maupun lunak, pemanfaatan tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.

Sistem manajemen dalam pendidikan Islam merupakan proses yang koordinatif, sistematis, dan integratif. Proses itu dimulai dari perencanaan. Pengorganisasian, penggerakan, sampai pada pengawasan yang semuanya selalu didasari oleh nilai-nilai Islam agar sistem tersebut dapat sekaligus mempunyai nilai-nilai yang material dan spiritual.

2. Prinsip dan Aspek Manajemen Pendidikan Islami

Prinsip manajemen pendidikan Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat ditemukan dalam sebuah hadits, dimana hadits tersebut menekankan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan inti dalam sebuah manajemen organisasi. Karena itu secara *implicit* hadits Rasulullah SAW., "Sesungguhnya Abdullah Ibn Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda; Setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap dari kalian akan diminati pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Seorang perempuan (istri) adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pelayan (pembantu) adalah pemimpin dalam harta milik tuannya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang barang-barang diurusinya" (H.R Bukhari)

Makna hadits tersebut juga berkaitan dengan masalah manajemen pendidikan. Sebab, lembaga pendidikan Islam tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kepemimpinan yang mencerminkan manager.

Selanjutnya apa saja prinsip-prinsip manajemen Islami itu? Dalam kitab *Fi Ijtamiyyab al-Tarbiyah*, karya Munir al-Husry

Sarhan (1978:69-71), disebutkan bahwa prinsip manajemen Islami itu diantaranya ; (1) Ikhlas; (2) Kejujuran; (3) Amanah; (4) Adil; (5) Tanggung Jawab; (6) Dinamis; (7) Praktis; dan (8) Fleksibel. Sementara Sanusi Uwes (2003: 182-193) menambahkan ada beberapa karakter kepemimpinan Islam yang mengantarkan kepada kesuksesan kepemimpinan Rasulullah SAW., yakni (1) kejujuran, (2) keadilan, (3) kelembutan hati, (4) kecerdasan, (5) keberanian, dan (6) sabar.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, system manajemen pendidikan Islam ini akan mampu memberikan konstribusinya pada peningkatan kinerja kelembagaan maupun manajemen yang maslahat dunia-akherat. Arahan yang positif tersebut dimaksudkan agar system manajemen Islami dewasa ini setahap demi setahap dapat menggeser dari paradigma manajemen yang bersifat material (berat sebelah) berubah menjadi system manajemen Islami yang benar-benar integrative-holistik (Sanusi Uwes, 2003: 182-193).

Dalam aplikasinya, peranan manajemen sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen, dimana fungsi-fungsi inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari manajemen itu sendiri sebagai proses yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Fungsi-fungsi ini pula nantinya yang akan menentukan berhasil dan tidaknya kinerja manajemen. Berikut uraian fungsi-fungsi manajemen, yaitu: (1) Perencanaan (Planning); (2) Pengorganisasian (Organizing); (3) Pengerakan (actuating) dan (4) Pengawasan (controlling), (Walter m. McMahon: 2004: xv).

Secara garis besar aspek manajemen pendidikan Islam adalah manajemen yang mengacu pada aspek ; (1) institusi (lembaga), (2) structural (3) personalia (4) informasi, (5) teknik, dan (6) lingkungan/masyarakatnya (Made Pidarta, 1983: 23).

3. Manajemen Model Pembelajaran Efektif dan Unggulan

Model pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islami yang selama ini berjalan dan menghasilkan SDM, lulusannya belum menunjukkan tingkat produktivitas yang memenuhi selera tuntutan pasar. Kini mulai banyak diterapkan berbagai manajemen pembelajaran yang berorientasi efektif dan unggulan setelah diketahui perlunya usaha perbaikan dan penyempurnaan manajemen kelembagaan dan peningkatan mutu pengelola suatu pendidikan.

Pembelajaran efektif dan unggulan merupakan satu konsep yang memiliki cakupan yang luas, dan digunakan dalam banyak hal, sebagaimana dikemukakan para pakar manajemen pendidikan, Smith SM., bahwa pembelajaran merupakan suatu hasil, fungsi, dan proses. Bila pembelajaran itu digunakan sebagai suatu proses. Maka suatu percobaan dilakukan untuk menerapkan apa yang terjadi bila suatu pengalaman belajar berlangsung. Untuk itu tidaklah salah bila pembelajaran ini diartikan sebagai proses interaksi edukatif antara dua pihak (peserta didik dan pendidik) guna perubahan, pembentukan dan pengendalian perilaku agar mencapai lulusan yang *marketable*.

Karena itu pembelajaran diartikan sebagai suatu proses pendidikan yang dapat memberikan hasil jika orang-orang berinteraksi dengan informasi (materi, kegiatan, pengalaman). Untuk itu makna pembelajaran adalah: (1) Upaya mengorganisasikan lingkungan belajar yang kondusif; (2) mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik; dan (3) Suatu proses membantu menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari (Umedi, 1999: 5). 16 Maka ini menjelaskan bahwa seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, jika ia dapat menyumbangkan dirinya bagi kehidupan yang baik melalui proses, hasil dan fungsi pembelajaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif, terutama unsur dinamisnya yang ada pada diri guru agar dapat memotivasi membelajarkan siswa serta kondisi guru siap memberdayakan (*empowering*) siswa. Model pembelajaran ini intinya merupakan pola yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh tim *ad hoc* dan dijadikan pedoman pelaksanaan pengajaran serta evaluasi belajar di kelas yang merupakan pengejawantahan dari penyusunan kurikulum, pengaturan materi serta pemberian petunjuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengajaran.

Dalam memilih model pembelajaran yang efektif dan unggulan, perlu dipertimbangkan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Perlu disadari pula bahwa banyak model pembelajaran dan banyak pula gaya belajar dengan tujuan berbeda-beda. Dalam prosesnya hendaknya ada inovasi model pembelajaran yang utama dengan dukungan model lain, agar siswa

menjadi aktif dan kreatif, serta produktif dalam belajar dengan melibatkan siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan memilih model manajemen yang tepat sasaran. Model manajemen yang ditawarkan para ahli ini diantaranya:

a. Model Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective)

Model manajemen ini merupakan aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan menjadi satu kesatuan berdasarkan sasaran/tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mulai dari tujuan nasional hingga beberapa sasaran sesuai dengan sifat dan jenjang lembaga pendidikan yang bersangkutan. Menurut Giegold (1988:2), Manajemen berdasarkan sasaran ini, prioritas utamanya merumuskan tujuan lembaga pendidikan, kemudian dijabarkan menjadi sub fungsi, kemudian menjadi unit kerja dan setiap unit kerja dijabarkan menjadi tugas-tugas individu. Dari contoh tersebut nampak model ini lebih mengutamakan rumusan tujuan secara teoritis yang kurang dapat dipraktikkan karena membatasi kreativitas guru disekolah.

b. Manajemen Berdasarkan Struktur (Manajement by Structures)

Menurut Dale, (Ricard A. Hahson, 1983: 3), bahwa model manajemen ini lebih bersifat mekanistik dalam mengatur organisasi. Model manajemen ini mengatur pola organisasi dan memperjelas apa yang harus dikerjakan oleh setiap personalia organisasi dan mengatur hubungan antara pekerja kemudian digabung di bawah satu ketua. Jhonson menyatakan: Manajemen berdasarkan struktur ini lebih menekankan pada pengaturan hubungan beberapa pekerjaan yang sama menjadi unit-unit kerja yang secara hierarkis dalam organisasi pendidikan, tetapi tidak menyentuh proses pendidikan. Contoh model manajemen ini lebih bersifat sentralistik, mekanistik dan tidak komprehensif.

c. Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management)

MBS merupakan kependekan dari Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu model pendekatan baru yang kemudian berkembang dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah atau dalam nuansa yang lebih bersifat pengembangan (developepment) disebut "*School Based Quakity Improvement*". Model manajemen ini, merupakan alternatif dalam pengolahan pendidikan yang lebih

menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsepnya diperkenalkan melalui teori "*Effective School*" oleh Edmon pada tahun 1979, sasrannya lebih memfokuskan pada perbaikan proses pendidikan. Keunggulannya antara lain: (1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (2) sekolah mempunyai misi dan target mutu yang ingin dicapai, (3) sekolah mempunyai kepemimpinan yang kuat, (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan IPTEK, (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administrasi dan pemanfaatan hasil untuk penyempurnaan/perbaikan mutu dan (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. (Umaedi, 1999: 5)19

Djaman Satotori (2001: 1), menegaskan bahwa: pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan secara menyeluruh mencakup kebijakan, strategi perencanaan, pengembangan isi kurikulum hasil inisiatif sendiri berdasarkan ketentuan pemerintah dan otoritas pendidikan. Proses pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap tingkah laku seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk orang tua dan masyarakat. 20

Umaedi, (1999:6), menegaskan, paling tidak ada empat hal yang terkait dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu: (1) Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (2) kualitas mutu harus ditentukan oleh penguasa jasa sekolah, (3) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi dan misi sekolah bukan dengan pemaksaan aturan, dan (4) sekolah harus menghasilkan sekolah yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter dan memiliki kematangan semisional.21

Berbagai tuntutan seperti di atas, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan alternative paling tepat karena telah diuji oleh Edwar E. Lawler dan kawan-kawan. Hasilnya, ternyata telah membawa dampak positif dalam peningkatan proses belajar. Dalam berbagai informasi manajemen berbasis sekolah telah dicoba diberberapa Negara, antara lain Selandia Baru dan Chili.

d. Manajemen Berbasis Sekolah Madrasah (Madrasah Based Management)

MBM (Manajemen Berbasis Madrasah) merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. MBM merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar madrasah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dalam rangka peningkatan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. (E Mulyasa, 2003: 19-38) 22. Penekanan aspek-aspek tersebut sifatnya situasional dan kondisional sesuai dengan masalah yang dihadapi dan politik yang dianut pemerintah.

Nanang Fatah, (2000: 19), menjelaskan bahwa: MBM merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi madrasah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dengan penerapan MBM, madrasah memiliki *“ful authority and responsibility”* dalam menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan.

Untuk mewujudkannya, madrasah dituntut untuk menetapkan berbagai program dan kegiatan, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi madrasah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. Semua kebijakan dan program madrasah ditetapkan oleh komite madrasah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD), pejabat pendidikan daerah, kepala madrasah, kepala pendidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Dalam rangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis madrasah, yang memberikan kewenangan penuh kepada madrasah dan guru dalam mengatur

pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan madrasah.

Dengan demikian, manajemen berbasis madrasah ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-guru serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu, dalam perakteknya perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemennya agar menjadi suatu proses yang berkesinambungan.

C. Operasionalisasi Manajemen Pendidikan Islami pada Institusi

Dalam operasionalisasi manajemen pendidikan Islami, menurut M. Syarifudin, (2005:45-58), paling tidak ditemukan lima pendekatan yang strategis tentang manajemen pengembangan madrasah, salah satunya yaitu: (1) pendekatan berdasarkan struktur; (2) pendekatan berdasarkan proses; (3) pendekatan berdasarkan fungsi; (4) Pendekatan berdasarkan pembagian kerja, dan (5) Pendekatan berdasarkan gaya kepemimpinan (manajerial). 25 Dari kelima pendekatan itu, baik MBM, MBS, MBO, MIS maupun manajemen *convensional* telah banyak diberlakukan, namun hasilnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

1. Pendekatan Berdasarkan Struktur

Pendekatan ini pada hakekatnya menyoroti organisasi-organisasi yang mewadahi suatu system, termasuk di dalamnya organisasi pendidikan. Dengan menganut prinsip dasar rasionalis dan pentingnya orientasi efisiensi dalam menjalankan roda organisasi. Dengan kata lain system dalam suatu organisasi seyoyanya memperhatikan efektivitas, produktifitas, dan rasionalitas.

2. Pendekatan Berdasarkan Proses

Dalam pelaksanaannya, manajemen berdasarkan proses pada umumnya mempunyai sepuluh langkah yaitu :

- Penentuan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
- Perumusan dan penentuan strategi yang hendak ditempuh
- Penjabaran strategi menjadi rencana kerja
- Penjabaran rencana kerja menjadi program kerja
- Kegiatan pengorganisasian
- Kegiatan penggerakan tenaga pelaksanaan

- Pelaksanaan kegiatan operasional
- Pelaksanaan pengawasan
- Kegiatan penelitian
- Penciptaan dan penggunaan system umpan balik

3. Pendekatan berdasarkan fungsi:

Telah disepakati oleh para ahli bahwa mengukur efisiensi dan efektivitas kerja sulit alat ukurnya, untuk itu ukuran utama dalam pendekatan fungsi ini adalah “kepuasan” (clientele groups) dengan tingginya mutu sebagai kriteria utamanya. Dalam manajemen sistem pendidikan fungsi “pemberian jasa” itu tetap didasarkan atas fungsi pengaturan. Artinya pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga terlibat dalam dua fungsi sekaligus, yaitu pelayanan dan pengaturan. Jika pemerintah karena kewenangannya terlibat dalam fungsi penyelenggaraan, salah satu dasar pertimbangannya adalah volume pekerjaan. Sebab pada dasarnya fungsi utama pemerintah adalah pengatur, sedangkan masyarakat dan keluarga membantu tanggung jawab pemerintah terhadap pengamalan fungsi tadi.

4. Pendekatan Berdasarkan Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam manajemen dapat dilakukan berdasarkan paling sedikit ada tiga kriteria, yaitu pembagian kerja berdasarkan fungsi, pembagian kerja berdasarkan spesialisasi dan pembagian kerja berdasarkan wilayah kerja.

5. Pendekatan Berdasarkan Gaya Kepemimpinan (Manajerial)

Penggabungan antara pemahaman teoritis dan empiris, telah memberikan keyakinan yang semakin mendalam dikalangan para ahli dan praktisi tentang betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam seluruh proses manajemen dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai perannya, jika bobot kepemimpinan sedemikian besar dalam upaya pencapaian tujuan, maka mutu kepemimpinan mutlak perlu ditingkatkan, terutama diarahkan pada peningkatan kemampuan para pejabatnya.

Dengan demikian, dari kelima pendekatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pendidikan islam dan implementasinya bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam kiranya sudah dapat perlu dievaluasi hasilnya, baik menyangkut

kelembagaan, sumber daya manusianya, maupun prospeknya di masa yang akan datang.

D. Analisis Manajemen

Ilmu manajemen telah berkembang sebagai fenomena kehidupan modern menyertai kehadiran berbagai organisasi di masyarakat, menurut Syarifudin, (2005: 185), di dalamnya mengandung maksud untuk pengelolaan kegiatan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masa depan hidupnya secara bersama. Perilaku bekerjasama sebagai suatu yang bersifat fitrah didasarkan pada prinsip tauhid, khalifah, dan amanah.

Sopyan Syafri Harahap (Syarifudin,2005:100), mengemukakan: bahwa manajemen Islam diartikan sebagai suatu ilmu manajemen yang berisi struktur teori yang menyeluruh dan konsisten serta dapat dipertahankan dari segi empirisnya yang didasari pada jiwa dan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, manajemen pendidikan yang islami merupakan penerapan berbagai prinsip Islami dalam mengelola organisasi (madrasah, sekolah, pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam) untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia.

1. Perencanaan Pendidikan Islami

Dalam rangka melakukan pekerjaan, seorang muslim hendaklah membuat perencanaan. Pada hakikatnya pikiran agama dibangun atas dasar perencanaan masa depan. Dalam hal ini Taufik Rahman, (1999: 11), menjelaskan bahwa: Dengan membuat perencanaan pendidikan yang bermanfaat bagi hidupnya dan membuat metode pendidikan dan pengajaran yang tepat, dapat mengantarkan dirinya kepada tujuan, yaitu Allah dan mendapat balasan dari pada-Nya.

Merencanakan suatu kegiatan pendidikan merupakan tindakan awal sebagai pengakuan bahwa suatu pekerjaan tidak semata-mata ditentukan sendiri keberhasilannya, namun banyak faktor lain yang harus dipersiapkan untuk mendukungnya. Dalam al-Qur'an.

Al-Faruqi, menjelaskan bahwa masa depan umat Islam sebagai khalifah bertanggung jawab akan kemammuran alam ada dua, yaitu: (1) meraih masa depan yang dekat yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan sekaligus, dan (2) Meraih kebahagiaan hidup yang jauh di

akhirat. (Q.S . Al-Baqarah, 2: 201). Di sini jelas dalam perencanaan itu harus berdimensi ganda yaitu hasil di dunia dan hasil di akhirat.

Dalam proses perencanaan ada keputusan bersama, maka perlu dipersiapkan segala sumber daya manusia dan material untuk melaksanakan rencana bersama di dalam segala bidang kehidupan. (Q.S, Yusuf, 12:47-49).

Dalam al-Qur'an diungkapkan kisah nabi Yusuf yang membuat rencana makro berjangka panjang tentang persiapan atau perencanaan pangan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Yusuf ayat 47-49:

﴿ تَأْكُلُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنُوبًا فِي فَدْرُوهُ حَصَدْتُمْ فَمَا ذَابًا سَبِينِ سَبْعَ تَرَعُونَ قَالَ ﴿٤٧﴾ مِنْ يَأْتِي نُمْ تُحْصِنُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا هُنَّ قَدَمْتُمْ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادٌ سَبْعَ ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي نُمْ ﴿٤٨﴾ يَعْصِرُونَ وَفِيهِ النَّاسُ يُعَاثُ فِيهِ عَامٌ ذَلِكَ بَعْدَ

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (Q.S, Yusuf, 12:47-49). Kisah ini ini menjadi pelajaran bagi setiap muslim, betapa pentingnya merencanakan tindakan untuk mengantisipasi keperluan masa depan.

Dalam konsep perencanaan, sesungguhnya terkandung di dalamnya sifat tawakkal sebagai refleksi dari kekuatan dan keyakinan tauhid kepada Allah. Menurut Qardhawi melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, kemudian harus diiringi tawakkal sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan yang baik menuju keridhaan Allah.

Dalam realitanya, lembaga-lembaga pendidikan yang notabene berlabel Islam masih tampak kurang memiliki perencanaan yang matang, sebagaimana perencanaan madrasah memanfaatkan manajemen berbasis keislaman, kemderman dan Keindonesiaan, baik MBM, MBS, atau MBO.

Di sini perlu kajian dan penelitian pendidikan yang mengarah pada peningkatan mutu perencanaan MBM yang signifikan dengan tujuan pemberdayaan lembaga dan SDM yang berkualitas dan unggulan, perencanaan yang operasional tersebut nantinya bisa diaplikasikan pada tataran pelaksanaan yang terukur.

Secara empirik, bisa diilustrasikan perencanaan yang baik dalam pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan berlabel islam, adalah perencanaan pembelajaran yang dibuat langsung oleh guru untuk pembelajarannya, mereka membuat keputusan berkaitan dengan apa isi pelajaran atau cakupannya, berapa lama waktu yang digunakan dalam pengajaran, penilaian apa yang akan digunakan dan bagaimana pengajaran tersebut akan dinilai. (Mukhtar, dkk., 2003:52).

Dalam perspektif ini, sebagai manajer guru membuat rencana pengajaran, mengarahkan anak untuk belajar, memimpin anak-anak, memotivasi dan memanfaatkan sumberdaya dalam pembelajaran, serta mengawasi proses dan menilai hasil pembelajaran. Secara operasional bisa dicontohkan dengan pembuatan perencanaan operasional mengajar bagi setiap guru, seperti :

- Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP/silabi) menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP).
- Menghitung hari kerja efektif untuk setiap mata pelajaran, memperhitungkan hari libur, hari untuk ulangan dan hari kerja yang tidak efektif
- Menyusun program tahunan (prota)
- Menyusun program semester/catur wulan
- Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). Dalam kegiatan ini guru menyusun rencana secara rinci mencakup pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan tes formatif yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan pengajaran.
- Rencana pengajaran. Dalam kegiatan ini guru membuat rincian pelajaran. Harus ada catatan kemajuan siswa setelah mengikuti pelajaran tertentu, untuk menjadi dasar pelaksanaan ERP (evaluasi rancangan program) berikutnya. (Syarufudin, 2005:240-244)

Kegiatan perencanaan kurikulum ini sejak dari AMP sampai RP sangat penting bagi kegiatan selanjutnya, maka peran kepala sekolah/madrasah dan pesantren sangat penting dalam membimbing, mengarahkan dan membantu para guru yang mengalami kesulitan

dalam menyelesaikan kegiatan ini. Untuk memudahkan kelangsungan kegiatan ini, dapat dilakukan kegiatan bersama dalam mata pelajaran sejenis melalui musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

2. Pengorganisasian Pendidikan Islam

Pengorganisasian pendidikan Islam merupakan segala sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi hingga terwujud kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan Islami melalui pelaksanaan rencana.

Dalam kehidupan organisasi pendidikan Islam yang di dalamnya berisikan kumpulan sejumlah orang, adanya pembagian bidang pekerjaan. Pembagian bidang pekerjaan menciptakan adanya pemimpin dan anggota di mana dengan otoritas dan keteladanannya mempengaruhi para anggota untuk bekerja secara sukarela dan bersama-sama mencapai tujuan

Menurut Rahman, amanat diberikan kepada orang-orang yang berhak yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi intelektual dan manajerial dalam sebuah organisasi. Sebab profesionalisme sangat dihargai dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84 yang artinya: "Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya". (Q.S. Al-Isra, 17 : 84)

Adapun dalam konteks pengorganisasian, dapat kita contohkan salah satu aspek yang pokok, yakni manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu proses mengarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolak ukur pencapaian tujuan pengajaran oleh pelajar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, rangkaian proses manajemen kurikulum di lembaga pendidikan, mencakup: bidang perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi/pengawasan. Aktivitas manajemen kurikulum/pengajaran ini adalah kolaborasi kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bersama-sama guru melakukan kegiatan manajerial dimaksud agar perencanaan berlangsung dan mencapai hasil yang baik.

Sebagai contoh, Pada tahap Pengorganisasian dan koordinasi ini kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan

jadwal pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembagian tugas mengajar dan tugas lain secara merata sesuai keahlian dan minat guru. Hal itu dapat meningkatkan motivasi kerja, puas, aman dan mendukung kenaikan pangkat.
- b. Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari dalam satu minggu, sehingga ada waktu pertemuan untuk MGMP atau istirahat.
- c. Penyusunan jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar. (Syarifuddin, 2005: 242-243)

Kegiatan yang perlu untuk mendukung kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang mengarah pembentuk keimanan dan ketaqwaan, kepribadian, kepemimpinan dan keterampilan tertentu. Kegiatan penyusunan ini dimaksudkan untuk penyegaran informasi pengetahuan guru tentang IPTEK dan metode, atau model pembelajaran baru dalam pemanfaatan hari libur sekolah/madrasah dan pesantren.

3. Tahap Pengendalian/Pengawasan

Proses pengawasan merupakan cara terakhir yang ditempuh dalam kegiatan manajerial, setelah perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Pengawasan atau controlling merupakan proses pengamatan atau memonitor kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan.

Pengawasan pendidikan Islam menjadi sangat strategis sekali apabila setiap orang dalam organisasi harus menyadari pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Namun perlu digaris bawahi bahwa nilai-nilai Islam mengajarkan secara mendasar mengenai pengawasan tertinggi atas perbuatan dan usaha manusia baik secara individu maupun secara organisatoris adalah Allah SWT. Pengawasan dari Allah SWT., adalah terletak pada sifat Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah telah menegaskannya dalam al-Qur'an Q.S.An-Nisa' 135,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.An-Nisa’ 4: 135). [361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

4. Kepemimpinan Pendidikan Islam

Kerangka dasar memahami konsep dasar an berbagai teori kepemimpinan. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut “*leadership*”.(Taufiq Rahman, 1999: 21). Dalam konteks khalifah, al-Maragi menggantikan sebagai pelaksana wewenang Allah dalam meralisasikan berbagai perintah-Nya dalam kehidupan sesama manusia. Adapun Imam, adalah orang yang memimpin (berarti menjalankan kepemimpinan -Nya) bagi suatu kaum atau umat yang berada di jalan yang lurus. Sebagaimana Firman Allah SWT., dalam Q.S. Al-Qhashas 28:5, artinya: dan kami hendaak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemmpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Berkaitan dengan wali, diartikan sebagai pelindung, karena para pemimpin, idealnya berfungsi sebagai pengayom, pembimbing anggota/umatnya dari kesesatan dan kemelaratan. Sebagaiman Allah SWT berfirman Q.S.42: 46, yang artinya: Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya

sesuatu jalanpun (untuk mendapatkan petunjuk) (Q.S Asy-Syura 42:46) .

Berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin yang teruji, dapat dicontoh dari sifat Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran:159,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali Imran, 3:159) 39 [246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dalam rangka menggerakkan orang lain untuk mau bekerja atau mengikuti secara sukarela, maka para pemimpin atau manajer harus memiliki satu hal yang paling penting yaitu adanya keteladanan atau charisma. Bersikap lemah lembut. Bersifat pemaaf, rendah hati dan suka bermusyawarah dalam segala urusan untuk mengambil putusan adalah rangkaian sifat pemimpin dalam hubungan dengan para bawahan dan menggerakkan mereka sehingga mau melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, keteladanan pemimpin atau manajer dalam hubungan timbale baliknya dengan para bawahan merupakan salah satu penggerak mereka untuk berjalan dalam setiap setiap pekerjaan.

Berkaitan dengan hakikat dan cirri-ciri manajemen Islami. Effendy (1999:221) menjelaskan ada enam cirri sebagai berikut:

- a. Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur (akhlakul Karimah)
- b. Manajemen terbuka. Artinya pengolaan yang sehat, dan terbuka (open minded) atau tranparansi. Karena Jabatan sebagai pimpinan atau manajer adalah amanah yang harus dipelihara dengan baik dan penuh keadilan

- c. Manajemen yang demokratis. Konsekuensi dari sikap terbuka dalam manajemen. Maka pengambilan keputusan atas musyawarah untuk kebaikan organisasi. Dengan demikian tinggi keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Maka mereka semakin berdaya dalam menjalankan pekerjaannya dan mendorong

Munculnya kepuasan kerja dengan dibarengi imbalan yang sesuai dengan kebutuhan hidup, kemampuan organisasi dan ketentuan yang berlaku

5. Manajemen berdasarkan ilmiah.

Dengan mengamalkan prinsip pengetahuan tidak dikerjakan secara membabi buta. Artinya pimpinan dan manajer haruslah orang yang berilmu pengetahuan karena dia yang akan merencanakan, mengarahkan, menambil keputusan dan mengawasi pekerjaan tentu memerlukan ilmu pengetahuan yang luas tentang organisasi, manajemen dan bidang pekerjaannya.

6. Manajemen berdasarkan tolong menolong (ta'awun).

Prinsip tolong menolong atau kerjasama adalah mengamalkan sunnatullah dalam menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah, dan hal ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia.

7. Manajemen berdasarkan perdamaian.

Namun jika ditilik dari kacamata Sanusi Uwes, manajemen Islami terlihat pada visi dan pondasi yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah dan Model kepemimpinan Rasulullah SAW., yakni kejujuran, keadilan, kelembutan hati, kecerdasan, keberanian, dan sabar. (Sanusi Uwes, :177-193). Menjadi makin jelas implementasi manajemen pendidikan Islam yang berorientasi modern, pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu melakukan perbaikan dan peningkatan mutu dengan berbagai pendekatan manajemen Islami berorientasi pada kebutuhan rakyat secara integralistik-holistik.

Pertama, ditilik dari segi konseptual teoritik dalam pelaksanaan lembaga pendidikan Islam perlu seorang pimpinan ideal seperti manajer yang diharapkan yaitu: (1) Memiliki pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islami yang meliputi kegiatan mengatur dan menata, yaitu: PBM, kesiswaan, ketenangan. Alat pelajaran, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan kerja sama dengan masyarakat. (2) Memiliki keterampilan dalam bidang perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan yang ada di bawah tanggung jawabnya. (3) Memiliki sikap: Memahami dan melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah, juga memahami pelaturan-peraturan serta mampu melaksanakannya, serta mampu menghargai cara berpikir yang rasional, demokratis, dinamis, kreatif dan terbuka terhadap pembaharuan pendidikan serta mau menerima kritik yang membangun, selain saling mempercayai sebagian dasar dalam pembagian tugas. (Sanusi Uwes, :182-183)

Kedua, Transparansi pimpinan dalam mengelola seluruh pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu; pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, urusan tata usaha, personil, keuangan, sarana dan peralatan, urusan rumah tangga, asrama, perpustakaan dan labolarorium, pembinaan kesiswaan, hubungan antara pemimpin, guru dan siswa, selain itu pula, menyelenggarakan hubungan dengan orang tua siswa dan masyarakat, melakukan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan, dan melakukan tugas-tugas lainnya yang semua itu perlu dijabarkan lebih lanjut melalui forum diskusi ini.

PENUTUP

Konsep dan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen Mutu Terpadu (MMT), Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), atau manajemen perubahan madrasah menuju ke arah pemberdayaan personil dan potensi madrasah merupakan cara strategis mencapai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif

Manajemen pendidikan Islami yang terus dimantapkan sistemnya, dipahami bersumber pada nilai-nilai Islam yang berfungsi sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi peningkatan kinerja pengelolaan pendidikan, proses pelaksanaan, perubahan orientasi ke arah tujuan yang lebih kualitatif, kompetitif, dan unggulan. Semua itu memerlukan langkah strategis berupa tindakan manajerial yang inovatif, koperatif, koordinatif dan komunikatif Mekanisme operasional manajemen Islami dalam sebuah pendidikan Islam modern yang seharusnya, perlu daya dukung financial, fasilitas sarana dan prasarana memadai guna menunjang implementasi manajemen Islami terutana yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum, pengajaran, pembinaan kesiswaan baik keterampilan maupun moral keagamaan/ibadah. Pengolahan ketenagaan

(guru/karyawan), keuangan, sarana/prasarana, serta hubungannya dengan lingkungan/masyarakat.

RANGKUMAN

Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Impilasi konsep manajemen yang efisien dan efektif, tampak nyata pada beberapa aspek yang tidak bisa berjalan menangkut kegiatan manajerial yaitu : Pertama, pengaturan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, sehingga semua unsur dalam organisasi sudah mulai mau mengatur dan memanfaatkan job yang besentuhan dengan segala sesuatuyang dimiliki seperti: Money, material, machine, method dan market. Kedua, tampak terhadap peningkatan kerjasama antar pimpinan, guru, personalia dan masyarakat yang harus ditonjolkan adalah semua anggota melibatkan diri dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan pengembangan lembaga sehingga tumbuh dan berkembang rasa memiliki (sense of belonging), rasa bertanggung jawab (sense of resfonsibility), dan rasa berkompetisi (sense of competition) untuk memperoleh kualitas yang diharapkan lembaga, Ketiga, dampak lain yang akan tampak pada langkah obyektif pimpinan lembaga, Ketiga, dampak lain yang akan tampak pada langkah obyektif pimpinan lembaga, guru, personil dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan lembaga, hal ini ditinjau pada proses dan keberhasilan pada siswanya. Dampak yang senyatanya dari implementasimanajemen berbasis Islami ini serasi dengan ungkapan setiap individu/pribadi bisa menerima keuntungan materi, kebersamaan dan kepuasan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya (1996) *Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Depag RI (1989), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Djam'an Satari (2000), *Quality Assurance dalam Desentralisasi Pendidikan*, Bandung; Universitas Pendidikan Indonesia.
- E.Mulyasa, (2003) *Menjadi Kepala Sekolah Prpfesional*, Bandung: Rosdakarya.
- James H. Donnelly (1984), *Fundamentals of Management*, Texas: Business Publication.
- James W. Cortada, (1986) *Total Quality Management: Terapan dalam manajemen Sistem Informasi*, Terj. Eko Suwandi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- John M. Echols dan Hasan Shadily (1993), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta; Gramedia.
- Made Pidarta (1983), *Management Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mukhtar, dkk.(2003), *Sekolah Berprestasi*, Jakarta: Nimas Multima.
- Minur al-Hursy Sarhan, (1979) *Fi Ijtima'iyyah al-Tarbiyah*, Kairo: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah.
- Nanang Fatah (2000), *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemadirian*. Bandung Roda Karya.
- Ramayulis, (2004) *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Richard A. Hahson, et.al.(1983) *The Theory and Management of System*, Tird Edition, Tokyo: McGraw.
- Sanusi Uwes, (2003) *Visi dan Pondasi Pendidikan (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Logos.
- Syafaruddin, M.Pd. (2005), *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Syarifuddin, M.Pd.(2005), *Pengelolaan Madrasah (Pendekatan Teoritis dan Parktis)*, Bandung: PSPM.
- Taufiq Rahman, (1999) *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia,
- Umedi, (1999) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Depdikbud.
- Walter M. McMahan, (2004) *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Efisien* (Buku Serial Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan terbitan UNESCO), Jakarta: Logos.
- William, C. Giegold, (1998) *Majamennt by Objective*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Wirakartakusumah, Aman. 1998. *Pengertian Mutu Dalam Pendidikan*, Lokakarya MMT IPB, Kampus Dermaga Bogor, 2-6 Maret

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya (1996) *Pengantar Ilmu Manajemen*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia.
- Abd, Rahman Getteng, (1997). *Pendidikan Islam. dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam.
- Abd. Rahman Assegaf, (2004). *Pendidikan tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdul Hafidz, Muhammad Nur, 1997, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*. Bandung: Al-Bayan,
- Abdul Hamid Abu Sulaiman (1994). *Permasalahan Metodologis Dalam Pemikiran Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- _____. (1993). *Crisis in Muslim Mind*, tr. by Yusuf Talal DeLorenzo, Herndon, Virginia: III T.
- _____. (1995). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*, Third edition, Herndon: Virginia: IIIT.
- Abdullah Nasih Ulwan. (1981). *Tarbiyah al Aulad fi Islam*, Jilid I (Get. III) Beirut: Dar al Salam.
- Abu Ahmadi dan Nurubhiyati. (1991). *Ilmu Pendidikan*, (Cet.1); Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Gazali, (t.th.), *Ihya Ulumuddin*, Juz Agus, Bustanudin. (1999) *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial : Studi BANDING Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ahmed, Shabir et.al. (1999). *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Bangil : Al-Izzah.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah (1975) *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi.
- Al-Ahwani, Ahmad Fu'ad, (tt) *Al-Tarbiyyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Ainain, Abu Khalil Abu (tt.). *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fi al-Qur'an al-Karim*, t.t: Dar al-Fikr al-Arabi,
- Al-Attas, Syed M. Naquib, (2003), *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.
- _____. (1984) *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan,.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. (1996). *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Bagil : Al-Izzah.
- _____. (2005). "Al-Qur'an Mu'kijzat Yang Abadi". Jurnal Al-Insan.VolI,No.1, Januari 2005. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan.
- Al-Faruqi, Ismaili Raji, (1988). "Islamization of Knowledge: Problems, Principles, and Prospective," in *Islam: Source and Purpose of Knowledge*, Herndon: IIIT,.
- Ali, Fachry, (2000). *Kontinuitas dan Perubahan: Catatan Sejarah Sosial Budaya Alumni IAIN dalam Problem dan Prospek IAIN*, Jakarta: Ditbinperta.
- Ali, M, (2000). *Manajemen pendidikan berbasis sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2000). *Dukungan masyarakat terhadap sekoiah*. Jakarta: Depdiknas.
- Ali, M., (1983). *Guru dalam proses belajar mengajar*. Bandung: Asyraf.
- Al-Qur'an dan Tarjamahnya, 2005, Depag, Jakarta.

- Amin, Husayn Ahmad. (1997) *Al-Mi'ah Al-A'zham fi Tarikh Al-Islam*, diterjemahkan oleh Baharuddin Fannani dengan judul *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (Cet.II; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Anas Syahrul Alimi dan M.Fadhilah Zaidie (Editor), (1999). *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan Indonesia*, Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof.Dr.Djohar,MS, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2001). *Nizham Al-Islam*. Tanpa Tempat Penerbit : Hizbut Tahrir.
- An-Nahlawi. Abdurrahman, (1995), *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Anwar Jasim, (1985) *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam : Tinjauan Filosofis*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 10 Oktober 1985.
- Arief, Armai, (2005).*Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRS D Press.
- Arifin H.M. (1991) *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (1994) *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Muzayyin, (1987) *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bina Aksara,.
- Arifin, Syamsul. Dkk (1996). *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Si Press.
- Arifin, (1991). M. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Armida S, (1999) “*Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Platform untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia” diselenggarakan oleh ISEI Cabang Bandung dan LPEM FE-UI, Bandung 25 Maret.
- _____,(1999) “*Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia” diselenggarakan Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung 20 Juli 1999.
- Arsyad, M. Natsir. (1992) *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah : Dari Jabir Hingga Abdus Salam*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Ashraf, (1985) *New Horizon in Muslim Education*, London: The Islamic Academy, Cambridge University,
- Ash-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi, (2000) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'andan Tafsir*, Semarang, Putra Rizki Putra.
- Assegaf, Abd. Rahman, (2004) *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____, (2007). *Pendidikan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press
- Athiyah, al- Habsy M. (1993) *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan*. Get VIII. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atmaturida (2001). *Sistem Pengelolaan Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,
- Azizi, Qodri, (2003) *Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Azra, Azyumardi. (1998). *Esei-Esie Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Get. I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- _____, (1999) *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta:Logo Wacana Ilmu.
- _____, (2002) *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002.
- _____, (2003) *Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran*, [http:// islamlib.com/ WAWANCARA/azra3.html](http://islamlib.com/WAWANCARA/azra3.html),6/27/2003
- Bahreisj, Hossein. (1995). *Menengok Kejayaan Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Bakry, Nurchalis et.al. (1996). *Bioteknologi dan Al-Qur`an Referensi Dakwah Dai Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Banathy, Bela H. (1991). *Systems Design of Education. A journey to create the future*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications
- Barzinji, Jamal.(1996). *Sejarah Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Bawani, Imam dan Isa Anshori. (1991) *Cendikiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Cet. I. Surabaya : Bina Ilmu.
- Bernard Lewis, (1996) *the Arab In History*, Harper London, Colophons Books.
- Boediono, (1997) *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bray, Mark, (1996) *Decentralization of Education: Community Financing*, The World Bank: Directions in Development, Washington, D.C.
- Brozo, W, Brobst, A. and Moje, E. (1994). *A Personal View of Teacher Change*. Chidlhood Education.
- Bruce, J., & Marsha, W. (1980). *Models of Teaching*. New Jersey: Prentice Hall Inc
- Burki, Shahid J., Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, (1999) *Beyond the Center: Decentralizing the State*, The World Bank, Washington, D.C.
- Burlian, Somad, (1981). *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- Calwell, B.J. and Spinks, J.M. (1988). *Towards the Self-Managing School*. London: The Falmer Press.
- Dabbagh, Nada & Brenda Bannan-Ritland. (2005). *Online Learning. Concept, strategies and application*. Columbus,OH : Pearson.
- Darmaningtyas, (2005), *Pendidikan Rusak-Rusakan*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Daud Ali, Muhammad, (1999) *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud Ibrahim, Marwah, (1994), *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi (Wacana Peradaban dengan Visi Islami)*, Mizan, Bandung.
- Denim, Sudarwan. (2002). *Konsep dan Teori Manajemen Berbasis Sekolah*. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Depag RI (1989), *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional

- Department of Education, Quesland, AU. (1990). *Focus on School: The Future Organization of Educational Services for Students*. Brisbane, AU: Dept. of Educational Publications.
- Depdikbud. (1995). *Perbandingan Pendidikan di Indonesia dengan Negara Lain*. Jakarta: Pusat Informatika, Balitbng Depdikbud.
- Depdiknas, (2001). *Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta. Djaman Satori dkk, 2003. Profesi Keguruan 1, Universitas Terbuka.
- Dewan Pimpinan Penerbit, (2002) *Ensiklopedi Islam*, (Perpustakaan Nasional RI), Jakarta.PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Dewantoro, Hajar, (1997) “*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*”, dalam : *Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ [Penyunting], Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Aditiya Media, Yogyakarta.
- Dhalimunthe Fahrur Razy. (1999). *Kapita Selektta Pendidikan*. Medan: IAIN Pres, ,
- Dharma, Agus, (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Belajar dari Pengalaman Orang Lain*. Artikel Pendidikan Network.
- Djam'an Satari (2000), *Quality Assurance dalam Desentralisasi Pendidikan*, Bandung; Universitas Pendidikan Indonesia.
- Djamaluddin Ancok, (1998) Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Manusia di Milenium Ketiga, UII, Yogyakarta,.
- Djamarah, S, Bahri, & Zain, Aswan, (1996) *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2005). *Pendidikan dan Peserta didik dalam interaksi Edukatif suatu Pendekatan Teoritis Pendidikan*, Bandung: Rineka Cipta.
- Bandung:Rosda Karya
- F. O'neil, William, (2001), *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta.: Pustaka Pelajar,
- Fadjar Malik, (1955) *Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995, (tidak diterbitkan).
- _____, (1999,) *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia.
- Faqih, Mansour (1997). *Islam, Globalisasi dan Nasib Kaum Marginal*, Jurnal Ulurnul Quran, No. 6/VII/1997.
- Faqih, Mansour, (1997) *Islam, Globalisasi dan Nasib Kaum Marginal*, Jurnal Ulurnul Quran, No. 6/VII/1997.
- Fazlur Rahman, Islam (1997), *Terj.,Ahsin Mohammd*, Bandung: Pustaka.
- Fernandez perez, Miguel, (1982). *Krisis Dalam Pendidikan*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Freire, Paulo, (1999) *Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebsan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Fuaduddin T.M, (1999). *Pengasuk anak* (Cet. 1; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan fender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan the Asia Foundation.
- Fullan, Michael. (1992). *The Meaning of Educational Change*. Toronto: OISE Press.
- Gafur, A. (1999). *Disain Instruksional*. Solo: Tiga Serangkai
- Gilley, Jerry W. dan Steven A. Egglan, (1989). *Principles of Human Resourches Development*. New York: Addison Wesley Pub. Company. Inc.

- Gunadi, RA & M. Shoelhi (Ed.). (2003). *Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*. Jakarta : Penerbit Republika.
- Hadari nawawi. (1985). *Organisasi Sekolah dan Pengelo/Aan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hadipermono, Syeichul. (1995) *Bayi Tabung dan Rekayasa Genetika*. Surabaya: Wali Demak Press.
- Hadiyanto dan Subijanto, (2005) *Pengembalian Kebebasan Guru Untuk Mengkreasi Iklim Kelas Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- Hamalik, Oemar, (2004). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____, (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hannaway, J. and Carnoy, M. (Ed.). 1995. *Decentralization and School Improvement: Can We Fulfill The Promise?*. San Francisco, CA: Jossey Bass Publishers.
- Harry, Rakim, (2008). *Pengembangan Sistem Informasi Sekolah (SISKO)*. <http://pelangi.dit-plp.go.id>, on 14-02-2008 11:18
- Hasan Langulungan, (1999). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husni.
- Hasan Shadily (t. th.). *Ensiklopedi Indonesia*. (Jilid V). Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoevah.
- Hasbullah, (2006). *Otonomi Pendidikan: Keijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Bandung: Setia
- Hasbunah,(1999) *Dasar-dasar Pendidikan*, (Cet.I). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- <http://www.Problematika Pendidikan Islam Masa Kini dan Akan Datang.com>
- <http://annajib.wordpress.com/2010/02/12/rekonstruksi-epistemologi-pendidikan-islamupaya-mewujudkan-pendidikan-islam-yang-mencerdaskan/>. Syamsul Afandi. (Diunduh, tgl 6 Juni 2012)
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_scientists (Diunduh, tgl 6 Juni 2012)
- <http://frahasti.wordpress.com/2009/01/31/ibnu-ajid> (Diunduh, tgl 6 Juni 2012)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd (Diunduh, tgl 6 Juni 2012)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina (Diunduh, tgl 6 Juni 2012)
- http://riyanbuno.blogspot.com/2010_07_01_archive.html. diunduh 7 Mei 2012.
- Ihsan, Hamdani, (1998). "*Filsafat Pendidikan Islam*" (Bandung: CV Pustaka Setia,
- Imam Suprayogo, (2004) *Memelihara Sangkar Ilmu*, UIN Malang: Citra Mentari Group.
- Imarah, (1972) *al-A'mal al-Kämil Li al-Imam Muhammad Abduh*, juz III, Bairut: al-Muassasah al-Arabiyah li al-Dirasah wa al-Nashr,
- Indrastuti, Noor (2006). PAKEM, *Antara Menakutkan dan Menyenangkan*: Studi Kasus SDN Sukarasa II, Kec. Malangbong, Kab. Garut. www.mbs-sd.org. 04, Februari, 2009.
- Ismail, (ed), (2000), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ismail, SM., Nurul Huda, (2002). (eds.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi (ed). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta.
- _____, (2004). *Reaktualisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Jalal, Fasli dan Supriyadi, Dedi. Ed. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- James H. Donnelly (1984), *Fundamentals of Management*, Texas: Business Publication.
- James W. Cortada, (1986) *Total Quality Management: Terapan dalam manajemen Sistem Informasi*, Terj. Eko Suwandi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- John M. Echols dan Hasan Shadily (1993), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta; Gramedia.
- Joyce. B. Weil, M. and Showers, B. (1992). *Model of Teaching (fourth edition)*. Boston: Allyn and Bacon Publishing Co.
- Jusuf Amir Faisal, (1995) *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Karel A., (1994), *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. Kedua, Jakarta: LP3ES,
- Kasbolah, K. (1999). *Penelitian tindakan kelas*. Jakarta: Dirjen Dikti P2GSD.
- Kazi, (1992). "The Pursuit of Scientific Knowledge in Islam," *Islamic Thought and Scientific Creativity*, "Conceptual Framework of Islamic Educational System," *Islamic Thought and Scientific*
- Kleden, Iqnas. (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Get I LP3ES.
- Komponen MKDK*. Get.I. Bandung: Pustaka Setia.
- Komponen MKDK*. Get.I. Bandung: Pustaka Setia.
- Langgulang, Hasan, (1987). *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna,
- _____, (1980). *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Get I. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Latif, Yudi, (2005) *Inteligensia Muslim dan Kuasa (Geneologi Intelgensia Muslim Indonesia Abad ke 20)*, Bandung: Mizan,
- M. Hashein (1976), Tejemahan dari Mutahhari "Society and History "Masyarakat dan Sejarah., (Cet. V) Mi'ra: Dar al-Ma aril.
- M. Natsir, (1997). *Dasar-dasar Ilmu Mendidik*, Jakarta: Mutiara,
- M. Ngaling Purwanto, (1994), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Cet.1). Bandung: Remaja Rosda karya.
- M. Quraish Shihab, (1997). *Membumikan al-Qur'an*, (Cet. XV); Bandung: Mizan
- M. Soedomo, (1987). *Sekitar Eksistensi sekolah*, Yogyakarta: Henedita Offset.
- Ma'arif, Syamsul, (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Maarif, Syafii, A., dkk, (1991), *Pendidikan Islam di Indonesia (Antara Cita dan Fakta)*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maarif, A. Syafii., (1996), "Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah", makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.

- Machfudz Ibawi, (1986) "Modus Dialog di Perguruan Tinggi Islam", dalam Amin Husni et.al., *Citra Kampus Religius Urgensi Dialog Konsep Teoritik Empirik Dengan Konsep Normatif Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Made Pidarta (1983), *Management Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Madjid, Nurcholish, (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina,
- _____, (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: Paramadina.
- Maman Achdiat, (1981) *Pembentukan Profesional Keguruan*, Penlok P3G. Surya, HM. 2000. Kapita Selekta Kependidikan SD, Universitas Terbuka.
- Manzoor-ul-Haque, (1993) "The Quranic Model of Education," *Muslim Education Quarterly*.
- Marilyn, K., & Quanrantalory. (1987). *Effective Teaching. Principles and Practice*. London: Scott, Foresman and Company
- Marimba, Ahmad D. (1986). *Pengantar filsafat Pendidikan*. Get. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____, (1980). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al. Ma'arif.
- Ma'ruf, Anas dan Anas (2000). *Shaping Globalization; Jawaban Kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*. Yogyakarta: Jendela.
- Ma'ruf, Anas dan Anas, (2000). *Shaping Globalization; Jawaban Kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme, Teri*. Yogyakarta: Jendela, 2000.
- Masood, Ehsan, (2009) *Ilmuan-Ilmuan Muslim Pelopoor Hebat di Bidang Sains Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Mas'ud, Abdurrachman, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Miarso, Yusufhadi, 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Kencana, Jakarta. Pidarta, Made, 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Miarso, Yusufhadi. (2005). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustekom-Kencana
- Midyawarta, No. 69/Thn.XII, From: <http://www.bpk. Penabur. or.id/ KPS. Jkt/widya/69/69.pdt>.
- Minur al-Hursy Sarhan, (1979) *Fi Ijtima'iyyah al-Tarbiyah*, Kairo: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah.
- Moh. Shofan, (2004). "Pendidikan Berparadigma Profetik; Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam" Jogjakarta:UGM Press.
- Mohrman,S.A;Whhlstetter, P.and Associates. (1993) *School-BasedManagement: Organizing for High Performance*. San Francisco, CA: Jossey Bass Co.
- Muchtar, Afandi, (2005) "Pendidikan Islam: Makna, Problem dan. Solusi", dalam *Hannoni Kehidupan Beragama*, Jakarta:Oasis publisher.
- Muhaiir, N. (1996). *Pedoman pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK)*. Yogyakarta: BP3GSD, UP3SD, UKMP-SD Dirjen Dikti Depdikbud.

- Muhaimin dan Abd. Mujib, (1993), *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis Keraugka dasar Oprasionalnya* (Cet. I); Bandung: Tirtenda Karya.
- Muhaimin, (2006) *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, (2009) *Manajemen Pendidikan, Aplikasi dan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta, Prenada Media Group,
- Muhaimin, Yahya [Menteri Pendidikan Nasional], (2000) "*Reformasi Pendidikan Nasional Menuju Indonesia*", Majalah Dwiwutan BPK Penabur Jakarta,
- Muhammad 'Abd. Al-Aliy, (tt.). *The family Structure in Islam*. Maryland: International Grafic Printing Service.
- Muhammad Qutb, (1401 H.) *Minhaj al-Tarbiyah* Dar 4: Syuruq.
- Muhammad, Omar, (1979) *Falsafah Pendidikan Islam*", Jakarta: Bulan Bintang.
- _____, (1997) *Falsafah Pendidikan Islam*", Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, dkk. (2003), *Sekolah Berprestasi*, Jakarta: Nimas Multima.
- Mukti, Abdul, 2000, (editor), *Pendidikan, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____, (2003) *Menjadi Kepala Sekolah Prpfesional*, Bandung: Rosdakarya.
- _____, (2006). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____, (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____, (2007) *Manajemen Berbasis Sekolah*, (konsep strategi dan implementasi).
- Munir al-Mursiy Sarhan, (1978), *fi Ijtimainat al Tarbiyah*, (Cet. Al-Qahirah: Maktabah al-Anjlu al-Misniyyah.
- Munsir, D.N. (1999). *Penelitian tindakan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III.
- Munthoha, (1998) *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press.
- Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ (1997) *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Yogyakarta: Aditiya Media,
- Muslim Usa (editor), Cet. I, (1991) *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Myers, Eugene A. 2003. *Zaman Keemasan Islam Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat* (Arabic Thought and Western World in The Golden Age of Islam). Alih bahasa M.M. el-Khoiry. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Nakosteen, Mehdi, (2003) *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat* , Cet.2, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nanang Fatah (2000), *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemadirian*. Bandung Roda Karya.

- Nasution, Harun. (1991). *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah*
- Nasution, S. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Get II. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution. (1999). *Guru yang Profesionai*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Nata, Abuddin, (2000) *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- _____, (2004) *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari, (1995) *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: UGM Press,
- Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, (1997). *Ilmu Pendidikan Islam (IPI) untuk Fakultas tarbiyah*
- _____, (1991) *Ilmu Pendidikan*. Get I. Jakarta: Rineka Gipta.
- Nur Uhbiyati, (1997), *Ilmu Pendidikan Islam Untuk Fakukas Tarbiyah Komponen MKDK, (Cet. I) ; Bandung: Pustaka Setia.*
- Patrinoss, Harry A. and David L. Ariasingam, (1997) *Decentralization of Education: Demand-Side Financing*, The World Bank: Directions in Development, Washington, D.C.
- Paulo Frcirc, (2000). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, (Cet. I;)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qaradhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qomar, Mujamil, (2005). *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* . Jakarta: Erlangga.
- Quthb, Muhammad, (1988). *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- _____. (1400 H). *Manhaj Tarbiyah al-Islamiyah*. Jilid I. Cet. IV. Kairo: Dar al- Syuruq.
- Raharjo, Dawam, (1965). *Pondok Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Rahim, Husni (2001) *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,
- Rahman, Fazlur., (1985), *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terj. (Ahsin Mohammad), Bandung: Pustaka.
- Rahmat, Jalaluddin, (1997), *Catatan Kang Jalal (Visi Media, Politik dan Pendidikan*. Bandung: Mizan,
- Ramayulis, (2004) *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramly, Andi Muawiyah. (2000). Peta Pemikiran Karl Marx [Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis]. Yogyakarta : LKiS.
- Redaksi, Warta MBS No. 8 Thn. 2006. Peningkatan Mutu Pendidikan, Upaya Yang Harus Terus Menerus Kita Lakukan. http://www.mbs-sd.org/warta_mbs.php?id=24
- Reigeluth, Charles M. and Robert J. Garfinkle. (eds.)(1994). *Systemic Change in Education*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications Toffler, Alvin. The Third Wave. London : Pan Books Ltd.
- Republik Indonesia, (1999) UU nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, Mei.
- Richard A. Hahnsen, et.al.(1983) *The Theory and Management of System*, Tird Edition, Tokyo: McGraw.
- Ridla, Muhammad Jawad, (tt.). *Al-Fikr Al-Tarbawiy Al-Islamiy; Muqoddimah fi Usulih Al-Ijtima'iyah wa Al-Aqlaniyah*, t.k.: Dar Al-Fikr Al-Arabiy..
- Robins, Stephen P. dan Mery Coulter, (2004). *Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia, Indeks Kelompok Gramedia.

- Sa'ud, Udin S, (2001). *Strategi dan Model Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management) Menuju Sekolah Mandiri*. Makalah disajikan dalam diskusi panel “Sosialisasi Konsep dan Model MBS” bagi para Kepala SD se Kota Bandung, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2001.
- _____, (2002) *Prospek dan Tantangan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di Tingkat Sekolah* (Makalah Seminar dan Lokakarya)
- _____, (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai Wujud Nyata Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional: “Strategi manajer pendidikan dalam menghadapi desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan”, tanggal 17-18 Juli 2000 di UPI, Bandung (tidak diterbitkan).
- Sallis, Edward. (1993). *Total Quality Management in Education*, Kogam Page, London.
- Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Prakti Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (cet. Ke-2)., Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanusi Uwes, (2003) *Visi dan Pondasi Pendidikan (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Logos.
- Sardjito, Marwan, (1996). *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV Amissco.
- Selkov-Brecher, J.L. (1992). *A Successful Model for School-Based Planning*. Educational Leadership Journal, September 1992.
- Shah, Anwar, (1998), “*Balance, Accountability, and Responsiveness: Lessons about Decentralization*”, dalam Picciotto, Robert and Eduardo Wiesner (eds.), *Evaluation and Development: The Institutional Dimension*, New Brunswick, USA and London, UK: Transaction Publishers.
- Shaleh Abd. Azis.(1976) *al Tarbiyah. al-Hadisahh Marldatulia, Mabadiuha, Tatbigatuha al-Arnaliyyah*, Jilid III (Cet. VII); Mi'ra: dar al-Ma'arif.
- Shihab, Quraisy, (1996), *Wawasan Al-Qur'an* (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat), Mizan, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1995) *Metodologi Penelitian Survei*. Putaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Slamet PH, (2006) *Manajemen Berbasis Sekolah: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Income Generating Activity*. Buletin Pelangi Pendidikan Edisi V, Agustus 2006.
- Slamet, Margono, (1999). *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, IPB Bogor.
- Soebahar, Abd. Halim, (2002) *Wawasan Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia,
- Soejatmiko, (1984) *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta : LP3ES.
- Soejono Ag.. (1979). *Aliran Baru dalam Pendidikan*. Bagian ke-2 (Cet. I); Bandung: CV. Ilmu.
- Soelaeman Joesoef dan Slamet Santoso (1981), *Pertgantar Pendidikan Sosial* . Surabaya: Usaha nasional.

- Soleh Salahuddin, (1998) *Urgensi Reformasi Pendidikan dalam Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total*, Ed. Musa Kazhim, Pustaka, Hidayat, 1998.
- Soroyo, (1999) *Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*, dalam Buku: Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, (Editor: Muslih Usa). Yogyakarta.Tiara Wacana,
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES,
- Sucipto, Hery, (2008) *The Great Moslem Scientist* , Cet.1, Jakarta; Grafindo KhazanahIlmu.
- Sudarwan Danim, (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Sudirman, N. (1987). *Ilmu Pendidikan*. Cet I. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sudiro, M. Irsyad., (1995) *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar danLokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern,Cirebon, Tanggal, 30 Agustus – 1 September 1995.
- Sugen Listyo Prabowo, (2008) *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah*, Malang.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi, Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulayman, Abdul Hamid Abu (1993), *Crisis in Muslim Mind*, Terj. Yusuf Talal DeLorenzo, Herndon, Virginia: IIIT.
- Sunanto, Musyrifah, (2004) *Sejarah Islam Klasik* , Cet.2, Jakarta; Prenada Media.
- Suparlan, (2008) *Membangun Sekolah Efektif*, Yogyakarta, Hikayat Publishing.
- Supriadi, Dedi. (1998). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- _____, (2008) *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suriasumantri, Jujun S. (1988). *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Suroyo, (1991), *Perbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan PendidikanIslam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsep Pendidikan Islam,Problem dan Prospeknya, Volem 1 Tahun1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta.
- _____, (1992), "Pendidikan Islam di Indonesia Merancang Masa Depan", Yogyakarta : UNISIA, No.12 Th. XIII,1992,UII,.
- Surya, Mohamad. (2003). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Yayasan Bhakti Winaya
- _____, (2003). *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sutan Zanti Arbi, Syahmiar Syahrin, 1991/1992. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Dirjen Dikti Depdikbud.
- Sutari Imam Barnadib. (1986). *Pengantara Ihnu Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: FIP IKIP.
- Suwendi, (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,

- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2000.
- Suyanto, (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media, Jakarta.
- _____, (1999). *Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*, Makalah : Seminar Nasional "Mencari Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Menghadapi Milenium Ketiga, 9 November 1999, ISPI dan Primagama, Yogyakarta, 1999.
- Syafii Maarif, Ahmad., (1997) "Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa, dalam: Muslih Usa [Penyunting], Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi, Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta
- Syahminan Zaini, (1986). "*Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*" Jakarta: Kalam Mulia,
- Syafaruddin, (1999). *Kapita Selekta Pendidikan*. Medan: IAIN Pres,
- _____, (2005) *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- _____,(2005), *Pengelolaan Madrasah (Pendekatan Teoritis dan Parktis)*, Bandung: PSPM.
- Tafsir, Ahmad, (1994), *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. (1995). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- _____, (1999) *Pendidikan untuk Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Lathifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 5 September 1999.
- _____, (2006) *Filsafat Pendidikan Islami*, Bandung: Rosdakarya
- Taufiq Rahman, (1999) *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia,
- Tilaar, H.A.R. (1998), *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Penerbit Tera Indonesia
- _____, (1999) *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,
- _____, (2000), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- _____, (2002). *Pendidikan dan Masyarakat Madani Indonesia* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis, (2005) *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Tim Teknis Bappenas. (1999). *School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: Bappenas.
- UNSCD. (1998) *Knowledge Society*. Published for and on behalf of The United Nations. Oxford, NY : Oxford University Press.
- Umedi, (1999) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Depdikbud.
- Usman, M.U. (1990). *Menjadi guru profesional*. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Wahab, Rochmat, (2003), *Mencermati RUUSPN dikaitkan dengan Masa Depan Bangsa*, (paper), Yogyakarta:

- Wahid, Marzuki, (2001). *Dinamika Pendidikan Islam, Respon Pesantren terhadap Modernisasi Pendidikan*. Jakarta: Litbang Dep. Agama RI,
- Wahyoetomo, (1997). *Perguruan Tinggi, Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*. (Cet. I) ; Jakarta: Gema Insani Press.
- Walter M. Mcmahon, (2004) *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Efisien* (Buku Serial Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan terbitan UNESCO), Jakarta: Logos.
- Wasty Soemanlo, (1998). *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Wen, Sayling. (2003). *Future of Education (Masa Depan Pendidikan)*, alih bahasa Arvin Saputra, Batam: Lucky Publisher.
- Westra, Pariata, 2002. *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- William, C. Giegold, (1998) *Majamennt by Objective*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Winarno, Budi. 2004. *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru*. Yogyakarta : Tajidu Press.
- Wirakartakusumah, Aman. 1998. *Pengertian Mutu Dalam Pendidikan*, Lokakarya MMT IPB, Kampus Dermaga Bogor, 2-6 Maret
- World Bank Report. 1999. *From Crisis to Recovery*. Jakarta: World Bank Office.
- Yunus, Mahmud, (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya,
- Yusanto, Muhammad Ismail (2001). *Menggagas Kembali Konsep System Pendidikan Islam*, (makalah), disampaikan dalam Stadium Geeral Magister Studi Islam UT' Yogyakarta, tanggal 8 September 2001.
- Zahoor, A. 2003. *Dominasi Ilmuwan Muslim Tahun 700 – 1400 M*. Jakarta : Bina Mitra Press.
- Zainuddin, (1991). *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Gaztli (Cet. I)*; Jakarta: Bumi Aksara.
- Zallum, Abdul Qadim. 2001. *Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarkanluaskannya*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- Zamrozi, (2000). *Paradigma Pendidikan di Masa Depan*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Zubair, A. Charis. 1997. *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zuhairini, dkk, (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Zuriah, Nurul, (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan/Perundangan-undangan:**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087 Tahun 2004 Tentang Standar Akreditasi Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Wewenang

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Perangkat Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Eselonisasi Jabatan Dinas Daerah.
Pusat Kurikulum-Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. (2001). Kurikulum Berbasis Kompetensi Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas
GBHN, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, Tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Arkola, Surabaya, 1999.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.